



BUPATI BADUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 - 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Kedua Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016–2021.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 22 Agustus 2017

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 22 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 9
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(9, 60 /2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 pada tanggal 16 Agustus 2016 dan telah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung setiap tahun. RPJMD SB tersebut dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

RPJMD SB Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud telah memuat Urusan Pemerintah Daerah yang baru sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun masih mencantumkan Perangkat Daerah yang lama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.

Setelah RPJMD SB Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diimplementasikan beberapa waktu, terjadi perubahan regulasi dan perkembangan kondisi daerah sebagai berikut :

1. Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada tanggal 4 Agustus 2016, yang pada Diktum Kedua menyatakan :
“Segera melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah”;

2. Perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada tanggal 13 Desember 2016;
3. Adanya perkiraan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021 berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016;
4. Harmonisasi rumusan antar tujuan, sasaran, dan indikator kinerja supaya lebih terukur dan relevan sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang akuntabilitas instansi pemerintah.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan perubahan terhadap RPJMD SB Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Perubahan RPJMD tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
3. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. Merugikan kepentingan nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9

LAMPIRAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2016 – 2021**

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
1.5 Maksud dan Tujuan	9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	11
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	22
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	36
2.4 Aspek Daya Saing daerah	41
2.5 Standar Pelayanan Minimal	79
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	82
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	82
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	93
3.3 Kerangka Pendanaan	103
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	110
4.1 Permasalahan Pembangunan	110
4.2 Isu - Isu Strategis	116
BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	147
5.1 Visi	148
5.2 Misi	149
5.3 Tujuan dan Sasaran	149
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	161
6.1 Strategi	161
6.2 Arah Kebijakan.....	166

BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	192
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	274
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	373
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	392
	10.1 Pedoman Transisi	392
	10.2 Kaidah Pelaksanaan.....	392

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan	11
Tabel 2.2	Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Badung Tahun 2015.....	15
Tabel 2.3	Proyeksi Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Badung Tahun 2011-2021 (Ribuan Jiwa)	16
Tabel 2.4	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.....	18
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.....	19
Tabel 2.6	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung Tahun 2015	20
Tabel 2.7	Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015.....	21
Tabel 2.8	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Badung	24
Tabel 2.9	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung.....	25
Tabel 2.10	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Badung	27
Tabel 2.11	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Badung.....	29
Tabel 2.12	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung	34
Tabel 2.13	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung.....	34
Tabel 2.14	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung	35
Tabel 2.15	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung.....	35
Tabel 2.16	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung	36
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kabupaten Badung	37

Tabel 2.18 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 s.d .2015	
Kabupaten Badung	37
Tabel 2.19 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015	
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung.....	38
Tabel 2.20 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar	
Tahun 2011 s.d .2015 Kabupaten Badung	38
Tabel 2.21 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015	
Menurut Kecamatan Kabupaten Badung.....	39
Tabel 2.22 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Badung	40
Tabel 2.23 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015	
Kabupaten Badung	40
Tabel 2.24 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2015	
Kabupaten Badung	41
Tabel 2.25 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2012 Kabupaten Badung.....	42
Tabel 2.26 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2011 s.d 2015	
Kabupaten Badung	42
Tabel 2.27 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2011 s.d 2015	
Kabupaten Badung	43
Tabel 2.28 Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 s.d 2015	
Kabupaten Badung	43
Tabel 2.29 Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Badung.....	44
Tabel 2.30 Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Badung	45
Tabel 2.31 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian	
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung	46
Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	
Tahun 2011 s/d 2015 Kabupaten Badung	83
Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Badung.....	85
Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2010 s.d 2015	
Kabupaten Badung	86
Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2010 s/d 2015	
Kabupaten Badung	88
Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2010 s/d 2015 Kabupaten Badung.....	91

Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja	
	Tahun 2010 s/d 2015 Kabupaten Badung	97
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2012 s/d 2015	
	Kabupaten Badung	98
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	
	Kabupaten Badung	100
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	
	Tahun 2012-2015 Kabupaten Badung.....	101
Tabel 3.10	Defisit Riil Tahun 2012-2015 Kabupaten Badung	102
Tabel 3.11	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)	
	Tahun 2012 s/d 2015 Kabupaten Badung	103
Tabel 3.12	Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	
	Kabupaten Badung	104
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung..	105
Tabel 3.14	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016-2021	
	Kabupaten Badung	106
Tabel 3.15	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Tahun 2016 – 2021	
	Kabupaten Badung	106
Tabel 3.16	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	
	Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung.....	107
Tabel 3.17	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah	
	Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Badung.....	109
Tabel 4.1	Identifikasi Program Prioritas	127
Tabel 4.2	Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh.....	129
Tabel 4.3	Analisis Pengaruh Negatif Program 1.....	130
Tabel 4.4	Analisis Pengaruh Negatif Program 2.....	131
Tabel 4.5	Analisis Pengaruh Negatif Program 3.....	132
Tabel 4.6	Analisis Pengaruh Negatif Program 4.....	133
Tabel 4.7	Analisis Pengaruh Negatif Program 5.....	134
Tabel 4.8	Analisis Pengaruh Negatif Program 6.....	135
Tabel 4.9	Analisis Pengaruh Negatif Program 7.....	136

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8.....	137
Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9.....	138
Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD	141
Tabel 4.13 Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021	
Kabupaten Badung	143
Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Badung	154
Tabel 5.2 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	156
Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Badung	174
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Badung	201
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan	
Pendanaan Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Badung.....	275
Tabel 8.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan	
Pendanaan Tahun 2016 Kabupaten Badung.....	311
Tabel 8.3 Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai	
Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021.....	347
Tabel 9.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Badung	374

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Badung	
	Tahun 2010-2015.....	17
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000,2010 dan BPS Tahun 2015.....	19
Grafik 2.3	Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2015.....	21
Grafik 2.4	PDRB Kabupaten Badung ADHB Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah) ...	22
Grafik 2.5	PDRB Perkapita Kabupaten Badung ADHB Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)	23
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2011-2015 (%)	29
Grafik 2.7	Indeks Gini Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2009-2015.....	31
Grafik 2.8	Pemerataan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2011-2015 (Persen)	32
Grafik 2.9	Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015	33
Grafik 2.10	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Badung Tahun 2015.....	36
Grafik 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2015.....	63
Grafik 2.12	Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA/SMK.....	63
Grafik 2.13	Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kab. Badung, Tahun 2010 – 2015.....	66
Grafik 2.14	Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kab. Badung, Tahun 2010 – 2015.....	66
Grafik 2.15	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2011-2015	68
Grafik 2.16	Distribusi Pendapatan Pada Kelompok 40% Penduduk Berpendapatan Rendah di Kabupaten Badung Tahun 2011-2015	69
Grafik 2.17	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung, Bali dan Nasional Tahun 2011-2013.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Implementasi PPNSB dalam RPJMD Semester Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	3
Gambar 1.2 Diagram Alir Penyusunan RPJMD	4
Gambar 1.3 Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah	6
Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya	131
Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan	133
Gambar 4.3 Potensi Agribisnis sekaligus daerah resapan Petang.....	136

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Mengingat RPJMD mencakup berbagai dimensi pembangunan daerah serta merupakan subsistem dari pembangunan provinsi dan nasional, maka proses penyusunan RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan yakni : teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Melalui keempat pendekatan tersebut maka secara substansi dokumen RPJMD dapat diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional serta memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, menyebutkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Disamping itu, dalam Surat Edaran tersebut disebutkan pula bahwa perodesasi Peraturan Daerah tentang RPJMD pasca pemilukada adalah Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tahapan penyusunan RPJMD meliputi : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka pasangan I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode Tahun 2016-2021 pada tanggal 17 Pebruari 2016 oleh Gubernur Bali atas nama Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-758 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Badung Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-759 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Badung Provinsi Bali, wajib menyusun RPJMD yang merupakan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025.

Adapun sasaran pokok dari RPJMD periode ketiga tersebut yakni meningkatkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjabarkan visi-misi dan program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD, secara substansi berpedoman pada prinsip-prinsip **Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB)** yang merupakan implementasi dari **Ajaran Tri Sakti** yaitu : **berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan**. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga mengadopsi filosofis kehidupan dan kearifan lokal masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karna* serta *Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*.

Pembangunan bersifat **Semesta** merupakan pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kewilayahan pada semua jenjang yang dilaksanakan secara terpimpin. Sedangkan pembangunan secara **Berencana** merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpola, dapat dilaksanakan tahap demi tahap namun tuntas sesuai dengan irama dan dinamika perubahan lokal, nasional dan global.

Implementasi Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.

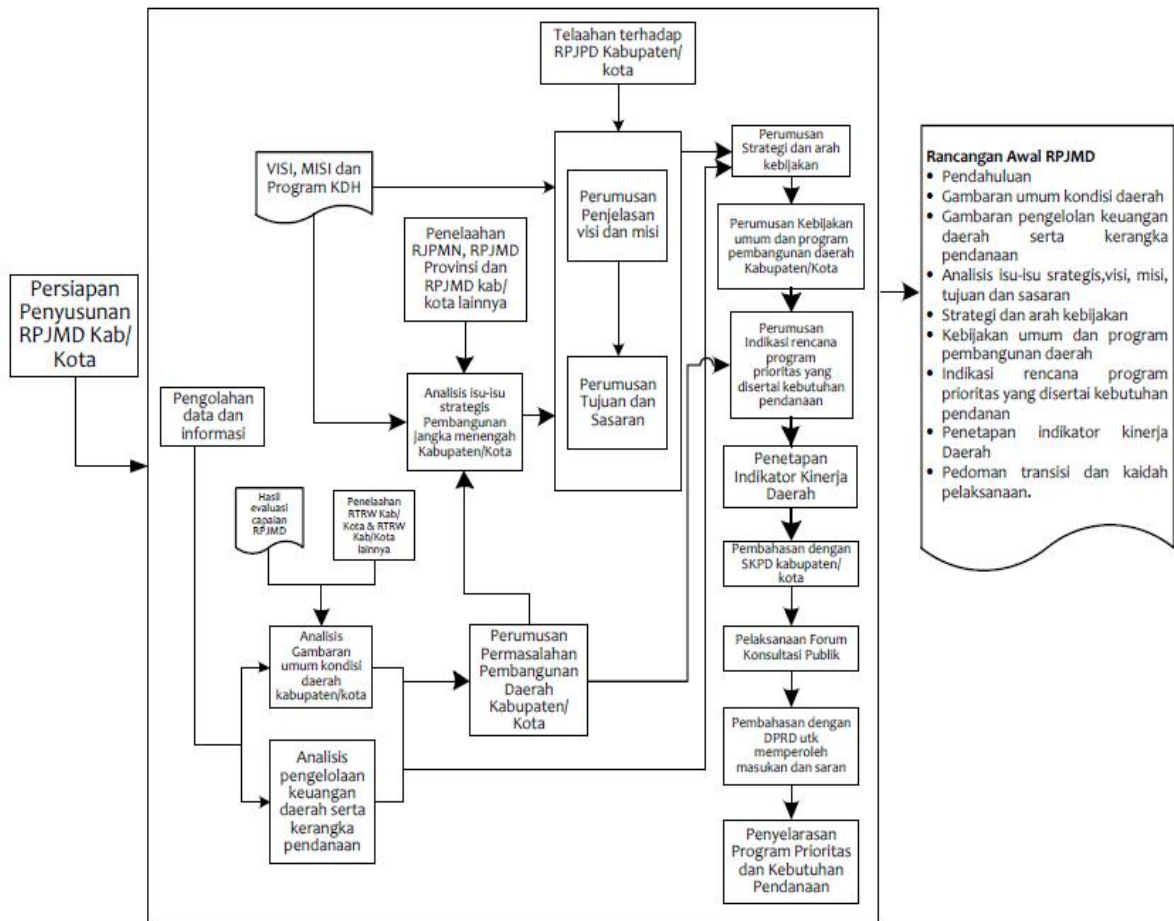
Implementasi PPNSB dalam RPJMD Semesta Berencana
Kabupaten Badung Tahun 2016-2021



Mengacu pada Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dimaksud, maka substansi RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, lebih difokuskan pada pencapaian terhadap 5 (lima) bidang prioritas meliputi : 1). Bidang pangan, sandang dan papan; 2). Bidang pendidikan dan kesehatan; 3). Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan; 4) Bidang adat, agama dan budaya; serta 5) Bidang pariwisata. Kelima bidang prioritas tersebut didukung dengan pembangunan pada bidang Infrastruktur, Legislasi serta Anggaran. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, selain memuat 5 (lima) bidang prioritas tersebut, pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga dirancang program-program yang merupakan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah dengan target dan indikator kinerja yang terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan program-program sesuai prioritas dan urusan daerah dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dari berbagai unsur, sebagaimana termuat dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Diagram Alir Penyusunan RPJMD



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

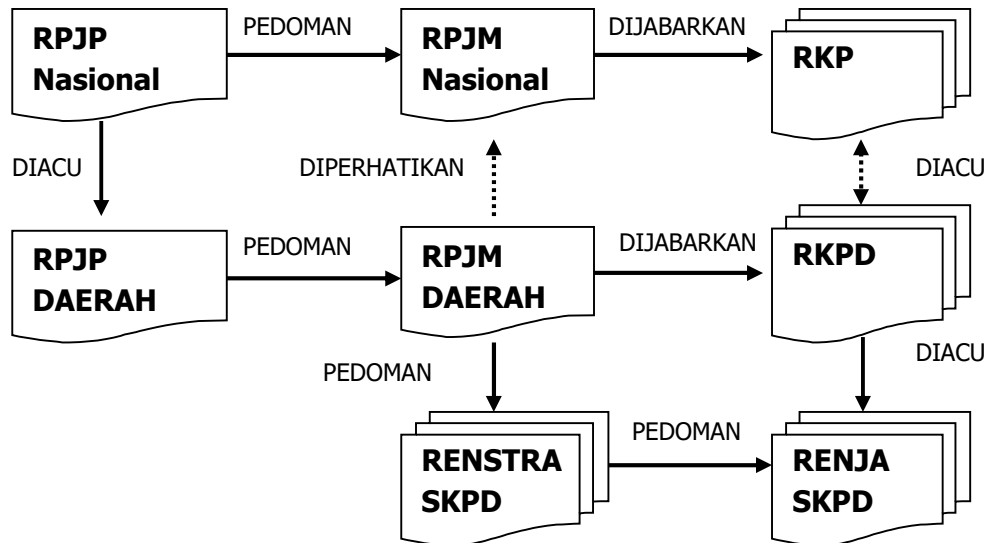
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pembangunan daerah adalah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selanjutnya RPJPD menjadi pedoman untuk menyusun RPJMD yang bersangkutan. Hubungan antar dokumen perencanaan dimaksud disajikan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3.

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Tahun 2010.

Keterangan :

- Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
- Renja-SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung juga digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Badung, serta memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota tetangga sebagaimana tercantum dalam RPJMD masing-masing. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Bali yang perlu diperhatikan yaitu : RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Provinsi Bali, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Bali, RAD Pangan dan Gizi Provinsi Bali, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Bali, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Provinsi Bali.

Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kabupaten Badung yang perlu diperhatikan yaitu : RAD *Sustainable Development Goals (SDG's)* Kabupaten Badung, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Badung.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Maksud dan Tujuan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
 - 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.4 Kerangka Pendanaan
- Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - 4.1 Permasalahan Pembangunan
 - 4.2 Isu-Isu Strategis
- Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 - 5.1. Visi
 - 5.2. Misi
 - 5.3. Tujuan dan Sasaran
- Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - 6.1. Strategi
 - 6.2. Arah Kebijakan
- Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
- Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
 - 10.1. Pedoman Transisi
 - 10.2. Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi-misi dan program-program unggulan daerah dengan memperhatikan kondisi terkini dan isu-isu strategis serta kemampuan keuangan daerah guna mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, yaitu:

- a. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang meliputi : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD serta perencanaan anggaran pembangunan;

- b. Menyediakan landasan formal bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menetapkan kebijakan serta mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui program-program prioritas sesuai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Sebagai instrumen untuk menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh seluruh Perangkat Daerah dalam bentuk program/kegiatan yang terukur dan berorientasi kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- d. Pedoman sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah antar bidang, antar wilayah dan antar jenjang pemerintahan secara terpadu dan sinergis; dan
- e. Pedoman untuk mengukur kinerja dan evaluasi capaian program-program pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lahan dan Wilayah

A. Luas Wilayah Batas Administratif

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali. Secara geografis Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20" - 8°50'52" Lintang Selatan dan 115°05'03" dan 115°26'51" Bujur Timur. Bentuk bentangan wilayah Kabupaten Badung menyerupai sebilah keris yang membujur dari utara ke selatan, yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di utara, Samudera Indonesia di sisi selatan, Kabupaten Bangli, Gianyar dan Kota Denpasar di sisi timur dan Kabupaten Tabanan di sisi barat.

Luas wilayah Kabupaten Badung yaitu seluas 418,52 km2 (7,43% dari luas daratan Pulau Bali), dengan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Petang yaitu 115 km2 atau 27,48% dari total luas wilayah Kabupaten Badung. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil terdapat di Kecamatan Kuta, yaitu seluas 17,52 km2 atau 4,19 % dari total luas wilayah Kabupaten Badung.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Badung per kecamatan ditunjukkan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kabupaten Badung Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah Km ²	Prosentase Luas Wilayah (%)
1	Kuta Selatan	101,13	24,16
2.	Kuta	17,52	4,19
3.	Kuta Utara	33,86	8,09
4.	Mengwi	82,00	19,59
5.	Abiansemal	69,01	16,49
6.	Petang	115	27,48
BADUNG		418,52	100

Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

B. Keadaan Iklim

Kabupaten Badung merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau (April-Oktober) dan musim penghujan (Nopember-Maret), hal ini dipengaruhi oleh adanya arus angin yang melintasi daratan serta banyaknya kandungan uap air. Curah hujan di bawah normal terjadi pada bulan Pebruari, Maret, April, September dan Oktober. Sedangkan curah hujan di atas normal terjadi pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, Nopember, dan Desember. Curah hujan rata-rata per tahun antara 893,4 - 2.702,6 mm.

Suhu minimum terjadi pada bulan Agustus mencapai 23,4°C dan maksimum pada bulan Oktober mencapai 31,5 °C, sedangkan suhu rata-rata 26,1 °C – 27,9°C. Kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Agustus, September dan Oktober mencapai 77% sedangkan tertinggi pada bulan Januari mencapai 84%. Ditinjau dari penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Desember mencapai 53% sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Oktober mencapai 95%.

C. Topografi

Ditinjau dari topografi wilayah, Kabupaten Badung berada pada ketinggian antara 0 – 2.075 meter Diatas Permukaan Laut (DPL). Wilayah Kecamatan Petang memiliki topografi paling tinggi antara 275-2.075 DPL, sedangkan terendah berada di wilayah Kecamatan Mengwi 0-350 meter DPL.

Berdasarkan kondisi topografi tersebut, wilayah Kabupaten Badung memiliki kemiringan lereng antara 0 - >40%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kemiringan lereng 0 – 5%, merupakan daerah landai, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi Kelurahan Tanjung Benoa, sebagian Kelurahan Benoa dan Jimbaran, serta Kelurahan Kuta, Tuban dan Kedonganan, sebagian Kelurahan Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak dan Kelurahan Kerobokan Kelod, dengan luas daerah \pm 4.733 Ha atau 11,3% dari luas daerah;
- b. Kemiringan lereng 5 – 15%, merupakan daerah bergelombang umumnya merupakan daerah perbukitan bergelombang, penyebarannya meliputi daerah : sebaian Kecamatan Kuta Utara, sebagian Kecamatan Mengwi, dan sebagian Kecamatan Abiansemai dengan luas daerah \pm 20.540 Ha atau 49,1 % dari luas daerah;

- c. Kemiringan lereng 15 – 40%, merupakan daerah miring. Penyebarannya meliputi Sebagian Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta sebagian Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan dengan luas daerah ± 15.813 Ha atau 37,8% dari luas daerah;
- d. Kemiringan lereng > 40%, merupakan daerah yang sampai curam. Penyebarannya meliputi sebagian Kelurahan Benoa, Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan Desa Kutuh serta daerah puncak G. Catur Desa Pelaga, dengan luas daerah ± 766 Ha atau 1,8% dari luas daerah.
- e. Ketinggian di atas permukaan laut adalah 0 – 2.075 Meter

D. Kondisi Morfologi

Pembagian satuan morfologi Kabupaten Badung didasarkan pada bentuk bentang alam dan kemiringan lereng, yang dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi yaitu :

a. Dataran

Merupakan daerah dataran alluvium dan pantai, bentuk lereng datar hingga landai dengan kemiringan lereng umumnya 0-2%, terletak pada ketinggian 0 – 50 m di atas permukaan laut. Sungai yang mengalir pada satuan morfologi ini kondisi keairannya bersifat permanen (mengalir sepanjang tahun). Bentuk sungai melebar ke arah horizontal dengan tebing yang landai dan dangkal. Batuan penyusun terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan liat.

Penyebarannya di bagian tengah-selatan dengan luas daerah lebih kurang 11,56% dari luas wilayah, meliputi Kuta, Legian, Tuban, Benoa, dan Nusa Dua. Daerah ini umumnya dipergunakan sebagai daerah permukiman, industri, perkantoran, pertokoan, dan obyek wisata.

b. Perbukitan Berelief Halus

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang halus dengan kemiringan lereng umumnya antara 2–5% dan berada pada ketinggian 100 – 500 m di atas permukaan laut.

Bentuk morfologi dipengaruhi oleh adanya torehan alur-alur sungai yang membentuk pola aliran sejajar (pararel) dengan lembah yang cukup lebar dan agak dalam serta bentuk sungai mulai mengarah ke bentuk “U”. Erosi lateral sudah mulai berjalan lebih intensif dibandingkan dengan erosi vertikal. Batuan penyusun terdiri dari tufa dan lahar yang berasal dari batuan gunung api kelompok Buyan – Bratan dan Batur (Qpbb).

Penyebarannya terdapat di bagian tengah dengan luas lebih kurang 43,38% dari luas wilayah yaitu sekitar daerah Mengwi, Kapal, Abiansemal, Blahkiuh, Lukluk dan Sangeh. Penggunaan lahan di daerah ini digunakan untuk kawasan permukiman, pertanian dan obyek wisata.

c. Perbukitan Berelief Sedang

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sedang dengan kemiringan lereng umumnya 5–15% dan berada pada ketinggian 7 - 213 meter di atas permukaan laut.

Penyebarannya di bagian selatan wilayah dengan luas lebih kurang 23,94% dari luas daerah, meliputi daerah Pecatu, Petang, Kutuh dan Uluwatu. Penggunaan lahan pada satuan ini umumnya berupa daerah alang-alang, tegalan dan permukiman.

d. Perbukitan Berelief Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang kasar dengan kemiringan lereng 15-40% dan berada pada ketinggian 500 – 1000 m di atas permukaan laut. Pola aliran sungainya umumnya membentuk pola aliran sejajar (pararel) dengan kenampakan tebing-tebing sungai cukup dalam. Keadaan ini menunjukkan bahwa erosi vertikal lebih intensif dibandingkan dengan erosi lateral. Batuan penyusun terdiri dari tufa dan lahar yang berasal dari batuan gunung api kelompok Buyan – Bratan dan Batur (Qpbb).

Sebarannya terdapat di bagian utara dengan luas lebih kurang 19,58% dari luas daerah yaitu sekitar daerah Pangsan, Petang, Sandakan, Nungnung Kiadan dan Pelaga. Penggunaan lahan di daerah ini adalah untuk kawasan perkebunan, permukiman setempat dan persawahan.

e. Perbukitan Berelief Sangat Kasar

Satuan morfologi ini mempunyai bentuk permukaan bergelombang sangat kasar dengan kemiringan lereng umumnya > 40% dan berada pada ketinggian 1500 – 2096 m di atas permukaan laut. Pola aliran sungai menunjukkan pola memancar (radial) dengan lembah dalam dan sempit. Sifat sungai umumnya musiman (intermittent) artinya hanya berair pada musim penghujan. Batuannya terbentuk dari hasil kegiatan gunung api kelompok Buyan – Bratan Purba berupa lava dan Breksi (Qvbb).

Sebarannya menempati bagian utara dengan luas lebih kurang 1,53% dari luas daerah, yang meliputi daerah sekitar G. Catur yang umumnya masih ditutupi oleh hutan tropik.

E. Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan wilayah Kabupaten Badung terdiri dari 2 (dua) klasifikasi, yakni lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian dimaksud berupa lahan sawah dan lahan bukan sawah seluas 18.126 hektar (43,31%) , sedangkan lahan bukan pertanian berupa jalan, permukiman, perkantoran, sungai dan hutan negara seluas 13.720 hektar (32,78%).

Sebaran penggunaan lahan pertanian sawah yang terluas terdapat di Kecamatan Mengwi mencapai 4.597 hektar dan terkecil terdapat di Kecamatan Kuta mencapai 30 hektar, sedangkan di Kecamatan Kuta Selatan tidak terdapat lahan pertanian sawah. Sementara untuk lahan bukan sawah berupa : tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, lahan yang tidak diusahakan sementara waktu, dan lainnya (tambak, kolam, empang dan hutan yang diusahakan) terluas terdapat Kecamatan Petang mencapai 8.939 hektar, dan terkecil terdapat di Kecamatan Kuta mencapai 164 hektar. Secara rinci pola penggunaan lahan Kabupaten Badung dimuat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Badung
Tahun 2015

No	Penggunaan Lahan	Luas (Hektar)	Persen (%)
1	Lahan Pertanian	28.132	67,22
1.1	Lahan Sawah (irigasi teknis)	10.006	23,91
1.2	Lahan bukan sawah	18.126	43,31
	a. Tegal/Kebun	8.028	19,18
	b. Perkebunan	6.337	15,14
	c. Hutan Rakyat	2.122	5,07
	d. Sementara tidak diusahakan	235	0,56
	e.Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan yang diusahakan)	1.404	3,35
2	Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, Hutan Negara)	13.720	32,78
Jumlah		41.852	100

Sumber : BPS Kabupaten Badung, 2015

2.1.2 Demografi

A. Perkembangan dan Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, maka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2016 mencapai sekitar 466.945 ribu jiwa, Tahun 2017 mencapai sekitar 471.911 ribu jiwa, Tahun 2018 mencapai sekitar 476.933 ribu jiwa, Tahun 2019 mencapai sekitar 482.012 ribu jiwa, Tahun 2020 mencapai sekitar 487.151 ribu jiwa, dan pada Tahun 2021 mencapai sekitar 492.348 ribu jiwa. Sedangkan apabila dilihat dari komposisinya, penduduk Kabupaten Badung didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan. Kondisi ini tentu perlu segera diantisipasi mengingat jumlah penduduk yang padat akan berkonsekwensi pada peningkatan sumberdaya penunjang kehidupan antara lain mencakup pangan, sandang dan papan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Badung dari Tahun 2011-2021 dimuat pada Tabel 2.3..

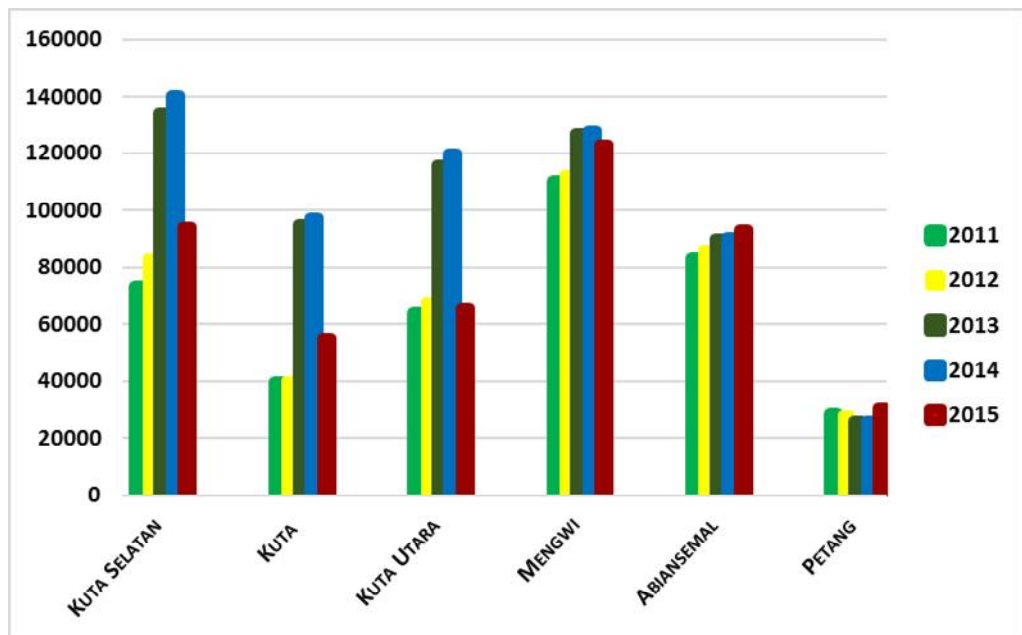
Tabel 2.3
Proyeksi Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin di Kabupaten Badung
Tahun 2011-2021 (Ribu Jiwa)

Jenis Kelamin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laki - Laki	220,483	231,081	232,820	231,553	232,302	234,080	235.872	237.677	239.496	241.329	243.176
Perempuan	212,346	223,821	225,580	229,831	229,734	232,865	236.039	239.256	242.516	245.822	249.172
Kab.Badung	432,829	454,902	458,400	461,384	462,036	466,945	471.911	476.933	482.012	487.151	492.348

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Selanjutnya grafik perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Badung per kecamatan pada tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 2.1.

Grafik 2.1.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Badung
Tahun 2010-2014



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015

B. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan pariwisata dunia memiliki berbagai lapangan usaha sehingga menjadi salah satu tujuan migran di Provinsi Bali. Hal ini membawa dampak terhadap tingginya kepadatan penduduk Kabupaten Badung yakni mencapai 1.104 jiwa/km² pada Tahun 2015. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Kuta yang mencapai 3.144 jiwa/km², sementara kepadatan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Petang yang hanya sebesar 263 jiwa/km². Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Kuta tidak dapat dihindari mengingat Kuta merupakan pusat aktivitas kepariwisataan sehingga lapangan usaha juga terkonsentrasi di wilayah tersebut.

Wilayah yang memiliki perkembangan kepadatan penduduk cukup tinggi setelah Kecamatan Kuta yakni Kecamatan Kuta Utara yang mencapai 1.937 jiwa/km². Hal ini disebabkan oleh perkembangan sarana kepariwisataan dan permukiman di wilayah Kecamatan Kuta Utara yang berfungsi sebagai *hinterland* dari pusat pariwisata Kuta meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, di tahun 2015 mengalami sedikit penurunan. Tingginya kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Kuta Utara perlu dikendalikan mengingat berdampak pada meningkatnya beban lingkungan, serta rawan timbulnya permasalahan sosial kemasyarakatan.

Secara rinci kepadatan penduduk Kabupaten Badung dari Tahun 2010-2015 dimuat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.

Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Badung
Tahun 2010-2015

NO	KECAMATAN	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM2)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kuta Selatan	709	729	826	1.330	1.389	933
2	Kuta	2.272	2.287	2.301	5.428	5.576	3.144
3	Kuta Utara	1.829	1.890	2.021	3.429	3.538	1.937
4	Mengwi	1.328	1.349	1.377	1.550	1.562	1.502
5	Abiansemal	1.191	1.211	1.254	1.306	1.313	1.356
6	Petang	248	248	247	228	227	263
BADUNG		939	957	1.004	1.408	1.440	1.104

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015

C. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk sering digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha – usaha pemerintah di bidang kependudukan. Semakin kecil laju pertumbuhan penduduk, maka usaha pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk semakin berhasil. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung selama 5 tahun terakhir rata-rata 3,28% dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.104 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi mulai Tahun 2011-2015 terjadi di Kecamatan Kuta Selatan yang mencapai 12,34%, disusul Kecamatan Kuta mencapai 6,92%, sedangkan terendah terjadi di Kecamatan kuta utara yaitu 2,12%.

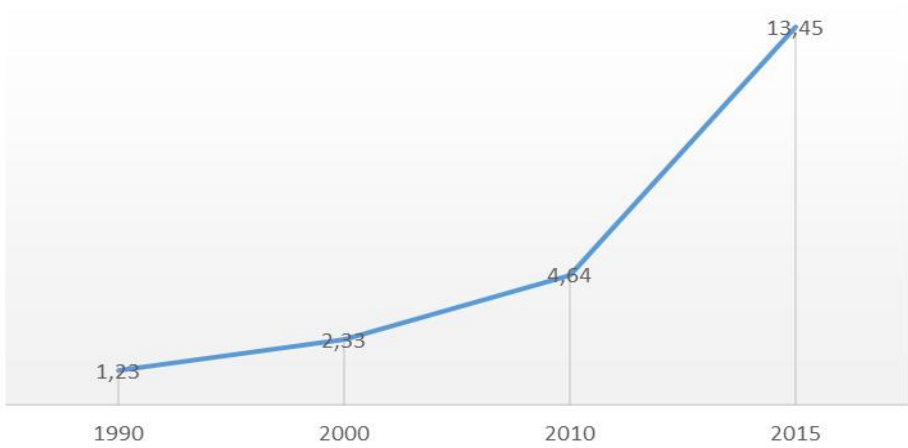
Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Badung perlu dikendalikan secara komprehensif dan lintas wilayah, mengingat fenomena aglomerasi penduduk dan ekonomi semakin menguat yang akan membawa berbagai dampak terhadap lingkungan, prasarana wilayah dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung ditunjukkan pada Tabel 2.5. dan Grafik 2.2.

Tabel 2.5.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung
Tahun 2010-2015

NO	KECAMATAN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)				RATA-RATA
		2010-2011	2011-2012	2013-2014	2014-2015	
1	Kuta Selatan	2,79	13,31	4,46	32,86	12,34
2	Kuta	0,63	0,64	2,73	43,68	6,92
3	Kuta Utara	3,34	6,92	3,19	45,31	2,12
4	Mengwi	1,54	2,09	0,79	3,85	3,45
5	Abiansemal	1,71	3,50	0,55	3,33	6,60
6	Petang	0,05	0,34	0,38	16,41	3,43
BADUNG		1,89	4,90	2,33	23,35	3,28

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2015

Grafik 2.2.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Badung
Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000,2010 dan
BPS Tahun 2015



Sumber : Sensus Penduduk Tahun 1990, 2000, dan 2010
Badung Dalam Angka Tahun 2015

D. Rata – rata Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup (*life expectancy rate*) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Rata-rata usia harapan hidup menjadi salah satu indikator penting yang dapat menggambarkan derajat

kesehatan masyarakat di suatu daerah dan merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Oleh sebab itulah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dilaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kualitas kehidupan.

Seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, rata-rata usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan. Usia rata-rata harapan hidup masyarakat Kabupaten Badung pada Tahun 2015 mencapai 74,30 tahun sehingga berada di atas rata – rata umur harapan hidup Bali sebesar 71,35 tahun dan nasional sebesar 70,1 tahun.

E. Indikator Ketenagakerjaan

Berdasarkan indikator ketenagakerjaan Tahun 2015, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Badung mencapai sekitar 463.227 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak sekitar 338.816 orang di antaranya bekerja dan sebanyak 1150 menganggur. Berdasarkan kondisi tersebut maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2015 mencapai 92,00% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 0,34 sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung
Tahun 2015

NO	URAIAN	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Penduduk Usia Kerja (Orang)	236.952	226.275	463.227
2	Angkatan Kerja (Orang)	198.964	141.003	339.967
3	Bekerja (Orang)	198.885	139.931	338.816
4	Pengangguran Terbuka (Orang)	79	1.071	1.150
5	Bukan Angkatan Kerja (Orang)	37.988	88.273	126.261
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83,97	61,50	92,00
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,04	0,76	0,34

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

F. Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha

Distribusi penduduk Kabupaten Badung berdasarkan lapangan usaha Tahun 2015, menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Badung sebagian besar bergerak pada lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan hotel yaitu mencapai 41,90%, disusul jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan mencapai 16,30%, sedangkan

yang paling rendah pada lapangan pertambangan dan penggalian yaitu 0,04%.

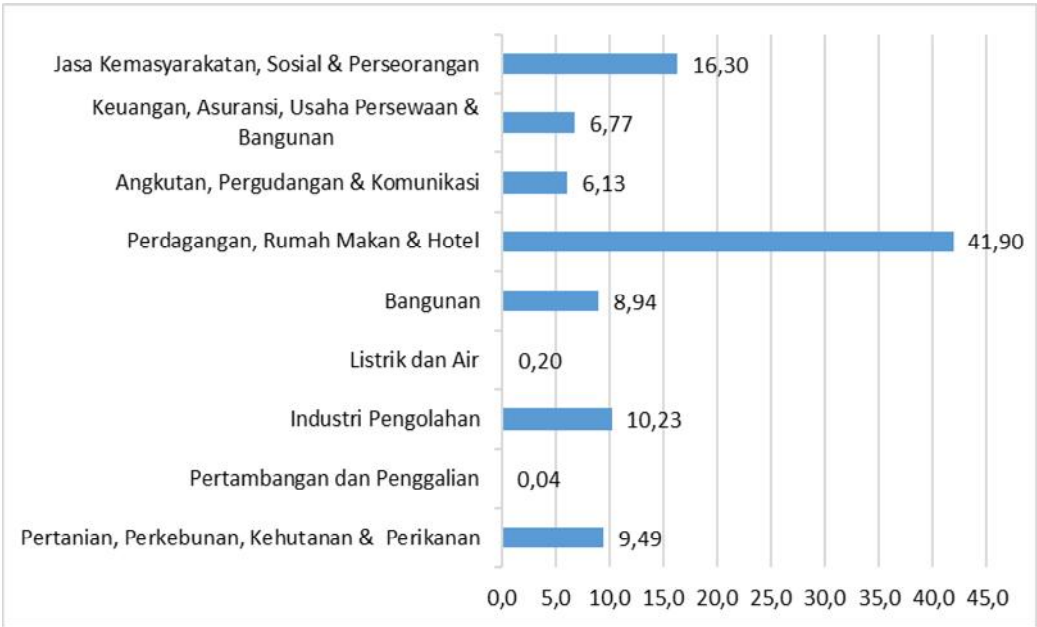
Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Badung dominan bergerak pada lapangan usaha sektor tersier, dan paling sedikit pada lapangan usaha sektor primer. Secara rinci distribusi penduduk berdasarkan lapangan usaha ditunjukan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2015

NO	LAPANGAN USAHA	JUMLAH	PERSEN
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan & Perikanan	32.161	9,49
2	Pertambangan dan Penggalian	121	0,04
3	Industri Pengolahan	34.663	10,23
4	Listrik dan Air	661	0,20
5	Bangunan	30.304	8,94
6	Perdagangan, Rumah Makan & Hotel	141.975	41,90
7	Angkutan, Pergudangan & Komunikasi	20.778	6,13
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan & Bangunan	22.937	6,77
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perseorangan	55.216	16,30
Total		338.816	100,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Grafik 2.3.
Distribusi Penduduk Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2015



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

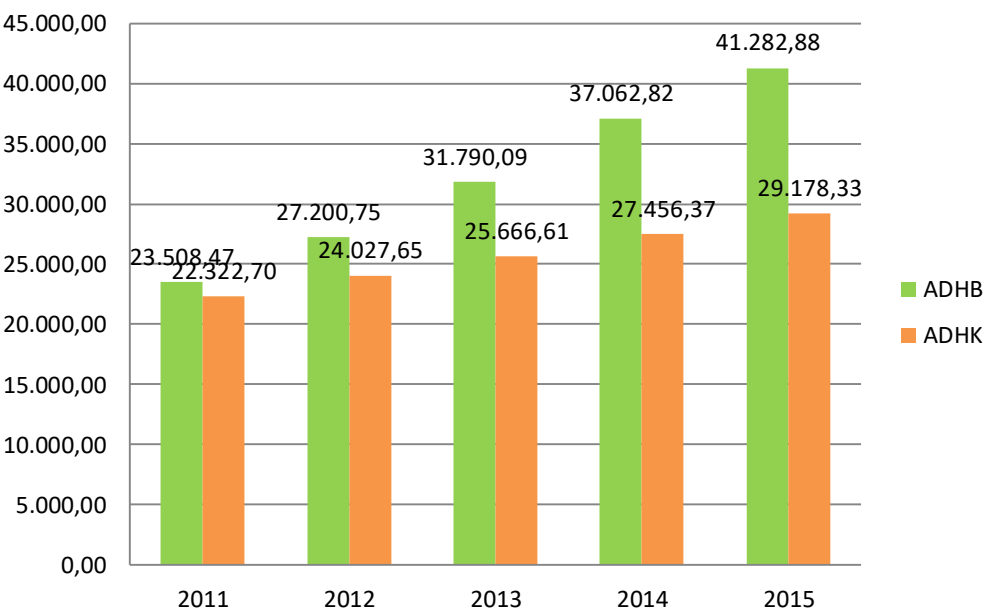
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

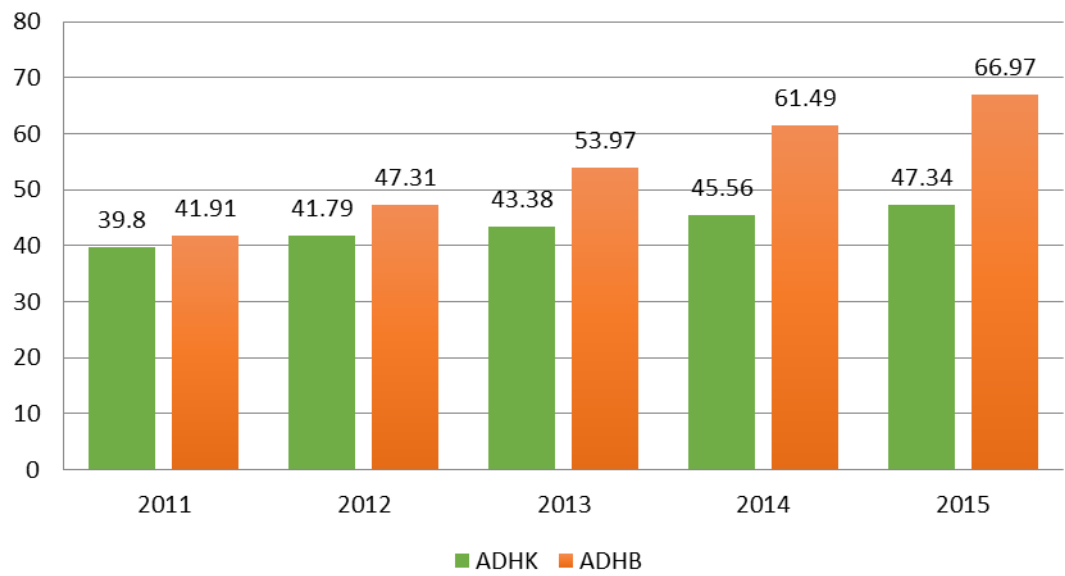
Grafik 2.4
PDRB Kabupaten Badung ADHB
Tahun 2011-2015 (Milyar Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2015

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Badung terus meningkat yang diindikasikan dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada Tahun 2011, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku baru mencapai Rp.23.508,47 milyar, meningkat menjadi Rp.41.282,88 milyar pada Tahun 2015. Peningkatan juga terlihat pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) yaitu dari Rp.22.322,70 milyar pada Tahun 2011 meningkat menjadi Rp.29.178,33 milyar pada Tahun 2015.

Grafik 2.5
PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Peningkatan juga terlihat dari hasil perhitungan PDRB perkapita Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2011, PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2011) Kabupaten Badung baru mencapai Rp.39,80 juta meningkat pada Tahun 2015 menjadi Rp.47,34 juta lebih. Sedangkan pada PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku meningkat dari Rp.41,91 juta pada Tahun 2011 menjadi Rp.66,97 juta pada Tahun 2015.

Tabel 2.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung
Tahun 2011 s.d 2015
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010
(Dalam milyar Rupiah)

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.836,40	8,23	1.954,37	8,13	1.982,15	7,72	2.087,31	7,60	2.182,15	7,48
2	Pertambangan dan Penggalian	84,58	0,38	98,02	0,41	105,14	0,41	106,35	0,39	102,08	0,35
3	Industri Pengolahan	1.024,52	4,59	1.074,57	4,47	1.163,28	4,53	1.283,50	4,67	1.387,24	4,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	46,21	0,21	51,32	0,21	55,45	0,22	57,75	0,21	57,94	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	72,21	0,32	74,59	0,31	78,64	0,31	85,52	0,31	88,57	0,30
6	Konstruksi	2.074,42	9,29	2.478,05	10,31	2.623,08	10,22	2.705,93	9,86	2.817,43	9,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.649,39	7,39	1.749,22	7,28	1.905,69	7,42	2.073,02	7,55	2.238,23	7,67
8	Transportasi dan Pergudangan	4.292,63	19,23	4.552,04	18,95	4.826,61	18,81	4.985,18	18,16	5.093,13	17,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.657,14	25,34	6.117,81	25,46	6.631,28	25,84	7.132,96	25,98	7.640,25	26,18
10	Informasi dan Komunikasi	1.685,97	7,55	1.824,27	7,59	1.927,37	7,51	2.092,93	7,62	2.276,90	7,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	601,69	2,70	653,92	2,72	737,53	2,87	819,73	2,99	890,63	3,05
12	Real Estate	888,02	3,98	945,47	3,93	1.010,17	3,94	115,70	0,42	1.202,30	4,12
13	Jasa Perusahaan	181,36	0,81	185,23	0,77	202,08	0,79	220,51	0,80	236,10	0,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	988,89	4,43	999,98	4,16	998,01	3,89	1.122,02	4,09	1.229,68	4,21
15	Jasa Pendidikan	766,14	3,43	768,88	3,20	873,74	3,40	981,17	3,57	1.062,45	3,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	286,94	1,29	304,44	1,27	343,02	1,34	391,44	1,43	432,65	1,48
17	Jasa Lainnya	186,18	0,83	195,49	0,81	203,37	0,79	222,35	0,81	240,60	0,82
	PDRB	22.322,70	100,00	24.027,65	100,00	25.666,61	100,00	27.456,37	100,00	29.178,33	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung
Tahun 2011 s.d 2015
atas Dasar Harga Berlaku
(Dalam milyar Rupiah)

No	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.894,34	8,06	2.100,22	7,72	2.352,69	7,40	2.516,30	6,79	2.767,48	6,70
2	Pertambangan dan Penggalian	88,15	0,37	105,55	0,39	120,37	0,38	128,27	0,35	128,19	0,31
3	Industri Pengolahan	1.077,02	4,58	1.186,71	4,36	1.339,29	4,21	1.487,96	4,01	1.684,86	4,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	40,37	0,17	39,91	0,15	39,06	0,12	48,85	0,13	65,06	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,82	0,31	74,26	0,27	79,65	0,25	84,48	0,23	93,68	0,23
6	Konstruksi	2.186,85	9,30	2.802,29	10,30	3.121,73	9,82	3.216,49	8,68	3.451,42	8,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.771,43	7,54	1.926,01	7,08	2.152,45	6,77	2.413,11	6,51	2.659,12	6,44
8	Transportasi dan Pergudangan	4.769,00	20,29	5.610,46	20,63	6.913,40	21,75	8.831,24	23,83	10.263,82	24,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.948,21	25,30	7.186,66	26,42	8.807,67	27,71	10.815,28	29,18	11.787,94	28,55
10	Informasi dan Komunikasi	1.682,45	7,16	1.833,38	6,74	1.940,83	6,11	2.065,23	5,57	2.298,39	5,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	628,09	2,67	753,08	2,77	896,70	2,82	997,52	2,69	1.096,99	2,66
12	Real Estate	915,48	3,89	999,50	3,67	1.124,15	3,54	1.239,79	3,35	1.354,24	3,28
13	Jasa Perusahaan	182,86	0,78	198,61	0,73	224,19	0,71	247,84	0,67	283,09	0,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	999,95	4,25	1.025,89	3,77	1.043,15	3,28	1.149,85	3,10	1.299,01	3,15
15	Jasa Pendidikan	766,55	3,26	818,67	3,01	1.004,17	3,16	1.120,14	3,02	1.240,78	3,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	296,16	1,26	329,96	1,21	390,76	1,23	435,44	1,17	511,78	1,24
17	Jasa Lainnya	296,16	1,26	329,96	1,21	390,76	1,23	435,44	1,17	297,03	0,72
	PDRB	23.508,47	100,00	27.200,75	100,00	31.790,09	100,00	37.062,82	100,00	41.282,88	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Potret kinerja perekonomian Kabupaten Badung periode Tahun 2011-2015 yang ditopang industri pariwisata secara nyata tergambar pada peningkatan nilai PDRB Kabupaten Badung yang dihasilkan oleh

masing-masing lapangan usaha. PDRB atas dasar harga konstan memiliki pola yang hampir sama dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada Tahun 2015 besaran PDRB Kabupaten Badung atas dasar harga konstan sebesar Rp. 29,18 triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 27,46 triliun. Total nilai tambah yang terbentuk (PDRB atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2015 sebesar Rp. 41,28 triliun meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 37,06 triliun.

Sektor pariwisata sangat berperan dalam pembentukan besarnya nilai tambah ini, termasuk keberadaan DTW (Daya Tarik Wisata) turut memberi sumbangan besar terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Badung. Hal ini dapat terlihat dari besarnya nilai tambah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai Rp. 11,79 triliun. Dari seluruh nilai tambah pada lapangan usaha ini, sub kategori penyediaan akomodasi memberikan kontribusi sebesar 73,42 persen, sedangkan sub kategori penyediaan makan minum memberikan kontribusi sebesar 26,58 persen.

Selain lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha yang memiliki nilai tambah cukup besar yakni transportasi dan pergudangan yang mencapai Rp. 10,3 triliun pada Tahun 2015. Meningkatnya kontribusi lapangan usaha ini disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan, baik wisman maupun wisdom ke Bali. Keberadaan Bandara Ngurah Rai mampu menghasilkan nilai tambah hampir 90 persen terhadap nilai tambah di lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Di posisi ketiga terdapat lapangan usaha konstruksi yang menghasilkan nilai tambah terbesar mencapai Rp. 3,45 triliun pada Tahun 2015. Diposisi selanjutnya ditempati oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan juga lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selengkapanya dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.10
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung
Tahun 2011 s.d 2015
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

No	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		ABHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06	8,23	7,72	8,13	7,40	7,72	6,79	7,60	6,70	7,48
2	Pertambangan dan Penggalian	0,37	0,38	0,39	0,41	0,38	0,41	0,35	0,39	0,31	0,35
3	Industri Pengolahan	4,58	4,59	4,36	4,47	4,21	4,53	4,01	4,67	4,08	4,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,21	0,15	0,21	0,12	0,22	0,13	0,21	0,16	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,31	0,32	0,27	0,31	0,25	0,31	0,23	0,31	0,23	0,30
6	Konstruksi	9,30	9,29	10,30	10,31	9,82	10,22	8,68	9,86	8,36	9,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,54	7,39	7,08	7,28	6,77	7,42	6,51	7,55	6,44	7,67
8	Transportasi dan Pergudangan	20,29	19,23	20,63	18,95	21,75	18,81	23,83	18,16	24,86	17,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25,30	25,34	26,42	25,46	27,71	25,84	29,18	25,98	28,55	26,18
10	Informasi dan Komunikasi	7,16	7,55	6,74	7,59	6,11	7,51	5,57	7,62	5,57	7,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,67	2,70	2,77	2,72	2,82	2,87	2,69	2,99	2,66	3,05
12	Real Estate	3,89	3,98	3,67	3,93	3,54	3,94	3,35	0,42	3,28	4,12
13	Jasa Perusahaan	0,78	0,81	0,73	0,77	0,71	0,79	0,67	0,80	0,69	0,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,25	4,43	3,77	4,16	3,28	3,89	3,10	4,09	3,15	4,21
15	Jasa Pendidikan	3,26	3,43	3,01	3,20	3,16	3,40	3,02	3,57	3,01	3,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,29	1,21	1,27	1,23	1,34	1,17	1,43	1,24	1,48
17	Jasa Lainnya	1,26	0,83	1,21	0,81	1,23	0,79	1,17	0,81	0,72	0,82
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Selama periode Tahun 2011 – 2015, struktur perekonomian Badung masih didominasi oleh lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum serta lapangan usaha transportasi. Sarana kepariwisataan di Kabupaten Badung yang cukup banyak memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Badung. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional

Ngurah Rai di Kabupaten Badung, mampu memberikan sumbangan terbesar di lapangan usaha transportasi disamping transportasi darat.

Selanjutnya lapangan usaha konstruksi menempati posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 8,36 persen pada Tahun 2015, diikuti oleh lapangan usaha pertanian sebesar 6,70 persen dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran yang menyumbang sebesar 6,44 persen.

Jenis-jenis investasi yang memberi pengaruh signifikan terhadap PDRB disebabkan oleh pembangunan hotel, restoran, toko, ruko dan jasa lainnya. Demikian pula dampak pembangunan mega proyek pada Tahun 2012 diantaranya perluasan Bandara Ngurah Rai, pembangunan jalan tol diatas perairan, serta *underpass* Dewa Ruci memberi kontribusi mencapai 10,30 persen terhadap total PDRB Badung.

Pembangunan irigasi dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan gedung yang bersumber dari belanja pemerintah daerah turut menjadi stimulan dalam perkembangan lapangan usaha konstruksi. Pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan nilai tambah lapangan usaha ini bertambah dari sebesar Rp. 2,19 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 3,45 triliun pada tahun 2015. Setelah tahun 2012 peranan sektor ini mulai mengalami penurunan yaitu sebesar 8,68 persen pada Tahun 2014 dan menjadi 8,36 persen pada Tahun 2015.

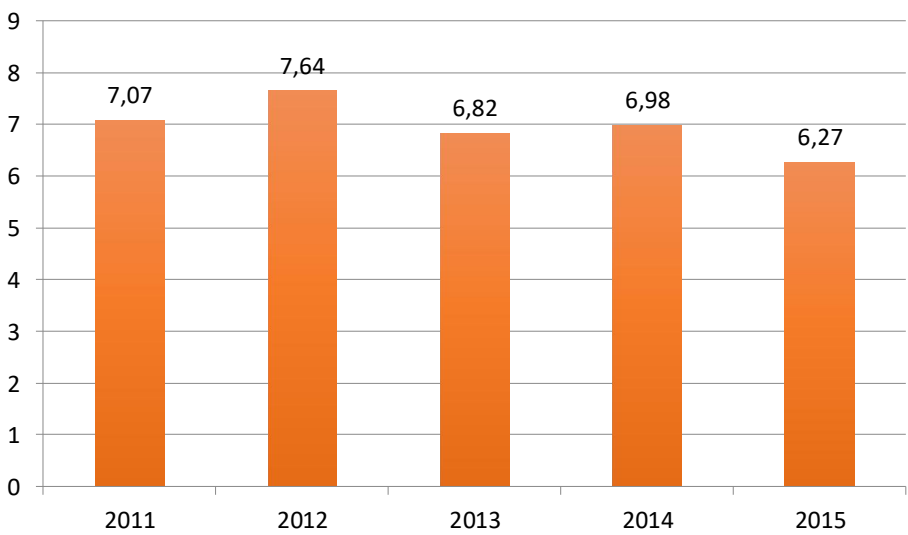
Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, menempati posisi kelima pada Tahun 2015 dengan kontribusi mencapai 6,44 persen. Besarnya keterkaitan antara industri pariwisata dan lapangan usaha perdagangan mengakibatkan nilai tambah di lapangan usaha ini cukup signifikan mencapai Rp. 12,94 triliun. Peranan atau distribusi masing-masing lapangan usaha ditunjukkan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.11
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Badung

No	Sektor	Pertumbuhan	
		ADHB	ADHK
		%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-16,81	-9,09
2	Pertambangan dan Penggalian	-17,20	-7,67
3	Industri Pengolahan	-10,92	3,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-8,22	-4,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-25,72	-6,16
6	Konstruksi	-10,13	3,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-14,52	3,82
8	Transportasi dan Pergudangan	22,56	-9,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,85	3,32
10	Informasi dan Komunikasi	-22,21	3,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,54	13,24
12	Real Estate	-15,76	3,58
13	Jasa Perusahaan	-11,84	-0,40
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-26,02	-4,87
15	Jasa Pendidikan	-7,83	6,09
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-1,60	15,35
17	Jasa Lainnya	-10,85	-1,13
	PDRB	-164,76	13,6

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Grafik 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung
Tahun 2011-2015 (%)



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, seiring

perkembangan perekonomian nasional. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hal diantaranya kondisi perekonomian global (ekonomi global yang belum pulih dari krisis dalam 3 tahun terakhir, perekonomian nasional yaitu akibat kenaikan BBM) dan isu-isu lainnya yang berpengaruh terhadap kepariwisataan di Kabupaten Badung.

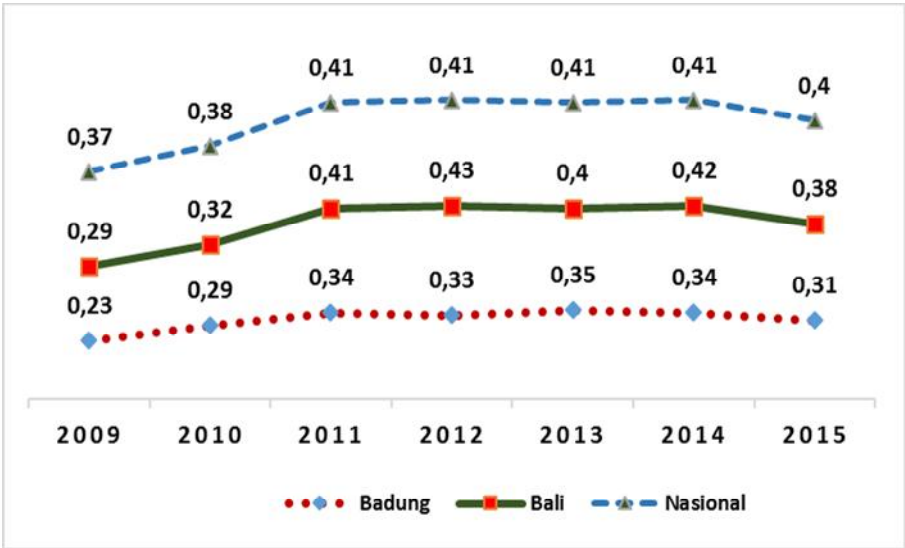
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami puncaknya pada Tahun 2012 yaitu mencapai 7,64%. Kondisi ini didorong oleh pelaksanaan proyek/investasi skala besar di sektor bangunan pada Tahun 2012 diantaranya proyek *Underpass*, Jalan di atas Perairan (JDP) dan perluasan Bandara Ngurah Rai. Selain hal tersebut kondisi ini dipicu oleh adanya berbagai *event* yang berskala internasional yang bertempat di Nusa Dua, Kuta Selatan antara lain KTT *APEC*, KTT *ASEAN*, *Bali Democracy Forum* serta *World Trade Organization (WTO)*. Sedangkan pada Tahun 2013 hingga Tahun 2015 terjadi perlambatan yang disebabkan proyek investasi skala besar telah berakhir pelaksanaannya serta dampak dari perekonomian nasional dan global mengalami perlambatan.

Di samping dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan di suatu daerah juga perlu dilihat dari sisi lain, antara lain aspek kesenjangan pendapatan antar penduduk yang diukur dengan gini rasio. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menjadi alat dalam mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Kisaran nilai indeks gini rasio dari 0 - < 0,35 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, kisaran 0,35 - 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan kisaran nilai indeks gini rasio > 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada Tahun 2009 hingga Tahun 2015 menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Badung masih dalam tingkat ketimpangan sedang, namun trennya menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Tentu hal ini yang perlu diantisipasi melalui berbagai program pembangunan agar tidak bergerak naik menjadi ketimpangan sedang atau bahkan tinggi. Perbandingan gini rasio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan nasional Tahun 2009 - 2015 dapat dilihat pada Grafik 2.7 berikut.

Grafik 2.7

Indeks Gini Rasio Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2009-2015



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Selain gini rasio, indikator lain yang juga dapat digunakan untuk mengetahui dimensi lain dari kesenjangan adalah indikator distribusi pendapatan pada kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah. Kondisi yang diharapkan adalah agar distribusi pendapatan yang dinikmati kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah menerima > 17% dari total pendapatan. Kriteria distribusi pendapatan ini disusun oleh Bank Dunia sebagai berikut:

- a. 40% penduduk berpendapatan terendah menerima < 12% total pendapatan: pemerataan rendah/ketimpangan distribusi pendapatan tinggi
- b. 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12% - 17% total pendapatan: pemerataan sedang/ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
- c. 40% penduduk berpendapatan terendah menerima > 17% total pendapatan: pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

Perkembangan distribusi pendapatan di Kabupaten Badung pada Tahun 2011 - 2015 ditunjukkan pada grafik 2.8 berikut:

Grafik 2.8
Pemerataan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung
Tahun 2011-2015 (Persen)



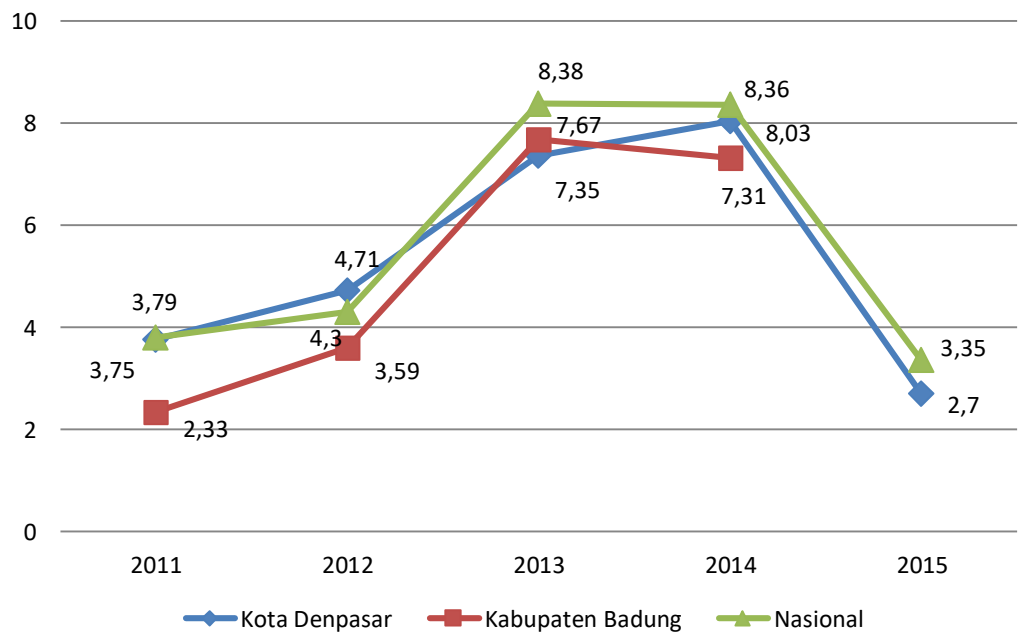
Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada Tahun 2015 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 20,70 persen dari total pendapatan sehingga pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Adapun Laju Inflasi Kabupaten Badung dari Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Grafik 2.9 berikut ini :

Grafik 2.9
Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015



Sumber Data : BPS Kabupaten Badung

Dalam kurun waktu Tahun 2011 hingga Tahun 2014, tingkat inflasi Kabupaten Badung selalu berada di bawah inflasi Kota Denpasar dan Nasional. Namun pada Tahun 2013 tingkat inflasi Kabupaten Badung berada di atas inflasi Kota Denpasar yang juga merupakan kondisi puncak inflasi Kabupaten Badung yang mencapai 7,67 persen. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dan ketahanan perekonomian khususnya ketersediaan dan distribusi barang komponen pembentuk inflasi di Kabupaten Badung telah berjalan cukup baik sehingga membuat harga-harga cukup stabil. Dalam empat tahun terakhir puncak inflasi terjadi pada Tahun 2013 dimana mencapai 7,67 persen. Kondisi ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang telah mendorong peningkatan harga-harga komoditas dan biaya transportasi. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada Tahun 2011 yang mencapai 2,33%.

Mulai Tahun 2015 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Badung tidak lagi melakukan perhitungan terhadap laju inflasi di Kabupaten Badung sehingga nilai yang digunakan sebagai acuan laju inflasi adalah pendekatan laju inflasi Kota Denpasar dengan nilai laju inflasi pada Tahun 2015 sebesar 2,70%, lebih rendah bila dibandingkan dengan laju inflasi nasional sebesar 3,35%.

Tabel 2.12
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d .2015
Kabupaten Badung

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Inflasi
Inflasi	2,33	3,59	7,67	7,31	2,70	4,72

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung, Tahun 2011-2015

Laju inflasi dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2011 mencapai 2,33%, dan juga lebih rendah bila dibanding dengan inflasi nasional sebesar 3,79%. Sedangkan untuk Tahun 2014 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,31%, lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi nasional sebesar 8,36%. Hal ini terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada Desember 2014 sehingga memicu kenaikan harga-harga barang secara umum. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya untuk mempertahankan agar laju inflasi relatif stabil dengan mengarahkan sektor produksi untuk terus melakukan peningkatan kuantitas dan pemantauan distribusi barang, dapat dilihat pada tabel 2.12.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Angka rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah siswa Kabupaten Badung pada Tahun 2011-2015 untuk jenjang pendidikan SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA/SMK selama 3 tahun. Dengan demikian mulai jenjang SD sampai SMA/SMK angka rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun. Secara rinci rata-rata lama sekolah ditunjukkan pada tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.13
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 s.d .2015
Kabupaten Badung

NO	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD	6	6	6	6	6
2	SMP	3	3	3	3	3
3	SMA/SMK	3	3	3	3	3
	Jumlah	12	12	12	12	12

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni budaya dan olahraga mempunyai kontribusi yang positif terhadap peningkatan kualitas dan kemampuan daya saing masyarakat. Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Badung dalam kurun waktu Tahun 2011 - 2015 dapat dilihat dari keberadaan sekaa-sekaa kesenian/ grup kesenian, gedung kesenian, klub olahraga dan sarana olahraga. Kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan seni budaya dan olahraga mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya tersebut.

Perkembangan seni, budaya dan olahraga yang terdapat di wilayah Kabupaten Badung dapat dilihat dalam tabel 2.14 dan tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.14
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Tahun 2011 s.d .2015
Kabupaten Badung

No	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	150	152	152	155	155
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	-	1	1	1	1
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.	89	89	89	89	89
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.	6	6	6	6	6

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

Tabel 2.15
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Kecamatan Petang	50	-	2	-
2	Kecamatan Abiansemal	200	-	24	2
3	Kecamatan Mengwi	200	-	24	2
4	Kecamatan Kuta Utara	150	-	25	2
5	Kecamatan Kuta	150	1	8	1
6	Kecamatan Kuta Selatan	150	1	6	-
	Jumlah	900	2	89	7

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2011 s.d .2015
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	59.502	60.265	60.884	61.266	56.758
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	55.059	52.009	54.669	54.156	53.890
1.3.	APS SD/MI	108,07	115,87	111,37	113,13	103,32
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 thn	23.930	24.909	25.506	26.791	29.090
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.359	18.659	21.581	21.748	23.776
2.3.	APS SMP/MTs	117,54	133,50	118,19	123,19	122,35

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

Grafik 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD dan SMP
Kabupaten Badung
Tahun 2015



Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

Angka partisipasi sekolah memberikan informasi tentang daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Kondisi angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) Kabupaten Badung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami sedikit dinamika namun tetap berada diatas target yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan capaian angka partisipasi sekolah pada tiap-tiap kecamatan sebagai unsur pembentuk capaian tingkat kabupaten, telah menunjukkan capaian melampaui target yang ditetapkan. Adapun angka partisipasi sekolah masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel 2.17 berikut :

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kecamatan Petang	2.445	2.588	94,57	1.511	1.327	113,87
2	Kecamatan Abiansemal	8.414	8.078	104,16	4.733	3.967	119,31
3	Kecamatan Mengwi	11.444	10.823	105,74	6.633	5.574	119,00
4	Kecamatan Kuta Utara	11.740	11.139	105,40	5.253	3.986	131,79
5	Kecamatan Kuta	9.220	8.458	109,01	4.110	3.398	120,95
6	Kecamatan Kuta Selatan	13.495	12.804	105,40	6.850	5.524	124,00
	Jumlah	56.758	53.890	105,32	29.090	23.776	122,35

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015

a. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Tabel 2.18
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2011 s.d .2015
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	269	271	272	274	275
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	55.059	52.009	54.669	54.156	53.890
1.3.	Rasio	49	52	50	51	51
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	47	50	50	50	52
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.359	18.659	21.581	21.748	23.776
2.3.	Rasio	23	27	23	23	22

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

Tabel 2.19
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan Petang	27	2.588	104	4	1.327	30
2	Kecamatan Abiansemal	64	8.078	79	6	3.967	15
3	Kecamatan Mengwi	72	10.823	67	13	5.574	23
4	Kecamatan Kuta Utara	34	11.139	31	10	3.986	25
5	Kecamatan Kuta	27	8.458	32	6	3.398	18
6	Kecamatan Kuta Selatan	51	12.804	40	13	5.524	24
	Jumlah	274	53.890	51	52	23.776	22

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015

Rasio ketersediaan sekolah sebagaimana dalam Tabel 2.18 dan Tabel 2.19 diatas mencerminkan ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar per 10.000 orang penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan dasar sesuai dengan jenjang usia tertentu.

Di kabupaten Badung rasio ketersedian sekolah pada masing-masing kecamatan sangat berfluktuasi, seirama dengan perkembangan jumlah penduduk usia pendidikan dasar pada wilayah kecamatan tertentu dengan kisaran untuk tingkat sekolah dasar yaitu terendah kecamatan Kuta Utara dan tertinggi Kecamatan Petang serta untuk jenjang SMP, terendah Kecamatan Abiansemal dan tertinggi Kecamatan Petang.

b. Rasio guru/murid

Tabel 2.20
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2011 s.d .2015
Kabupaten Badung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.505	3.523	3.530	3.623	3.674
1.2.	Jumlah Murid	60.586	61.290	61.400	61.284	61.203
1.3.	Rasio	58	57	57	59	60
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.663	1.748	1.765	1.831	1.907
2.2.	Jumlah Murid	24.955	25.828	27.002	27.868	29.282
2.3.	Rasio	67	68	65	66	65

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2011-2015

Rasio guru terhadap murid merupakan perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini memberikan informasi ketersediaan tenaga pengajar dan dapat juga dipergunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu orang guru agar tercapai mutu pengajaran.

Perkembangan antar waktu rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Badung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang cukup statis yaitu antara kisaran 57 sampai dengan 60 per 1000 jumlah murid. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan jumlah guru dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah siswa, namun belum signifikan.

Demikian juga halnya dengan perkembangan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama yang berkisar pada angka 67 per 1000 jumlah murid pada tahun 2011 menjadi 65 per 1000 jumlah murid pada tahun 2015. Kondisi ini menggambarkan adanya penurunan jumlah guru pada jenjang sekolah menengah pertama bila dibandingkan dengan perkembangan jumlah siswa. Situasi seperti ini mengisyaratkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk merancang program kegiatan yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kompetensi guru agar mampu mencapai mutu pengajaran yang optimal.

Selanjutnya, apabila dilihat data per kecamatan yang ada di Kabupaten Badung sesuai dengan Tabel 2.21, dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid pada tahun 2015 pada jenjang sekolah dasar paling tinggi berada pada Kecamatan Petang dan terendah pada Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama, rasio guru terhadap murid tertinggi pada Kecamatan Mengwi dan terendah pada Kecamatan Kuta Selatan. Keadaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.21 berikut :

Tabel 2.21

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015
Menurut Kecamatan
Kabupaten Badung

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kecamatan Petang	248	2.643	94	108	1.452	74
2	Kecamatan Abiansemal	767	9.106	84	285	4.786	60
3	Kecamatan Mengwi	791	12.331	64	510	6.787	75
4	Kecamatan Kuta Utara	663	12.874	51	336	5.192	65
5	Kecamatan Kuta	468	9.622	49	263	4.237	62
6	Kecamatan Kuta Selatan	737	14.627	50	405	6.828	59
	Jumlah	3.674	61.203	60	1.907	29.282	65

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.22
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2011	Jumlah Investor	597	92	689
2012	Jumlah Investor	607	170	777
2013	Jumlah Investor	528	257	785
2014	Jumlah Investor	1.264	195	1.459
2015	Jumlah Investor	1701	328	2029

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Badung tercermin dari jumlah izin yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Dari data Tabel 2.22, terlihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 secara keseluruhan jumlah investor selalu mengalami peningkatan, namun jumlah investor (PMDN) atau investor (PMA) berfluktuasi.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.23
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2011	611	8.536.644.647.061	689	3.173.814.437.239
2012	762	8.808.590.543.488	777	7.180.810.126.088
2013	667	6.297.274.880.989	785	6.147.499.450.989
2014	1.356	3.086.430.085.315	1.459	2.618.136.988.815
2015	1691	32.836.318.317.774	1701	2.967.015.417.734

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung

Dari data tabel 1.19 di atas terlihat bahwa jumlah nilai investasi dari tahun 2011 sampai 2015 berfluktuasi. Jumlah investasi terbesar terjadi

pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini disebabkan karena adanya perluasan pembangunan bandara Ngurah Rai, pembangunan jalan tol di Nusa Dua dan meningkatnya investasi di bidang akomodasi pariwisata.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 s.d 2014

Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	2.985	6.785	17.012	9476	36386
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	689	777	785	1459	5739
3	Rasio daya serap tenaga kerja	4,33	8,73	21,67	6,49	6,34

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga yang bekerja pada perusahaan (PMA/PMDN). Dari data Tabel 20 di atas terlihat ratio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Badung pada tahun 2011 – 2015 berfluktuasi, dan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 21,67. Hal ini disebabkan karena adanya perluasan pembangunan bandara Ngurah Rai dan meningkatnya pembangunan akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung, sehingga dibutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Nilai tukar petani

Untuk hasil penghitungan terhadap nilai tukar petani (NTP), dapat disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	99,8	100	110,29	157,53	123,65
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	90,52	100	112,24	124,46	117,86
3.	Rasio	1,103	1	0,98	1,265	1,049

Sumber Data : BPS Kabupaten Badung Dan Dinas Pertanian Kabupaten Badung

Dari tabel 2.25 terlihat bahwa Nilai tukar petani (NTP) setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan indikator Indeks yang diterima petani 99,8 pada tahun 2011 menjadi 157,53. Sedangkan Indeks yang dibayar petani hanya meningkat pada tahun 2013 yang artinya pengeluaran petani lebih tinggi 1,95 point dibandingkan pendapatannya. Pada tahun 2012 Indeks yang diterima dan Indeks yang dibayar sama, sedangkan tahun 2014 dan 2015 Indeks yang diterima petani lebih besar dari Indeks yang dibayar.

- b. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Tabel 2.26
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan
Tahun 2011 s.d 2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total pengeluaran RT non pangan	617.273	728.813	827.250	849.935	717.712
2.	Total pengeluaran	1.016.725	1.211.685	1.331.826	1.412.756	1.192.583
3.	Rasio	60,71	60,11	62,11	60,16	60,18

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Pada tabel 2.26. Tabel Pengeluaran RT non pangan terus mengalami peningkatan dari Total Pengeluaran, dengan ratio di kisaran 60,11 s/d 62,11, yang artinya pengeluaran RT untuk kebutuhan pangan pengeluarannya lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsi non pangan. Indikasi ini mencerminkan tingkat kesejahteraan petani semakin meningkat.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 2.27
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Badung
Tahun 2011 s.d 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Realisasi pemanfaatan ruang (Kawasan Lindung)	-	-	-	-	28,98
2.	Realisasi pemanfaatan ruang (Kawasan Budidaya)	-	-	-	-	366,63
3.	Rencana Peruntukan RTRW (Kawasan Lindung)	-	-	-	-	28,82
4.	Rencana Peruntukan RTRW (Kawasan Budidaya)	-	-	-	-	389,69
5.	Rasio kawasan lindung (1./3.)	-	-	-	-	100,5
6.	Rasio kawasan budidaya (2./4.)	-	-	-	-	94,08

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

Rasio ketaatan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 untuk pola pemanfaatan ruang kawasan lindung eksisting sudah sesuai dengan yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Badung. Sedangkan ketaatan pada pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebesar 94,08% terhadap RTRW Kabupaten Badung.

b. Luas wilayah produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.28
Persentase Luas Wilayah Produktif
Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas wilayah produktif	-	-	-	-	256,70
2.	Luas Seluruh wilayah budidaya	-	-	-	-	389,69
3.	Rasio (1/2.)	-	-	-	-	65,87

Sumber Data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

Untuk luas wilayah produktif di Kabupaten Badung sesuai yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 sebagai kawasan budidaya pertanian dalam arti luas dengan rasio sebesar 65,87% dari total luas pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
a. Angka kriminalitas

Tabel 2.29
Angka Kriminalitas Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kasus narkoba	15	19	25	17	39
2.	Jumlah kasus pembunuhan	2	2	4	1	2
3.	Jumlah kejahatan seksual	11	8	5	5	0
4.	Jumlah kasus penganiayaan	80	71	116	97	73
5.	Jumlah kasus pencurian	408	310	466	319	107
6.	Jumlah kasus penipuan	58	51	79	21	20
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	1	0	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	574	461	696	460	316
9.	Jumlah penduduk	506.043	524.659	533.203	460.618	589.000
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,11%	0,09%	0,13%	0,10%	0.05%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

Keamanan dan ketertiban merupakan landasan utama menciptakan situasi dan kondisi Kabupaten Badung yang aman dan damai. Rasa aman dan tenteram merupakan prasyarat bagi berputarnya roda pembangunan ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meningkatnya jumlah kejahatan merupakan gangguan serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jumlah angka kriminalitas di Kabupaten Badung menunjukkan kecenderungan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011 terjadi 574 kasus, kemudian menurun menjadi 461 kasus pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 696 kasus pada tahun 2013, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 316 kasus. Jenis kriminalitas yang mencolok adalah pencurian dan penipuan.

Tindak kejahatan lainnya yang juga cenderung meningkat adalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Pada tahun 2012 dan tahun 2013, jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba meningkat dibanding tahun 2011. Namun pada tahun 2014 terdapat kasus narkoba sebanyak 17 kasus menurun sebesar 68 % dibanding tahun 2013 sebanyak 25 kasus dan pada tahun 2015 kasus narkoba kembali meningkat dibanding tahun 2014 sebanyak 39 kasus.

b. Jumlah Demonstrasi

Untuk menghitung jumlah demontrasi, dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30
Jumlah Demo Tahun 2011 s.d 2015
Kabupaten Badung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang politik	-	-	-	1	
2	Ekonomi	-	-	1	2	1
3	Kasus pemogokan kerja	-	1	1	2	
4	Jumlah unjuk rasa	-	1	2	5	1

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, bersama-sama dengan Kepolisian dan aparat pengamanan lainnya melaksanakan tugas pengamanan demo yang dilakukan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang terjadi di areal Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Adapun demo yang diamankan selama kurun waktu dari Tahun 2011 - 2015 terkait dengan bidang politik, ekonomi dan kasus pemogokan kerja sebagai berikut : Tahun 2011 tidak ada Demo oleh masyarakat, Tahun 2012 ada satu kasus pemogokan kerja yang dilakukan oleh Karyawan Hotel Kartika di Kuta, Tahun 2013 terjadi dua kali demo yang dilakukan oleh pegawai taxi di Jimbaran Kuta Selatan dan Demo pedagang di Bandara Ngurah Rai, Tuban, Kuta. Sedangkan pada Tahun 2014 terjadi demo sebanyak lima kali yang dilakukan oleh penambang galian C, sopir taxi di Jimbaran, Demo oleh mahasiswa Universitas Mahendradata Denpasar, Demo oleh Forum Kaling dan demo oleh masyarakat Desa Adat Cemagi, Kecamatan Mengwi dan Tahun 2015 terjadi demo eksekusi lahan kampus universitas udayana oleh mahasiswa.

2.5. Hasil analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Berdasarkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditunjukkan dalam Tabel 2.31 berikut.

Tabel 2.31
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	7,07	7,64	6,82	6,97	6,27	-	
1.2.	Laju inflasi provinsi	3,75	4,71	7,35	8,03	2,70	-	
1.3.	PDRB per kapita	39,80	41,79	43,58	45,56	47,34	-	
1.4.	Indeks Gini	0,3385	0,3258	0,3468	0,3404	0,31	-	
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	19,20	19,75	15,12	18,64	20,70	-	
1.6.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	2,62	2,16	2,46	2,54	2,49	2,00 – 3,00	Sesuai
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka partisipasi kasar	115,01	129,23	117,73	120,37	117,22	100	Melampaui
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	99,95	99,96	99,99	100	100	100	Belum Tercapai
1.3.	Angka Partisipasi Murni							
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,87	103,67	98,62	99,12	99,98	90 - 100	Melampaui
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	91,28	101,62	91,59	92,10	109,95	90 - 100	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.3.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/ Paket C	78,04	91,09	83,69	83,72	104,44	90 - 100	Belum Tercapai
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	95,10	99,70	99,74	99,57	99,81	-	
2.2.	Angka ^{usia} harapan hidup	73,91	74,05	74,19	74,30	74,61	-	
2.3.	Prevalensi balita gizi buruk	0,21	0,11	0,42	0,25	0,21	3,60	Belum Tercapai
3.	Ketenagakerjaan							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja	54,53	54,49	56,18	53,58	57,11	-	
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	108,07	115,87	111,37	113,13	110,53	100	Melampaui
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	49	52	50	51	42	-	
1.1.3.	Rasio guru/murid	17	17	17	17	62	40	Melampaui
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	29	29	28	28	28	40	Belum Tercapai
1.2.	Pendidikan menengah:							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	117,54	133,5	118,19	123,19	104,44	100	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	23	27	23	23	20	-	
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	15	15	15	15	81	21	Belum Tercapai
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	39	38	37	35	36	21	Melampaui
1.3.	Fasilitas Pendidikan:							
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	269	271	272	274	274	275	Belum tercapai
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85	87	87	91	90	91	Belum Tercapai
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	320	320	320	320	320	-	
1.5.	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	Sesuai
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	Belum Tercapai
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,00	0,12	0,06	0,01	0,03	0,00	Belum Tercapai
1.6.	AngkaKelulusan:							
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99,99	100	100	100	100	Sesuai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui
		2011	2012	2013	2014	2015		
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99,97	99,99	99,99	100	100	Sesuai
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	99,98	100	100	100	Sesuai
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	94,60	97,91	96,93	98,24	100	Belum tercapai
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,27	94,89	98,44	100	96,01	100	Belum tercapai
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV	61,04	62,56	80,32	81,61	100	100	Sesuai
2.	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	80,8	53,2	59,0	60,0	71,0	1:100	
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	14,7	14,8	14,9	15,9	15,9	-	
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,070	0,069	0,100	0,116	0,116	-	
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	36,5	26,2	55,3	110,0	110,0	1 :40	Sesuai
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	78,2	73,5	73,3	61,72	61,74	1 :100	Sesuai
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60,3	54,9	80,6	72,99	72,99	80	Belum tercapai
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,09	92,0	95,7	99,72	99,73	90	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui
		2011	2012	2013	2014	2015		
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positive	8,49	43	45,2	51,8	51,8	85	Belum Tercapai
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	105,87	104,3	96,77	93,86	93,86	90	Melampaui
2.14.	Jumlah puskesmas	12	12	13	13	13	-	
2.15.	Jumlah pembantu puskesmas	53	54	54	54	54	-	
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	62,78 5%	84,21 8%	89,06 9%	91,39 2%	91,392 %	-	
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	0,057	0,0571	0,0567	0,0567	0,0567	-	
3.3.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	Belum Tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
3.4.	Panjang jalan dilalui Roda 4	565.981	628.744	628.744	628.744	628.744	-	
3.5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	355.353	529.517	560.018	574.626	574.626	-	
3.6.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	-	569.554	569.554	-	
3.7.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	-	569.554	569.554	-	
3.8.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	10.272,39	10.345,77	10.685,17	10.829,64	10.829,64	-	
4.	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	64.025,50	63.025,50	83.002,67	86.667,00	97.066,83	-	
4.2.	Rumahtangga pengguna listrik	100	100	100	100	100	100,00 %	
4.3.	Rumahtangga ber-Sanitasi	86.519	868,580	89.035	105.154	105.154	-	
4.4.	Rumah layak huni	85.636	85.636	85.636	85.636	85.636	-	
5.	Perencanaan Pembangunan							
5.6.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	sesuai
5.7.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	sesuai

[illegible]

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui >)
		2011	2012	2013	2014	2015		
7.9.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,000 50	0,000 50	0,000 50	0,000 50	0,0005 0	5	Belum Tercapai
7.10.	Penegakan hukum lingkungan	-	-	-	100%	100%	100%	Sesuai
8.	Pertanahan							
8.6.	Persentase luas lahan bersertifikat	-	67,60	73,75	80,16	80,16	100%	Belum Tercapai
8.7.	Penyelesaian kasus tanah Negara	18	22	24	28	28	14	Melampaui
8.8.	Penyelesaian izin lokasi	31,58 %	45,83 %	-	-	-	100%	Belum Tercapai
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
9.6.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	1	Belum Tercapai
9.7.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,70	0,86	0,90	0,92	0,92	1	Belum Tercapai
9.8.	Rasio pasangan berakte nikah	0,74	0,77	0,60	0,104	0,104	1	Belum Tercapai
9.9.	Kepemilikan KTP	99%	99%	0,98	99%	99%	100%	Belum Tercapai
9.10.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	700	800	900	920	920	1.000	Belum Tercapai
9.11.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	0,99	0,99	0,98	0,99	0,99	100%	Belum Tercapai
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
10.6.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	44,69 %	45,12 %	44,31 %	46,56 %	46,56 %	100%	Belum Tercapai
10.7.	Rasio KDRT	0,50	0,071	0,044	0,048	0,048	0	Belum Tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
10.8.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	6 Kasus	13 Kasus	12 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	0	Belum Tercapai
10.9.	Persentase Penanganan kasus KDRT yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
11.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,14	2,10	2,11	2,12	2,12	2,1	Sesuai
11.2.	Rasio akseptor KB	85,21	85,49	85,46	84,49	84,49	74,00	Melampaui
11.3.	Cakupan peserta KB aktif	82,21 % (65.88 5)	85,46 (%) (67.07 0)	85,57 % (67.1 45)	88,91 % (70.3 48)	88,91 % (70.34 8)	65 %	Melampaui
11.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	3577	3906	3787	2827	2827	-	
12.	Sosial							
12.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	9	9	9	9	9	-	
12.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	2.375	2.773	2.773	2.773	2.773	-	
12.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	297	372	682	782	782	-	
13.	Ketenagakerjaan							
13.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	2,36	1,63	2,20	3,28	3,28	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
13.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	51	54	54	62	62	-	
13.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	77,8	72,92	73,04	73,05	72,92	-	
13.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	1.251	1.396	1.312	1.128	765	-	
13.5.	Tingkat pengangguran terbuka	2,30	1,60	0,77	0,48	0,34	-	
13.6.	Keselamatan dan perlindungan	20	20	20	20	20		
13.7.	Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Badung	50	54	60	63	77		
14.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
14.1.	Persentase koperasi aktif	88,87 %	90%	78%	78,92 %	78,92 %	75%	Melampaui
14.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	14.754	15.862	17.496	18.700	18.700	-	
14.3.	Jumlah BPR/LKM	607	629	639	663	663	-	
14.4.	Usaha Mikro dan Kecil	839	912	338	786	786	-	
15.	Penanaman Modal							
15.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	689	777	785	1.459	1.459	-	
15.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3.173.814.437.239	7.180.810.126.088	6.147.499.450.989	2.618.136.988.815	2.618.136.988.815	19.032.403.640.000	Melampaui
15.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	4,33	8,73	21,67	6,49	6,49	4,86	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
15.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1,74	1,36	0,03	(1,47)	(1,47)	-	
16.	Kebudayaan							
16.1.	Penyelenggaraa n festival seni dan budaya	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Sesuai
16.2.	Sarana penyelenggaraa n seni dan budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai
16.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	23 Situs	-	-	-		
17.	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri							
17.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60	46	40	40	40	-	
17.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	2	3	3		
18.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
18.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,2	5,4	5,2	5,1	5,1	7	Belum Tercapai
18.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	33,01	33,18	33,47	31,71	31,18	1 orang / 1 RT	Sudah tercapai
18.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	378	378	378	378	378	-	
18.4.	Pertumbuhan ekonomi	7,07	7,64	6,82	6,97	6,27	-	
18.5.	Kemiskinan	3.726 RTS- PM	11.54 2RTS- PM	10.87 9 RTS- PM	9.783 RTS- PM	9.783 RTS- PM	0	Belum Tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
18.6.	Penegakan PERDA	105,2 3	113, 43	104, 88	106, 88	106, 88	100	Melampaui
18.7.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali sehari dalam sehari	Sesuai
18.8.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	60%	65%	70%	75%	80%	100%	Belum tercapai
18.9.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1922 orang	1922 orang	1922 orang	1922 orang	1922 orang	-	
18.10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	84.20 %	84.20 %	295.4 %	295.4 %	295.4 %	25%	Melampaui
18.11	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	84.20 %	84.20 %	295.4 %	295.4 %	295.4 %	25%	Melampaui
18.12	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	80.40 %	88.14 %	88.32 %	96.33 %	96.33 %	75%	Melampaui
18.13	Sistim Informasi Manajemen Pemda	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	Sesuai
18.14	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-	74,90	79,43	(62,51–81,25) untuk interval Baik	Memenuhi nilai interval baik
19.	Ketahanan Pangan							
19.1.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
19.2.	Ketersediaan pangan utama	86,98 %	85,89 %	80,47 %	89,51 %	89,51 %	-	
20.	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
20.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	62 Kelompok	Belum Tercapai
20.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3 kelompok-pok	3 kelompok-pok	3 kelompok-pok	3 kelompok-pok	3 kelompok-pok	606 Kelompok	Belum Tercapai
20.3.	Jumlah LSM (yang memiliki SKT)	7	7	7	5	2		
20.4.	LPM Berprestasi	1 kelompok	1 Kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 Kelompok	5 kelompok	Belum Tercapai
20.5.	PKK aktif	606 kelompok-pok	606 kelompok-pok	606 kelompok-pok	606 kelompok-pok	606 kelompok-pok	606 kelompok-pok	Sesuai
20.6.	Posyandu aktif	572 Kelompok - pok	572 Kelompok-pok	573 Kelompok-pok	573 Kelompok-pok	573 Kelompok-pok	573 Kelompok-pok	Sesuai
20.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	93,5%	79,4%	89,3%	93,9%	93,9%	70%	Melampaui
20.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	62 Kelompok-pok	62 Kelompok-pok	62 Kelompok-pok	62 Kelompok-pok	62 Kelompok-pok	62 Kelompok-pok	Sesuai
21.	Statistik							
21.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
21.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
22.	Kearsipan							
22.1.	Pengelolaan arsip secara baku	30 SKPD	30 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	135 SKPD	Belum tercapai
22.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	40 Orang	40 Orang	104 Orang	132 Orang	132 Orang	233 Orang	Terlampau
23.	Komunikasi dan Informatika							
23.1.	Jumlah jaringan komunikasi	6	6	6	6	6	6	Sesuai
23.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	227	227	211	211	211	211	Belum tercapai
23.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	22	22	22	22	22	22	Sesuai
23.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	10	10	10	10	10	10	Sesuai
23.5.	Web site milik pemerintah daerah				62	62	62	Sesuai
23.6.	Pameran/expo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	Sesuai
24.	Perpustakaan							
24.1.	Jumlah perpustakaan	336 Perpus takaan	336 Perpus takaan	336 Perpus takaan	440 Perpus takaan	440 Perpus takaan	Setiap sekolah, desa/Kel urahan memiliki perpusta kaan yang standar nasional perpusta kaan	Sebagian besar belum memenuhi standar perpustakaan
24.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	817 Orang	1.024 Orang	4.621 Orang	3.507 Orang	3.507 Orang	0,55 perjum- lah pendu- duk	Belum tercapai

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui >)
		2011	2012	2013	2014	2015		
24.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.671 Exp	3.461 Exp	9.105 Exp	6.359 Exp	6.359 Exp	10 persen dari jumlah koleksi 5 tahun terakhir	Masih perlu penambahan 10 % pertahun
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62,88	63,20	64,61	62,91	62,91	-	
1.2.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	12,91 M	13,43 M	14,21 M	-	-	-	
1.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	666,32 M	693,76 M	744,55 M	-	-	-	
1.4.	Cakupan bina kelompok petani	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	-	
1.5.	Jumlah Populasi ternak	1.661. 692	1.357. 001	1.366 .005	1.476 .035	1.476. 035	-	
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	137,54 ha	175,68 ha	37,62 ha	82,13 ha	82,13 ha	-	
2.2.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	40 Jt	40 Jt	40 Jt	-	-	-	
3.	Pariwisata							
3.1.	Kunjungan wisata	2.756. 579	2.892. 019	3.148 .443	3.681 .342	3.681. 342	Pada 2011 target 2.700.000 wisman, bertambah 150.000 wisman setiap tahunnya	Melampaui

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
3.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	5.948.208,92	7.186.658,79	8.807.667,89	10.815.279,76	10.815.279,76	-	
4.	Kelautan dan Perikanan							
4.1.	Produksi perikanan	38.386,30	48.563,50	49.099	6.619,60	6.619,60	15 Aspek Daya Saing daerah 94,63	Belum tercapai
4.2.	Konsumsi ikan	30,91	31,10	32,20	32,87	32,87	32,7	Melampaui
4.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	150	169	167	167	167	167	sesuai
4.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	4.467,9	4.570,3	4.748,4	6.094,7	6.094,7	16.523,2	Melampaui
5.	Perdagangan							
5.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,30%	10,30%	9,82%	8,68%	8,68%	-	
5.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	128.296.174,45	64.119.363,27	57.770.469,90	63.675.447,62	63.675.447,62	117.496.806,53	Belum Tercapai
6.	Perindustrian							
6.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,58%	4,36%	4,21%	4,01%	4,01%	-	
6.2.	Pertumbuhan Industri.	54	41	50	22	22	-	
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.	Pertanian							
1.1.	Nilai tukar petani	1,103	1	0,98	1,265	1,265	-	

NO	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2011	2012	2013	2014	2015		
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,77	2,04	2,70	1,36	1,36	1,36	Sesuai
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	372.7 50	1.162. 527	1.087. 571	1.279. 597	1.279. 597	1.279.5 97	sesuai
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandar a/ terminal per tahun	-	240.7 40 Orang	538.01 1 Orang	702.0 32 Orang	702.0 32 Orang	702.032 Orang	sesuai
2.	Lingkungan Hidup							
2.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	-	
	Fokus Iklim Berinvestasi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas	0,11%	0,09%	0,13%	0,10%	0,10%	-	
1.2.	Jumlah demo	-	1	2	5	1	-	

Sumber Data : PD Terkait

Berdasarkan Tabel 31 tentang hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Badung dapat dijelaskan sebagai berikut :

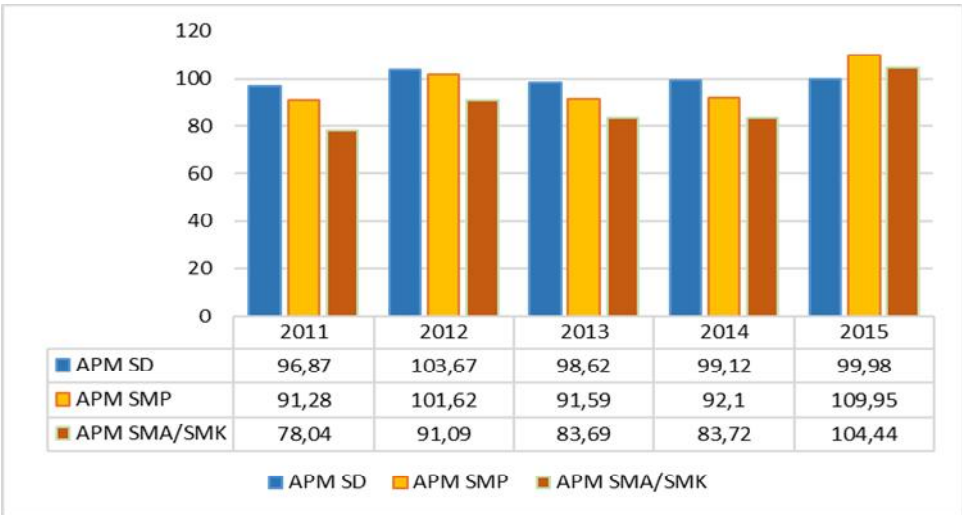
1.5.1 Fokus kesejahteraan rakyat

a) Pendidikan

Dari beberapa indikator pada fokus kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni jenjang SD dan angka partisipasi murni jenjang SMP telah mampu melampaui standar

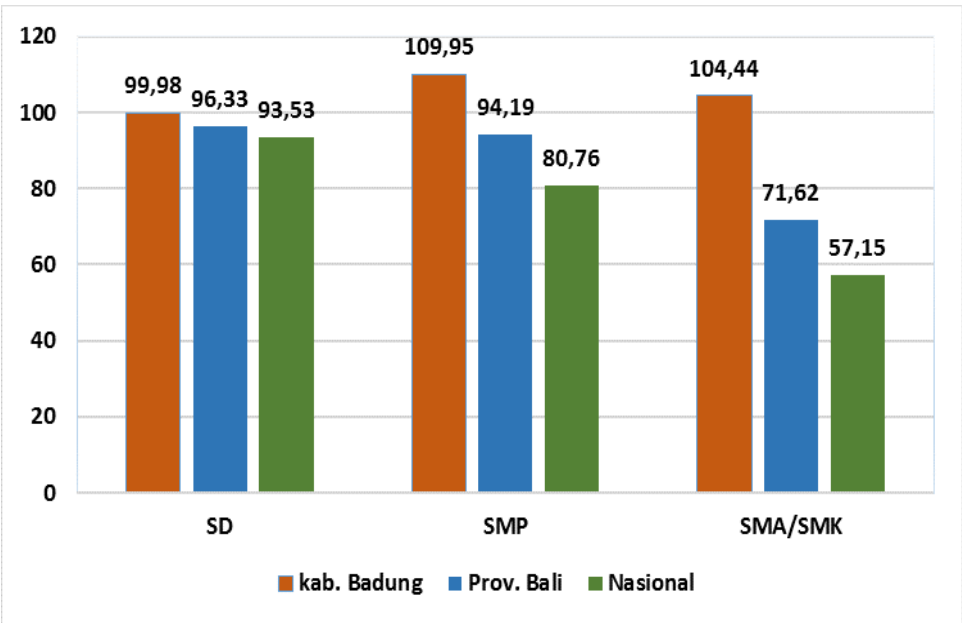
yang ditetapkan. Sedangkan indikator angka partisipasi sekolah dan angka pendidikan yang ditamatkan telah sesuai dengan standar. Namun terdapat pula beberapa indikator yang belum mampu memenuhi standar yaitu : angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK. Kondisi ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang cukup tinggi serta adanya motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah di luar wilayah Kabupaten Badung.

Grafik 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK
Kabupaten Badung
Tahun 2011 - 2015



Sumber Data: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Grafik 2.12
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni
SD, SMP dan SMA/SMK



Sumber Data: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Apabila dilihat dari posisi relatif capaian indikator angka partisipasi murni Kabupaten Badung dengan Propinsi Bali dan

Nasional maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Badung telah berada diatas capaian Propinsi Bali dan Nasional.

1.5.2 Fokus layanan wajib

a) Pendidikan dasar

Ditinjau dari indikator pendidikan dasar maka menunjukan bahwa terdapat indikator yang telah melampaui standar yaitu angka partisipasi sekolah dan terdapat beberapa indikator yang belum mampu memenuhi standar, antara lain : rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Badung, masih terdapat kekurangan guru sebagai tenaga pendidik.

b) Pendidikan menengah

Dalam penyediaan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Badung dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata telah mampu melampaui standar, namun rasio jumlah guru terhadap murid masih berada dibawah standar yang ditetapkan.

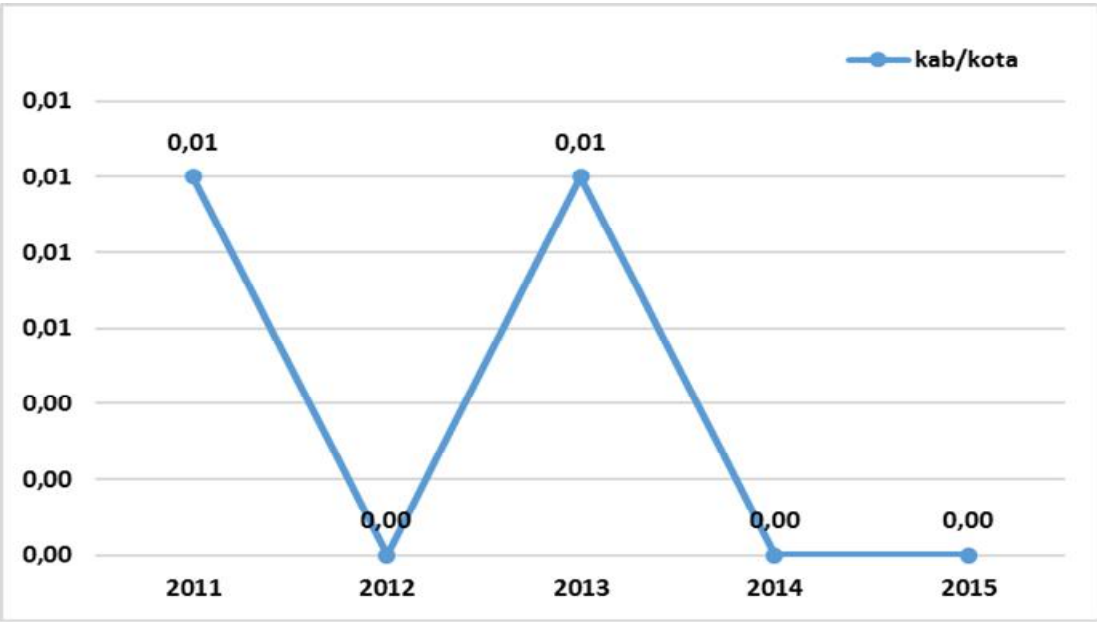
c) Fasilitas pendidikan

Selanjutnya dalam bidang penyediaan fasilitas pendidikan terdapat beberapa indikator yang telah mampu memenuhi standar antara lain : indikator sekolah SMP dengan kondisi bangunan baik, angka putus sekolah jenjang sekolah dasar, angka putus sekolah jenjang sekolah menengah pertama, angka kelulusan jenjang sekolah dasar, serta angka kelulusan jenjang sekolah menengah atas/kejuruan. Sedangkan untuk indikator yang belum memenuhi standar antara lain : angka putus sekolah jenjang SMA/K, angka kelulusan jenjang sekolah menengah pertama, angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama serta dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas/kejuruan, dan capaian jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D IV. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan dalam beberapa indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk/migrasi, serta keterbatasan kemampuan anak didik dalam mengikuti proses pendidikan serta terdapat tenaga pendidik/guru yang pada saat sekarang ini sedang dalam proses menempuh pendidikan untuk memenuhi kualifikasi S1/D IV.

Mengenai perkembangan angka putus sekolah pendidikan dasar jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengalami perkembangan yang cukup signifikan, walaupun untuk

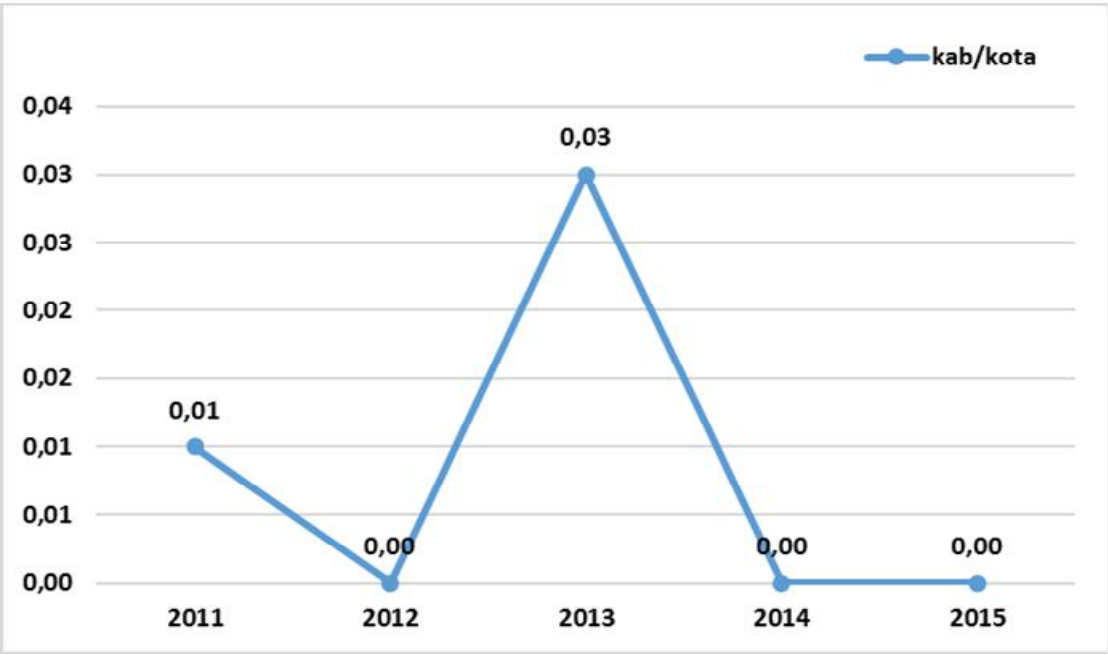
jenjang sekolah menengah pertama sempat mengalami kenaikan pada tahun 2013, namun kembali mengalami penurunan yang sangat drastic pada tahun 2014 dan tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun perkembangan angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.13
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)
Kabupaten Badung, Tahun 2010 - 2015



Sumber data : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)
Kabupaten Badung, Tahun 2011 - 2015



Sumber data : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, perkembangan indikator pendukung secara umum menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 telah terjadi kemajuan yang berarti. Hal ini antara lain terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di atas 6,5%. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dengan menggunakan tahun dasar

2011 mencapai 7,64% dan mengalami penurunan mencapai 6,82% pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 terjadi sedikit penguatan menjadi 6,82% dan pada tahun 2014 kembali menguat mencapai angka 6,98%. Selanjutnya di tahun 2015 kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 6,27%. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya diharapkan dapat menstimulasi pembukaan lapangan pekerjaan baru sehingga berimplikasi pada penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan.

Demikian pula bila dilihat dari indikator pendapatan per kapita, dalam periode yang sama selalu mengalami peningkatan dari rata-rata sebesar Rp 41,91 juta/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi Rp 66,97 juta/kapita/tahun pada tahun 2015. Peningkatan pendapatan per kapita ini, membantu daya beli masyarakat seiring dengan rata-rata laju inflasi di tingkat Provinsi yang cenderung terus bergerak naik dari 3,75% pada tahun 2011 hingga mencapai 8,43% pada tahun 2014. Laju inflasi yang tinggi ini tentunya mempengaruhi tingkat harga komoditi makanan maupun non makanan, yang amat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

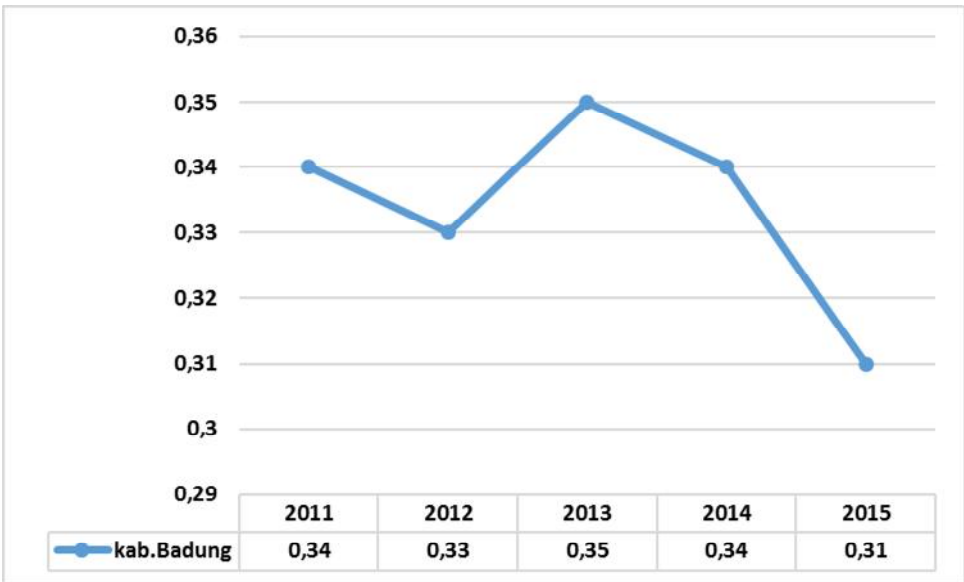
Tentunya menarik pula untuk menyandingkan perkembangan indikator ekonomi tersebut dengan indikator kemiskinan sehingga dapat diperoleh gambaran apakah laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rata-rata pendapatan per kapita dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Bila dilihat dari indikator kesenjangan, data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa gini rasio berkembang secara fluktuatif dari 0,3385 pada tahun 2011 lalu pada tahun 2012 turun menjadi 0,3258. Penurunan indeks gini ini tentunya bermakna positif karena menunjukkan penurunan tingkat kesenjangan. Sekalipun demikian, gini rasio Kabupaten Badung pada tahun 2013 menunjukkan terjadinya peningkatan menjadi 0,3468 dan selanjutnya pada tahun 2015 turun sedikit menjadi 0,3147.

Kondisi yang diharapkan tentunya indikator gini rasio dapat terus mengecil mendekati angka 0 karena menunjukkan menurunnya kesenjangan antar penduduk/pertumbuhan dinikmati secara merata. Dari perkembangan tersebut, kondisi kesenjangan yang rendah ditunjukkan dengan angka gini rasio yang berada pada kisaran 0 - 0,35 sehingga perkembangan angka gini rasio Kabupaten Badung selama kurun waktu tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan rendah.

Bila dilihat dari kondisi di tingkat Provinsi Bali maupun nasional, perkembangan gini rasio Kabupaten Badung pada tahun

2015 cenderung lebih baik, karena arah perkembanganya menurun. Sama halnya dengan gini rasio Provinsi Bali dan nasional yang pada tahun terakhir bergerak turun, yang selama empat tahun terakhir telah berada dalam tingkat ketimpangan sedang, dengan indeks lebih besar dari 0,35. Peningkatan gini rasio tersebut mengindikasikan masih terjadinya kesenjangan pendapatan masyarakat secara umum di tingkat Provinsi Bali dan nasional.

Grafik 2.15
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Badung Tahun 2011-2015



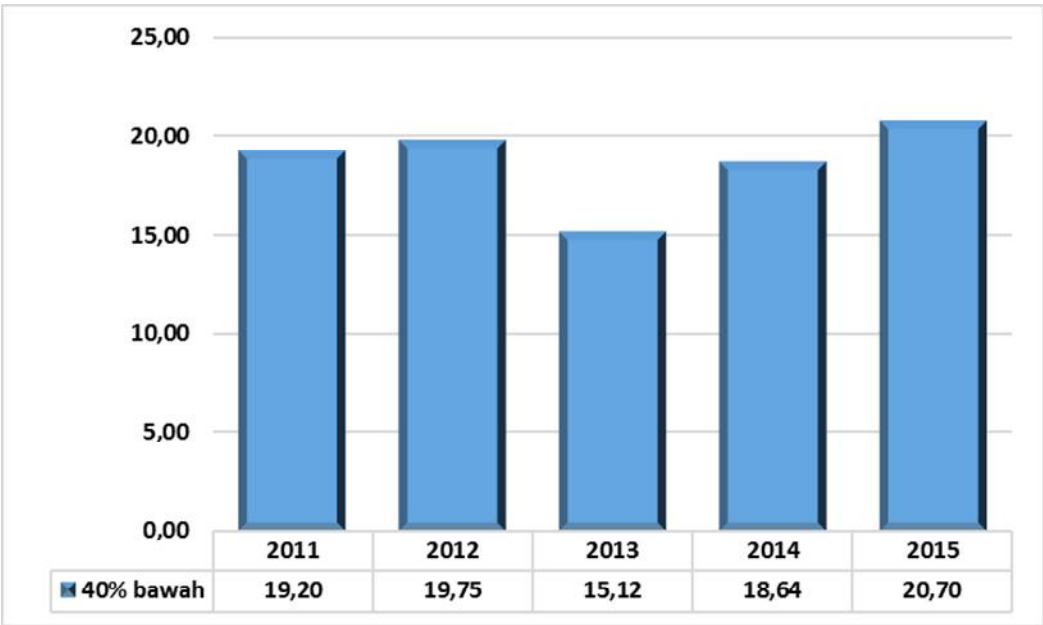
Sumber: BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya bila dilihat dari indikator pemerataan, sepanjang tahun 2011 hingga 2015 distribusi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah berfluktuasi dari kisaran 19% lebih pada tahun 2011 dan tahun 2012, selanjutnya turun menjadi 15,12% pada tahun 2013, meningkat kembali menjadi 18,64% pada tahun 2014 dan 20,70 % tahun 2015. Kondisi peningkatan indikator pemerataan pada tahun 2015 ini menggembirakan karena menunjukkan peningkatan distribusi pendapatan yang dinikmati 40% penduduk berpendapatan terendah. sekaligus menunjukkan berkurangnya tingkat kesenjangan antar lapisan masyarakat.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia bila 40% penduduk berpendapatan terendah menikmati lebih besar dari 17% pendapatan, maka pemerataan tergolong tinggi/ketimpangan distribusi pendapatan rendah. Kondisi Kabupaten Badung dalam empat tahun terakhir memang berfluktuasi, namun kisarannya masih tetap berada di atas 17%. Oleh sebab itu maka perlu diupayakan agar porsi distribusi pendapatan yang dinikmati oleh

40% terendah ini dapat tetap di atas 17% dan terus meningkat. Grafik distribusi pendapatan pada kelompok 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Badung tahun 2011 hingga 2015 adalah sebagai berikut.

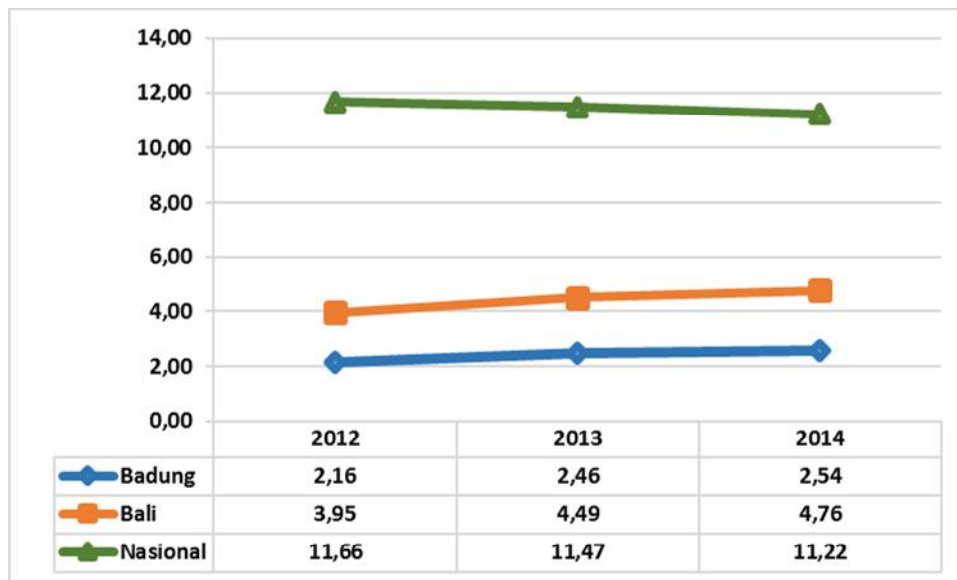
Grafik 2.16
Distribusi Pendapatan Pada Kelompok 40% Penduduk Berpendapatan Rendah di Kabupaten Badung Tahun 2011-2015



Di sisi lain bila dilihat dari proporsi penduduk yang tergolong miskin karena daya belinya berada di bawah garis kemiskinan, data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Badung hingga tahun 2014 berada pada tingkat 2,54%. Oleh sebab itu dari sudut pandang persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan pada tahun 2012 mencapai 97,84% (tingkat kemiskinan 2,16%) dan tahun 2013 naik menjadi 97,54% seiring dengan tingkat kemiskinan menjadi 2,46%. Pada tahun 2014 terjadi sedikit peningkatan sehingga tingkat kemiskinan menjadi 2,54% sehingga penduduk yang berada di atas garis kemiskinan mengalami penurunan menjadi 97,46%.

Bila tingkat kemiskinan Kabupaten Badung ini dibandingkan dengan kondisi di Provinsi Bali dan nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung telah berada jauh di bawah rata-rata Provinsi Bali dan nasional. Tingkat kemiskinan Provinsi Bali dari tahun 2012 hingga tahun 2014 masih berada pada kisaran 4%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2014 masih sebesar 11,22%. Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Badung, Bali dan nasional dari tahun 2012 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.17
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung, Bali dan Nasional
Tahun 2012-2014



Sumber : Dinas Sosial

Sejauh ini tidak terdapat standar persentase penduduk yang berada di atas garis kemiskinan yang dapat menjadi acuan. Namun tentunya kondisi yang diupayakan dan diharapkan dapat terwujud adalah semakin kecilnya tingkat kemiskinan sehingga hampir mencapai 100% penduduk berada di atas garis kemiskinan.

Dari berbagai indikator pendukung Aspek Kesejahteraan Masyarakat nampak bahwa secara umum kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung dalam kurun waktu 2012-2014 mengalami peningkatan, dan untuk memperbaiki capaian aspek kesejahteraan fokus perhatian perlu dilakukan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan per kapita agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. Oleh sebab itulah indikator gini rasio perlu diarahkan agar terus menurun mendekati nol dan distribusi pendapatan terhadap 40% penduduk berpendapatan terendah perlu terus diarahkan agar menguat, mencapai posisi yang lebih tinggi dari yang pernah dicapai pada tahun 2012 yaitu sebesar 19,75% (posisi tertinggi selama kurun waktu 2011-2015).

Dari beberapa indikator pada fokus kesejahteraan rakyat bidang pendidikan dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni jenjang SD dan angka partisipasi murni jenjang SMP telah mampu melampaui standar yang ditetapkan. Sedangkan indikator angka partisipasi sekolah dan angka pendidikan yang ditamatkan telah sesuai dengan standar. Namun terdapat pula beberapa indikator yang belum

mampu memenuhi standar yaitu : angka partisipasi murni jenjang SMA/SMK. Kondisi ini disebabkan karena mobilitas penduduk yang cukup tinggi serta adanya motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan menengah di luar wilayah Kabupaten Badung.

Untuk indikator pendidikan dasar terdapat indikator yang telah melampaui standar yaitu angka partisipasi sekolah dan ada pula indikator yang belum mampu memenuhi standar, antara lain : rasio guru terhadap murid dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Badung, masih terdapat kekurangan guru sebagai tenaga pendidik.

Dalam penyediaan layanan pendidikan menengah di Kabupaten Badung dapat diketahui bahwa indikator angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata telah mampu melampaui standar, namun rasio jumlah guru terhadap murid masih berada dibawah standar yang ditetapkan.

Selanjutnya dalam bidang penyediaan fasilitas pendidikan terdapat beberapa indikator yang telah mampu memenuhi standar antara lain : indikator sekolah SMP dengan kondisi bangunan baik, angka putus sekolah jenjang sekolah dasar, angka putus sekolah jenjang sekolah menengah pertama, angka kelulusan jenjang sekolah dasar, serta angka kelulusan jenjang sekolah menengah atas/kejuruan. Sedangkan untuk indikator yang belum memenuhi standar antara lain : angka putus sekolah jenjang SMA/K, angka kelulusan sjenjang sekolah menengah pertama, angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama serta dari sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas/kejuruan, dan capaian jumlah guru dengan kualifikasi pendidikan S1/D IV. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar yang ditentukan dalam beberapa indikator tersebut diatas dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk/migrasi, serta keterbatasan kemampuan anak didik dalam mengikuti proses pendidikan serta terdapat tenaga pendidik/guru yang pada saat sekarang ini sedang dalam proses menempuh pendidikan untuk memenuhi kualifikasi S1/D IV.

Pada Aspek Pelayanan Umum khususnya Kesehatan dari indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pencapaian kinerja dari tahun 2011 hingga tahun 2015 masih berfluktuasi, dan secara keseluruhan indikator tersebut masih belum mencapai standar yang ditetapkan.

Dari indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, capaian kinerja

Dinas Kesehatan dari tahun 2011 hingga 2015 secara keseluruhan telah melampaui standar. Sedangkan pada indikator cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dan indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin, pencapaian kinerja pada 4 (empat) indikator tersebut dari tahun 2011 hingga tahun 2015 telah sesuai standar (100%).

Dari indikator cakupan kunjungan bayi dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari tahun 2011 hingga tahun 2015 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Bila capaian indikator ini dibandingkan dengan standar yang ditetapkan maka pencapaiannya telah melampaui standar.

Pada Aspek Pelayanan Umum khususnya Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari indikator rata-rata jumlah anak per keluarga penurunan. Bila capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Bali dengan rata-rata jumlah anak sebesar 2,3, maka capaian indikator tersebut di Kabupaten Badung telah jauh lebih kecil yaitu 2,12. Bercermin dari perkembangan selama tahun 2011 hingga 2015 tersebut maka tantangan selanjutnya adalah menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga di tahun 2015 menjadi 2,0 sehingga dapat mendukung visi program KB Nasional untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.

Dari indikator ratio akseptor KB, capaian kinerja BKBKS dari tahun 2011 hingga 2015 secara keseluruhan juga telah menunjukkan terjadinya peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kesadaran pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Badung untuk menggunakan alat kontrasepsi yang meningkat. Sebagai gambaran, dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 72.123, yang telah menggunakan alat kontrasepsi mencapai 60.937 (84,49 %) dari standar yang ditentukan sebesar 74,00 % dari total PUS. Demikian pula dari indikator cakupan Peserta KB Aktif, peserta KB Aktif di Kabupaten Badung dari tahun 2011 hingga 2014 secara konsisten juga terus mengalami peningkatan, antara lain melalui pemakaian kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implant, vasektomi dan tubektomi, sehingga cakupan peserta peserta KB Aktif pada tahun 2014. Namun perlu diakui bahwa dari tingginya cakupan peserta KB Aktif tersebut, nampaknya masih didominasi perempuan, sehingga tantangan ke depan adalah mendorong partisipasi laki-laki dalam program KB. Perhatian ke depan juga

perlu diperkuat untuk mendorong pemakaian kontrasepsi jangka panjang (MKPJ) ini untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Sedangkan bila dilihat dari indikator jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1, perkembangan dari tahun 2011 hingga 2014 jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 di Kabupaten Badung terus mengalami penurunan, dalam artian kualitasnya keluarga yang ada telah mengalami penguatan. Namun mengingat dinamika faktor sosial ekonomi, politik dan lainnya yang amat kompleks dan tidak seluruhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, maka upaya perlindungan sosial kepada Rumah Tangga Sasaran juga perlu dilakukan untuk memastikan mereka tidak jatuh di bawah garis kemiskinan.

Dari dimensi sosial, di Kabupaten Badung terdapat sembilan panti asuhan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama dan juga memperoleh perhatian Pemerintah Kabupaten Badung. Sebagai daerah yang secara sosial ekonomi mengalami perkembangan yang pesat, berbagai masalah terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga dialami oleh Kabupaten Badung, utama keberadaan Pekerja Seks Komersil (PSK) serta gelandangan pengemis. Terhadap keberadaan PMKS yang jumlahnya sulit untuk diketahui secara pasti ini telah terus dilakukan penanganan, baik melalui pembinaan dan pemulangan ke daerah asalnya. Demikian pula terhadap PMKS lainnya terus dilakukan pembinaan dan bantuan sosial yang dapat mendukung peningkatan kualitas kehidupannya.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Badung tentunya berimplikasi terhadap berbagai masalah sosial bahkan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata di atas 6,5% telah mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menekan angka tingkat pengangguran terbuka dari kondisi awal sebesar 2,30% pada tahun 2011 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,34% pada tahun 2015. Fenomena yang menarik dicermati adalah bahwa penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka ini juga diikuti dengan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berturut-turut dari 76,38% pada tahun 2011 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 71,41% pada tahun 2014 dan kembali naik menjadi 72,92% tahun 2015. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara

ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kondisi TPAK Kabupaten Badung yang terus menurun selama kurun waktu 2011-2014 dan selanjutnya kembali naik tahun 2015.

Untuk memperluas peningkatan penempatan para pencari kerja maka Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung bersinergi dengan perusahaan secara berkelanjutan juga melaksanakan layanan bursa kerja. Dalam pelaksanaannya hingga tahun 2014 sebanyak 5000 lebih pencari kerja telah berhasil ditempatkan sehingga diharapkan dapat terus menekan angka pengangguran. Selanjutnya dari aspek hubungan industrial, berbagai permasalahan menjadi pemicu terjadinya sengketa antara pengusaha-pekerja. Data tahun 2011 hingga 2014 nampaknya menunjukkan gejala peningkatan jumlah sengketa per tahunnya, dari 51 per tahun pada tahun 2011 menjadi 62 per tahun pada tahun 2014. Berbagai perselisihan tersebut terjadinya dengan derajat yang beragam dari ringan. Hal ini perlu menjadi perhatian ke depan agar dapat ditekan dan derajatnya juga tetap berada pada derajat yang ringan dan tidak berimplikasi pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dijelaskan bahwa pada Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah diantaranya Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK seluruhnya belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijelaskan bahwa pada Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah diantaranya Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan Rasio KDRT belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan sedangkan pada aspek Persentase Penanganan Kasus KDRT yang terselesaikan sudah mencapai standar yang telah ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dapat

dijelaskan bahwa pada aspek Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) telah melampaui dari standar yang telah ditetapkan.

Untuk Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD dan PEMDES) dapat dijelaskan bahwa pada cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, PKK aktif, Posyandu aktif, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat telah mencapai standar yang telah ditetapkan dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat telah melampaui standar yang telah ditetapkan sedangkan pada aspek kemiskinan, Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dan LPM Berprestasi belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dapat dijelaskan bahwa pada aspek Pengelolaan arsip secara baku belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan sedangkan pada aspek Peningkatan SDM pengelola kearsipan telah melampaui sebanyak 83 orang dari standar yang ditetapkan yaitu sebanyak 233 orang.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dapat dijelaskan bahwa pada aspek jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah seluruhnya belum tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam menjalankan Bidang Ketahanan Pangan menggunakan satu regulasi ketahanan pangan yang telah diatur berdasarkan permentan No 65 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Ketahanan Pangan berupa ketersediaan bahan pangan utama telah mampu dipenuhi oleh Pemkab Badung dengan rasio kecukupan 80,47% - 89,51%.

Produktivitas padi memiliki tren yang cukup fluktuatif, terutama di tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun 2014 dari 64,62 Kw/ha menjadi 63,12 kw/ha , hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2014 adanya tunda tanam terkait musim kering yang berkepanjangan dan adanya rehabilitasi jaringan irigasi

usaha tani di beberapa subak abian, di tahun 2015 produktivitas padi sedikit mengalami peningkatan menjadi 63,18 Kw/ha.

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB sebesar 12,913 Milyar tahun 2011 dan tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan tren yang semakin meningkat. Untuk cakupan bina kelompok tani setiap tahunnya telah dilaksanakan pembinaan kelompok tani sebanyak 9 kelompok tani yang di harapkan dapat meningkatkan ketrampilan teknis kelompok tani tersebut.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan luas 137, 545 Ha pada tahun 2011 seluas 175,68 ha tahun 2012 seluas 37,625 ha tahun 2013 dan tahun 2014 seluas 82,13 ha. Tren penanaman sangat fluktuatif hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan permintaan masyarakat pemilik lahan untuk melaksanakan peningkatan kualitas tanam tanaman jenis tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis.

Untuk kerusakan kawasan hutan tidak terjadi kerusakan dalam kawasan hutan. Kondisi Hutan di Kabupaten Badung relatif aman sehingga penebangan liar, perusakan hutan tidak terjadi. Kontribusi sektor kehutanan yang dilaporkan masyarakat secara ekonomi dalam PDRB mencapai rata-rata 40 juta rupiah setiap tahunnya.

Produksi perikanan di Kabupaten Badung berasal dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Secara keseluruhan realisasi produksi perikanan dari tahun 2011 – 2014 sebesar 142.669,3 ton. Jika dibandingkan dengan target produksi perikanan dari tahun 2011-2014 yaitu sebesar 152.494,63 ton maka realisasinya baru mencapai 93,56 %. Belum tercapainya target produksi perikanan disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi budidaya rumput laut yang ada di Kecamatan Kuta Selatan akibat adanya pergeseran peruntukan di Desa Kutuh kecamatan Kuta Selatan yang sebelumnya merupakan sentra pengembangan rumput laut berubah menjadi pengembangan pariwisata. Hal ini menyebabkan banyak pembudidaya yang beralih mata pencaharian dari usaha budidaya rumput laut ke bidang usaha pariwisata sehingga berdampak pada pengurangan jumlah kelompok pembudidaya rumput laut yang semula berjumlah 5 kelompok menjadi 1 kelompok. Ini secara keseluruhan sangat berpengaruh terhadap tingkat produksi perikanan karena produksi rumput laut memberikan kontribusi paling besar terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung.

Konsumsi ikan secara keseluruhan dari tahun 2011-2014 setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 dari target tingkat konsumsi ikan sebesar 32,40 kg/kapita/tahun sudah terealisasi sebesar 32,87 kg/kapita/tahun atau sebesar 100,93%. Peningkatan konsumsi ikan ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kandungan gizi dan manfaat dari ikan terhadap kesehatan.

Pada bidang kelautan dan perikanan terdapat beberapa kelompok binaan sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan yaitu kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan dan rumput laut, kelompok pengolah, kelompok pemasar dan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Pembinaan terhadap kelompok dilakukan secara kontinyu setiap tahun baik itu yang dilakukan oleh bidang teknis di kabupaten maupun oleh petugas penyuluh kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Badung. Dari target jumlah kelompok yang dibina sebanyak 167 kelompok sudah dapat terlaksana 100 %.

Produksi perikanan kelompok nelayan adalah lebih dominan kepada produksi perikanan tangkap di laut yang merupakan hasil produksi tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan yang ada di sepnajang wilayah pesisir kabupaten Badung yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara dan Mengwi. Produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2011 – 2014 setiap tahun mengalami peningkatan. Dari target produksi sebesar 16.523,2 ton sudah mencapai realisasi sebesar 19.881,8 ton atau 120,33 % dari target yang ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari hasil berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan baik dalam bentuk pembinaan, bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Badung.

Urusan pilihan pada bidang pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dimana salah satu indikator keberhasilan kepariwisataan di Kabupaten Badung ditunjukkan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Badung, dalam hal ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung serta jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 34, berdasarkan tabel tersebut kita melihat bahwa adanya peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara serta jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata. Tentunya peranan pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai tiga pilar pembangunan , yang mampu memberikan kenyamanan

dan keamanan kepada wisatawan sehingga Kabupaten Badung tetap menjadi primadona destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan Ke Kabupaten Badung tentunya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) , yang dapat dilihat dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Badung, yang mengalami peningkatan secara signifikan pula.

Jumlah arus penumpang angkutan umum adalah jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk / keluar Daerah . Dari data tabel tersebut terlihat jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2011 - sebanyak 372.750 orang, tahun 2012 sebanyak 1.162.527 orang, tahun 2013 sebanyak 1.087.571 orang, tahun 2014 sebanyak 1.279.597 orang, dan jumlah kenaikan yang paling signifikan adalah pada tahun 2012, hal ini disebabkan karena pada bulan juni 2012 terminal Mengwi sudah mulai beroperasi meskipun belum optimal.

Rasio ijin trayek adalah Jumlah ijin Trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk dikali 100 . Sesuai dengan Pasal 2, Ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Badung dalam disebutkan :

1. Trayek Mengwi - Mambal - Jagapati
2. Trayek Mengwi - Darmasabha - Mambal - Penarungan
3. Trayek Mengwi - Puspem - Dalung - Canggu
4. Trayek Mengwi - Blahkiuh - Sangeh
5. Trayek Munggu - Kerobokan - Sentral Parkir
6. Trayek Sentral Parkir - Pantai Kuta
7. Trayek Jimbaran - GWK - Tanjung Benoa
8. Trayek Tuban - GWK Uluwatu

Dari 8 (delapan) trayek yang ada baru terisi 3 (tiga) trayek, sedangkan lagi 5 (lima) trayek lainnya belum terisi, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya dunia usaha untuk menanam modalnya (investasi) di Kabupaten Badung.

Jumlah wajib uji angkutan umum adalah jumlah kendaraan yang bersifat umum, baik untuk angkutan orang maupun angkutan barang yang wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga setiap unit kendaraan umum wajib uji melaksanakan pengujian kendaraan dua kali dalam setahun. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2011 s.d 2014 terdapat peningkatan kendaraan

bermotor wajib uji yang bersifat umum, khususnya kendaraan umum jenis angkutan sewa dan pariwisata. Hal ini merupakan suatu peningkatan yang bersifat positif. Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dalam upaya menjamin keselamatan pemakai kendaraan itu sendiri maupun pelaku lalu lintas lainnya, maka dengan demikian merupakan kewajiban bagi pemilik angkutan umum untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Prasarana pendukung sistem transportasi di Kabupaten Badung disamping prasarana jalan juga terdapat beberapa terminal yang digunakan untuk mengatur keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan barang. Terminal yang terdapat di Kabupaten Badung pada tahun 2011 hanya memiliki 2 Terminal tipe C yaitu : terminal Dalung yang berlokasi pada akses masuk Perumahan Dalung Permai dan sentral Parkir yang berlokasi di Kecamatan Kuta . Sedangkan mulai bulan Juni 2012 Kabupaten Badung memiliki 3 terminal yaitu 2 terminal tipe C dan 1 Terminal tipe A. Terminal Tipe A Mengwi yang berlokasi di Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi. Terminal Tipe A Mengwi melayani angkutan penumpang Antar Propinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan kota, angkutan pedesaan dan angkutan pariwisata.

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada Tahun 2011 s/d 2013 adalah 46 menit. Sedangkan mulai tahun 2014, dilakukan perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan memperhitungkan waktu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor mulai dari awal penerimaan berkas sampai berkas dikembalikan kepada pemilik kendaraan sehingga diperoleh waktu pengujian yang baru yaitu selama 48 menit.

2.5 Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu SPM bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat

dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Adapun jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan :
 - a. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - b. Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Bidang Kesehatan :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - j. Upaya Kesehatan Jiwa pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*).
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah kabupaten/kota.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

6. Bidang Sosial

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Badung diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan maka analisis kinerja keuangan daerah dilakukan terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu penerimaan daerah yang terdiri pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah menggambarkan kapasitas kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah serta pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kapasitas kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat dari posisi keuangan daerah yaitu dari neraca daerah. Neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui cerminan posisi aset daerah, kewajiban daerah sampai dengan ekuitas daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Badung

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, APBD Kabupaten Badung terdiri atas: (a).Pendapatan Daerah; (b).Belanja Daerah; (c). Pembiayaan Daerah, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah disajikan secara series menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2011-2015 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	PENDAPATAN	1.851.283.062.358	2.609.068.617.374	2.954.602.744.485	3.444.267.368.967	3.735.129.565.341	19,8
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.406.835.182.181	1.872.346.181.796	2.279.053.275.955	2.722.625.562.621	3.001.464.263.014	21,1
1.1.1.	Pajak Daerah	1.281.695.594.849	1.685.559.515.318	2.010.554.251.067	2.339.332.864.903	2.598.718.129.654	19,6
1.1.2.	Retribusi Daerah	35.837.593.226	68.946.271.044	90.414.452.112	116.502.660.909	96.040.159.072	33,7
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	36.092.597.140	41.756.733.380	71.350.739.922	125.339.002.878	142.995.660.239	44,1
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	53.209.396.967	76.083.662.054	106.733.832.854	141.451.033.930	163.710.314.049	32,9
1.2.	Dana Perimbangan	280.705.583.161	515.654.159.310	429.797.446.192	381.713.595.700	332.251.562.433	10,7
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	123.435.032.161	160.747.933.310	56.611.263.192	56.346.740.700	44.947.526.433	-13,8
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	157.052.376.000	353.067.906.000	372.625.383.000	324.815.695.000	286.763.106.000	26,5
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	218.175.000	1.838.320.000	560.800.000	551.160.000	540.930.000	6,7
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	163.742.297.016	221.068.276.268	245.752.022.338	339.928.210.646	401.413.739.894	25,6
1.3.1	Hibah	89.625.000	-	-	54.625.825.956	75.091.364.406	9,4
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.903.646.274	122.552.870.720	102.342.371.338	130.253.477.690	162.799.634.488	33,4
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	84.655.996.760	76.432.769.000	113.491.184.000	131.532.528.000	163.317.741.000	19,7
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.015.040.000	10.583.569.648	960.285.000	205.000.000	205.000.000	-17,4
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	7.125.000	-	-	-	-	-25,0
1.3.7	Dana Jamkesmas	69.930.500	-	-	-	-	-25,0
1.3.8	Dana Kompensasi Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) Konsolidasi Tanah (LC)	2.758.963.600	-	-	-	-	-25,0

1.3.9	Dana Kapitasi Askes PNS	681.492.982	-	-	-	-	-25,0
1.3.10	Dana Jampersal	61.410.000	-	-	-	-	-25,0
1.3.11	Dana JKBM	1.606.290.900	-	-	-	-	-25,0
1.3.12	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	9.892.776.000	1.606.290.900	-	-	-	-45,9
1.3.13	Dana Insentif Daerah	-	9.892.776.000	28.958.182.000	23.311.379.000	-	18,3
1.3.14	Pengembalian Kelebihan JKBM	-	-	-	-	-	-

Sumber : 1. Badan Pendapatan / Pasedahan Agung
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat yaitu di periode tahun 2011 sebesar Rp.1.851.283.062.358 sampai dengan periode tahun 2015 sebesar Rp.3.735.129.565.341 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 19,8%. Pendapatan Asli Daerah rata-rata pertahun cenderung meningkat dari periode tahun 2011 – 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,1%, Secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan sebesar 44,1%, Retribusi Daerah sebesar 33,7%, sedangkan pertumbuhan yang terendah adalah Pajak daerah sebesar 19,6%.

Pendapatan Kabupaten Badung berasal dari dana perimbangan yang didapat dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dana Perimbangan Kabupaten Badung pada periode 2011 – 2015 rata-rata tumbuh sebesar 10,7%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Umum sebesar 26,5% serta yang mengalami penurunan adalah Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak dengan penurunan sebesar 13,8%.

Selain dari PAD dan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan Kabupaten Badung berasal dari Lain – Lain Pendapatan yang Sah. Lain – Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Badung pada periode 2011 – 2015 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 25,6%, sumber terbesar diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemda Lainnya sebesar 33,4% dan pertumbuhan terendah Dana Hibah khusus sebesar 9,4%.

B. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar peningkatan belanja. Komponen belanja terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pada tabel berikut disajikan perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Badung tahun 2010-2015, sebagaimana tertuang pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2011 s.d 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	BELANJA	1.572.210.487.617	2.334.080.297.426	2.755.459.722.078	3.276.164.109.817	3.446.634.314.570	22,7
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.059.192.474.981	1.268.529.842.646	1.488.224.176.921	1.654.384.787.120	1.909.366.328.158	15,9
1	Belanja Pegawai	657.803.294.154	767.437.703.476	881.464.639.348	982.021.268.535	1.035.507.051.033	12,1
3	Belanja Subsidi	540.000.000	910.000.000	2.090.000.000	3.837.400.000	5.393.600.000	80,6
4	Belanja Hibah	43.186.758.790	44.320.460.845	95.313.468.711	93.604.909.624	144.802.581.385	42,6
5	Belanja Bantuan Sosial	32.012.616.500	48.119.962.000	52.141.750.000	33.549.092.500	26.839.800.000	0,8
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	126.170.160.128	191.156.530.025	212.227.730.488	272.387.605.145	332.221.196.731	28,2
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	198.646.101.309	216.289.002.899	234.132.968.576	268.781.366.026	364.602.099.009	16,9
8	Belanja Tidak Terduga	833.544.100	296.183.400	10.853.619.798	203.145.290	-	825,5
II	BELANJA LANGSUNG	513.018.012.636	1.065.550.454.780	1.267.235.545.157	1.621.779.322.697	1.537.267.986.412	37,3
1	Belanja Pegawai	51.806.055.584	63.448.806.722	75.694.057.565	63.427.200.338	59.742.497.212	4,9
2	Belanja Barang dan Jasa	261.507.743.379	374.395.947.727	424.829.297.562	609.282.785.114	554.753.160.856	22,8
3	Belanja Modal	199.704.213.673	627.705.700.331	766.712.190.030	949.069.337.245	922.772.328.344	64,4

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Memperhatikan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode 2011 - 2015 bahwa Belanja daerah Kabupaten Badung memiliki pertumbuhan rata rata sebesar 22,7%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dari Rp.1.059.192.474.981 di tahun 2011 menjadi Rp.1.909.366.328.158 di tahun 2015, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,9%. Sedangkan Belanja Langsung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yakni Rp.513.018.012.636 pada tahun 2011 menjadi Rp.1.537.267.986.412 tahun 2015, dengan rata-rata kenaikan Belanja Langsung sebesar 37,3%.

C. Pembiayaan

Komponen pembiayaan terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan berikut menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2010 s.d 2015

No	URAIAN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	RATA RATA KENAIKAN (%)
	PEMBIAYAAN DAERAH						
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	497.292.438.596	759.887.764.420	902.998.736.991	893.884.086.627	925.326.073.071	18,5
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	97.292.438.596	757.401.951.605	901.461.570.467	888.147.920.029	924.161.610.511	18,5
2	Penarikan kembali pokok dana bergulir	-	2.485.812.815	1.537.166.524	5.736.166.598	1.164.462.560	63,8
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.447.400.000	145.200.000.000	214.000.000.000	154.000.000.000	300.000.000.000	200,3
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.500.000.000	145.200.000.000	214.000.000.000	154.000.000.000	300.000.000.000	223,5
2	Penguatan Modal Dana Bergulir	1.947.400.000	-	-	-	-	-25,0

No	URAIAN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	RATA RATA KENAIKAN (%)
	PEMBIAYAAN NETTO	478.845.038.596	614.687.764.420	688.998.736.991	739.884.086.627	625.326.073.071	8,1
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN	757.401.951.605	901.461.570.467	888.201.985.529	923.705.602.144	913.821.323.842	5,1

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Memperhatikan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa realisasi Pembiayaan Netto Kabupaten Badung mengalami kenaikan rata rata sebesar 8,1%, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 18,5%, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran bahwa realisasi Pengeluaran Pembiayaan juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yakni Rp.18.447.400.000 di tahun 2011 menjadi Rp.300.000.000.000 di tahun 2015, dengan rata-rata kenaikan sebesar 200,3%. Pertumbuhan yang signifikan tersebut berasal dari penyertaan modal (Investasi) yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 223,5%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan mengalami kenaikan dari Rp.757.401.951.605 di tahun 2011 menjadi Rp.913.821.323.842 di tahun 2015 dengan rata-rata kenaikan SILPA Tahun berjalan sebesar 5,1%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan kondisi keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah Kabupaten Badung, serta Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Badung dalam kurun waktu tahun 2011-2014 yang disajikan pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015

URAIAN	TAHUN					RATA- RATA PERTUM- BUHAN
	2011	2012	2013	2014	2015	%
ASET	4.441.186.555.640	5.427.956.479.093	6.867.820.899.396	8.670.320.796.798	26.143.991.789.511	69,1
ASET LANCAR	952.986.034.533	1.129.953.342.662	1.346.234.012.239	1.539.266.057.557	1.255.354.452.858	8,4
Kas	757.786.742.691	901.573.078.216	888.341.033.175	923.958.007.980	913.821.323.842	5,1
Kas di Kas Daerah	753.880.735.478	894.498.493.069	876.201.606.486	896.870.005.924	877.683.351.481	4,2
Kas di Bendahara Penerimaan	164.947.007	77.127.207	60.207.500	86.960.602	16.471.284	-28,0
Kas di Bendaha Pengeluaran	2.010.728.440	15.434.978	122.995.051	789.825.868	525.727	260,0
Kas di BLUD	1.730.331.766	6.982.022.962	11.956.224.138	21.890.602.445	29.195.242.039	122,8
Kas Lainnya	-	-	-	-	7.108.230.573	25,0
Piutang Pendapatan	-	-	-	-	592.058.661.645	25,0
Piutang Pajak	116.861.878.920	127.497.039.012	350.206.481.355	419.414.081.906	-	50,9
Piutang Retribusi	3.052.957.577	3.826.288.179	9.098.536.545	19.155.272.703	-	68,4
Piutang Bagi Hasil Provinsi	19.831.752.282	89.828.056	19.334.646.192	24.113.133.885	-	5337,3
Piutang Denda/Bunga Pajak Hotel, Restoran, Hiburan	59.501.443.930	99.770.602.000	86.677.237.969	103.245.269.884	-	-6,6
Piutang Sanksi Administrasi	-	1.606.263.216	2.271.867.668	2.616.424.485	-	-10,8
Biaya dibayar dimuka	1.717.724.513	356.667.034	459.045.522	566.648.403	-	-31,8
Piutang JKBM	45.701.500	4.235.012.058	1.595.107.526	-	-	2251,1
Piutang lain - lain	2.680.000	459.551	4.591.779	-	-	179,1
Penyisihan Piutang	-	-	-	-	(293.668.265.153)	-25,0
Penyisihan Piutang Pajak	(8.996.292.041)	(9.014.889.208)	(20.380.696.520)	(70.814.733.737)	-	68,4
Penyisihan Piutang Bunga Pajak	(3.881.857.337)	(7.437.310.704)	(7.059.545.712)	(37.994.825.278)	-	106,2
Penyisihan Piutang Sanksi Administrasi	-	(80.313.161)	(113.593.383)	(222.918.047)	-	9,4
Piutang Deviden PT BPD Bali	-	-	-	129.756.129.682	-	-
Piutang Deviden Jamkrida Bali Mandfara	-	-	-	5.712.479	-	-
Piutang Sisa Hasil Usaha KPN Bina Sejahtera	-	-	-	68.776.697	-	-
Piutang Lain-lain	-	-	4.591.779	18.283.724	-	49,5
Piutang Sewa atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	121.590.515	-	-

URAIAN	TAHUN					RATA- RATA PERTUM- BUHAN
	2011	2012	2013	2014	2015	%
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	96.340.384	25,0
Persediaan	7.063.302.498	7.530.618.412	15.799.300.122	25.259.202.275	42.863.894.878	61,5
INVESTASI JANGKA PANJANG	365.614.050.059	527.178.005.241	1.024.284.191.780	1.240.381.224.393	1.614.131.413.890	47,4
Invesatasi Dana Bergulir	33.892.570.000	31.406.757.185	29.869.590.661	24.133.424.063	22.968.961.503	-9,1
Investasi Non Permanen lainnya	9.337.558.220	9.337.558.220	9.337.558.220	9.337.558.220	9.337.558.220	-
Investasi Non Permanen lainnya Diragukan Tertagih	(6.144.222.467)	(6.144.222.467)	(6.144.222.467)	(8.379.222.467)	-8.379.222.467	9,1
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	37.085.905.753	34.600.092.938	33.062.926.414	25.091.759.816	23.927.297.256	-10,0
Invesatasi Jangka Panjang Permanen	328.528.144.306	492.577.912.303	991.221.265.366	1.215.289.464.577	1.590.204.116.634	51,2
Penyertaan Modal Pemerintah daerah	328.528.144.306	492.577.912.303	991.221.265.366	1.215.289.464.577	1.590.204.116.634	51,2
ASET TETAP	3.069.082.012.484	3.685.666.164.923	4.413.348.155.707	5.805.955.412.325	23.159.506.392.408	92,6
Tanah	661.834.567.611	657.679.167.611	654.123.371.611	1.169.896.499.611	19.445.502.558.846	410,0
Peralatan dan Mesin	229.374.702.025	315.155.931.874	409.425.979.659	498.051.787.638	681.149.107.517	31,4
Gedung dan Bangunan	1.245.152.376.036	1.390.782.986.191	1.533.277.353.541	1.798.326.515.796	2.069.137.417.474	13,6
Jalan, Irigasi dan Jaringan	850.980.004.619	1.281.458.804.888	1.764.723.882.896	2.211.217.421.496	2.749.115.050.667	34,5
Aset Tetap Lainnya	33.306.885.831	36.764.862.393	41.931.876.291	43.543.738.903	50.766.726.436	11,2
Konstruksi dalam Pengerjaan	48.433.476.363	3.824.411.966	9.865.691.708	84.919.448.881	6.132.168.830	183,5
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-1.842.296.637.362	-25,0
ASET LAINNYA	53.504.458.565	85.158.966.268	83.954.539.671	84.718.102.523	114.999.530.355	23,6
Aset Tak Berwujud	1.435.139.625	3.155.343.125	4.339.751.675	6.688.685.475	4.976.042.489	46,5
Aset Lain-lain	52.069.318.940	82.003.623.143	79.614.787.996	78.029.417.048	110.023.487.866	23,4
Jumlah Aset Lainnya	53.504.458.565	85.158.966.268	83.954.539.671	84.718.102.523	114.999.530.355	23,6
JUMLAH AKTIVA	4.441.186.555.640	5.427.956.479.093	6.867.820.899.396	8.670.320.796.798	26.143.991.789.511	69,1
KEWAJIBAN	9.097.551.425	29.799.205.895	17.048.429.700	72.677.898.157	90.917.221.563	134,0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.097.551.425	29.799.205.895	17.048.429.700	72.677.898.157	90.917.221.563	134,0
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	219.844.079	34.380.542	139.050.646	145.008.103	92.963.062	47,1
Pendapatan diterima dimuka	-	1.385.683.308	978.044.588	-	8.082.028.025	258,0

URAIAN	TAHUN					RATA- RATA PERTUM- BUHAN
	2011	2012	2013	2014	2015	%
Utang Beban	-	-	-	-	82.742.230.476	25,0
Utang jangka Pendek lainnya	8.877.707.346	28.379.142.045	16.909.379.054	72.532.890.054	-	102,1
EKUITAS DANA	4.432.089.004.216	5.398.157.273.198	6.850.772.469.696	8.597.642.898.641	26.451.770.121.738	70,5
EKUITAS DANA LANCAR	943.888.483.108	1.100.154.136.767	1.329.185.582.539	1.466.588.159.400	1.461.608.017.188	11,8
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	757.401.951.605	901.461.570.467	888.201.982.529	923.705.992.377	913.946.840.743	5,1
Cadangan Piutang	188.135.989.344	220.849.646.034	442.093.678.941	590.048.847.302	590.048.847.302	37,8
Cadangan Persediaan	7.063.302.498	7.530.618.412	15.799.300.122	25.259.202.275	31.512.848.591	50,3
Dana yang Harus Disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(8.877.707.346)	(29.764.825.353)	(16.909.379.054)	(72.532.890.054)	-73.921.909.345	130,7
Pendapatan yang ditangguhkan	164.947.007	77.127.207	-	-	21.389.898	-13,3
EKUITAS DANA INVESTASI	3.488.200.521.108	4.298.003.136.431	5.521.586.887.157	7.131.054.739.241	24.990.162.104.550	82,8
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	365.614.050.059	527.178.005.241	1.024.284.191.780	1.240.381.224.393	1.240.381.224.393	39,9
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.069.082.012.484	3.685.666.164.923	4.413.348.155.707	5.805.955.412.325	23.665.551.156.434	94,7
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	53.504.458.565	85.158.966.268	83.954.539.671	84.718.102.523	84.220.523.723	14,5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	4.441.186.555.641	5.427.956.479.093	6.867.820.899.396	8.670.320.796.798	26.542.687.343.302	70,3

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

A. Aset

Secara keseluruhan, aset Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2011-2015 mengalami kenaikan. Aset lancar pemerintah Kabupaten Badung memiliki rata-rata pertumbuhan pada periode 2011 - 2015 sebesar 8,4%. Kas memiliki rata-rata pertumbuhan pada periode 2011 - 2015 sebesar 5,1%. Investasi Jangka Panjang pemerintah memiliki rata-rata pertumbuhan pada periode 2011 - 2015 sebesar 47,4%. Jumlah Aset Tetap Kabupaten Badung selama tahun 2011-2015 memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 92,6%.

B. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Badung selama periode tahun 2011-2015 memiliki angka rata-rata pertumbuhan positif sebesar 134%, hal tersebut sangatlah wajar mengingat kemampuan keuangan Kabupaten Badung meningkat setiap tahunnya.

C. Ekuitas Dana

Perkembangan Ekuitas Dana Kabupaten Badung selama tahun 2011-2015 rata-rata tumbuh sebesar 70,5%, dimana pada tahun 2011 Ekuitas Dana Kabupaten Badung sebesar Rp.4.432.089.004.216 menjadi Rp.26.451.770.121.738 pada tahun 2015. Pertumbuhan ini didorong pertumbuhan ekuitas dana investasi yaitu dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 82,8%, dimana bentuk Ekuitas Dana Investasi yang diinvestasikan dalam Aset Tetap memiliki pertumbuhan paling besar yakni pertumbuhan sebesar 94,7%.

3.1.3. Rasio Keuangan Kabupaten Badung

Berdasarkan data neraca Kabupaten Badung periode 2011 - 2015 sebagaimana tersaji pada Tabel 3.4 yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan rasio keuangan Kabupaten Badung. Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk Tahun 2011 - 2015 berdasarkan formulasi, yang disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Rasio Likuiditas					
1.	Rasio lancar (current ratio)	104,8	37,9	79,0	21,2	13,8
2.	Rasio Kas (quick ratio)	104,0	37,7	78,0	20,8	13,3
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00205	0,00549	0,00248	0,00838	0,00348
2	Rasio hutang terhadap modal	0,00205	0,00552	0,00249	0,00845	0,00344

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Badung yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, Rasio Lancar pada Tahun 2015 sebesar 13,8, ini berarti pada tahun 2015 kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 13.8 kali lebih besar dibandingkan dengan hutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung pada Tahun 2015.

2. Rasio Kas (*Quick Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki pemerintah, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Penghitungan *quick ratio* dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid untuk menutupi hutang lancar. Berdasarkan tabel diatas, *quick ratio* pada tahun 2015 sebesar 13,3, ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Badung 13,3 kali lebih besar dalam membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya jadi Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada tahun 2015 sebesar 0,00348 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil, atau dengan kata lain Aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Badung lebih banyak diperoleh dari pembelanjaan Pendapatan Kabupaten Badung yang bukan berasal dari hutang.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2015 sebesar 0,00344. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Badung, hal ini berarti Kabupaten Badung merupakan daerah yang mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Kuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian

laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah didapat dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan, karena sangat berpengaruh penting terhadap keberhasilan program atau kegiatan yang direncanakan. Sampai saat ini, potensi terbesar Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berasal dari kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Hal ini disebabkan kekhususan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata yang didukung oleh kualitas dan kuantitas akomodasi pariwisata seperti tempat MICE (Meeting, Incentive, Conference and Event) yang memadai, adanya *event* seni budaya, olah raga dan pertemuan/konferensi baik nasional, regional maupun internasional yang diadakan di Kabupaten Badung.

Namun mengingat kepariwisataan bersifat sangat sensitif terhadap berbagai hal seperti isu gangguan keamanan, wabah penyakit dan instabilitas politik, maka hal – hal yang berkaitan dengan itu harus terus diantisipasi dengan cepat dan tepat. Disamping itu, potensi wajib pajak harus terus digali secara maksimal untuk ditetapkan menjadi wajib pajak daerah sejalan dengan perkembangan kemampuan masyarakat dan pertumbuhan kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Perkembangan indikator–indikator yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa pariwisata di Bali tetap bergairah pada tahun 2014 sehingga menambah optimisme dan menguatkan keyakinan untuk merumuskan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Tahun 2015.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- 1) Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- 2) Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.

- 3) Melakukan Penagihan piutang Pajak Daerah secara aktif dan pasif untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan.
- 4) Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam upaya modernisasi administrasi Pajak Daerah demi terwujudnya e-governance di bidang Pajak Daerah.
- 5) Melakukan kerjasama dengan pihak Perbankan dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang transparan, mudah, dan cepat.
- 6) Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta instansi lainnya dalam meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat.
- 7) Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Dedikasi, Hormat, Akurat, Mudah dan Akuntabel.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pendaftaran dan pendataan wajib pajak baru serta melaksanakan pemuktakhiran data potensi wajib pajak dan retribusi daerah.
- 2) Melakukan pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang belum patuh melaksanakan kewajiban perpajakan.
- 3) Menyempurnakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah dan membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi secara bertahap dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 5) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi secara berkesinambungan kepada seluruh komponen terkait.
- 6) Memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah yang terbaik serta memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.
- 7) Bekerja sama dengan kurator dalam penagihan piutang pajak melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.
- 8) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- 9) Mengintensifkan penerimaan dari sumber lain-lain Pendapatan Daerah.

B. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang menggambarkan arah kebijakan Belanja Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan Kabupaten Badung Tahun 2010-2014. Belanja Daerah dipergunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja untuk menyelenggarakan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama stakeholders menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib
2. Belanja pada setiap SKPD untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran merupakan Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Badung bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang, Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran dapat di jabarkan sebagai berikut:

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2011 hingga tahun 2015 secara series menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Badung, yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6

Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Badung Tahun 2010 - 2015

NO	URAIAN	2011			2012			2013			2014			2015			RATA - RATA
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)	
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)					
2	BELANJA	1.812.671.007.973	1.572.210.487.617	86,7	2.671.642.814.959	2.334.080.297.426	87,4	3.027.775.911.367	2.755.459.722.078	91,0	3.614.006.551.503	3.276.164.109.817	90,7	4.051.571.511.425	3.446.634.314.570	85,1	88,2
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.277.543.517.892	1.110.998.530.565	87,0	1.463.878.021.674	1.268.529.842.646	86,7	1.623.136.935.493	1.488.224.176.921	91,7	1.804.201.412.603	1.654.384.787.120	91,7	2.198.073.625.269	1.909.366.328.158	86,9	88,8
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	858.309.551.914	709.609.349.738	82,7	920.296.751.682	767.437.703.476	83,4	977.496.630.367	881.464.639.348	90,2	1.093.374.066.148	982.021.268.535	89,8	1.184.517.208.550	1.035.507.051.033	87,4	86,7
2 . 1 . 3	Belanja Subsidi	540.000.000	540.000.000	100,0	910.000.000	910.000.000	100,0	2.090.000.000	2.090.000.000	100,0	3.870.000.000	3.837.400.000	99,2	5.420.000.000	5.393.600.000	99,5	99,7
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	45.199.676.990	43.186.758.790	95,5	45.454.215.798	44.320.460.845	97,5	96.874.582.650	95.313.468.711	98,4	100.242.049.336	93.604.909.624	93,4	265.477.281.050	144.802.581.385	54,5	87,9
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	36.885.593.800	32.012.616.500	86,8	49.363.658.648	48.119.962.000	97,5	57.501.750.000	52.141.750.000	90,7	35.638.500.000	33.549.092.500	94,1	27.600.000.000	26.839.800.000	97,2	93,3
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	127.357.970.394	126.170.160.128	99,1	212.066.068.817	191.156.530.025	90,1	219.855.161.334	212.227.730.488	96,5	284.286.151.505	272.387.605.145	95,8	341.865.059.659	33.221.196.731	9,7	78,3
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	206.250.724.794	198.646.101.309	96,3	232.787.326.730	216.289.002.899	92,9	255.465.191.345	234.132.968.576	91,6	283.790.645.614	268.781.366.026	94,7	370.194.076.009	364.602.099.009	98,5	94,8
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	833.544.100	27,8	3.000.000.000	296.183.400	9,9	13.853.619.798	10.853.619.798	78,3	3.000.000.000	203.145.290	6,8	3.000.000.000	-	-	24,6
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.393.347.041.995	1.170.821.297.790	84,0	1.207.764.793.285	1.065.550.454.780	88,2	1.404.638.975.874	1.267.235.545.157	90,2	1.809.805.138.900	1.621.779.322.697	89,6	1.853.497.886.156	1.537.267.986.412	82,9	87,0
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	858.309.551.914	709.609.349.738	82,7	69.182.049.949	63.448.806.722	91,7	79.788.831.923	75.694.057.565	94,9	67.622.576.549	63.427.200.338	93,8	67.205.320.084	59.742.497.212	88,9	90,4
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.231.484.331	261.507.734.379	89,5	430.512.061.957	374.395.947.727	87,0	473.202.533.790	424.829.297.562	89,8	650.599.465.027	609.282.785.114	93,6	678.323.213.263	554.753.160.856	81,8	88,3
2 . 2 . 3	Belanja Modal	242.806.005.750	199.704.213.673	82,2	708.070.681.379	627.705.700.331	88,7	851.647.610.161	766.712.190.030	90,0	1.091.583.097.324	949.069.337.245	86,9	1.107.969.352.810	922.772.328.344	83,3	86,2

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012 – 2015

Berdasarkan Tabel 3.6 Dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat, realisasi mengalami kenaikan dari 87,0 pada tahun 2011 menjadi 86,9% pada periode 2015, dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 88,8% pada periode 2011 - 2015. Serta tingkat realisasi Belanja Langsung dari tahun 2011 sebesar 84,0% menjadi 82,9 % pada tahun 2015, dengan rata-rata tingkat realisasi sebesar 87,0% pada periode 2011-2015.

B. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Badungtertuang pada tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

KODE	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.	BELANJA	1.572.210.487.617	1.300.893.221.857	1.162.672.843.062	1.339.140.965.691	3.446.634.314.570
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.059.192.474.981	653.818.498.811	729.463.006.962	796.775.941.269	1.909.366.328.158
5.1.1	Belanja Pegawai	657.803.294.154	653.818.498.811	729.463.006.962	796.775.941.269	1.035.507.051.033
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	417.372.035.899	452.544.105.050	473.780.224.737	509.017.016.921	539.234.123.489
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	166.450.079.049	195.877.913.761	249.656.782.225	281.073.549.348	313.455.742.859
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4.154.980.000	5.396.480.000	6.026.000.000	6.685.375.000	6.468.191.000
5.2	BELANJA LANGSUNG	513.018.012.636	647.074.723.046	433.209.836.100	542.365.024.422	1.537.267.986.412
5.2.1	Belanja Pegawai	51.806.055.584	58.523.118.468	72.169.967.565	63.427.200.338	59.742.497.212
5.2.1.01	Honorarium PNS	17.152.134.573	22.542.530.120	17.053.300.850	16.365.721.549	15.069.140.762
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.407.602.311	34.562.294.848	53.888.428.215	45.688.120.789	43.235.647.450
5.2.1.03	Uang Lembur	1.075.448.500	1.418.293.500	1.228.238.500	1.373.358.000	1.422.489.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	261.507.743.379	545.780.874.101	295.101.232.228	421.491.287.808	554.753.160.856
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.783.176.535	374.395.947.727	99.933.210.041	165.056.496.349	66.091.846.828
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.869.950.303	75.756.332.643	98.688.016.956	148.534.925.792	144.021.193.347
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.267.653.000	6.256.260.200	10.754.154.679	11.021.659.152	10.742.241.475
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir	853.858.000	1.992.821.432	1.393.333.872	1.942.631.702	2.024.952.700
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	462.960.000	4.339.608.000	5.960.926.855	6.107.302.000	6.397.761.000
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	749.637.780	1.491.773.430	2.271.205.952	3.151.887.000	3.248.466.750
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	14.394.176.520	21.377.173.010	24.362.717.809	21.149.594.577	22.470.466.184
5.2.2.11	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	4.314.807.000	766.915.080	4.818.645.248	7.759.748.800	6.383.331.062
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.117.173.400	2.415.932.050	3.660.344.115	3.898.760.550	882.366.600

KODE	URAIAN	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	3.214.353.100	13.441.059.715	5.274.252.232	9.457.629.500	5.014.731.310
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.034.148.195	38.094.466.274	32.175.122.417	34.536.286.671	20.055.428.926
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	164.000.000	1.395.905.200	1.108.500.000	1.043.500.000	1.186.500.000
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.084.580.800	4.056.679.340	4.700.802.052	3.785.401.164	3.195.565.978
5.2.2.38	Honorarium PNS	-	-	-	4.045.464.551	15069140762
5.2.3.	Belanja Modal	199.704.213.673	42.770.730.477	65.938.636.308	57.446.536.276	922.772.328.344
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	15.357.538.900	12.681.226.198	25.274.148.236	20.052.210.016	20.666.250.501
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	640.659.600	2.324.327.200	2.031.717.589	2.478.311.898	-
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.996.112.950	2.891.692.235	5.268.796.725	6.146.427.878	-
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.371.594.262	9.821.153.350	13.901.494.526	12.350.326.682	10.085.022.968
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.884.032.620	10.855.577.040	17.599.549.232	15.206.497.317	636.570.000
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	801.543.500	4.196.754.454	1.862.930.000	1.212.762.485	816.889.800

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012– 2014

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2011 – 2013 cenderung mengalami penurunan, penurunan tersebut di karenakan terjadinya penurunan Belanja langsung . Pada tahun 2013 – 2015 cenderung mengalami peningkatan, Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena peningkatan Belanja barang dan jasa pada Belanja langsung , juga berkenaan dengan peningkatan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Selanjutnya dijelaskan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2015

NO	URAIAN	BELANJA	TOTAL PENGELUARAN	PROSENTASE
		(UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR)	(BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN)	
		(a)	(b)	
1	Tahun Anggaran 2011	709.609.349.738	1.590.657.887.617	44,6
2	Tahun Anggaran 2012	1.300.893.221.857	2.479.280.297.426	52,5
3	Tahun Anggaran 2013	1.162.672.843.062	2.969.459.722.078	39,2
4	Tahun Anggaran 2014	1.339.140.965.691	3.430.164.109.817	39,0
5	Tahun Anggaran 2015	1.095.249.548.245	3.746.634.314.570	29,2

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012– 2014

Berdasarkan Tabel 3.8, diperoleh Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah menunjukkan penurunan pada periode 2011 - 2015, tahun 2011 persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 44,6% dan tahun 2015 turun menjadi 29,2%. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk untuk pembangunan lebih besar proporsinya terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun telah dilakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD.

C. Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Gambaran tentang realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kab.Badung pada 3 (tiga) tahun terakhir, tertuang pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Badung

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata Kenai kan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
I.	BELANJA						
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	714.896.750.654	845.693.610.111	942.379.009.790	1.069.877.328.311	1.192.226.986.516	13,7
1	Gaji Dan Tunjangan	417.372.035.899	452.544.105.050	473.780.224.737	509.017.016.921	539.234.123.489	6,6
2	Tambahan Penghasilan PNS	166.450.079.049	195.877.913.761	249.656.782.225	281.073.549.348	313.455.742.859	17,3
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4.154.980.000	5.396.480.000	6.026.000.000	6.685.375.000	6.468.191.000	12,3
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	111.200.377.000	169.531.940.000	192.212.017.000	251.682.036.500	263.716.632.394	25,4
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.782.450.000	9.281.086.750	14.379.279.375	17.589.948.875	40.105.342.151	109,7
6	Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa	12.187.333.128	12.343.503.275	5.636.434.113	3.115.619.770	28.399.222.187	178,4
7	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	749.495.578	718.581.275	688.272.340	713.781.897	847.732.436	3,5
B.	BELANJA LANGSUNG	53.057.845.664	72.581.193.230	87.862.257.440	87.025.752.802	81.904.710.137	12,8
1	Honorarium PNS	17.152.134.573	22.542.530.120	17.053.300.850	16.365.721.549	15.069.140.762	-1,2
2	Honorarium Non PNS	31.407.602.311	34.562.294.848	53.888.428.215	45.688.120.789	43.235.647.450	11,3
3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	853.858.000	1.992.821.432	1.393.333.872	1.942.631.702	2.024.952.700	36,7
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	462.960.000	4.339.608.000	1.393.333.872	6.107.302.000	6.397.761.000	278,1
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	164.000.000	1.395.905.200	1.108.500.000	1.043.500.000	1.186.500.000	184,6
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	749.637.780	1.491.773.430	2.271.205.952	3.151.887.000	3.248.466.750	48,3
7	Belanja Premi Asuransi	2.267.653.000	6.256.260.200	10.754.154.679	12.726.589.762	10.742.241.475	62,6
JUMLAH		767.954.596.318	918.274.803.341	1.030.241.267.230	1.156.903.081.113	1.274.131.696.653	13,5

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011 - 2015

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada periode 2011-2015 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,5%. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas yang berasal dari Belanja Tidak Langsung pada periode 2011-2015 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,7%, sedangkan yang berasal dari Belanja Langsung sebesar 12,8%.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/ defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan. Hasil Analisis pembiayaan tertuang pada Tabel 3.10, sbagai berikut :

Tabel 3.10
Defisit Riil Tahun 2011-2015
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2011 Realisasi (Rp)	2012 Realisasi (Rp)	2013 Realisasi (Rp)	2014 Realisasi (Rp)	2015 Realisasi (Rp)	Rata -rata (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.850.767.400.625,81	2.620.854.103.474	2.954.662.970.616	3.459.985.625.334	3.735.129.565.341	19,9
2	BELANJA DAERAH	1.406.298.099.449,01	2.334.080.297.426	2.755.459.722.078	3.276.164.109.817	3.446.634.314.570	27,0
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18.447.400.000	145.200.000.000	214.000.000.000	154.000.000.000	300.000.000.000	200,3
A.	Defisit Riil	278.556.913.008,64	141.573.806.048	-14.796.751.462	29.821.515.517	-11.504.749.229	-149,9
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :							
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	497.292.438.596,16	757.401.951.605	901.461.570.467	888.147.920.029	924.161.610.511	18,5
2	Penarikan Dana Bergulir	-	2.485.812.815	1.537.166.524	5.736.166.598	1.164.462.560	63,8
B.	Total Realisasi Penerimaan	497.292.438.596,16	759.887.764.420	902.998.736.991	893.884.086.627	925.326.073.071	18,5
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		757.401.951.604,80	901.461.570.467	888.201.985.529	923.705.602.144	913.821.323.842	5,1

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011 – 2015

Tabel 3.11
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)
Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015

No.	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	757.401.951.605		901.461.570.467		888.201.985.529		923.705.602.144		913.821.323.842	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	42.306.635.508	5,6	250.913.724.425	28,0	141.699.867.776	16,0	249.951.305.853	27,1	246.820.658.601	27,0
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	19.993.208.656	47,3	36.078.991.250	4,0	73.338.487.849	8,0	(5.322.249.175)	-0,6	(3.118.707.275)	-0,3
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(145.812.741)	-0,7	4.398.787.199	0,5	(4.878.217.596)	-1,0	(7.997.461.626)	-0,9	60.546.923.334	6,6
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	251.295.248.250	33,2	240.460.520.356	27,0	328.102.166.857	37,0	272.323.389.289	29,5	337.842.441.686	37,0
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-		-	-	-	-
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	9.460.350.676	1,1	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011 – 2015

Berdasarkan tabel 3.11 diatas selanjutnya dapat disimpulkan analisis kebijakan pembiayaan daerah bahwa dari tahun 2011 – 2015 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan memiliki angka pertumbuhan sebesar 5,1%. Untuk menghindari adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan, maka dalam penentuan SiLPA harus cermat dan didasarkan pada penghitungan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi yang bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah serta akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun 2011-2015, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2016-2021.

3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Gambaran tentang rata-rata pertumbuhan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta perioritas utama Kabupaten Badung yang diperoleh dari pengolahan data dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tertuang pada tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Badung

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13,7
1	Gaji Dan Tunjangan	6,6
2	Tambahan Penghasilan PNS	15,0
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	12,3
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15,0
5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	15,0
6	Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan Kepada Pemerintahan Desa	15,0
7	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3,5
B	BELANJA LANGSUNG	12,8
1	Honorarium PNS	-1,2
2	Honorarium Non PNS	11,3
3	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15,0
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15,0
5	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	15,0
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15,0
7	Belanja Premi Asuransi	15,0

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan Tabel 3.12, diperoleh Prosentase Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Badung untuk Belanja Tidak Langsung pertumbuhan rata-rata kenaikan sebesar 13,7%, serta untuk Belanja Langsung terkait Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama sebesar 12,8%. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari Belanja Tidak Langsung lebih besar di bandingkan dengan pertumbuhan rata Belanja Langsung.

3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 – 2021 menggunakan tahun dasar 2016 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	APBD 2016	PROYEKSI 2017	PROYEKSI 2018	PROYEKSI 2019	PROYEKSI 2020	PROYEKSI 2021
Pendapatan	3.948.077	5.096.064	6.567.483	7.140.222	7.773.318	8.480.060
Pendapatan Asli Daerah	3.195.340	4.258.418	5.700.510	6.432.695	7.095.522	7.829.022
Dana Perimbangan	512.066	628.007	572.651	494.454	464.724	437.967
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	240.671	209.639	294.321	213.071	213.071	213.071

Sumber: 1. Badan Pendapatan / Pasedahan Agung
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

A. Proyeksi SILPA

Proyeksi SiLPA tahun 2016 dan 2021 dimana diketahui nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA dari periode 2011 - 2015 mengalami peningkatan namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 5,1 % dari total APBD maka diperoleh proyeksi SiLPA pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 3.14
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 – 2021
Kabupaten Badung
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	APBD 2016 (Rp)	PROYEKSI 2017 (Rp)	PROYEKSI 2018 (Rp)	PROYEKSI 2019 (Rp)	PROYEKSI 2020 (Rp)	PROYEKSI 2021 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	913.821	1.076.132	676.910	362.219	375.122	407.422

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan Kab.Badung untuk mendanai pembangunan Kabupaten Badung dalam jangka waktu lima tahun 2016-2021, disajikan pada tabel 3.15 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021
(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	RAPBD 2016 (Rp)	PROYEKSI 2017 (Rp)	PROYEKSI 2018 (Rp)	PROYEKSI 2019 (Rp)	PROYEKSI 2020 (Rp)	PROYEKSI 2021 (Rp)
1	Pendapatan	3.948.077	5.096.064	6.567.483	7.140.222	7.773.318	8.480.060
2	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	913.821	1.076.132	676.910	362.219	375.122	407.422
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUDA		4.861.898	6.172.196	7.244.393	7.502.441	8.148.440	8.887.482

Sumber: 1. Badan Pendapatan / Pasedahan Agung
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

B. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2013-2014. Adapun hasil proyeksi dapat dilihat melalui tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	APBD 2016 (Rp)	Proyeksi 2017 (Rp)	Proyeksi 2018 (Rp)	Proyeksi 2019 (Rp)	Proyeksi 2020 (Rp)	Proyeksi 2021 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	4.861.898	6.172.196	7.244.393	7.502.441	8.148.440	8.887.482
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	2.370.154	3.177.103	3.613.650	3.561.821	3.858.089	4.206.246
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
	Dikurangi:						
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	299.587	401.585	456.765	450.214	487.662	531.669
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-	-
II	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	2.070.567	2.775.518	3.156.885	3.111.607	3.370.427	3.674.577
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	2.791.331	3.396.678	4.087.508	4.390.834	4.778.013	5.212.905
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	2.257.951	2.995.093	3.630.743	3.940.619	4.290.351	4.681.236
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	1.523.891	2.021.388	2.450.388	2.659.523	2.895.557	3.159.366
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	734.060	973.705	1.180.355	1.281.095	1.394.793	1.521.870
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	2.057.272	2.422.973	2.907.154	3.109.739	3.383.220	3.691.036

Sumber: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

C. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka akan ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai kelompok prioritas.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut:

a. Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan amanat/ kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan 10% (sepuluh persen).

Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/ misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/ kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

c. Prioritas III

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya.

Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun, total pada tabel untuk masing-masing kolom persentase harus selalu berjumlah 100 persen. total untuk kolom rupiah dapat menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya.

Penetapan persentase masing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal tim perumus dalam menetapkan pagu program atau pagu SKPD. Secara simultan persentase tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk prioritas III.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah dapat dialokasikan sebagaimana tabel 3.17 sebagai berikut.

Tabel 3.17
Kerangka Pendanaan
Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021

(dalam jutaan rupiah)

JENIS DANA	ALOKASI											
	APBD`		PROYEKSI		PROYEKSI		PROYEKSI		PROYEKSI		PROYEKSI	
	TA 2016		TA 2017		TA 2018		TA 2019		TA 2020		TA 2021	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
PRIORITAS I	42,59	2.070.567	44,97	2.775.518	43,58	3.156.885	41,47	3.111.607	41,36	3.370.427	41,35	3.674.577
PRIORITAS II	15,10	734.060	15,78	973.705	16,29	1.180.355	17,08	1.281.095	17,12	1.394.793	17,12	1.521.870
PRIORITAS III	42,31	2.057.272	39,26	2.422.973	40,13	2.907.154	41,45	3.109.739	41,52	3.383.220	41,53	3.691.036
JUMLAH	100,00	4.861.898	100,00	6.172.196	100,00	7.244.393	100,00	7.502.441	100,00	8.148.440	100,00	8.887.482

Sumber: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BAB IV

ANALISIS ISU - ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

4.1.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Pendidikan

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan keluarga.
- 2) Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
- 3) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- 5) Masih kurangnya sekolah jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Abiansemal.

b. Kesehatan

- 1) Belum optimalnya penurunan angka kematian ibu.
- 2) Masih tingginya angka kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.

- 3) Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
 - 4) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
 - 5) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
 - 6) Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
 - 7) Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
 - 8) Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
 - 9) Terbatasnya sarana pendukung untuk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
 - 10) Belum optimalnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir dan menjaga level air agar sungai terlihat lebih bersih saat kemarau.
 - 2) Masih adanya pembuangan air limbah secara langsung ke pantai.
 - 3) Masih kurangnya instalasi pengolahan air limbah komunal di kawasan perumahan.
 - 4) Belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah terpadu di Kabupaten Badung terutama di kawasan Badung Selatan.
 - 5) Belum tertanganinya beberapa badan jalan khususnya pada kawasan *Land Consolidation* (LC).
 - 6) Belum tuntasnya penanganan terhadap sejumlah infrastuktur yang menghubungkan jalur-jalur pariwisata antara lain : jalan lingkar selatan dan lingkar barat di Kuta Selatan.
 - 7) Masih kurangnya infrastruktur penunjang pada jalur-jalur menuju objek wisata, antara lain : Lampu Penerangan Jalan, jaringan telepon, trotoar dan drainase.
 - 8) Belum ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyambungkan limbahnya ke sistem jaringan air limbah terpusat DSDP.
 - 9) Belum jelasnya referensi pembangunan infrastruktur.
 - 10) Belum adanya perangkat hukum tentang bangunan gedung yang mengatur ketentuan tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunan publik.

d. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 2) Masih rendahnya pemahaman pemilih pemula dalam partisipasi politik.
- 3) Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana masih kurang.
- 4) Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
- 5) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun perilaku sosial masyarakat.
- 6) Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- 7) Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
- 8) Belum terbangunnya pos siaga bencana di masing – masing kecamatan.
- 9) Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.
- 10) Terbatasnya paket individu masyarakat Kabupaten Badung yang terdampak bencana belum dapat diwujudkan.
- 11) Payung hukum tentang sumber pendanaan penanganan pasca bencana belum relevan.

e. Sosial

- 1) Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Belum optimalnya sinergi antar *stakeholder* dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan sosial.
- 3) Belum seluruh masyarakat terlindungi oleh jaminan sosial.

4.1.2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

a. Tenaga Kerja

- 1) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kerjasama Tripartit dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.
- 2) Masih terdapat tenaga kerja yang belum mengikuti sertifikasi uji kompetensi .
- 3) Masih terbatasnya jumlah assessor.
- 4) Rendahnya jiwa wirausaha.

- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih rendah.
 - 3) Rendahnya pengetahuan perempuan terhadap penyakit kanker, HIV-AIDS dan penyakit berbahaya lainnya.
- c. Lingkungan Hidup
 - 1) Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air.
 - 2) Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup.
 - 3) Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembuatan taman kota dan hutan kota.
 - 4) Belum adanya masterplan pertamanan.
 - 5) Pencemaran di wilayah Kabupaten Badung 55% berasal dari limbah domestik.
- d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan catatan sipil.
- e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 1) Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa.
- f. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
 - 1) Tingginya angka pernikahan dini.
 - 2) Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB.
 - 3) Rendahnya pemahaman remaja terhadap program generasi berencana (gen-re).
 - 4) Belum optimalnya peran Tribina KB.
- g. Perhubungan
 - 1) Pertumbuhan jumlah kendaraan yang jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan prasarana jalan.
 - 2) Terkonsentrasinya kegiatan/ aktivitas/ mobilitas di wilayah Badung Selatan menyebabkan beban lalu-lintas dan permasalahan kemacetan lalu-lintas bertumpu di wilayah Badung Selatan.
 - 3) Belum optimalnya pelayanan penggunaan angkutan umum di Kabupaten Badung.
- h. Komunikasi dan Informatika.
 - 1) Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung.

- 2) Kurang tersedianya lahan parkir di luar badan jalan di wilayah padat aktivitas.

i. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1) Kurangnya sinergitas antara UMKM dengan lembaga keuangan dalam hal kemitraan, permodalan dan promosi produk.
- 2) Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas.
- 3) Terbatasnya kesempatan UKM dalam mengikuti informasi dan promosi produknya.
- 4) Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha.
- 5) Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM.
- 6) Belum memiliki Unit Pengelola Dana Bergulir.

j. Kebudayaan

- 1) Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
- 2) Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah.
- 3) Belum optimalnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual seniman, sastrawan dan budayawan.
- 4) Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
- 5) Masih kurangnya tenaga guru Bahasa Bali yang dapat mendukung pengajaran seni, sastra dan budaya Bali.

k. Perpustakaan

- 1) Kondisi perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan yang belum memenuhi standar.
- 2) Kurangnya minat baca masyarakat.

4.1.3 Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

- 1) Penataan peruntukan sektor perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik.
- 2) Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan masih rendah.
- 3) Fluktuasi harga sarana produksi perikanan sangat tinggi yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah.
- 4) Belum optimalnya fungsi TPI / Dermaga Kedonganan.
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

b. Pariwisata

- 1) Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk yang ramah lingkungan.
- 2) Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
- 3) Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
- 4) Perlunya penataan perizinan sarana akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
- 5) Optimalisasi pemasaran dan promosi pariwisata dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 6) Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata perlu ditingkatkan.
- 7) Daya Tarik Wisata (DTW) yang belum tertata secara optimal.
- 8) Belum maksimalnya pengembangan potensi Daya Tarik Wisata baru
- 9) Masih rendahnya kualitas SDM pengelola destinasi
- 10) Terbatasnya jumlah event promosi pariwisata yang diikuti.
- 11) Perlu adanya peningkatan infrastruktur pada Daya Tarik Wisata.
- 12) Terbatasnya ketersediaan sarana parasarana penunjang kepariwisataan.
- 13) Kurangnya ketaatan industri pariwisata melengkapi perijinan.
- 14) Belum adanya data base industri pariwisata.

c. Pertanian

- 1) Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan.
- 2) Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian.
- 3) Pesatnya alih fungsi lahan.
- 4) Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata.
- 5) Kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian.
- 6) Rendahnya adopsi inovasi pertanian.
- 7) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
- 8) Penataan peruntukan sektor peternakan belum terwujud dengan baik.
- 9) Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan masih rendah.
- 10) Fluktuasi harga sarana produksi peternakan sangat tinggi yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi daerah Pemulihan *performance* sapi Bali, serta penurunan jumlah populasi sapi Bali.
- 11) Kurangnya fasilitas baik sarana maupun prasarana RPH Mambal untuk mewujudkan swasembada daging sapi, serta untuk menghasilkan BOB.

d. Perdagangan

- 1) Adanya kecendrungan semakin meningkatnya jumlah *mini market* dan makanan siap saji yang masuk ke kawasan pedesaan.
- 2) Kurangnya daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern.

4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Fungsi Lainnya

- 1) Belum optimalnya pelayanan perizinan.
- 2) Belum maksimalnya analisis jabatan dan rasio kebutuhan pegawai.
- 3) Belum optimalnya disiplin aparatur pemerintah.
- 4) Belum maksimalnya penegakan Peraturan Daerah.
- 5) Belum ditetapkannya zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4.2 Isu - Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis perlu diantisipasi, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis ditunjukkan dari kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis yang berkembang akibat pengaruh kondisi global, regional dan nasional yang perlu mendapat perhatian dan fokus penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dalam kurun waktu lima tahun kedepan meliputi :

4.2.1 Isu-isu Strategis Global, Regional dan Nasional

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prospek ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global pada periode Tahun 2016-2021. Beberapa isu strategis yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai Tahun 2015, di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian Kabupaten Badung, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi termasuk sumberdaya manusianya.

2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian Kabupaten Badung yang mengandalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata antara lain berasal dari : (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor bagi produk-produk UMKM Kabupaten Badung, (b) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya belum sepenuhnya pulih berdampak pada menurunnya ekspor berbagai produk dari Kabupaten Badung; (c) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun flat sehingga mempengaruhi ekspor dan investasi di Kabupaten Badung; (d) proses normalisasi kebijakan moneter AS di Tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya.
3. Stabilitas politik dan keamanan menjadi tantangan utama dalam memelihara keberlanjutan pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karena itu diperlukan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sehingga menjadi kondusif termasuk bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.
4. Perubahan situasi geo-politik global yang ditandai dengan 'pertarungan' penguasaan sumber daya alam dalam rangka food and energy security. Krisis energi dunia dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia dan arus ekspor-impor pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam, bahkan persaingan negara besar dan negara industri baru ditandai dengan strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara ekonomi lebih kaya dan kuat.
5. Globalisasi nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan, yang sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang

dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial. Hal ini membawa Indonesia berada pada persilangan antara budaya global dan budaya lokal yang berorientasi pada identitas primordial.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terdapat beberapa tantangan utama yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung diantaranya meliputi :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum dan pemerintah, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun daerah terutama bagi dunia usaha yang akan berinvestasi di daerah.
2. Kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik, sehingga dapat mendukung proses pembangunan kedepan secara efektif dan efisien.
3. Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas.

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan

perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

4. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.
5. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
6. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai kondisi saat ini dan menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju karena saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain perlu direformasi.
7. Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah masih belum optimal. Disamping itu anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif perlu dikurangi, sehingga dapat diarahkan untuk membiaya pembangunan secara optimal.

4.2.2 Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Terdapat beberapa isu strategis dalam pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan daerah meliputi :

a. Pendidikan

- 1) Perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan
- 2) Memantapkan program pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 12 tahun
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan peserta didik

- 4) Restrukturisasi satuan pendidikan dasar menuju satuan pendidikan berbasis Hindu
- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar
- 6) Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
- 7) Pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 12 tahun
- 8) Peningkatan kualitas mutu lulusan yang berintegritas
- 9) Peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan
- 10) Peningkatan pendidikan dan pengembangan anak usia dini
- 11) Pembentukan sekolah PAUD/TK berbasis Agama Hindu dan Bahasa Bali
- 12) Peningkatan manajemen guru dan pendidikan kejuruan
- 13) Masih kurangnya sekolah jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Abiansemal

b. Kesehatan

- 1) Perluasan akses dan mutu pelayanan kesehatan tingkat dasar dan rujukan yang berkualitas
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan
- 3) Peningkatan kesadaran, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam hidup sehat
- 4) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- 5) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- 6) Peningkatan kesehatan perempuan, ibu hamil, anak, remaja hingga lanjut usia (*continuum of care*)
- 7) Percepatan perbaikan status gizi masyarakat
- 8) Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan
- 9) Pengembangan dan peningkatan efektivitas pembiayaan kesehatan
- 10) Integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam jaminan kesehatan nasional yang berkelanjutan dan menjangkau seluruh masyarakat (*universal coverage*)

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Pengkajian mengenai pemanfaatan muara Tukad Mati sebagai Daerah Tujuan Wisata baru
- 2) Pembangunan utilitas terpadu
- 3) Peningkatan infrastruktur terkait penambahan jumlah penduduk

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Peningkatan intensitas dan kualitas penanggulangan PMKS

- 2) Perluasan akses rumah layak huni bagi masyarakat miskin/rentan
- 3) Optimalisasi jangkauan pelayanan air bersih dan sistem pelayanan air minum
- 4) Pengembangan sistem utilitas terpadu
- 5) Pengembangan sistem pengolahan sampah / limbah terpadu
- 6) Perluasan akses kredit kepemilikan rumah terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- 7) Pengolahan air laut menjadi air minum atau air bersih untuk mengantisipasi kekurangan air baku pada kawasan Badung Selatan
- 8) Pengamanan daerah tangkapan air
- 9) Pengendalian alih fungsi lahan
- 10) Pembangunan IPAL pada kawasan Badung Selatan untuk menanggulangi air limbah

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Peningkatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- 2) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan
- 3) Pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan organisasi kemasyarakatan terutama di lingkungan masyarakat perkotaan
- 4) Pengurangan resiko bencana
- 5) Pemberdayaan masyarakat secara partisipatif terhadap penanggulangan bencana.
- 6) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
- 7) Peningkatan efektivitas waktu pelayanan dengan merealisasikan pos siaga bencana di masing-masing kecamatan
- 8) Peningkatan cakupan pelayanan tanggap darurat dengan penambahan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
- 9) Peningkatan jaminan kehidupan korban bencana dengan merealisasikan paket bantuan logistik
- 10) Pemberian santunan kepada individu dan kelompok masyarakat terdampak bencana
- 11) Optimalisasi penanganan pasca bencana dengan membuat dan mensinergikan peraturan/payung hukum pada saat pasca bencana.

f. Sosial

- 1) Perluasan jangkauan jaminan sosial terhadap masyarakat rentan
- 2) Peningkatan intensitas penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- 3) Peningkatan sinergitas antar pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam penanggulangan permasalahan sosial dan kemiskinan.

4.2.3 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Isu strategis dalam pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

a. Tenaga Kerja

- 1) Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui instrumen Upah Minimum dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 2) Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
- 3) Peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja dan pencari kerja dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- 4) Memberi pinjaman lunak kepada pekerja Indonesia (masyarakat Bali) yang ke luar negeri untuk menjadi pengusaha muda dalam rangka menyerap tenaga kerja
- 5) Terbatasnya penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)
- 6) Perluasan penyerapan tenaga kerja berbasis wirausaha mandiri
- 7) Kurang optimalnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mempersiapkan tenaga kerja terlatih

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Peningkatan pengarusutamaan gender
- 2) Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
- 3) Penanggulangan lebih intensif penyakit kanker dan HIV-Aids
- 4) Peningkatan antisipasi terhadap daerah rawan *trafficking*

c. Pangan

- 1) Perubahan iklim (climate change) yang mengganggu suplai air, pola tanam dan produktivitas hasil pertanian
- 2) Terancamnya ketahanan pangan
- 3) Belum tersedianya peta potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Badung
- 4) Terancamnya ketahanan pangan
- 5) Penurunan kualitas sumber daya alam pertanian
- 6) Pesatnya alih fungsi lahan pertanian
- 7) Kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian
- 8) Rendahnya adopsi inovasi pertanian
- 9) Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
- 10) Belum optimalnya sinergitas pertanian dengan pariwisata

- 11) Belum optimalnya database potensi sumberdaya pertanian
 - 12) Menurunnya rumah tangga petani dan kurangnya minat generasi muda untuk menekuni usaha pertanian
 - 13) Pembentukan unit usaha untuk membeli hasil panen petani
- d. Lingkungan Hidup
- 1) Penanganan kawasan resapan air hujan
 - 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - 3) Mempertahankan ruang Daya terbuka hijau
 - 4) Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati
 - 5) Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) 10 sungai
- e. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 1) Belum Sepenuhnya masyarakat menyadari akan pentingnya kepemilikan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil.
- f. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
- 1) Pengendalian angka kelahiran anak untuk menekan tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga (di atas 2 anak)
 - 2) Peningkatan motivasi masyarakat terhadap pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang
 - 3) Peningkatan usia remaja kawin pertama diatas 20 tahun
 - 4) Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
 - 5) Penyebarluasan informasi (KIE) tentang program KB
 - 6) Peningkatan peran Tri Bina KB dan UPPKS
 - 7) Perluasan dukungan dari berbagai sektor untuk meraih bonus demografi
- g. Perhubungan
- 1) Isu keamanan Global dan Regional menuntut Kabupaten Badung sebagai destinasi Internasional meningkatkan keamanan wilayahnya
- h. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 1) Peningkatan motivasi dan kapasitas kewirausahaan
 - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri tenun lokal
 - 3) Peningkatan bantuan permodalan kepada UMKM
 - 4) Penyertaan modal pemerintah untuk peningkatan kualitas, kuantitas, sarana dan prasarana pasar tradisional
 - 5) Penguatan promosi potensi industri tenun lokal
 - 6) Penguatan sumber bahan baku dan penggunaan bahan baku tenun lokal

i. Kebudayaan

- 1) Penguatan peran lembaga adat/tradisional sebagai wadah pelestarian adat, seni dan budaya.
- 2) Pelestarian kesenian, budaya serta lembaga adat dan lembaga tradisional lainnya ditengah dinamika kehidupan modern.
- 3) Peningkatan perlindungan asset budaya daerah
- 4) Pemantapan dan peningkatan kualitas kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama
- 5) Mulai mudarnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
- 6) Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
- 7) Lemahnya perlindungan hak cipta dan kurangnya penghargaan (*kerthi budaya*) bagi seniman, sastrawan dan budayawan
- 8) Kekurangan guru agama Hindu.
- 9) Peningkatan srada bhakti bagi generasi muda
- 10) Kurangnya minat generasi muda mendalami tentang Budaya Bali
- 11) Gangguan keamanan terhadap pura dan pratima
- 12) Beralihnya kepemilikan asset pura (pelaba pura)
- 13) Kerancuan penggunaan simbol-simbol keagamaan yang sakral.

j. Perpustakaan

- 1) Peningkatan minat baca masyarakat Kabupaten Badung untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan Daerah.
- 2) Kondisi perpustakaan sekolah dan Desa/Kelurahan yang belum memenuhi standar

k. Kearsipan

- 1) Peningkatan pengelolaan arsip secara baku pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

4.2.4 Urusan Pilihan

Dalam pelaksanaan urusan pilihan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat penanganan meliputi :

a. Kelautan dan Perikanan

- 1) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan serta pengembangan teknologi
- 2) Peningkatan daya saing produk hasil perikanan
- 3) Penataan ruang wilayah yang terpadu bagi peruntukkan sektor perikanan dan kelautan
- 4) Fluktuasi harga sarana produksi perikanan yang sangat tinggi

- 5) Belum optimalnya fungsi TPI / Dermaga Kedonganan
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan

b. Pariwisata

- 1) Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk ramah lingkungan
- 2) Diversifikasi produk pariwisata dan pengembangan Daya Tarik Wisata baru
- 3) Belum tergarapnya secara maksimal potensi kepariwisataan di Kabupaten Badung
- 4) Kurang optimalnya pengelolaan wisata pedesaan
- 5) Belum optimalnya sinergi pertanian, perikanan, kelautan, UMKM dan pelaku pariwisata
- 6) Pesatnya pertumbuhan destinasi/kompetitor baru
- 7) Lemahnya daya saing SDM kepariwisataan di Kabupaten Badung
- 8) Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.

c. Penanggulangan Bencana Daerah

- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 2) Peningkatan kapasitas dalam penanganan kebencanaan

d. Pertanian

- 1) Pembentukan unit usaha untuk membeli hasil panen petani
- 2) Pemanfaatan teknologi dalam penghijauan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas
- 3) Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia peternakan serta pengembangan teknologi
- 4) Peningkatan daya saing produk hasil peternakan
- 5) Penataan ruang wilayah yang terpadu bagi peruntukkan sektor peternakan
- 6) Fluktuasi harga sarana produksi peternakan yang sangat tinggi
- 7) Pemulihan *performance* sapi Bali, serta penurunan jumlah populasi sapi Bali
- 8) Kurangnya sarana maupun prasarana untuk mewujudkan swasembada daging sapi

4.2.5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat penanganan meliputi :

a. Fungsi Lainnya

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
- 2) Optimalisasi analisis jabatan dan pengembangan karir PNS
- 3) Optimalisasi pembinaan terhadap kinerja aparatur pemerintah
- 4) Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- 5) Peningkatan penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
- 7) Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme secara berkelanjutan
- 8) Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
- 9) Peningkatan pelayanan perizinan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
- 10) Optimalisasi pembinaan terhadap disiplin aparatur pemerintah
- 11) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah
- 12) Penetapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Tujuan dilakukannya KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaedah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- b. Mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.
- c. Merumuskan program mitigasi dan alternatif terhadap program pembangunan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan hasil KLHS, maka dapat diidentifikasi beberapa program/kegiatan prioritas yang berdampak lingkungan :

- a. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita;
- b. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura;

- c. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa;
- d. Mendorong pengembangan Agropolitan Petang;
- e. Pembangunan jalan bebas hambatan;
- f. Pengembangan dan pembangunan terminal;
- g. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet;
- h. Pengembangan pengelolaan limbah domestic terpadu;
- i. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
- j. Pengembangan kawasan pariwisata;
- k. Pengembangan kawasan pertanian modern;
- l. Pengembangan kawasan industri; dan
- m. Pengembangan kawasan perikanan.

Adapun maksud dilaksanakannya tahapan pengkajian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dan negatif terhadap indikasi program prioritas dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Demikian juga terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Analisis dimaksud dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

Kajian pengaruh dilakukan dengan memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan memberikan penilaian pengaruh negatif atau positif lalu mendeskripsikan pengaruh tersebut. Selanjutnya menganalisis pengaruh kumulatif dengan disertai usulan adaptasi/mitigasi.

Tabel 4.1 Identifikasi Program Prioritas

<div>Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan</div> <div>Program Prioritas</div>	Pencemaran Air dan Polusi Udara	Degradasi Lahan/hutan	Permasalahan Sampah	Degradasi Pantai	Kegiatan Yang terkait dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	1	0	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
2. Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	1	1	1	0	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat

					perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
3. Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan pusat perdagangan dan jasa 3.Pembangunan drainase 4.Pembangunan sarana/prasarana pengelolaan limbah dan sampah
4.Pengembangan Agropolitan Petang	0	1	1	0	1.Pembangunan terminal 2.Pembangunan Pasar
5.Pembangunan jalan bebas hambatan	0	1	0	0	1.Pengembangan kawasan
6. Pengembangan dan pembangunan terminal	0	1	0	0	1.Pembangunan jalan 2.Pengembangan kawasan
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	1	0	0	1	1.Pengembangan kawasan
8. Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	1	0	0	1	1.Pengembangan pelayanan sanitasi perkotaan
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	1	1	1	0	1.Perluasan permukiman 2.Pembangunan jalan
10. Pengembangan kawasan pariwisata	1	0	1	1	1.Pembangunan jalan 2.Pembangunan akomodasi wisata
11.Pengembangan kawasan pertanian modern	1	1	0	0	1.Pembangunan jalan 2.Pengembangan pasar
12. Pengembangan kawasan industri kerajinan rakyat dan UMKM	1	1	1	0	1.Pengembangan permukiman 2.Pembangunan jalan
13.Pengembangan kawasan perikanan	1	0	1	1	1.Pengembangan pasar ikan

Berdasarkan analisis pengaruh kumulatif diatas, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap masing-masing program prioritas yang dikaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan serta mendeskripsikannya sesuai dengan nilai yang diberikan. Adapun hasil penilaian dan pendeskripsian tersebut dituangkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2 Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Isu-Isu PB							
	Pencemaran Sungai/Pantai		Degradasi lahan/hutan		Masalah Sampah		Degradasi pantai-	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
1. Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita	-	Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan	-	Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan	+	Peningkatan aktivitas dan mobilitas penduduk	+	Peningkatan akses dan aktivitas di kawasan pantai
2.Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	-	Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan	+	Peningkatan berbagai aktivitas layanan, pemukiman dan perdagangan	0	Kemungkinan tidak berpengaruh
3.Mendorong pengembangan PKLp Jimbaran, Kedonganan, Benoa, dan Tanjung Benoa	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata	+	Penataan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman dan pariwisata
4.Pengembangan Agropolitan Petang	-	Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sarana /prasarana	+	Penataan kawasan	0	Tidak berdampak penting
5.Pembangunan jalan bebas hambatan	0	Tidak berdampak penting	-	Alih fungsi lahan/penggunaan lahan produktif	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
6.pengembangan dan pembangunan terminal	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	+	Alih fungsi lahan disekitarnya	-	Peningkatan Intnsitas dan mobilitas di terminal	0	Tidak berdampak penting
7. Penataan DAS Tukad Ayung, Tukad Mati dan Tukad Penet	++	Penataan DAS mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	+	Menghindari alih fungsi DAS	+	Penataan DAS mengurangi pembuangan sampah ke sungai	+	Penataan DAS mengurangi masuknya limbah dan sampah ke pantai
8.Pengembangan pengelolaan limbah domestik terpadu	++	Pengolahan terpadu mengurangi tekanan beban limbah ke sungai	0	Tidak berdampak penting	+	Tidak berdampak penting	++	Pengolahan terpadu mencegah pencemaran air laut
9. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	0	Limbah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	-	Alih fungsi lahan disekitar kawasan	0	Sampah dihasilkan dari peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa	0	Tidak berdampak penting
10. Pengembang-an kawasan pariwisata	0	Air limbah dari akomodasi wisata	+	Penataan kawasan pariwisata	0	Sampah dari aktivitas pariwisata	0	Ancaman sepadan dan ekosistem pantai
11.pengembangan kawasan pertanian modern	--	Pencemaran air karena penggunaan bahan kimia	+	Penataan kawasan dengan payung hukum dan sapras yang layak	0	Tidak berdampak penting	0	Tidak berdampak penting
12.pengembangan kawasan industri	--	Air limbah yang dihasilkan	0	Alih fungsi lahan produktif dan pengembangan	--	Berbagai macam sampah	0	Penurunan kualitas air laut

kerajinan dan UMKM		berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan		kawasan permukiman		yang dihasilkan berbagai aktivitas industri		disekitar-nya
13.Pengembangan kawasan perikanan	--	Air limbah dari pasar dan pengolahan ikan	0	Tidak berdampak penting	-	Sampah dari aktivitas pasar ikan	--	Tekanan ekoistem pantai dari padatnya aktivitas perikanan

Disamping itu pula dilakukan diidentifikasi perkiraan pengaruh khususnya dampak negatif suatu program prioritas terhadap suatu isu pembangunan berkelanjutan serta diuraikan mitigasi yang dapat dilakukan. Analisis dampak tersebut dituangkan kedalam Tabel berikut :

Tabel 4.3 Analisis Pengaruh Negatif Program 1

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai			
Deskripsi Baseline : Infrastruktur pendukung /jaringan kawasan akan memperpadat kawasan dan penurunan kualitas tutupan lahan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang masuk ke sistem perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam pendangkalan dan pencemaran. 2. Penyebabnya adalah pembangunan infrastruktur serta pengembangan permukiman 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama terjadinya gangguan dari kegiatan, dapat terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah domestik terpadu dan penerapan standar pengolahan limbah kegiatan usaha tertentu
Pengaruh kumulatif			
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan terus memperburuk sanitasi kawasan, estetika yang kumuh serta terancam kepunahan biota laut. 2. Dampak positif berupa peningkatan akses dan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada nelayan, dan generasi penerus karena kerusakan lingkungan yang parah.			

Gambar 4.1 Penyangga dan Potensi Ekologis Kuta dan sekitarnya



Tabel 4.4 Analisis Pengaruh Negatif Program 2

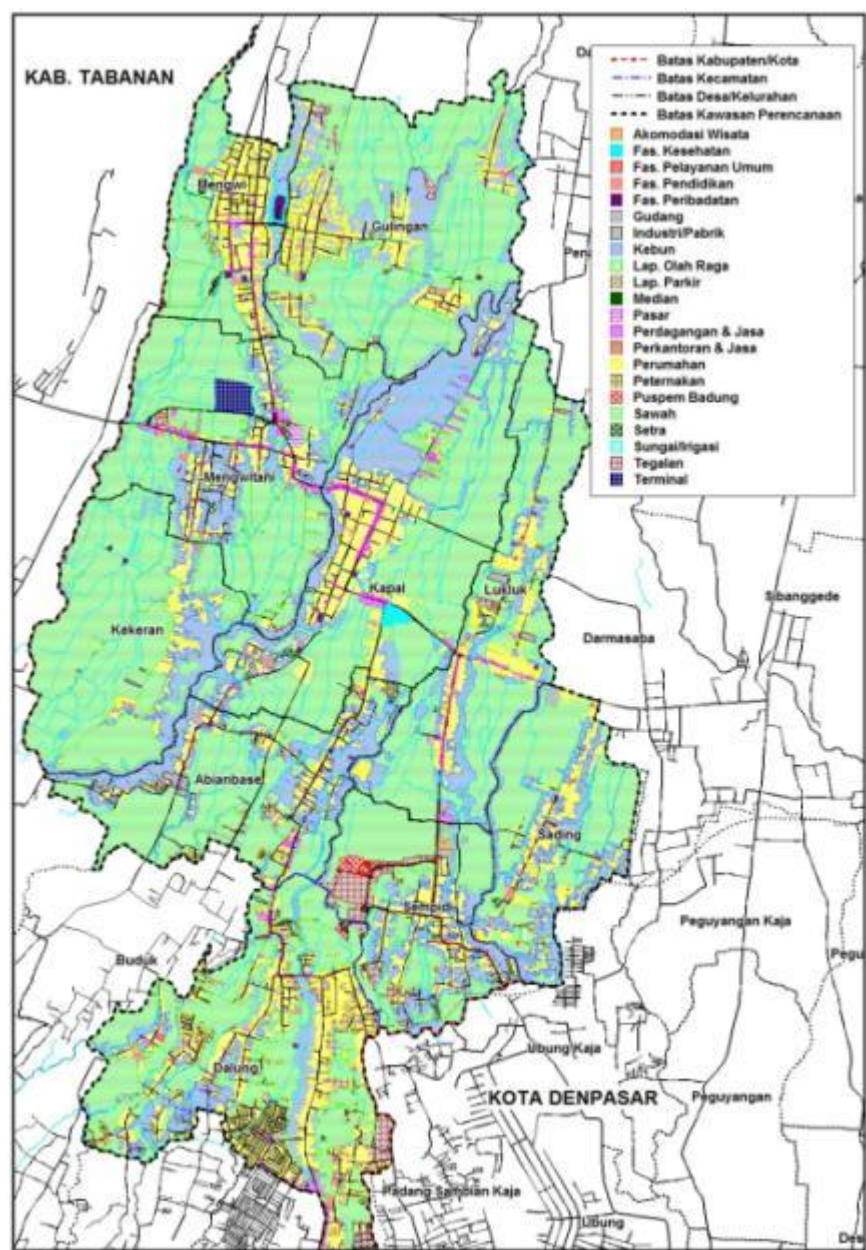
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Penurunan daerah resapan dan kualitas tutupan lahan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Peningkatan peran kawasan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup Kawasan Perkotaan Sarbagita		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan. 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Kuta dan Kuta Utara dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kualitas ruang terbuka hijau.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan penetapan presentasi ruang terbuka hijau dan peningkatan kualitasnya.
Pengaruh kumulatif			
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta			

banjir.
2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir. sementara dampak negative selain masyarakat Kuta dan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.

Tabel 4.5 Analisis Pengaruh Negatif Program 3

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan disekitar kawasan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Percepatan pengembangan PKWp mencakup Kawasan Perkotaan Mangupura		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif 2. Pengaruh tidak langsung adalah kualitas fungsi lahan sebagai daerah pertanian dan resapan berkurang 3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya 4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan kualitas ruang terbuka hijau.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapandaerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif			
1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pusat pemerintaahn dan perkotaan modern dengan infrastruktur yang memadai termasuk penetapan daerah pertanian abadi, presetase ruang yang berfungsi sebagai daerah resapan dan ruang terbuka hijau, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah renta banjir. 2. Dampak positif berupa kawasan tertata dengan ruang terbuka hijau yang layak, menjaga iklim mikro yang baik serta mencegah kawasan rentan banjir serta tetap terjaga produksi pertanian. sementara dampak negative selain masyarakat Mengwidan sekitarnya akan berdampak pada wilayah sekitarnya, dampak perubahan iklim semakin terasa dan kualitas udara memburuk.			

Gambar 4.2 Posisi Strategis Kabupaten Badung sebagai peluang dan ancaman lingkungan



Tabel 4.6 Analisis Pengaruh Negatif Program 4

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Pencemaran Sungai/Pantai			
Deskripsi Baseline : Peningkatan intensitas usaha yang menghasilkan limbah			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah peningkatan jumlah limbah yang mengandung residu pupuk kimia dan pestisida mencemari system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah dampak akumulasi	Untuk meminimalkan dampak harus diterapkan pola tanam yang ramah lingkungan.

	<p>menimbulkan kepunahan biota dan gangguan kesehatan manusia.</p> <p>2. Penyebabnya adalah pola pertanian intensif yang menggunakan bahan kimia secara luas.</p> <p>3. Lokasinya di wilayah Kecamatan Petang kearah hilir</p> <p>4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada upaya control dan pola tanam yang ramah lingkungan terjadi pemulihan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</p>	
Pengaruh kumulatif		
<p>1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta agropolitan yang mampu menjaga produksi pertanian dan peningkatan ekonomi wilayah/perdesaan dengan tidak merusak sumberdaya lahan dan air. Namun kemungkinan terburuk adalah kawasan agropolitan menjadi sumber pencemaran air dan ancaman lingkungan dan manusia yang terkena dampak.</p> <p>2. Dampak positif berupa peningkatan perekonomian bagi masyarakat kuta dan sekitarnya, sementara dampak negative timbulnya pencemaran air yang mengancam wilayah di hilir.</p>		

Tabel 4.7 Analisis Pengaruh Negatif Program 5

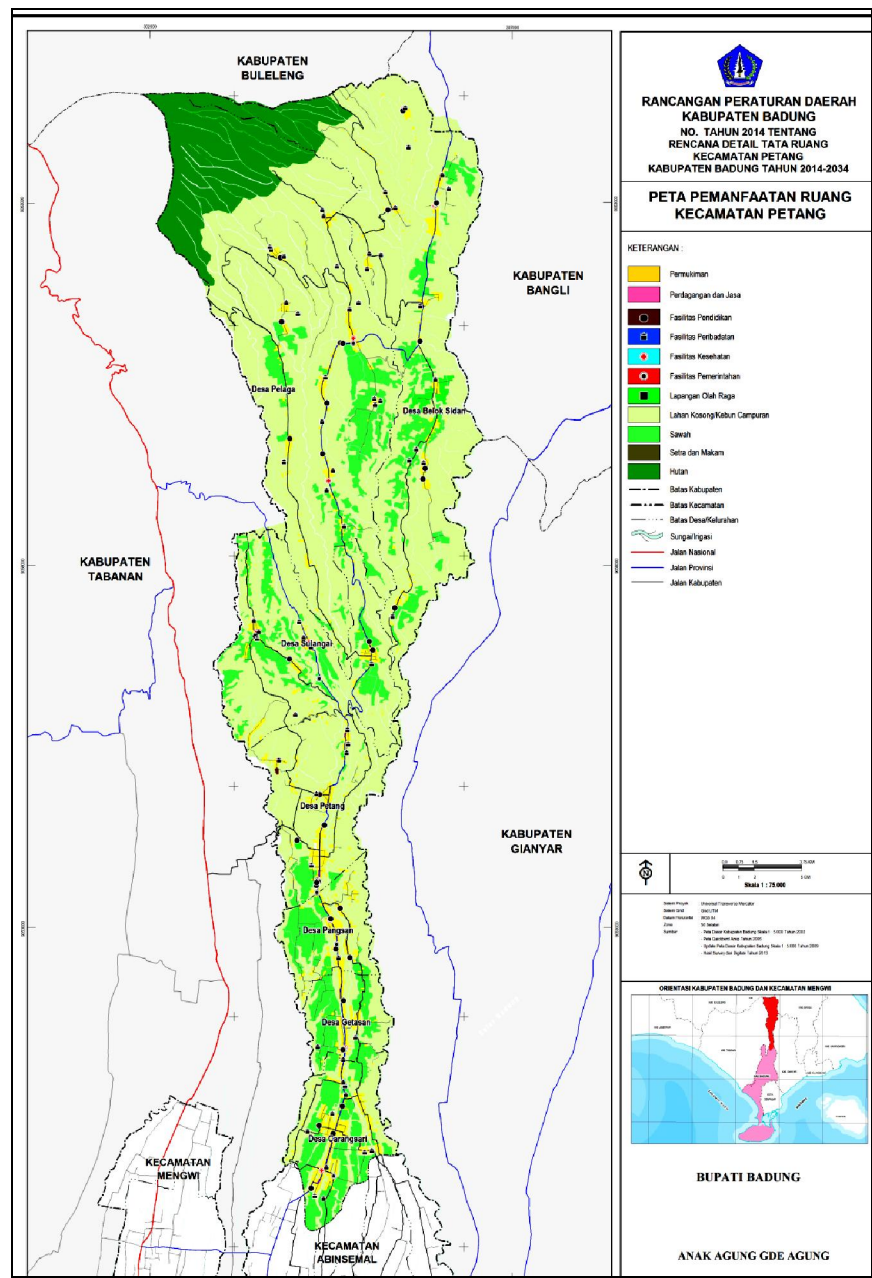
Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pembangunan jalan bebas hambatan		<p>1. Penggunaan lahan pertanian sebagai jalan, pengaruh langsung adalah alih fungsi lahan produktif</p> <p>2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembanan permukiman, pusat perdagangan baru di sekitar jalan sehingga terus mendorong alih fungsi lahan.</p> <p>3. Lokasi rencana jalan bebas hambatan Kuta- Tanah Lot- Soka, , Canggu – Mengwi, lingkaran Mengwi , Batuan –Purnama dan jalan primer arteri di pusat perkotaan Mangupura wilayah dan sekitarnya</p> <p>4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan daerah pertanian abadi dan penutupan ruas tertentu dari akses jalan.</p>	<p>Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.</p>
Pengaruh kumulatif			
<p>3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di Kabupaten Badung maupun antar kabupaten. Kawasan pertanian dan resapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah-daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.</p>			

4. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat yang sebelumnya tidak dilalui jalan, peningkatan perekonomian dengan dibuka akses jalur pariwisata, penjualan produk pertanian serta arus keluar masuk logistik dan berkembangnya daerah/pusat perdagangan baru khususnya di Sarbagita, pusat pemerintahan kabupaten dan Badung utara. Terjaga ruang terbuka hijau dan lahan produktif. sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada social kemasyarakatan.

Tabel 4.8 Analisis Pengaruh Negatif Program 6

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Degradasi lahan/hutan			
Deskripsi Baseline : Peningkatan alih fungsi lahan dan pengurangan lahan produktif			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Perkembangan pusat perdagangan dan jasa		<div>1. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa berdampak secara langsung adalah alih fungsi lahan produktif</div> <div>2. Pengaruh tidak langsung adalah adanya pengembangan permukiman dan kawasan kepadatan baru dan sekitarnya sehingga terus mendorong alih fungsi lahan.</div> <div>3. lokasinya di Badung Selatan (Jimbaran, Kedonganan, uluatu), Mengwi dan sekitarnya.</div> <div>4. Pengaruh akan berlangsung selama tidak ada penetapan kawasan pertanian abadi dan penataan kawasan.</div>	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pembatasan alih fungsi dan penetapan daerah pertanian abadi ruang terbuka hijau.
Pengaruh kumulatif			
<div>1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah tercipta pemerataan perekonomian dengan akses yang cepat dan lengkap di seluruh Kabupaten Badung daerah pertanian dan reapan tetap terjaga, situasi terburuk adalah munculnya pusat-pusat kepadatan dan kemacetan baru, menurunnya daerah pertanian, rendahnya daerah resapan yang berdampak pada daerah rentan banjir, memicu timbulnya daerah daerah dengan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.</div> <div>2. Dampak positif akan dirasakan oleh masyarakat pemerataan akan akses perdagangan dan jasa, peningkatan perekonomian dengan dibuka pusat-pusat perdagangan dan jasa baru.Sementara dampak negatif akan ada alih fungsi lahan dan muncul pusat-pusat kepadatan baru yang dapat berdampak pada sosial kemasyarakatan.</div>			

Gambar 4.3 Potensi Agribisnis Petang sekaligus daerah resapan



Tabel 4.9 Analisis Pengaruh Negatif Program 7

Isu Pembangunan Berkelanjutan :			
Pencemaran Sungai/Pantai			
Air limbah yang dihasilkan berbagai aktivitas industri mengancam ekosistem perairan			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program RPJMD Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Prioritas Semesta Badung	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan Agropolitan Petang		1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah limbah yang masuk ke system perairan. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan limbah sampah yang mengancam kesehatan dan lingkungan.	Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengolahan air limbah industri yang memenuhi baku

	<div>2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan bahan kimia dengan limbah yang besar.</div> <div>3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan sekitarnya</div> <div>4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengolahan limbah yang efektif memenuhi baku mutu yang ditentukan. dapat terjadi pemulihan, jika limbah yang dibuang memenuhi baku mutu /tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</div>	mutu yang ditentukan.
Pengaruh kumulatif		
<div>1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industry yang memadai termasuk pengolahan limbah dan sampah. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan.</div> <div>2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industry tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.</div>		

Tabel 4.10 Analisis Pengaruh Negatif Program 8

Isu Pembangunan Berkelanjutan : Masalah Sampah			
Berbagai macam sampah yang dihasilkan berbagai aktivitas industry			
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan			
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021	Perkiraan Pengaruh		Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan industri kecil dan UMKM	<div>1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah padat yang dihasilkan industri memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sektarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik menimbulkan pencemaran lingkungan perairan.</div> <div>2. Penyebabnya adalah aktivitas industry yang intensif menggunakan berbagai bahan baku dengan sampah limbah yang besar.</div> <div>3. Lokasinya di wilayah Mengwi dan</div>		Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah padat industri yang efektif.

	<p>sekitarnya</p> <p>4. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah padat yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</p>	
Pengaruh kumulatif		
<p>1. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan pusat industri yang mampu memenuhi kebutuhan dan ekspor hasil industri tertentu. Infrastruktur industri yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah padat. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak laiknya pengelolaan sampah dan limbah padat akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran air, gangguan kesehatan dan lingkungan.</p> <p>2. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil industri tertentu, dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam keanekaragaman hayati ekosistem perairan, gangguan kesehatan dan estetika kawasan dan sekitarnya.</p>		

Tabel 4.11 Analisis Pengaruh Negatif Program 9

Isu Pembangunan Berkelanjutan :		
Pencemaran air dan Masalah Sampah		
Besarnya limbah cair dan sampah yang dihasilkan dari aktivitas/pasar ikan		
Pengaruh Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021 terhadap perkembangan isu kedepan		
Program Prioritas RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Perkiraan Pengaruh	Uraian Adaptasi Mitigasi
Pengembangan kawasan Perikanan	<p>1. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/limbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai</p>	<p>Untuk meminimalkan dampak harus dilakukan pengelolaan sampah dan limbah cair perikanan (pasar ikan).</p>

	<ol style="list-style-type: none">2. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sektarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai3. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar.4. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi.5. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.6. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sektarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai7. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar.	
--	--	--

	<div>8. Perkiraan pengaruh langsung adalah besarnya jumlah sampah/lmbah cair yang dihasilkan pasar ikan memicu pencemaran lingkungan dan estetika kawasan dan sekitarnya yang buruk. Sementara pengaruh tidak langsung adalah penumpukan/penanganan sampah yang tidak baik serta akumulasi bahan pencemar menimbulkan pencemaran lingkungan pantai</div> <div>9. Penyebabnya adalah aktivitas pasar ikan yang padat dengan pencucian ikan dan pemrosesan ikan menghasilkan limbah dan sampah yang besar.</div> <div>10. Lokasinya di wilayah Kedonaganan dan Mengwi.</div> <div>11. Pengaruh akan berlangsung jika tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah dan limbah yang tepat tuntas dan efektif. pemulihan, jika pengelolaan sampah yang efektif diterapkan sehingga tidak menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung dan tidak menimbulkan pencemaran pantai dan estetikan kawasan, namun kemampuan pulih dapat berkurang tergantung kapasitas alam.</div>	
Pengaruh kumulatif		
<div>3. Situasi terbaik dari implementasi program pengembangan ini adalah terwujudnya Kabupaten Badung dengan kawasan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan ikan dan ekspor hasil perikanan. Infrastruktur pasar ikan yang memadai termasuk pengolahan sampah dan limbah cair. Namun kemungkinan terburuk adalah tidak tersedia atau tidak lainnya pengelolaan sampah dan limbah cair akan memperburuk lingkungan kawasan dan daerah sekitarnya, pencemaran pantai, dampak buruk bagi pariwisata daerah sekitarnya, gangguan kesehatan dan lingkungan.</div> <div>4. Dampak positif berupa pemenuhan akan hasil dari aktivitas perikanan(pasar ikan), dan perekonomian dan pendapatan, sementara dampak negative akan dirasakan dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam ekosistem pantai, gangguan kesehatan dan kawasan pariwisata sekitarnya.</div>		

4.3.2 Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam Program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 -2021

Upaya pengembangan mitigasi /adaptasi dan/atau alternatif adalah untuk meningkatkan kualitas program RPJMD Semesta Berencana dalam menunjang visi,misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Badung dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi

sebagai dampak program. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan /rencana /program untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul.

Pokja melakukan kegiatan ini dengan melibatkan pemangku kepentingan,termasuk narasumber dan para pakar serta dengan tim penyusun RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut berupa *Focussed Group Disscation* (FGD), *workshop*, panel ataupun forum lain yang dianggap perlu untuk dilakukan. Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12 Perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif	
			Mitigasi	Alternatif
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	<div>1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya</div> <div>2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau</div> <div>3. Dampak terhadap ancaman pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut).</div> <div>4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta</div>	<div>1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/daya tampungnya</div> <div>2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif</div> <div>3. Mendorong kepatuhan/ ketaatan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan</div> <div>4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama</div>	<div>1. Pembatasan/ pelarangan moda transportasi tertentu masuk kawasan</div> <div>2. Penetapan ruang terbuka hijau</div>

2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<ol style="list-style-type: none">1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah.2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan sawah abadi.2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah	<ol style="list-style-type: none">1. integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/ limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan
3	Pengembangan Agropolitan	<ol style="list-style-type: none">1. Dampak terhadap alih fungsi lahan2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi.4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas2. Penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan).3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani	<ol style="list-style-type: none">1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat2. Pengembangan pertanian organik
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	<ol style="list-style-type: none">1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.3. Dampak terhadap gangguan sistem subak	<ol style="list-style-type: none">1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran2. Menutup/ mbatasi akses percabangan jalan TOL.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.
5	Pengembangan Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none">1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan.3. Dampak terhadap gangguan sistem subak.4. Dampak pencemaran lingkungan5. Dampak sosial-kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya.3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kawasan industri khusus

			4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.	
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di kawasan dan sekitarnya.	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai 2. Mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal parkir yang memadai 4. Memberi jarak/radius ruang kawasan dengan daerah wisata terdekat	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus

4.3.2 Rumusan Integrasi Kedalam Rekomendasi

Tim penyusun KLHS berkoordinasi dengan tim perumus program dalam SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan upaya mitigasi dan atau alternative yang telah disusun sebelumnya. Adapun pengintegrasian kedalam rumusan rekomendasi ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.13
Perumusan Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program	Rumusan Mitigasi/Alternatif		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Pengembangan Perkotaan Kuta sebagai PKN dalam lingkup metropolitan Sarbagita	1. Dampak terhadap kepadatan dan kemacetan lalu lintas di Kuta dan sekitarnya 2. Dampak menurunnya luas ruang terbuka hijau 3. Dampak terhadap ancaman	1. Pengembangan infrastruktur yang layak dengan kapasitas/ daya tampungnya 2. Menjaga ruang terbuka hijau dan menetapkan ruang terbuka hijau yang representatif 3. Mendorong kepatuhan/keta	1. Pembatasan/pe- larangan moda transportasi tertentu masuk kawasan 2. penetapan ruang terbuka hijau	Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari metropolitan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya

		<p>pencemaran lingkungan perairan (air tanah, sungai dan laut).</p> <p>4. Dampak sosial-kemasyarakatan dan budaya masyarakat dan lembaga adat Kuta</p>	<p>atan terhadap pengelolaan limbah/sampah dan menegakan baku mutu yang ditentukan</p> <p>4. Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal yang sudah ada dan tumbuh sejak lama</p>		
2	Pengembangan Kawasan Perkotaan Mangupura	<p>1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah.</p> <p>2. Berdampak pada peningkatan kepadatan dan kemacetan lalu lintas.</p> <p>3. Dampak terhadap munculnya perkampungan kumuh perkotaan</p> <p>4. Dampak pencemaran sungai dan permasalahan sampah</p>	<p>1. Penetapan sawah abadi.</p> <p>2. Penyiapan infrastruktur modern dan pengaturan lalu lintas</p> <p>3. Penetapan standar sistem sanitasi rumah tangga, perumahan dan kegiatan usaha</p> <p>4. Penetapan sistem pengelolaan sampah yang representatif dan standar pengolahan air limbah</p>	<p>1. integrasi penerapan sistem pengelolaan sampah/limbah dalam perizinan kegiatan usaha dan perumahan</p>	<p>Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan system sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasyarakatan yang telah tumbuh.</p>
3	Pengembangan Agropolitan	<p>1. Dampak terhadap alih fungsi lahan</p> <p>2. Dampak terhadap pemanfaatan berlebihan sumber daya air</p> <p>3. Dampak terhadap polusi udara dari penggunaan mesin pertanian dan perkembangan transportasi</p>	<p>1. Penetapan kawasan pertanian dan permukiman terbatas</p> <p>2. penerapan teknologi penggunaan sumberdaya air alternatif (air hujan).</p> <p>3. penerapan sistem pertanian ramah lingkungan.</p> <p>4. integrasi dampak perubahan iklim kedalam pola tanam petani</p>	<p>1. peningkatan kesejahteraan petani sehingga petani menjadi primadona mata pencaharian masyarakat setempat</p> <p>2. pengembangan pertanian organik</p>	<p>Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.</p>

		4. Dampak hama/penyakit dari pengembangan pertanian intensif			
4	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. menutup/membatasi akses percabangan jalan TOL.	1. Pembangunan Jalan layang pada ruas-ruas tertentu untuk menjaga sistem subak.	Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta-Canggu-Tanah Lot. Mengwi-Batuan-Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5	Pengembangan Kawasan Industri	1. Dampak terhadap penggunaan lahan sawah 2. Dampak adanya peningkatan alih fungsi lahan. 3. Dampak terhadap gangguan sistem subak. 4. Dampak pencemaran lingkungan 5. Dampak sosial-kemasyarakatan	1. Menghindari penggunaan sawah produktif besar-besaran 2. Penetapan sawah abadi dengan sistem subaknya. 3. Penetapan industri jenis tertentu dengan kajian kelayakan lingkungan 4. Penerapan industri dengan sistem pengolahan limbah/sampah dan penerapan baku mutu lingkungan secara ketat.	1. penetapan kawasan industri khusus	Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan social-masyarakat setempat
6	Pengembangan Kawasan Perikanan	1. Dampak terhadap pencemaran pantai. 2. Dampak/gangguan terhadap daerah wisata sekitarnya 3. Dampak kepadatan lalu lintas di	1. Pembangunan infrastruktur sanitasi/kebersihan yang memadai. 2. mendorong masyarakat menjaga kebersihan kawasan 3. Pembangunan infrastruktur ; jalan dan areal	1. Pembangunan kawasan perikanan khusus	Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan

		kawasan dan sekitarnya.	parkir yang memadai 4.Memberi jarak/radius kawasan daerah wisata terdekat		pesisir.
--	--	-------------------------	--	--	----------

REKOMENDASI

1. Pengembangan infrastruktur Kuta sebagai bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita mempertimbangkan ruang, mutu kelayakan, kapasitas dan budaya.
2. Pengembangan konsep kota taman yang mengintegrasikan sistem sawah dan DAS serta menjaga nilai social kemasysarakatan yang telah tumbuh.
3. Integrasi pertanian ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim kedalam pengembangan kawasan agropolitan Petang.
4. Pembangunan jalan bebas hambatan/ TOL; Kuta- Tanah Lot-Soka serta Mengwi-Batuan- Purnama dengan tidak mengganggu kawasan /lahan pertanian produktif maupun kawasan lindung
5. Penetapan kawasan industri khusus dengan kajian daya tampung dan daya dukung serta luas yang dibatasi berdasarkan kepentingan lingkungan dan kehidupan sosial-masyarakat setempat
6. Pengembangan kawasan perikanan terbatas dengan fasilitas pendukung termasuk pengolahan limbah dan sampah serta pengendalian kerusakan lingkungan pesisir.

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2010-2015 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan tidak bisa terlepas dari tujuan, sasaran dan arah kebijakan jangka panjang daerah sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan nasional.

Pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat Badung yang adil dan makmur, lahir dan bathin, *gemah ripah loh jinawi tata tentram kertha raharja*, secara berkelanjutan dan seimbang.

Berangkat dari komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan, maka terdapat 5 (lima) hal mendasar yang menjadi latar belakang perumusan Visi dan Misi Kabupaten Badung yaitu :

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2010-2015;
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (*resources*) pembangunan Kabupaten Badung sesuai ajaran Tri Sakti.
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan.
5. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**“Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana*
Menuju Masyarakat yang Maju, Damai dan Sejahtera”**

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. **Memantapkan arah pembangunan Badung**, artinya bahwa pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2010-2015 menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Bali dan agenda pembangunan nasional (9 agenda Nawacita).
2. ***Tri Hita Karana***. Secara harfiah *Tri Hita Karana* berasal dari kata (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera, *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.
3. **Maju**, artinya bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi daerah dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sektor pembangunan dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkeadilan.
4. **Damai**, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, distriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat.
5. **Sejahtera**, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 dimaksud, juga berpedoman pada :

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

Ideologi sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung 5 (lima) tahun kedepan adalah Pancasila dan ajaran Trisakti. Kedua Ideologi tersebut berfungsi sebagai penuntun, penggerak, pemersatu masyarakat dan pengarah tujuan pembangunan semesta berencana di Kabupaten Badung.

Selanjutnya penjabaran Trisakti dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diwujudkan dalam bentuk :

a) **Berdaulat dalam Bidang Politik**

Berdaulat dalam Bidang Politik diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan Bali yaitu: *wilayah, sektor, dan sumber daya manusia serta nilai-nilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Bali*; seperti sistem organisasi Desa Adat, Subak; sistem tata ruang dan perumahan tradisional Bali seperti arsitektur tradisional Bali dan *tata palemahan*.

b) **Berdikari dalam Bidang Ekonomi**

Berdikari dalam Bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Badung yang meliputi : pertanian dalam arti luas, industri kerajinan rakyat, UMKM, dan pariwisata berbasis budaya yang mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat Badung secara mandiri, dengan mengutamakan potensi alam dan sumber daya lokal, sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari pihak luar.

c) **Berkepribadian dalam Bidang Budaya**

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

- Budaya sebagai landasan membentuk karakter, mental, dan jati diri serta identitas masyarakat Badung;
- Budaya untuk mengembangkan produk seni dan kerajinan;
- Budaya sebagai landasan pembangunan ekonomi kerakyatan;
- Budaya sebagai landasan pelestarian lingkungan.

2) Landasan konstitusional : **Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

- 3) Landasan filosofis : ***Tri Hita Karana, paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka***, dan kearifan lokal masyarakat lainnya.
- a) Pengertian ***Tri Hita Karana*** sebagaimana disebutkan diatas, tercermin dalam tata kehidupan masyarakat Hindu yang meliputi tiga unsur yaitu :
- *Parahyangan*, berasal dari kata *Hyang* yang artinya Tuhan. Jadi *Parahyangan* berarti Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja *Ida Sang Hyang Widhi Waca*/Tuhan Yang Maha Esa.
 - *Pawongan*, berupa unsur dalam organisasi masyarakat adat sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia.
 - *Palemahan*, yaitu berupa unsur atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan.
- b) ***Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*** artinya bersatu-padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Pola itu tertanam awalnya sebagai “*dresta*”, yakni tradisi adat yang berlaku sejak dahulu atau disebut *kuna dresta*, yang berlaku bagi sekelompok orang (*loka dresta*), dan di suatu tempat tertentu (*desa dresta*).
- 4) Landasan operasional : **9 (Sembilan) agenda Nawacita**.
- Nawacita** merupakan sembilan (9) agenda perubahan menuju Indonesia Hebat terdiri atas :
- a) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
 - b) Membuat Pemerintah yang tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
 - c) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dalam kerangka negara kesatuan.
 - d) Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
 - e) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
 - f) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
 - g) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik.
 - h) Melakukan revolusi karakter bangsa.
 - i) Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

5) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan.

Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung yaitu :

- a. Pro-Budaya /*Pro-Culture*
- b. Pro-Pertumbuhan /*Pro-Growth*
- c. Pro-Tenaga Kerja /*Pro-Job*
- d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*
- e. Pro-Lingkungan /*Pro-Environment*
- f. Pro-Penegakan Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan /*Pro Low Enforcement*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama, dengan tujuan :

Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya toleransi hidup beragama
- 2) Meningkatnya pelestarian adat dan budaya

Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan :

Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, dengan sasaran :

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*, dengan tujuan :

Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional, dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
- 3) Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN

Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan, dengan tujuan :

Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
- 2) Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
- 3) Menurunnya angka kemiskinan

Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan, dengan tujuan :

Meningkatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan, dengan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan tujuan :

1) Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada
- 2) Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada

2) Terwujudnya Pengarusutamaan Gender, dengan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya pengarusutamaan gender

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan tujuan :

1) Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2) Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu, dengan sasaran sebagai berikut :

Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana

Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah, dengan tujuan :

1) Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing, dengan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya daya saing tenaga kerja

2) Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya, dengan tujuan :

1) Meningkatnya ketersediaan pangan, dengan sasaran sebagai berikut :
Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani

2) Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan, dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
- 2) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

(HAL 154 - 155)

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

(HAL 156 – 160)

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera	
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama 2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah 3. Terwujudnya pemerintahan bersih dan bebas KKN
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia 2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat 3. Menurunnya angka kemiskinan
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	1. Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada 2. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
2. Terwujudnya pengarusutamaan gender	Meningkatnya pengarusutamaan gender

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	
Tujuan	Sasaran
1 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	Meningkatnya daya saing tenaga kerja
2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan ketersediaan pangan	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani
2. Meningkatkan daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	1 Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing 2. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera												
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	Indeks kerukunan umat beragama	Survei kerukunan umat beragama	83,50	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Survei : 1)Hubungan sosial antar kelompok agama, 2)Eksistensi keagamaan, konflik dan resolusi konflik, 3)Kebijakan pemerintah, dan 4) Potensi lokal	81,60	82,00	82,40	82,80	83,50	Bakesbangpol Disbud Balitbang
			90%	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	(Jumlah desa budaya/adat maju dibagi dengan jumlah desa budaya/adat yang ada dikalikan seratus) + (jumlah organisasi budaya/sekaa tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya/sekaa kali seratus) dibagi 2	48%	71%	77%	84%	90%	Disbud Bapenda / Pasedahan Agung
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survei indeks kepuasan masyarakat	82	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Survei indeks kepuasan masyarakat	78	79	80	81	82	Setda (Bagian Organisasi) Balitbang DPMTSP Disdukcapil Diskominfo Diskerpus Seluruh Perangkat Daerah

Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	80,10 (A)	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	Hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	76,55 (BB)	76,80 (BB)	78,00 (BB)	80,05 (A)	80,10 (A)	Setda (Bagian Organisasi) Inspektorat Bappeda Seluruh Perangkat Daerah
	2. Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan.	WTP	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK	Pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD Inspektorat Setda (Bag.Pembangunan) Seluruh Perangkat Daerah
	3. Kategori penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A	6. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kategori penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Kategori Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B	BB	BB	A	A	Inspektorat Setda (Bagian Organisasi)
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	82,3	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit	80,3	80,8	81,3	81,8	82,3	Balitbang Disdikpora Diskes DP2KBP3A RSUD Diskop UKMP
	2. Indeks kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	74,5	8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	Indeks Kebahagiaan	Survei tingkat kebahagiaan masyarakat	-	71,5	72,5	73,5	74,5	Balitbang Seluruh Perangkat Daerah
	3. Tingkat kemiskinan	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	2,05-2,00%	9. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk kali 100%	2,30-2,25%	2,25-2,15%	2,15-2,10%	2,10-2,05%	2,05-2,00%	Dinsos Bappeda DPKP Seluruh Perangkat Daerah

Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	7,91%	10. Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Nilai produk sektor UMKM dibagi total nilai PDRB kali 100%	7,73%	7,76%	7,80%	7,85%	7,91%	Diskop UKMP Disperinaker Setda (Bag.Perekonomian)

Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	Persentase pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	95%	11. Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah indikasi pelanggaran Perda dan Perkada yang dapat dicegah dibagi seluruh indikasi pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	80%	85%	90%	95%	100%	Satpol PP Bakesbangpol Setda (Bagian Hukum dan HAM)
				12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	Jumlah pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti dibagi seluruh pengaduan pelanggaran Perda dan Perkada kali 100%	75%	80%	85%	90%	95%	Satpol PP Bakesbangpol Setda (Bagian Hukum dan HAM)
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 [(X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis})]$ <p>Dimana : Xede(1) : Xede untuk harapan hidup, Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan, I(Inc-dis) : Indeks distribusi pendapatan</p>	76,13	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 [(X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis})]$ <p>Dimana : Xede(1) : Xede untuk harapan hidup, Xede(2) : Xede untuk harapan pendidikan, I(Inc-dis) : Indeks distribusi pendapatan</p>	75,61	75,74	75,87	76,00	76,13	DP2KBP3A Balitbang Disperinaker Dinsos Seluruh Perangkat Daerah

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Indeks pencemaran lingkungan hidup	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan	69,40	14. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Indeks Pertanaman (IP)	Penghitungan indikator dari : Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan hutan/lahan Luas tanam dibagi luas lahan kali 100 (dalam setahun)	65,90 185	66,70 195	67,94 205	68,85 215	69,40 230	DLHK Diskes DPUPR Satpol PP Disperpa Setda (Bag.SDA)
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Jumlah Pemenuhan Kapasitas dibagi jumlah kebutuhan kapasitas kali 100%	100%	15. Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Survei Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5	BPBD Diskarmat Dinsos Diskes RSUD Satpol PP DPUPR DPKP
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	0,31%	16. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%	0,335%	0,330%	0,325%	0,320%	0,310%	Disperinaker Dispar Dinsos Diskop UKMP
2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	100,00%	17. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	Jumlah infrastruktur kondisi mantap dibagi jumlah infrastruktur yang ada kali 100%	97,50%	98,00%	99,25%	100,00%	100,00%	DPUPR DPKP Dishub Diskominfo Bappeda Setda (Bag.Pembangunan)

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya												
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama	Formula	Target Kinerja Sasaran / Utama					Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	95,50	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan	% AKG kali Bobot	93,50	94,00	94,50	95,00	95,50	Disperpa Diskan DPUPR
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	Indeks daya saing destinasi pariwisata	Survei Indeks daya saing destinasi pariwisata	75%	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	Jumlah obyek wisata yang berdaya saing dibagi seluruh jumlah obyek wisata kali 100%	64%	66%	69%	72%	75%	Dispar DPUPR Disbud
				Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	Nilai produk sektor Pariwisata dibagi total nilai PDRB kali 100%	28,17	28,36	228,58	28,77	28,96	Dispar Disperpa Diskan Diskominfo DPUPR

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Oleh karena itu berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi pembangunan daerah.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama

Strategi :

- a. Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat.
- b. Pelestarian dan pengembangan adat dan budaya.
- c. Meningkatkan peran subak dalam mengembangkan nilai budaya.

2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- b. Interpretasi hasil survei kepuasan masyarakat
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi.
- d. Memberikan kemudahan dalam berinvestasi.
- e. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan non Perizinan.
- f. Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informasi.
- g. Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di pemerintahan daerah.
- h. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan.
- i. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan Desa berbasis IT.
- j. Melaksanakan Bimtek dan pembinaan terhadap perangkat desa.
- k. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang demokratis.
- l. Melaksanakan Bimtek PKK, BPD, LPM, Pemerintah Desa, Sistem Informasi Posyandu (SIP).

- m. Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat.
 - n. Melaksanakan pembinaan dan Bimtek pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan kelompok TTG.
3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Strategi :

- a. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah.
- b. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelitbangan.
- c. Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan.
- d. Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.
- f. Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan.
- g. Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP).
- h. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana.
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan.
- j. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Diklat/Bimtek/workshop teknis fungsional.
- k. Peningkatan pelayanan administrasi jabatan fungsional.
- l. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.
- m. Meningkatkan pembinaan dan penanganan kasus-kasus.
- n. Melaksanakan monitoring dan penilaian kinerja aparatur.
- o. Peningkatan pelayanan administrasi mutasi aparatur.
- p. Peningkatan pelayanan administrasi pensiun.
- q. Meningkatkan pelayanan seleksi administrasi penyesuaian ijasah.
- r. Meningkatkan pelayanan penghargaan satya lencana.
- s. Meningkatkan pelayanan administrasi pengukuhan gelar pendidikan.
- t. Meningkatkan sistem manajemen kepegawaian.
- u. Penetapan formasi kepegawaian.
- v. Meningkatkan Pelayanan Rekrutmen CPNSD.
- w. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur.
- x. Pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kendaraan Dinas dan gedung kantor.
- y. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor.
- z. Nilai akuntabilitas kinerja yang baik.
- aa. Dokumen perencanaan dikirim tepat waktu.

- bb. Pembinaan dan monitoring swadaya murni masyarakat.
 - cc. Verifikasi administratif permohonan bantuan hibah.
 - dd. Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.
 - ee. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Badung yang baik.
 - ff. Tersedianya koran dan majalah pada sekretariat daerah.
 - gg. Meningkatkan performance karyawan bagian kehumasan.
 - hh. Meningkatkan komunikasi dengan media masa.
 - ii. Meningkatkan kualitas SDM kehumasan.
 - jj. Meningkatkan kualitas informasi.
 - kk. Meningkatkan informasi kegiatan yang dipublikasikan.
 - ll. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan Barang/Jasa.
 - mm. Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sistem Pengadaan Barang / Jasa.
 - nn. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - oo. Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.
 - pp. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus dan penyimpan Barang di Masing-masing PD.
 - qq. Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi.
 - rr. Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan.
 - ss. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE.
 - tt. Peningkatan kualitas SDM dan manajemen.
 - uu. Meningkatkan penerapan pelaksanaan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.
 - vv. Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan *Quality Assurance* dan *Quality Control* serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
- Strategi :
- a. Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia.
 - b. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
 - c. Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas.
 - d. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
 - e. Meningkatkan pengendalian penyakit Menular dan penyakit tidak menular.
 - f. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan yang berkualitas.
 - g. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat.

- h. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.
 - i. Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.
 - j. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing koperasi.
 - k. Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat.
 - l. Peningkatan mutu pendidikan.
 - m. Memperluas akses kesejahteraan sosial.
 - n. Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial.
 - o. Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial.
 - p. Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
 - q. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
 - r. Peningkatan Kualitas RTLH dengan memfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau Program Bedah Rumah.
5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
- Strategi :
- a. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM.
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing koperasi.
 - c. Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri.
6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Strategi :
- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada.
 - b. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada.
 - c. Melaksanakan penanganan permasalahan hukum.
 - d. Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - e. Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada.
 - f. Melaksanakan pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah.
 - g. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.
7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
- Strategi :
- a. Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
 - b. Pemantauan kualitas sanitasi dasar dan lingkungan pemukiman.
 - c. Mengintensifkan pola tanam.

- d. Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - e. Pemenuhan SPM bidang Perumahan.
 - f. Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada korban bencana.
8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Strategi :

- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
 - b. Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor.
 - c. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
 - d. Mengembangkan potensi kewirausahaan.
 - e. Melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri.
 - f. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
 - g. Meningkatkan kualitas SDM pariwisata.
 - h. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing Koperasi.
 - i. Membangun, meningkatkan dan mempreservasi jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, mengembangkan sumber daya air dan sanitasi melalui peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian.
 - j. Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola dinas perhubungan.
 - k. Meningkatkan kelancaran ketertiban dan keselamatan lalu lintas.
 - l. Pembangunan sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman.
 - m. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan.
 - n. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE.
9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Strategi :

- a. Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian.
- b. Memetakan potensi pertanian ,perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung.
- c. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan.
- d. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian.
- e. Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer).

- f. Mendorong terserapnya produk pertanian kabupaten badung oleh sektor pariwisata.
- g. Memantapkan ketahanan pangan keluarga.
- h. Mengembangkan pertanian organik dalam rangka peningkatan mutu pangan.
- i. Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik.
- j. Pengembangan teknologi peternakan.
- k. Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah.
- l. Memetakan potensi perikanan di Kabupaten Badung.
- m. Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan.
- n. Melaksanakan penataan kawasan dan DTW.
- o. Menetapkan kelembagaan pengelola DTW.
- p. Meningkatkan kualitas industri pariwisata.
- q. Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung.
- r. Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan.
- s. Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

6.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan yang diambil oleh Kabupaten Badung dalam jangka waktu Tahun 2016-2021 yaitu :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Arah Kebijakan :

- a. Memperkokoh rasa kebangsaan serta adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat.
- b. Merevitalisasi adat dan budaya.
- c. Memberdayakan subak dalam mengembangkan nilai budaya.

2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah Kebijakan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat dan aman.
- c. Interpretasi hasil rata-rata nilai SKM perangkat daerah.
- d. Mempercepat proses pelayanan kearsipan dan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- e. Meningkatkan akses informasi peluang dan potensi investasi.

- f. Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi.
 - g. Menyederhanakan persyaratan dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - h. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dan Non Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi.
 - i. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi.
 - j. Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - k. Mengatur tata kelola persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi serta kualifikasi SDM sandi.
 - l. Meningkatkan kualitas dokumen statistik kabupaten badung dengan menyajikan data statistik yang akurat dan transparan.
 - m. Fasilitasi penggunaan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan Pemerintahan Desa.
 - n. Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan pembinaan perangkat desa dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan.
 - o. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel.
 - p. Fasilitasi pembinaan dan pelatihan Lembaga Desa.
 - q. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan.
 - r. Mendayagunakan pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan Kelompok TTG.
3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
- Arah Kebijakan :
- a. Meningkatnya harmonisasi antar sekretaris daerah seluruh Indonesia.
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
 - c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di bidang kelitbangan.
 - d. Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - e. Fasilitasi penguatan dan pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - f. Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan.
 - g. Peningkatan kinerja aparatur di Kecamatan Kuta Selatan.
 - h. Meningkatkan integritas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
 - i. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana.
 - j. Dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNSD.
 - k. Dilaksanakan Diklat Kepemimpinan.
 - l. Melaksanakan Bimtek Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.

- m. Melaksanakan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua.
- n. Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- o. Melaksanakan sosialisasi Penilaian Kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja).
- p. Melaksanakan Workshop Pengukuran Indeks profesional ASN.
- q. Melaksanakan diklat revolusi mental dalam membangun karakter pemimpin yang melayani.
- r. Melaksanakan diklat/bimtek/workshop teknis Fungsional sesuai kebutuhan Perangkat daerah.
- s. Melaksanakan Bimtek tingkat menengah pengadaan barang/jasa pemerintah.
- t. Melaksanakan workshop analisa kebutuhan diklat.
- u. Melaksanakan Bimtek pengelolaan informasi publik.
- v. Melaksanakan Diklat dasar POL-PP.
- w. Melaksanakan penilaian Potensi dan kompetensi ASN.
- x. Pelayanan administrasi ijin belajar dan atau tugas belajar.
- y. Usulan kepangkatan jabatan fungsional.
- z. Pengisian jabatan dengan melakukan seleksi pejabat oleh Tim Pansel dan Bupati.
- aa. Memberikan pembinaan ke OPD dan sekolah untuk mengurangi tindakan melanggar disiplin.
- bb. Melakukan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur.
- cc. Usulan naik pangkat dengan paper list.
- dd. Usulan administrasi pensiun dengan sistem *paper list*.
- ee. Melakukan pengembangan karier aparatur.
- ff. Melakukan jemput bola terhadap penghargaan yang diberikan oleh Presiden.
- gg. Melakukan pengembangan karier aparatur.
- hh. Sistem informasi kepegawaian berbasis web.
- ii. Dokumen penetapan Formasi kepegawaian dilaporkan MENPAN RB.
- jj. Rekrutmen CPNSD dengan sistem *Computer Assesment Tes* (CAT).
- kk. Tertib administrasi kepegawaian.
- ll. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
- mm. Peningkatan kualitas perlengkapan dan peralatan kantor.
- nn. Penyusunan AKIP.
- oo. Penyusunan Renstra, Renja, RKA.
- pp. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan.
- qq. Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah.
- rr. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah.
- ss. Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah.
- tt. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bimtek.

- uu. Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - vv. Pendistribusian Koran dan Majalah tepat waktu.
 - ww. Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pelaksanaan Tugas Kehumasan.
 - xx. Terjalinnya komunikasi dan kerajama dengan media masa.
 - yy. Meningkatnya Kemampuan SDM di Bidang Kehumasan.
 - zz. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi.
 - aaa. Meningkatnya informasi dan kegiatan yang dipublikasikan.
 - bbb. Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa.
 - ccc. Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa.
 - ddd. Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).
 - eee. Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - fff. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit kerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - ggg. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
 - hhh. Memfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD.
 - iii. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
 - jjj. Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan.
 - kkk. Pembinaan dan pelatihan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
 - III. Menumbuhkan Pemahaman SPIP pada setiap Aparatur di Masing – masing Perangkat Daerah.
 - mmm. Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola dan penerapan sistem pengawasan.
 - nnn. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal.
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
- Arah Kebijakan :
- a. Meningkatkan akses pembangunan manusia yang berkualitas.
 - b. Menuntaskan dan memantapkan program wajib belajar 12 tahun.
 - c. Memantapkan tata kelola pendidikan.
 - d. Memantapkan kemampuan fisik dan mental peserta didik.
 - e. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care) dengan melibatkan peran serta masyarakat.
 - f. Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peningkatan peran masyarakat untuk sadar gizi.

- g. Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
 - h. Peningkatan Kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan.
 - i. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta.
 - j. Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan.
 - k. Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.
 - l. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.
 - m. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
 - n. Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
 - o. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
 - p. Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi.
 - q. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebahagiaan hidup.
 - r. Meningkatkan kualitas pendidik, peserta didik dan sarana prasarana pendidikan.
 - s. Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
 - t. Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya.
 - u. Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial.
 - v. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
 - w. Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peransertamasyarakat untuk sadar gizi.
 - x. Alokasi Anggaran Bedah Rumah dan Peningkatan Kualitas menjadi Rumah Sehat.
 - y. Pengendalian titik- titik permukiman kumuh.
5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
- Arah Kebijakan :
- a. Peningkatan kualitas UMKM yang kreatif dan berdaya saing.
 - b. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing.
 - c. Membuka akses jaringan kerja sama.

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan tentang Perda dan Perkada.
- b. Mengefektifkan forum-forum masyarakat serta melaksanakan sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada.
- c. Penegakan Hukum.
- d. Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
- e. Mengefektifkan sosialisasi Perda dan Perkada.
- f. Penegakan Hukum.
- g. Peningkatan kualitas hidup perempuan

7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara, dan Indeks Tutupan hutan/Lahan.
- b. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.
- c. Memantapkan program intensifikasi.
- d. Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
- e. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas TRC yang memadai.
- g. Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat.
- h. Penanganan pasca bencana yang komprehensif.
- i. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.
- j. Peningkatan SDM Rumah Sakit.
- k. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya.
- l. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.

8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi.
- b. Pelaksanaan Akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kabupaten Badung.
- c. Meningkatkan jumlah dan kualitas assesor.
- d. Optimalisasi Pembinaan hubungan industrial berorientasi pada Triparti.

- e. Mengintensifkan pelatihan pencari kerja dan tenaga kerja.
 - f. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing.
 - g. Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan.
 - h. Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri.
 - i. Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
 - j. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
 - k. Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi.
 - l. Pembangunan infrastruktur adalah mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata.
 - m. Tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan serta disiplin pengelolaan pegawai pada Dinas Perhubungan.
 - n. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - o. Mewujudkan Lingkungan Yang sehat dan Nyaman didukung PSU yang memadai.
 - p. Mengembangkan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung.
 - q. Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan.
9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.
- Arah Kebijakan :
- a. Mengintensifkan penelitian dan pengembangan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Badung.
 - b. Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah.
 - c. Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah.
 - d. Pendampingan dan pelatihan inovasi pertanian.
 - e. Memperkuat ekonomi subak sebagai unit produksi, unit agribisnis dan agroindustri.
 - f. Membuka akses pemasaran produk pertanian badung kepada sektor Pariwisata.
 - g. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pekarangan, dan lahan tidak produktif untuk mendukung pangan keluarga.
 - h. Mengembangkan demplot pertanian organik dalam rangka peningkatan mutu pangan.
 - i. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).

- j. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging.
- k. Memetakan potensi peternakan di Kabupaten Badung.
- l. Mengembangkan perikanan berdasarkan potensi wilayah.
- m. Meningkatkan produksi perikanan.
- n. Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan.
- o. Penyusunan database DTW.
- p. Pembangunan daya tarik wisata baru.
- q. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana masing - masing DTW.
- r. Perbaikan manajemen pengelolaan DTW.
- s. Peningkatan SDM pengelola DTW.
- t. Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata.
- u. Kajian dan penyusunan database industri pariwisata berbasis IT.
- v. Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan.
- w. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
- x. Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah.
- y. Meningkatkan produksi perikanan.
- z. Meningkatkan tata kelola jaringan pada kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Badung

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera									
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	
Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1 Meningkatnya toleransi hidup beragama	Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat	Memperkokoh rasa kebangsaan serta adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat.	√	√	√	√	√	
	2 Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	1 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya	Merevitalisasi Adat dan Budaya	√	√	√	√	√	
		2 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya	Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal	√	√	√	√	√	
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun					
				2017	2018	2019	2020	2021	
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	√	√	√	√	√	
			2 Meningkatnya Pelayanan Publik yang mudah, cepat dan aman	√	√	√	√	√	
		2 Interpretasi hasil survei kepuasan masyarakat	Interpretasi hasil rata-rata nilai SKM perangkat daerah	√	√	√	√	√	
		3 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi	Mempercepat proses pelayanan kearsipan dan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi	√	√	√	√	√	
		4 Memberikan kemudahan dalam berinvestasi	1 Meningkatkan akses informasi peluang dan potensi investasi	√	√	√	√	√	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
			2 Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi	√	√	√	√	√
		5 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	1 Menyederhanakan Persyaratan dan mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	√	√	√	√	√
			2 Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dan Non Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	√	√	√	√	√
		6 Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi Informasi	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi	√	√	√	√	√
			2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika	√	√	√	√	√
		7 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di pemerintahan daerah	Mengatur tata kelola persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi serta kualifikasi SDM sandi	√	√	√	√	√
		8 Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan	Meningkatkan kualitas dokumen statistik kabupaten badung dengan menyajikan data statistik yang akurat dan transparan	√	√	√	√	√
		9 Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan Desa berbasis IT	Fasilitasi penggunaan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√
		10 Melaksanakan Bimtek dan pembinaan terhadap perangkat desa	Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		11 Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang demokratis	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel	√	√	√	√	√
		12 Melaksanakan Bimtek PKK, BPD, LPM, Pemerintah Desa, Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Fasilitasi pembinaan dan pelatihan Lembaga Desa	√	√	√	√	√
		13 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat	Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan	√	√	√	√	√
		14 Melaksanakan pembinaan dan Bimtek pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan kelompok TTG	Mendayagunakan pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan Kelompok TTG	√	√	√	√	√
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	1 Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Harmonisasi antar Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia	√	√	√	√	√
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	√	√	√	√	√
		2 Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelitbangan	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di bidang kelitbangan	√	√	√	√	√
		3 Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan	Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	√	√	√	√	√
		4 Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi	Fasilitasi penguatan dan pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		5 Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan	√	√	√	√	√
		6 Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan	Peningkatan kinerja aparatur di Kecamatan Kuta Selatan	√	√	√	√	√
		7 Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)	Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	√	√	√	√	√
		8 Meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana	√	√	√	√	√
		9 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	1 Dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNSD	√	√	√	√	√
			2 Dilaksanakan Diklat Kepemimpinan	√	√	√	√	√
		10 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Diklat/Bimtek/workshop teknis fungsional	1 Melaksanakan Bimtek Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	√	√	√	√	√
			2 Melaksanakan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	√	√	√	√	√
			3 Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	√	√	√	√	√
			4 Melaksanakan sosialisasi Penilaian Kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja)	√	√	√	√	√
			5 Melaksanakan Workshop Pengukuran Indek profesional ASN	√	√	√	√	√
			6 Melaksanakan diklat revolusi mental dalam membangun karakter pemimpin yang melayani	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
			7 Melaksanakan diklat/bimtek/workshop teknis Fungsional sesuai kebutuhan Perangkat daerah	√	√	√	√	√
			8 Melaksanakan Bimtek tingkat menengah pengadaan barang/jasa pemerintah	√	√	√	√	√
			9 Melaksanakan workshop analisa kebutuhan diklat	√	√	√	√	√
			10 Melaksanakan Bimtek pengelolaan informasi publik	√	√	√	√	√
			11 Melaksanakan Diklat dasar POL-PP	√	√	√	√	√
			12 Melaksanakan penilaian Potensi dan kompetensi ASN	√	√	√	√	√
			13 Pelayanan administrasi ijin belajar dan atau tugas belajar	√	√	√	√	√
		11 Peningkatan pelayanan administrasi jabatan fungsional	Usulan kepangkatan jabatan fungsional	√	√	√	√	√
		12 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	Pengisian jabatan dengan melakukan seleksi pejabat oleh Tim Pansel dan Bupati	√	√	√	√	√
		13 Meningkatkan Pembinaan dan Penangan Kasus-Kasus	Memberikan pembinaan ke OPD dan sekolah untuk mengurangi tindakan melanggar disiplin	√	√	√	√	√
		14 Melaksanakan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur	Melakukan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		15 Peningkatan pelayanan administrasi mutasi Aparatur	Usulan naik pangkat dengan paper list	√	√	√	√	√
		16 Peningkatan pelayanan administrasi pensiun	Usulan administrasi pensiun dengan sistem paper list	√	√	√	√	√
		17 Meningkatkan pelayanan seleksi administrasi Penyesuaian ijasah	Melakukan pengembangan karier aparatur	√	√	√	√	√
		18 Meningkatkan pelayanan Penghargaan Satya Lencana	Melakukan jemput bola terhadap penghargaan yang di berikan oleh Presiden	√	√	√	√	√
		19 Meningkatkan pelayanan administrasi pengukuhan gelar pendidikan	Melakukan pengembangan karier aparatur	√	√	√	√	√
		20 Meningkatkan Sistem manajemen kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian berbasis web	√	√	√	√	√
		21 Penetapan Formasi Kepegawaian	Dokumen penetapan Formasi kepegawain dilaporkan MENPAN RB	√	√	√	√	√
		22 Meningkatkan Pelayanan Rekrutmen CPNSD	Rekrutmmen CPNSD dengan sistem Computer Assesment Tes (CAT)	√	√	√	√	√
		23 Peningkatan pelayanan administasi perkantoran dan kinerja aparatur	Tertib administrasi kepegawaian	√	√	√	√	√
		24 Pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kendaraan Dinas dan gedung kantor	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	√	√	√	√	√
		25 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Peningkatan kualitas perlengkapan dan peralatan kantor	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		26 Nilai Akuntabilitas kinerja yang baik	Penyusunan AKIP	√	√	√	√	√
		27 Dokumen perencanaan dikirim tepat waktu	Penyusunan Renstra, Renja, RKA	√	√	√	√	√
		28 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat	Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan	√	√	√	√	√
		29 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah	Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah	√	√	√	√	√
		30 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.	1 Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah	√	√	√	√	√
			2 Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah	√	√	√	√	√
		31 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik	1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek	√	√	√	√	√
			2 Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	√	√	√	√	√
		32 Tersedianya Koran dan Majalah pada sekretariat Daerah	Pendistribusian Koran dan Majalah tepat waktu	√	√	√	√	√
		33 Meningkatkan Performance Karyawan Bagian Kehumasan	Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pelaksanaan Tugas Kehumasan	√	√	√	√	√
		34 Meningkatkan komonikasi dengan media masa	Terjalinnnya komonikasi dan kerajama dengan media masa	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	2 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	35 Meningkatkan Kualitas SDM Kehumasan	Meningkatnya Kemampuan SDM di Bidang Kehumasan	√	√	√	√	√
		36 Meningkatkan kualitas informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	√	√	√	√	√
		37 Meningkatnya informasi kegiatan yang dipublikasikan	Meningkatnya informasi dan kegiatan yang dipublikasikan	√	√	√	√	√
		38 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	√	√	√	√	√
		39 Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sistem Pengadaan Barang / Jasa	Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa	√	√	√	√	√
		1 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).	√	√	√	√	√
			2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola Keuangan dan Aset Daerah	√	√	√	√	√
		2 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit kerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku	√	√	√	√	√
		3 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus dan penyimpan Barang di Masing-masing PD	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur	√	√	√	√	√
		4 Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi	Menfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	3 Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	5 Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	√	√	√	√	√
		6 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE	Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan	√	√	√	√	√
		7 Peningkatan kualitas SDM dan manajemen	Pembinaan dan pelatihan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik	√	√	√	√	√
		1 Meningkatkan Penerapan Pelaksanaan SPIP di Masing - masing Perangkat Daerah	1 Menumbuhkan Pemahaman SPIP pada setiap Aparatur di Masing - masing Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
			2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola dan penerapan sistem pengawasan	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal	√	√	√	√	√
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1 Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia	Meningkatkan akses pembangunan manusia yang berkualitas	√	√	√	√	√
		2 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal	1 Menuntaskan dan memantapkan program wajib belajar 12 tahun	√	√	√	√	√
			2 Memantapkan tata kelola pendidikan	√	√	√	√	√
			3 Memantapkan kemampuan fisik dan mental peserta didik	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		3 Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care). dengan melibatkan peran serta masyarakat	√	√	√	√	√
		4 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat	Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi	√	√	√	√	√
		5 Meningkatkan pengendalian penyakit Menular dan penyakit tidak menular	Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular	√	√	√	√	√
		6 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan yang berkualitas	1 Peningkatan Kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan	√	√	√	√	√
			2 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta	√	√	√	√	√
			3 Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√
			4 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.	√	√	√	√	√
			5 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	√	√	√	√	√
		7 Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	√	√	√	√	√
		8 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.	Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	2 Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	9 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.	Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).	√	√	√	√	√
		10 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi	√	√	√	√	√
		1 Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebahagiaan hidup	√	√	√	√	√
		2 Peningkatan mutu pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidik, peserta didik dan sarana prasarana pendidikan	√	√	√	√	√
	3 Menurunnya angka kemiskinan	1 Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
		2 Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial	Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya	√	√	√	√	√
		3 Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√
		4 Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	√	√
		5 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat	Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peranserta masyarakat untuk sadar gizi	√	√	√	√	√
		6 Peningkatan Kualitas RTLH dengan memfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau Program Bedah Rumah	1 Alokasi Anggaran Bedah Rumah dan Peningkatan Kualitas menjadi Rumah Sehat	√	√	√	√	√
			2 Pengendalian titik- titik permukiman kumuh	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing UMKM	Peningkatan kualitas UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing	√	√	√	√	√
		2 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing	√	√	√	√	√
		3 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri	Membuka akses jaringan kerja sama	√	√	√	√	√
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	1 Meningkatkan pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	1 Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada	Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Perda dan Perkada	√	√	√	√	√
		2 Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	Mengefektifkan forum-forum masyarakat serta melaksanakan sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	√	√	√	√	√
		3 Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum	Penegakan Hukum	√	√	√	√	√
	2 Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada	1 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan	√	√	√	√	√
		2 Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada	Mengefektifkan sosialisasi Perda dan Perkada	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
2 Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	3 Meningkatnya pengarusutamaan gender	3 Melaksanakan Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah	Penegakan Hukum	√	√	√	√	√
		1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kualitas hidup perempuan	√	√	√	√	√
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana								
1 Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Indeks kualitas air, udara, dan IndeksTutupan hutan/Lahan	√	√	√	√	√
2 Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	2 Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	2 Pemantauan kualitas sanitasi dasar dan lingkungan pemukiman	Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak	√	√	√	√	√
		3 Mengintensifkan pola tanam	Memantapkan program intesifikasi	√	√	√	√	√
		1 Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan	√	√	√	√	√
			2 Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan	√	√	√	√	√
			3 Peningkatan kuantitas dan kualitas TRC yang memadai.	√	√	√	√	√
			4 Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat	√	√	√	√	√
			5 Penanganan pasca bencana yang komprehensif	√	√	√	√	√
	6 Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana	√	√	√	√	√		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
			7 Peningkatan SDM Rumah Sakit	√	√	√	√	√
		2 Pemenuhan SPM bidang Perumahan	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	√	√	√	√	√
		3 Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada korban bencana	Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah	√	√	√	√	√
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	1 Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor	1 Pelaksanaan Akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
			2 Meningkatkan jumlah dan kualitas assesor	√	√	√	√	√
		3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	Optimalisasi Pembinaan hubungan industrial berorientasi pada Triparti	√	√	√	√	√
		4 Mengembangkan potensi kewirausahaan	1 Mengintensifkan pelatihan pencari kerja dan tenaga kerja	√	√	√	√	√
			2 Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing	√	√	√	√	√
			3 Mengintensifkan pelatihan kewirahusahaan	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
2 Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	2 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	5 Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	Membuka akses kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	√	√	√	√	√
		6 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah	√	√	√	√	√
		7 Meningkatnya kualitas SDM pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata	√	√	√	√	√
		8 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi	√	√	√	√	√
		1 Membangun, meningkatkan dan mempreservasi jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, Mengembangkan Sumber Daya Air dan sanitasi melalui Peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian	Pembangunan infrastruktur adalah mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata	√	√	√	√	√
		2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Perhubungan	Tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan serta disiplin pengelolaan pegawai pada Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√
		3 Meningkatkan kelancaran ketertiban dan keselamatan lalu lintas	Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		4 Pembangunan sarana Prasarana dasar perumahan dan permukiman	Mewujudkan Lingkungan Yang sehat dan Nyaman didukung PSU yang memadai	√	√	√	√	√
		5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan.	Mengembangkan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
		6 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE	Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan	√	√	√	√	√
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya								
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatnya ketersediaan pangan	1 Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	1 Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian	Mengintensifkan penelitian dan pengembangan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
		2 Memetakan potensi pertanian ,perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung	Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	√	√	√	√	√
		3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan	Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah	√	√	√	√	√
		4 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian	Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	√	√	√	√	√
		5 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer)	Memperkuat ekonomi subak sebagai unit produksi, unit agribisnis dan agroindustri	√	√	√	√	√
		6 Mendorong terserapnya produk pertanian kabupaten badung oleh sektor pariwisata.	Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor Pariwisata.	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
		7 Memantapkan ketahanan pangan keluarga	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pekarangan. dan lahan tidak produktif untuk mendukung pangan keluarga	√	√	√	√	√
		8 Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan	Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan	√	√	√	√	√
		9 Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik	Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming)	√	√	√	√	√
		10 Pengembangan teknologi peternakan	Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	√	√	√	√	√
		11 Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah	Memetakan potensi peternakan di Kabupaten Badung	√	√	√	√	√
		12 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung	Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah	√	√	√	√	√
		13 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan	1 Meningkatkan produksi perikanan 2 Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
2 Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	2 Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	1 Melaksanakan penataan kawasan dan DTW	1 Penyusunan database DTW	√	√	√	√	√
			2 Pembangunan daya tarik wisata baru	√	√	√	√	√
			3 Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana masing - masing DTW	√	√	√	√	√
		2 Menetapkan kelembagaan pengelola DTW	1 Perbaikan manajemen pengelolaan DTW	√	√	√	√	√
			2 Peningkatan SDM pengelola DTW	√	√	√	√	√

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
	3 Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	1 Meningkatkan kualitas industri pariwisata	1 Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata	√	√	√	√	√
			2 Kajian dan penyusunan database industri pariwisata berbasis IT	√	√	√	√	√
			3 Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan	√	√	√	√	√
			4 Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	√	√	√	√	√
		2 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung	Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah	√	√	√	√	√
			Meningkatkan produksi perikanan	√	√	√	√	√
		4 Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan tata kelola jaringan pada kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	√	√	√	√	√

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan dari setiap misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan kiat pemerintah dalam bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum yang berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja dan program pembangunan daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pengambilan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka disusun program pembangunan daerah yang merupakan arahan yang lebih jelas dan nyata dari setiap strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Badung, sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Bali dan sasaran pembangunan jangka menengah Nasional.

Program-Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah berdasarkan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- b. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Peningkatan, Penelitian dan Pengembangan.
- g. Program Pengembangan Nilai Budaya.
- h. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- i. Perencanaan dan Penganggaran PD.
- j. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan, Penelitian dan Pengembangan.
- b. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- c. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

- d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- h. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
- i. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
- j. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
- k. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- l. Program Penataan Administrasi kependudukan.
- m. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- n. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- o. Program Pengembangan Data Informasi.
- p. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM.
- q. Program Peningkatan kapasitas pelayanan publik.
- r. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- s. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa.
- t. Program Pengelolaan Persandian Daerah.
- u. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik.
- v. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- w. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- x. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- y. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.
- z. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- aa. Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan.

3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Perencanaan Tata Ruang.
- b. Program Pengembangan Data/informasi.
- c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- d. Program rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
- e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- f. Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Kehutanan.
- g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- h. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- i. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- j. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/ kota.
- l. Program peningkatan Disiplin aparat.

- m. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- n. Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa.
- o. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- p. Program Peningkatan, Penelitian dan Pengembangan.
- q. Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- r. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- s. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- t. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- u. Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.
- v. Program Pengembangan Nilai Budaya.
- w. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
- x. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- y. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah.
- z. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- aa. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- bb. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- cc. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- dd. Program Peringatan hari besar nasional.
- ee. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
- ff. Program Penataan Administrasi kependudukan.
- gg. Program Kebersihan lingkungan.
- hh. Program Pengentasan Kemiskinan.
- ii. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- jj. Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah.
- kk. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- ll. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
- mm. Program Penilaian kinerja ASN.
- nn. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
- oo. Program Peningkatan SDM.
- pp. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- qq. Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
- rr. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
- ss. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- tt. Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan.
- uu. Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.
- vv. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
- ww. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- xx. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

- yy. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.
- zz. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.
- aaa. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- bbb. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- ccc. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
- ddd. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- eee. Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah.
- fff. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- ggg. Program Asuransi Barang Milik Daerah.
- hhh. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- iii. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal.
- jjj. Program Pelaksanaan Operasional Administrasi Pembangunan.
- kkk. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- III. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan, Penelitian dan Pengembangan.
- b. Program Pendidikan anak usia dini.
- c. Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
- d. Program Pendidikan Non Formal.
- e. Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Teknologi dan Informasi.
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- h. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- i. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- j. Program Perencanaan dan Penganggaran PD.
- k. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- l. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.
- m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
- n. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
- o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- p. Program Keluarga Berencana.
- q. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
- r. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- s. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- t. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- u. Program Upaya Kesehatan masyarakat.
- v. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
- w. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya.
- x. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
- y. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.
- z. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- aa. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
- bb. Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
- cc. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- dd. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- ee. Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis.
- ff. Program Pemeliharaan Alat Kesehatan.
- gg. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- hh. Program Pengelolaan BLUD RSUD.
- ii. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
- jj. Program Peningkatan, Penelitian dan Pengembangan.
- kk. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
- ll. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- mm. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- nn. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- oo. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- c. Program Pengembangan dan Peningkatan Ekspor.
- d. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM.
- e. Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif.
- f. Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi.
- g. Program Peningkatan Tertib Ukur.
- h. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

- k. Program Perencanaan dan Penganggaran PD.
- l. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
- m. Program peningkatan kemampuan teknologi Industri.
- n. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi.
- o. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal.
- b. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- c. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- d. Program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- g. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- i. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- j. Program Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah.
- k. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- l. Program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
- m. Program Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
- n. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender.
- o. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
- p. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
- q. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- r. Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan.
- s. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah.
- t. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- u. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- v. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Sosial Lingkungan Sehat.
- b. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.
- c. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.
- d. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

- e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
- g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
- h. Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
- i. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.
- j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- k. Program Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- l. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- m. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- n. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- o. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA).
- p. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.
- q. Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- r. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- s. Program Penanganan Darurat Bencana.
- t. Program Pemulihan Pasca Bencana.
- u. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- v. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
- w. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.
- x. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial.
- y. Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan.
- z. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- aa. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- bb. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
- cc. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
- c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- d. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- e. Program Pengembangan Kemitraan.
- f. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
- g. Program Pembangunan Peningkatan dan Preveresi Jalan dan Jembatan.
- h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- i. Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi.

- j. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- k. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- l. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- m. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- n. Program Perencanaan dan Penganggaran PD.
- o. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- p. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- q. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
- r. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
- s. Program Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman.
- t. Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman.
- u. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal.
- v. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa.
- w. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Program yang mendukung misi ini adalah :

- a. Program Peningkatan Produksi Pertanian.
- b. Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Pertanian.
- c. Program Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan).
- d. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan.
- f. Program Pengelolaan, Pengembangan Sumber Daya Air.
- g. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian.
- h. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
- i. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
- j. Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang ASUH.
- k. Program Penataan Bangunan/Gedung.
- l. Program Pengembangan Nilai Budaya.
- m. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- n. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- o. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- p. Program pengembangan pemasaran pariwisata.
- q. Program Pembangunan Peningkatan dan Perbaikan Jalan dan Jembatan.
- r. Program pengembangan dan pengelolaan produk wisata.
- s. Program pengembangan kemitraan.
- t. Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan dan Kelautan.

- u. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
- v. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
- w. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
- x. Program Pemberdayaan Masyarakat Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Sumber Daya Kelautan
- y. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat.
- z. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- aa. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata.
- bb. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- cc. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa.
- dd. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dalam Penyerapan Literasi Media.

Keterkaitan antara sasaran, strategi, arah kebijakan serta program pembangunan daerah disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Badung

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Meningkatnya Toleransi hidup beragama	1 Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat	1 Memperkokoh rasa kebangsaan serta adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat	1 Indeks kerukunan umat beragama	81,6	83,5	1 Program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6 Program Peningkatan, Penelitian dan Pengembangan 7 Program Pengembangan Nilai Budaya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan	Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Balitbang Disbud

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	1 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya	1 Merevitalisasi Adat dan Budaya	1 Derajat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	-	90%	1 Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Disbud
							2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Disbud
							3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebudayaan	Disbud
							4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebudayaan	Disbud
							5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kebudayaan	Disbud
		2 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya	2 Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal	2 Persentase lembaga subak yang masih aktif	100%	100%	6 Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kebudayaan	Disbud
							7 Program Pengembangan Nilai Budaya	Fungsi Keuangan	Bapenda
							8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Keuangan	Bapenda
							9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fungsi Keuangan	Bapenda
							10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Keuangan	Bapenda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	1 Indeks kepuasan masyarakat	76	82	11 Perencanaan dan Penganggaran PD	Fungsi Keuangan	Bapenda
							12 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Keuangan	Bapenda
							1 Program Peningkatan, Penelitian dan Pengembangan	Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
							2 Program kelembagaan dan ketatalaksanaan	Fungsi administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Organisasi)
			2 Meningkatnya Pelayanan Publik yang mudah, cepat dan aman	2 Indeks kepuasan masyarakat	(Baik) 76,00	(Sangat Baik)	3 Program kelembagaan dan ketatalaksanaan	Fungsi administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Organisasi)
		2 Interpretasi hasil survei kepuasan masyarakat	3 Interpretasi hasil rata-rata nilai SKM perangkat daerah	3 Jumlah laporan SPM	1 laporan	1 laporan	4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Maksimal	Fungsi administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Organisasi)
		3 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi	4 Mempercepat proses pelayanan kearsipan dan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi	4 Indeks kepuasan masyarakat	79,75	82,00	5 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Diskerpus
							6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kearsipan	Diskerpus
							7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	Kearsipan	Diskerpus

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kearsipan	Diskerpus
							9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kearsipan	Diskerpus
							10 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Kearsipan	Diskerpus
							11 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	Diskerpus
							12 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kearsipan	Diskerpus
							13 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Kearsipan	Diskerpus
							14 Program Penataan Administrasi kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Capil	Disdukcapil
							15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Kependudukan dan Capil	Disdukcapil
							16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Administrasi Kependudukan dan Capil	Disdukcapil

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 Memberikan kemudahan dalam berinvestasi	5 Meningkatkan Akses Informasi, Peluang dan Potensi Investasi	5 Indeks Kemudahan Berinvestasi	66.47	77.50	17 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Administrasi Kependudukan dan Capil	Disdukcapil
							18 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Administrasi Kependudukan dan Capil	Disdukcapil
							19 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	DPM PTSP
							20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penanaman Modal	DPM PTSP
							21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penanaman Modal	DPM PTSP
			6 Memberikan Kepastian Hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi	6 Persentase Realisasi Investasi	80%	100%	22 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Penanaman Modal	DPM PTSP
							23 Program Pengembangan Data Informasi	Penanaman Modal	DPM PTSP
				7 Persentase Pertumbuhan Investasi	9%	13%	24 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Unggulan Kompetitif UMKM	Penanaman Modal	DPM PTSP
							25 Progran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penanaman Modal	DPM PTSP

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	7 Menyederhanakan Persyaratan dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan	8 Persentase penyelesaian perizinan non perizinan tepat waktu	90%	98%	26 Program Peningkatan kapasitas pelayanan publik	Penanaman Modal	DPM PTSP
							27 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penanaman Modal	DPM PTSP
			8 Mengembangkan sistem informasi manajemen (SIM) perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi komunikasi	9 Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM)	33%	80%	28 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan media massa	Penanaman Modal	DPM PTSP
							29 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (RENJA, RKA)	Penanaman Modal	DPM PTSP
		6 Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi Informasi	9 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi	10 Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK	-	100%	30 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
			10 Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika	11 Arah kebijakan tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan serta disiplin pengelolaan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika	-	85,38	31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
							32 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
							33 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di pemerintahan daerah	11 Mengatur tata kelola persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi serta kualifikasi SDM sandi	12 Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang-undangan	-	100%	34 Program perencanaan dan penganggaran SKPD 35 Program Pengelolaan Persandian Daerah	Komunikasi dan Informatika Persandian	Diskominfo Diskominfo
		8 Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan	12 Meningkatkan kualitas dokumen statistik kabupaten badung dengan menyajikan data statistik yang akurat dan transparan	13 Jumlah Dokumen Statistik Kabupaten Badung Yang Dipublikasikan Tepat Waktu	-	3.750 dokumen	36 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Statistik	Diskominfo
		9 Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan Desa berbasis IT	13 Fasilitasi penggunaan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan Pemerintahan Desa	14 Persentase Desa yang menggunakan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan (Prodeskel, Siskeudes, SIP, SIAK)	20%	100%	37 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 38 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD DPMD
		10 Melaksanakan Bimtek dan pembinaan terhadap perangkat desa	12 Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan pembinaan perangkat desa dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan	15 Persentase aparatur yang berkompeten dalam management Pemerintahan Desa	-	100%	39 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11 Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang demokratis	13 Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel	16 Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku	9 Desa	0	40 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		12 Melaksanakan Bimtek PKK, BPD, LPM, Pemerintah Desa, Sistem Informasi Posyandu (SIP)	14 Fasilitasi pembinaan dan pelatihan Lembaga Desa	17 Persentase Kelembagaan Desa (BPD, LPM, PKK dan BKAD) yang berperan aktif dalam Pemerintahan dan Pembangunan Desa	68%	100%	41 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
				18 Jumlah PKK yang aktif	606 TP PKK	606 TP PKK	42 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
				19 Jumlah posyandu yang aktif	547 posyandu	547 posyandu	43 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		13 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat	15 Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan	20 Jumlah peningkatan swadaya murni masyarakat	-	90%	44 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
					-	34 Desa	45 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		14 Melaksanakan pembinaan dan Bimtek pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan kelompok TTG	16 Mendayagunakan pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan Kelompok TTG	21 Jumlah Pasar Desa yang aktif dan sehat	32 Pasar Desa	38 Pasar Desa	46 Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	1 Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Meningkatnya Harmonisasi antar Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 2 Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	22 Persentase kelompok TTG yang aktif	10%	60%	47 Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
				23 Jumlah Bumdesa yang terbentuk dan aktif	27 Bumdesa	40 Bumdesa	48 Program Pengembangan Lembaga ekonomi Pedesaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
				1 Jumlah iuran FORSESDASI yang dibayar	1 Orang	5 Orang	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag.Organisasi)
				2 Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	BB (75,89)	A (80,10)	2 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi administrasi Pemerintahan	Setda (Bag.Organisasi)
							3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Bappeda
					A (84,74)	A (90,50)	4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Perencanaan	Bappeda
							5 Program Perencanaan Tata Ruang	Perencanaan	Bappeda
							6 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Perencanaan	Bappeda
							7 Program Pengembangan Data/informasi	Perencanaan	Bappeda

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					A (84,74)	A (90,50)	8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 9 Program pelayanan administrasi perkantoran 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 13 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 14 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perencanaan Perencanaan Perencanaan Perencanaan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan	Bappeda Bappeda Bappeda Bappeda Setda (Bag. SDA) Setda (Bag. SDA) Setda (Bag. SDA) Setda (Bag. SDA)
					BB (75,89)	A (80,10)	16 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Keuangan)

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Data tidak tersedia	89,00%	17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Keuangan)
					Data tidak tersedia	100,00%	18 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Keuangan)
					Data tidak tersedia	100,00%	19 Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/ kota	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Keuangan)
							20 Program pelayanan administrasi perkantoran	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Umum)
							21 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Umum)
							22 Program peningkatan Disiplin aparatur	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Umum)
							23 Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Umum)
							24 Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Umum)
					-	82,00%	25 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Perwat)

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							26 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Perwat)
							27 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Perwat)
							28 Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan	Urusan Pilihan	Setda (Bag. Perekonomian)
							29 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan	Urusan Pilihan	Setda (Bag. Perekonomian)
							30 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Perekonomian)
							31 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Perekonomian)
							32 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Perekonomian)
							33 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Perekonomian)
				3 Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi	72,78	78,60	34 Program Administrasi Perkantoran	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Setwan
							35 Program Peningkatan sarana dan prasarana	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Setwan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							36 Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Setwan
							37 Program Peningkatan kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Setwan
							38 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Setwan
				4 Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	80%	100%	39 Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Fungsi Pengawasan	Inspektorat
		2 Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelitbangan	2 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di bidang kelitbangan	5 Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB (75,89)	A (80,10)	40 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
				6 Prosentase temuan hasil pemeriksaaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	-	100,00	41 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
				7 Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-	100,00	42 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8 Prosentasi realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung	-	85,00	43 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
				9 Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	-	100,00	44 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
		3 Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan	3 Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	10 Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	70,00	45 Program Peningkatan, Penelitian dan Pengembangan	Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
		4 Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi	4 Fasilitasi penguatan dan pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	11 Jumlah inovasi dan pembangunan IPTEK yang dikembangkan	-	10,00	46 Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
					-	100%	47 Program Pengembangan Data/Informasi	Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
		5 Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel	5 Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan	12 Jumlah Nilai LKJIP	77,76	75,00	48 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							49 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							50 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							51 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							52 Program Pengembangan Nilai Budaya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							53 Program Perencanaan dan Penganggaran PD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							54 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							55 Pengembangan Data/Informasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							56 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							57 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							58 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							59 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							60 Program Peringatan hari besar nasional	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							61 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							62 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							63 Program Kebersihan lingkungan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							64 Program Pengentasan Kemiskinan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							65 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							66 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi
							67 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Mengwi

[illegible]

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							77 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Selatan
							78 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Selatan
							79 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Selatan
							80 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Selatan
							81 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Selatan
							82 Program Perencanaan Dan Penganggaran Skpd	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Selatan
							83 Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Selatan
							84 Program Kebersihan Lingkungan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Selatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7 Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)	7 Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	14 Jumlah Nilai LKjIP 15 Persentase temuan BPK/INSPEKTORAT yang ditindak lanjuti	72,00 100%	74,00 100%	85 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan 86 Program Perencanaan Dan Penganggaran Skpd 87 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 89 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90 Pengembangan Nilai Budaya. 91 Perencanaan Pembangunan Daerah 92 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 93 Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Kuta Kec.Kuta Kec.Kuta Kec.Kuta Kec.Kuta Kec.Kuta

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							94 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Kuta
							95 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Kuta
							96 Peringatan hari besar nasional	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Kuta
							97 Pengelolaan Keragaman Budaya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Kuta
							98 Penataan Administrasi Kependudukan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Kuta
							99 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Kuta
							100 Kebersihan lingkungan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Kuta
							101 Pengentasan Kemiskinan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Kuta
							102 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Kuta

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				16 Nilai LKjIP Kecamatan	68,90	74,00	103 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							104 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							105 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							106 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							107 Program Pengembangan Nilai Budaya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							108 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							109 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							110 Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							111 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							112 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							113 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							114 Program Peringatan Hari Besar Nasional	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							115 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							116 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							117 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							118 Program Kebersihan Lingkungan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							119 Program Pengentasan Kemiskinan Lingkungan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara
							120 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Kuta Utara

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8 Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)	8 Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	17 Jumlah Nilai LKjIP	72,00	74,00	121 Pengembangan Nilai Budaya 122 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 123 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 124 Program Pengembangan Data / Informasi 125 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 126 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 127 Program Peringatan Hari Besar Nasional 128 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Petang Kec.Petang Kec.Petang Kec.Petang Kec.Petang Kec.Petang

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							129 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Petang
							130 Program Pengentasan Kemiskinan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Petang
							131 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Petang
							132 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Petang
							133 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Petang
							134 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Petang
							135 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Petang
							136 Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec.Petang

[illegible]

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							146 Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Abiansemal
							147 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Abiansemal
							148 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Abiansemal
							149 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Abiansemal
							150 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Abiansemal
							151 Program Peringatan Hari Besar Nasional	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Abiansemal
							152 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Kec. Abiansemal
		10 Meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana	10 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana	19 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	15 keg	17 keg	153 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
				20 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	2 paket	15 paket	154 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				21 Nilai Katagori AKIP	(BB)	(A)	155 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan dan keuangan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
				22 Cakupan Dokumen perencanaan	15 dok	15 dok	124 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		11 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan	11 Dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNSD	23 Jumlah CPNSD Diklat Prajabatan	-	750 orang	125 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			12 Dilaksanakan Diklat Kepemimpinan	24 Jumlah Aparatur diklat kepemimpinan	30 orang	150 orang	126 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		12 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Diklat/ Bimtek/ workshop teknis fungsional	13 Melaksanakan Bimtek Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	25 Jumlah Aparatur Bimtek Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	50 orang	250 orang	127 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			14 Melaksanakan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	26 Jumlah Aparatur Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	53 orang	575 orang	128 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			15 Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	27 Jumlah Aparatur Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah	53 orang	525 Orang	129 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			16 Melaksanakan sosialisasi Penilaian Kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja)	28 Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi	-	68 instansi	130 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			17 Melaksanakan Workshop Pengukuran Indeks profesional ASN	29 Jumlah peserta Workshop Pengukuran Indeks profesional ASN	-	250 orang	131 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			18 Melaksanakan diklat revolusi mental dalam membangun karakter pemimpin yang melayani	30 Jumlah peserta diklat revolusi mental dalam membangun karakter pemimpin yang melayani	-	620 orang	132 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			19 Melaksanakan diklat/bimtek/workshop teknis Fungsional sesuai kebutuhan Perangkat daerah	31 Jumlah yang mohon diklat/bimtek/workshop teknis Fungsional sesuai kebutuhan Perangkat daerah	200 orang	1650 orang	133 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			20 Melaksanakan Bimtek tingkat menengah pengadaan barang/jasa pemerintah	32 Jumlah peserta Bimtek tingkat menengah pengadaan barang/jasa pemerintah	-	250 orang	134 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			21 Melaksanakan workshop analisa kebutuhan diklat	33 Jumlah peserta Melaksanakan workshop analisa kebutuhan diklat	-	278 orang	135 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			22 Melaksanakan Bimtek pengelolaan informasi publik	34 Melaksanakan Bimtek pengelolaan informasi publik	-	212 orang	136 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			23 Melaksanakan Diklat dasar POL-PP	35 Jumlah peserta Diklat dasar POL-PP	50 0rang	250 orang	137 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			24 Melaksanakan penilaian Potensi dan kompotensi ASN	36 Jumlah apartur yng mengikuti penilaian potensi dan kompotensi ASN non guru	-	4.761 orang	138 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
			25 Pelayanan administrasi ijin belajar dan atau tugas belajar	37 Prosentase Aparatur yang mendapatkan ljin belajar dan atau tugas belajar	100%	100%	139 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		13 Peningkatan pelayanan administrasi jabatan fungsional	26 Usulan kepangkatan jabatan fungsional	38 Jumlah surat keputusan jabatan fungsional	200 sk	1.000 sk	140 Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		14 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	27 Pengisian jabatan dengan melakukan seleksi pejabat oleh Tim Pansel dan Bupati	39 Porsentase jabatan yang terisi	100%	100%	141 Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		15 Meningkatkan Pembinaan dan Penangan Kasus-Kasus	28 Memberikan pembinaan ke OPD dan sekolah untuk mengurangi tindakan melanggar disiplin	40 Jumlah unit kerja yang di bina	63 skpd	48 opd	142 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		16 Melaksanakan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur	29 Melakukan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur	41 Jumlah kinerja aparatur yang dinilai	-	23.805 orang	143 Program Penilaian kinerja ASN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		17 Peningkatan pelayanan administrasi mutasi Aparatur	30 Usulan naik pangkat dengan paper list	42 Jumlah Surat keputusan mutasi kepangkatan	250 SK	1.500 sk	144 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		18 Peningkatan pelayanan administrasi pensiun	31 Usulan administrasi pensiun dengan sistem paper list	43 Jumlah surat keputusan Pensiun	301 sk	1.640 sk	145 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		19 Meningkatkan pelayanan seleksi administrasi Penyesuaian ijasah	32 Melakukan pengembangan karier aparatur	44 Jumlah Aparatur seleksi Admistrasi Penyesuaian ijasah	-	2100	146 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		20 Meningkatkan pelayanan Penghargaan Satya Lencana	33 Melakukan jemput bola terhadap penghargaan yang di berikan oleh Presiden	45 Jumlah piagam penghargaan yang terbit	300	1500	147 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		21 Meningkatkan pelayanan administrasi pengukuhan gelar pendidikan	34 Melakukan pengembangan karier aparatur	46 Jumlah Aparatur Pengukuhan Gelar	100%	100%	148 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		22 Meningkatkan Sistem manajemen kepegawaian	35 Sistem informasi kepegawaian berbasis web	47 Porsentase data pegawai yang valid	80%	100%	149 Program Peningkatan SDM	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		23 Penetapan Formasi Kepegawaian	36 Dokumen penetapan Formasi kepegawain dilaporkan MENPAN RB	48 Jumlah rancangan penetapan Formasi Kepegawaian	300 formasi	1.400 formasi	150 Program Peningkatan SDM	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		24 Meningkatkan Pelayanan Rekrutmen CPNSD	37 Rekrutmmen CPNSD dengan sistem Computer Assesment Tes (CAT)	49 Jumlah rekrutmen pegawai pemkab badung	-	500	151 Program Peningkatan SDM	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	BKPSDM
		25 Peningkatan pelayanan administasi perkantoran dan kinerja aparatur	38 Tertib administrasi kepegawaian	50 Presentase tatakelola pelayanan administrasi	100%	100%	152 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		26 Pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kendaraan Dinas dan gedung kantor	39 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	51 Presentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik	100%	100%	153 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	40 Peningkatan kualitas perlengkapan dan peralatan kantor	52 Presentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang tugas	100%	100%	154 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		28 Nilai Akuntabilitas kinerja yang baik	41 Penyusunan AKIP	53 Nilai Akuntabilitas Kinerja	74	79	155 Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		29 Dokumen perencanaan dikirim tepat waktu	42 Penyusunan Renstra, Renja, RKA	54 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	156 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		30 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat	43 Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan	55 Jumlah peningkatan swadaya murni masyarakat	-	90%	157 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		31 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah	44 Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah	56 Proposal yang diverifikasi administratif	100%	100%	158 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		32 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.	45 Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah	57 Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah yang sesuai ketentuan	100%	100%	159 Program Peningkatan kesejahteraan rakyat	Fungsi Lainnya	Setda (Bag. Kesra)
			46 Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah	58 Penerima hibah yang dimonitoring	100%	100%	160 Program Peningkatan kesejahteraan rakyat	Fungsi Lainnya	Setda (Bag. Kesra)
							161 Program Peningkatan kesejahteraan rakyat	Fungsi Lainnya	Setda (Bag. Kesra)

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		33 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik	47 Menigkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek 48 Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	59 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung 60 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	2,5 Tinggi 2,5 Tinggi	3,3 Tinggi 3,3 Tinggi	162 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 163 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 164 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 166 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 167 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 168 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan	Setda (Bag. Pemerintahan) Setda (Bag. Pemerintahan) Setda (Bag. Pemerintahan) Setda (Bag. Pemerintahan) Setda (Bag. Pemerintahan) Setda (Bag. Pemerintahan) Setda (Bag. Humas)
		34 Tersedianya Koran dan Majalah pada sekretariat Daerah	49 Pendistribusian Koran dan Majalah tepat waktu	61 meningkatnya Wawasan Informasi Berita Media Sosial	21 jenis koran dan 4 majalah	20 jenis koran dan 3 majalah	169 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		35 Meningkatkan Performance Karyawan Bagian Kehumasan	50 Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pelaksanaan Tugas Kehumasan	62 Jumlah Pakaian Dinas Pada Bagian Humas Setda Kabupaten Badung	-	240 paket	170 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
		36 Meningkatkan komonikasi dengan media masa	51 Terjalannya komonikasi dan kerajama dengan media masa	63 Tercapainya Jalinan Komunikasi Timbal Balik dengan Pengertian antara Pers dengan Pemerintah dan jajarannya	1 kali	10 kali	171 Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
				64 Tersosialisasinya Kebijakan/Program Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kabupaten Badung	12 kali	60 kali	172 Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
		37 Meningkatkan Kualitas SDM Kehumasan	52 Meningkatnya Kemampuan SDM di Bidang Kehumasan	65 Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan Kehumasan pada karyawan/Karyawati Pemerintah Kabupaten Badung	28 orang	120 orang	173 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Data Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
		38 Meningkatkan kualitas informasi	53 Meningkatnya kualitas pelayanan informasi	66 Tersedianya Buku Kumpulan Sambutan Bupati	160 buku	800 buku	174 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
				67 Terliputnya dan terdokumenta sinya kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan kema- syarakatan di Kabupaten Badung	-	2403 liputan	175 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				68 Tersebar nya Pengetahuan Tentang Pemerintah, Pembangunan dan kemasya rakatan melalui buku selayang pandang	2000 buku	5000 buku 1000 keping CD	176 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
				69 Terealisasinya Pengumpulan Data dan Informasi	-	4 dokumen	177 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
				70 Dokumentasi Visual Kebudayaan Kabupaten Badung	-	4 dokumen	178 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
				71 Tersedianya Publikasi Branding Badung di Media Sosial	-	1 dokumen	179 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
				72 Tersedianya Bahan Promosi Video untuk Media Sosial	-	4 dokumen	180 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
		39 Meningkatnya informasi kegiatan yang dipublika sikan	54 Meningkatnya informasi dan kegiatan yang dipublikasi kan	74 Meningkatnya Informasi yang diterima masyarakat tentang berbagai kemajuan Pemba ngunan dan kemasyarakatan melalui Media Masa	3036 adv	18500 adv	181 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Humas)
		40 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang/Jasa	55 Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	75 Nilai Kepuasan terhadap layanan pengadaan barang/jasa	-	3,5	182 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Barang & Jasa)

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	41 Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sistem Pengadaan Barang / Jasa	56 Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa	76 Persentase pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	-	99%	183 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Setda (Bag. Barang & Jasa)
		1 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah)	1 Opini BPK	WTP	WTP	1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daeah	Fungsi penunjang urusan pemerintah	BPKAD
				2 Kategori Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	CC	A	2 Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi penunjang urusan pemerintah	BPKAD
							3 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Fungsi Pengawasan	Inspektorat
			2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola Keuangan dan Aset Daerah	3 Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	4 Program Administrasi Perkantoran	Fungsi penunjang urusan pemerintah	BPKAD
				4 Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100%	100%	5 Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Fungsi penunjang urusan pemerintah	BPKAD
				5 Persentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi penunjang urusan pemerintah	BPKAD
				6 Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPd	100%	100%	7 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Fungsi penunjang urusan pemerintah	BPKAD

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .	3 Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit kerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku	7 Persentase Penyusunan SPJ yang cepat, Tepat dan Akuntabel pada seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung 8 Jumlah Unit Kerja yang melaksanakan Barang Milik Daerah	100% 74 Unit Kerja	100% 59 Unit Kerja	8 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah 10 Program Asuransi Barang Milik Daerah	Fungsi penunjang urusan pemerintah Fungsi penunjang urusan pemerintah Fungsi penunjang urusan pemerintah	BPKAD BPKAD BPKAD
		3 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus dan penyimpan Barang di Masing-masing PD	4 Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur	9 SDM yang terampil menyusun Neraca Barang Milik Daerah	159 Orang	118 Orang	11 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Fungsi penunjang urusan pemerintah	BPKAD
		4 Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi	5 Memfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD	10 Persentase kegiatan fisik yang realisasinya tepat waktu	83,55%	98,90%	12 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Pemb)
		5 Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	11 Persentase PD yang serapan anggaranya diatas 80%	90%	86,45%	13 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Pemb)

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	6 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE	7 Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan	12 Persentase Pengembangan Infrastruktur berbasis teknologi	100%	90%	14 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Pemb)
		7 Peningkatan kualitas SDM dan manajemen	8 Pembinaan dan pelatihan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik	13 Presentase tingkat layanan LPSE	99,9%	99,9%	15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Pemb)
		1 Meningkatkan Penerapan Pelaksanaan SPIP di Masing - masing Perangkat Daerah	1 Menumbuhkan Pemahaman SPIP pada setiap Aparatur di Masing - masing Perangkat Daerah	1 Kategori Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	CC	A	1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Fungsi Pengawasan	Inspektorat
				2 Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	80%	100%	2 Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Fungsi Pengawasan	Inspektorat
				3 Persentase Penetapan Sistem Prosedur	100%	100%	3 Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Fungsi Pengawasan	Inspektorat
			2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola dan penerapan sistem pengawasan	4 Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	4 Program Admintrasi Perkantoran	Fungsi Pengawasan	Inspektorat
				5 Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100%	100%	5 Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Fungsi Pengawasan	Inspektorat

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	2 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan	3 Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal	6 Persentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi Pengawasan	Inspektorat
				7 Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	100%	7 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Fungsi Pengawasan	Inspektorat
				8 Kategori penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	-	A	8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Fungsi administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Organisasi)
		1 Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia	1 Meningkatkan akses pembangunan manusia yang berkualitas	1 Indeks Pembangunan Manusia	-	82,3	1 Program Peningkatan, Penelitian dan Pengembangan	Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
		2 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal	2 Menuntaskan dan memantapkan program wajib belajar 12 tahun	2 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 5 s.d. 6 tahun mendapatkan pendidikan anak usia dini	98,83%	100 %	2 Program Pendidikan anak usia dini	Pendidikan	Disdikpora
				3 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun mendapatkan pendidikan dasar	APK SD 113,57 % APK SMP 123.16 %	APK SD 100 % APK SMP 100 %	3 Program Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Disdikpora
				4 Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 18 tahun mendapatkan pendidikan kesetaraan	100 %	100 %	4 Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Disdikpora

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5 Persentase satuan pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi	data tdk tersedia	100%	5 Program Pendidikan Berbasis Teknologi dan Informasi	Pendidikan	Disdikpora
			3 Memantapkan tata kelola pendidikan	6 Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	6 Program Admintrasi Perkantoran	Pendidikan	Disdikpora
				7 Cakupan layanan sarana prasarana aparatur	100%	100%	7 Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Pendidikan	Disdikpora
				8 Cakupan layanan disiplin aparatur	100%	100%	8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pendidikan	Disdikpora
				9 Persentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pendidikan	Disdikpora
				10 Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	100%	10 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pendidikan	Disdikpora
			4 Memantapkan kemampuan fisik dan mental peserta didik	11 Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	20%	50%	11 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Disdikpora
				12 Jumlah prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	11 cabang	19 Cabang	12 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Kepemudaan dan Olahraga	Disdikpora

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas	5 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care). dengan melibatkan peran serta masyarakat	13 Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 14 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih 15 Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi 16 Cakupan pelayanan Kesehatan Balita 17 Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia 18 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif 19 Persentase perkawinan remaja kurang dari 20 tahun	90,36% 94,24% 96,90% 89,25% 50,03% 75,05 0,22%	100% 100% 100% 100% 100% 77,24 0,15%	13 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak 14 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak 15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 17 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 18 Program Keluarga Berencana 19 Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Diskes Diskes Diskes Diskes Diskes DP2KBP3A DP2KBP3A

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				20 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
				21 Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
				22 Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	22 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
				23 Tingkat Ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 tahun	1 tahun	23 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
				24 Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	100%	24 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat	6 Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.	25 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100%	100%	25 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Diskes
		5 Meningkatkan pengendalian penyakit Menular dan penyakit tidak menular	7 Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.	26 Cakupan penanganan penderita hipertensi	-	100%	26 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Diskes
				27 Cakupan penanganan penderita diabetes	-	100%	27 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Diskes
				28 Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	100%	28 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Diskes
				29 Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	100%	100%	29 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Diskes
				30 Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	94,32%	100%	30 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Diskes
				31 Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	-	100%	31 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Diskes
				32 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit bersumber binatang sesuai standar	-	100%	32 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Diskes

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas	8 Peningkatan Kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan 9 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta 10 Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan 11 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat. 12 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit	33 Persentase Kepesertaan SJSN Kesehatan 34 Persentase Puskesmas Terakreditasi Tingkat Madya 35 Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan 36 Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam 37 Indeks Keluarga Sehat 38 Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Tenaga Kesehatan 39 Persentase Penyehat Tradisional yang menerapkan kaidah kesehatan 40 BOR (Bed Occupancy Rate) 41 Kunjungan Rawat Jalan	71% - 8.330,00 Penduduk 46,15 - 11 Hari - 85% 105.494	100% 100% 8.648 Penduduk 100% 70% 2,5 Hari 100% 85% 133.406	33 Program Upaya Kesehatan masyarakat 34 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 35 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya 36 Program Upaya Kesehatan masyarakat 37 Program Upaya Kesehatan masyarakat 38 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 39 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 40 Program Pengelolaan BLUD RSUD Kesehatan	Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan	Diskes Diskes Diskes Diskes Diskes Diskes Diskes RSUD RSUD

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7 Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	12 Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	42 Kunjungan Rawat Darurat 43 Angka kematian ibu karena pre-eclamsia 44 Jumlah pasien kanker yang dilayani di rumah sakit 45 Hasil survey kepuasan masyarakat 46 Persentase posyandu purnama dan mandiri 47 Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat 48 Cakupan penjangkaran pendidikan dasar 49 Persentase peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 50 Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	36.718 ≤ 30% 1.098 ≥ 80% 95% 80,16 100% 51,99% 91,00	65.548 ≤ 30% 4.216 ≥ 80% 99% 86,00 100% 59,12% 100	41 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 42 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 43 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 44 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 45 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 46 Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RSUD RSUD RSUD Diskes Diskes Diskes DP2KBP3A DP2KBP3A

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.	13 Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.	51 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial di Puskesmas	100%	100%	47 Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Diskes
				52 Persentase Sarana Kesehatan pengelolaan Obat yang memenuhi syarat Kesehatan	100%	100%	48 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan	Diskes
				53 Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100%	100%	49 Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis	Kesehatan	Diskes
				54 Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100%	100%	50 Program Pemeliharaan Alat Kesehatan	Kesehatan	Diskes
		9 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.	14 Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).	55 Persentase Laporan Kesehatan lengkap, tepat dan akurat	85%	100%	51 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Diskes
				56 Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	52 Program pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Diskes
				57 Persentase kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	100%	100%	53 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kesehatan	Diskes
				58 Nilai evaluasi LKJIP Dinas Kesehatan Kab. Badung	BB	A	54 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kesehatan	Diskes

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	10 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	15 Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi	59 Persentase laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP	100%	100%	55 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kesehatan	Diskes
				60 Persentase keselarasan dokumen perencanaan	97%	100%	56 Program Perencanaan Perangkat Daerah	Kesehatan	Diskes
				61 Indek Pembangunan Manusia	79,3%	82,3%	57 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Diskop.UKMP
		1 Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat	1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebahagiaan hidup	1 Indeks Kebahagiaan	-	74,5	1 Program Peningkatan, Penelitian dan Pengembangan	Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
		2 Peningkatan mutu pendidikan	2 Meningkatkan kualitas pendidik, peserta didik dan sarana prasarana pendidikan	2 Persentase kelulusan SD	100 %	100 %	2 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Disdikpora
				3 Persentase kelulusan SMP	100 %	100 %	3 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Disdikpora
				4 Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	47 %	75 %	4 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Disdikpora
				5 Rasio rombel - peserta didik SD	1 - 40	1 - 28	5 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Disdikpora
				6 Rasio rombel - peserta didik SMP	1 - 40	1 - 32	6 Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Pendidikan	Disdikpora

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9 Menurunnya angka kemiskinan	1 Memperluas Akses kesejahteraan Sosial	1 Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial	1 Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan peningkatan kesejahteraan sosial	-	3.475 orang	1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinsos
							2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsos
				2 Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	56,34%	100%	3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Bappeda
		2 Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial	2 Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya	3 Cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar	142 orang	3.931 orang	4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsos
				4 Cakupan anak yang memperoleh bantuan rehabilitasi sosial dasar	-	170 orang	5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsos
				5 Cakupan Tuna Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	430 orang	2.230 orang	6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsos

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3 Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial	3 Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	6 Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh pemberdayaan Sosial	-	4.650 orang	7 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinsos
		4 Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	7 Predikat AKIP	B	A	8 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsos
							9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sosial	Dinsos
							10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sosial	Dinsos
							11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sosial	Dinsos
							12 Program Peningkatan dan Penyebaran Informasi	Sosial	Dinsos
							13 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah Kinerja dan Keuangan	Sosial	Dinsos
							14 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DPMD
		5 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat	5 Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peranserta masyarakat untuk sadar gizi	8 Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan Rastra	100%	100%			

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6 Peningkatan Kualitas RTLH dengan memfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau Program Bedah Rumah	1 Alokasi Anggaran Bedah Rumah dan Peningkatan Kualitas menjadi Rumah Sehat 2 Pengendalian titik-titik permukiman kumuh	1 Cakupan Ketersediaan Rumah Sehat	66%	100%	15 Program Pengembangan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPMD DPKP
	10 Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing UMKM	1 Peningkatan kualitas SDM UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing	1 Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	7,69%	7,91%	1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3 Program Pengembangan dan Peningkatan Ekspor 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM 5 Program Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif	Perdagangan Perdagangan Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Diskop.UKMP Diskop.UKMP Diskop.UKMP Diskop.UKMP Diskop.UKMP

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6 Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Diskop.UKMP
							7 Program Peningkatan Tertib Ukur	Perdagangan	Diskop.UKMP
							8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Diskop.UKMP
							9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Diskop.UKMP
							10 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Diskop.UKMP
							11 Program Perencanaan dan Penganggaran PD	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Diskop.UKMP
							12 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Perekonomian)
		2 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	2 Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing	2 Jumlah pelaku usaha industri yang mandiri dan berdaya saing	1.376 pelaku usaha	3.616 pelaku usaha	13 Program pengembangan industri kecil dan menengah	Industri	Disperinaker
							14 Program peningkatan kemampuan teknologi Industri	Industri	Disperinaker
							15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Industri	Disperinaker

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Industri	Disperinaker
							17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Industri	Disperinaker
							18 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat daerah	Industri	Disperinaker
							19 Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi	Industri	Disperinaker
		3 Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri baik dalam maupun luar negeri	3 Membuka akses jaringan kerjasama	3 Jumlah pelaku usaha industri yang difasilitasi	1.376 pelaku usaha	3.616 pelaku usaha	20 Program pengembangan industri kecil dan menengah	Industri	Disperinaker
				4 Jumlah Usaha Industri yang menyerap tenaga kerja	14.942 orang	17.343 orang	21 Program peningkatan kemampuan teknologi Industri	Industri	Disperinaker
11	Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	1 Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada	1 Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Perda dan Perkada	1 Persentase Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada	-	100%	1 Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
		2 Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	2 Mengefektifkan forum - forum masyarakat serta melaksanakan sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	2 Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	2 Program Pendidikan Politik Masyarakat	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12 Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	3 Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum	3 Penegakan Hukum	3 Persentase Permasalahan hukum yang tertangani	100%	100%	3 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
							4 Program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bakesbangpol
							5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Fungsi Administrasi Pemerintahan	Setda (Bag. Hukum & HAM)
		1 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan	1 Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan	1 Persentase Penegakan Perda dan perkada	70%	95%	1 Program Pemeliharaan Tibumtranmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
							2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
							3 Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
							4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada	2 Mengefektifkan Sosialisasi Perda dan Perkada	2 Persentase penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 7 Program Perencanaan Dan Penganggaran Perangkat Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP Satpol PP Satpol PP
		3 Melaksanakan Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah	3 Penegakan Hukum	3 Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	8 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 9 Program Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 10 Program Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 11 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Fungsi Administrasi Pemerintahan	Bakesbangpol Bakesbangpol Bakesbangpol Setda (Bag. Hukum & HAM)

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13 Meningkatnya pengarusutamaan gender	1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	1 Peningkatan kualitas hidup perempuan	1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	75,48	76,13	1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
					-	76,13	2 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
					-	76,13	3 Program Peningkatan Penelitian dan Pengembangan	Fungsi Penelitian dan Pengembangan	Balitbang
				2 Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan	85,71%	100%	4 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
				3 Persentase perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100%	100%	5 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A
							6 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Industri	Disperinaker
							7 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Disperinaker

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1 Peningkatan Upaya Pemantauan dan Pemulihan Kualitas lingkungan Hidup	1 Meningkatkan Indeks kualitas air, udara, dan IndeksTutupan hutan/Lahan	1 Nilai Indeks kualitas air, udara, dan Indeks Tutupan hutan/Lahan	60	69,40	8 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 9 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3 Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 5 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6 Program Pembinaan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Ketenagakerjaan Sosial Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	Disperinaker Dinsos DLHK DLHK DLHK DLHK DLHK

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lingkungan Hidup	DLHK
							8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Lingkungan Hidup	DLHK
							9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Lingkungan Hidup	DLHK
							10 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Lingkungan Hidup	DLHK
		2 Pemantauan kualitas sanitasi dasar dan lingkungan pemukiman	1 Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak	1 Persentase desa yang melaksanakan STBM	20,97%	68,12%	2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Diskes
				2 Persentase Desa/Kelurahan dengan tatanan Kabupaten Sehat	19,35%	45,16%	3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Diskes
				3 Persentase Tempat Pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	83,00%	94,00%	4 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Kesehatan	Diskes
							5 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
		2 Mengintensifkan pola tanam	2 Memantapkan Program intensifikasi	4 Indeks Pertanian (IP)	185%	230%	6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pertanian	Diperpa

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5 Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	60%	100%	7 Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 8 Program perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang 9 Program rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 10 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 11 Program Pengembangan Sistem Data/ Informasi Kehutanan	Pertanian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kehutanan Kehutanan Kehutanan	Diperpa DPUPR Setda (Bag. SDA) Setda (Bag. SDA) Setda (Bag. SDA)
	15 Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	1 Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Peningkatan SDM aparatur dan pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan 2 Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan 3 Peningkatan kuantitas dan kualitas TRC yang memadai	1 Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Level 4	Level 5	1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2 Program Penanganan Darurat Bencana 3 Program Pemulihan Pasca Bencana	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BPBD BPBD BPBD

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>4 Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat</p> <p>5 Penanganan pasca bencana yang komprehensif</p> <p>6 Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana</p>				<p>4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>7 Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</p> <p>8 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p>	<p>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>BPBD</p> <p>BPBD</p> <p>BPBD</p> <p>BPBD</p> <p>Diskarmat</p> <p>Diskarmat</p> <p>Diskarmat</p>

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Diskarmat
							12 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Diskarmat
							13 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
			7 Peningkatan SDM Rumah Sakit	2 Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kesehatan	RSUD
				3 Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kesehatan	RSUD
				4 Persentase Pegawai yang memperoleh Bintek	40%	100%	16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kesehatan	RSUD
		2 Pemenuhan SPM bidang Perumahan	8 Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya	5 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana	100%	100%	17 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Perumahan	DPKP
							18 Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	3 Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada korban bencana	9 Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah	6 Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	-	250 orang	19 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
				7 Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	24 jam	12 jam	20 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsos
				1 Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	35,74%	60,96%	21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Diskes
				2 Pelaksanaan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ada di Kabupaten Badung	76%	100%	22 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Diskes
		1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	1 Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi	1 Persentase tenaga kerja yang bersertifikat	35,74%	60,96%	1 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Disperinaker
		2 Meningkatkan kualitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Asesor	2 Pelaksanaan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) ada di Kabupaten Badung	2 Persentase Lembaga Pelatihan kerja yang memperoleh pembinaan	76%	100%	2 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Disperinaker
		3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan	3 Meningkatkan jumlah dan kualitas Asesor	3 Jumlah Asesor yang memperoleh pelatihan	9%	100%	3 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Disperinaker
			4 Optimalisasi pembinaan hubungan Industrial berorientasi pada Tripartit	4 Jumlah perusahaan yang diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	40 perusahaan	200 perusahaan	4 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Disperinaker

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 Mengembangkan potensi kewirausahaan	5 Mengintensifkan pelatihan pencari kerja dan tenaga kerja	5 Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalui perjanjian kerja bersama	50%	60%	5 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Disperinaker
			6 Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing	6 Jumlah calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	400 orang	1400 orang			
			7 Mengintensifkan pelatihan kewirahusahaan	7 Jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing	1376 pelaku usaha	3616 pelaku usaha	6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinsos
		5 Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	8 Membuka akses kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	8 Cakupan calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	-	100 orang	7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Disperinaker
		6 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	9 Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah	9 Jumlah Pencari Kerja yang magang ke luar negeri	-	90 orang			
				10 Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat	2660 orang	15000 orang	8 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Disperinaker

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	7 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	8 Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi	11 Tingkat Pengangguran terbuka	0,345%	0,310%	9 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Koperasi, Usaha Kecil Menengah	Diskop.UKMP
							10 Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dispar
		1 Membangun, meningkatkan dan mempreservasi jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, Mengembangkan Sumber Daya Air dan sanitasi melalui Peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian	1 Pembangunan infrastruktur adalah mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata	1 Persentase Infrastruktur jalan kabupaten ber kondisi baik	94,5%	100%	1 Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
				2 Persentase Infrastruktur jaringan irigasi ber kondisi baik	94,72%	100%	2 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
				3 Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak	58,76%	100%	3 Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
				4 Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan Pelaporan	100 %	100 %	4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
							5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
							6 Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Perhubungan	2 Tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan serta disiplin pengelolaan pegawai pada Dinas Perhubungan	5 Nilai AKIP Dinas Perhubungan	-	85,38	7 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11 Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD 12 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perencanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	Bappeda Dishub Dishub Dishub Dishub
		3 Meningkatkan kelancaran ketertiban dan keselamatan lalu lintas	3 Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas	6 Prosentase Peningkatan Kinerja Lalu lintas 7 Prosentase Peningkatan Kinerja Bidang Perhubungan	72,54 % 73,00%	85,00 % 85,00%	13 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 14 Program peningkatan Pelayanan Angkutan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	Dishub Dishub
		4 Pembangunan sarana Prasarana dasar perumahan dan permukiman	4 Mewujudkan Lingkungan Yang sehat dan Nyaman didukung PSU yang memadai	8 Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	58,12%	92,24%	15 Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9 Persentase Drainase lingkungan yang berkondisi baik	51,19%	52,74%	16 Program Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
				10 Persentase perumahan dengan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Yang berfungsi baik	-	47%	17 Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
				11 Persentase Rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	80%	100%	18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
							19 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
							20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
							21 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
							22 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPKP
	5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan.	6 Mengembangkan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung		12 Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet	-	100%	23 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	18 Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	6 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE	7 Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan	13 Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat-tempat strategis di Kabupaten Badung	15 Kamera CCTV	656 Kamera CCTV	24 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
				14 Terpeliharanya Infrastruktur dan Layanan pengguna LPSE	100%	90%	25 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Administrasi Pemerintahan	Setda Bagian Pembangunan
				15 Presentase tingkat layanan LPSE	99,9%	99,9%	26 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Administrasi Pemerintahan	Setda Bagian Pembangunan
		1 Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian	1 Mengintensifkan penelitian dan pengembangan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Badung	1 Skor Pola Pangan Harapan	93,38%	95,5%	1 Program Peningkatan produksi Pertanian	Pertanian	Diperpa
		2 Memetakan potensi pertanian ,perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung	2 Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah	2 Skor Pola Pangan Harapan	93,38%	95,5%	2 Program Pengembangan sistem data / informasi Pertanian	Pertanian	Diperpa
		3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan	3 Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah	3 Skor Pola Pangan Harapan	93,38%	95,5%	3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pertanian	Diperpa

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian	4 Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian	4 Skor Pola Pangan Harapan	93,38%	95,5%	4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Diperpa
							5 Program Peningkatan Ketahanan (Pertanian / Perkebunan)	Pertanian	Diperpa
							6 Program Peningkatan Produksi Pertanian	Pertanian	Diperpa
							7 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Pertanian	Diperpa
		5 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer)	5 Memperkuat ekonomi subak sebagai unit produksi, unit agribisnis dan agroindustri	5 Skor Pola Pangan Harapan	93,38%	95,5%	8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pangan	Diperpa
							9 Program Pengelolaan, Pengembangan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
		6 Mendorong terserapnya produk pertanian kabupaten badung oleh sektor pariwisata	6 Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor Pariwisata.	6 Skor Pola Pangan Harapan	93,38%	95,5%	10 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Pertanian	Diperpa
		7 Memantapkan ketahanan pangan keluarga	7 Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pekarangan. dan lahan tidak produktif untuk mendukung pangan keluarga	6 Skor Pola Pangan Harapan	93,38%	95,5%	11 Program Peningkatan Produksi Pertanian	Pertanian	Diperpa
							12 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)	Pangan	Diperpa

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8 Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan	8 Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan	8 Skor Pola Pangan Harapan	93,38%	95,5%	13 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Pertanian	Diperpa
		9 Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik	9 Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming)	9 Skor Pola Pangan Harapan	93,38%	95,5%	14 Program Pengelolaan, Pengembangan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
							15 Program Peningkatan Produksi Pertanian	Pertanian	Diperpa
							16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Pangan	Diperpa
							17 Program Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Pertanian	Diperpa
							18 Program Pengelolaan, Pengembangan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
		10 Pengembangan teknologi peternakan	10 Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging	10 Skor Pola Pangan Harapan	93,38%	95,5%	19 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	Diperpa

[illegible]

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung	12 Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah	12 Luas areal pemanfaat-an potensi budidaya perikanan	135.3 Ha	141 Ha	29 Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Diskan
		13 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan	13 Meningkatkan produksi perikanan	13 Persentase produksi perikanan	2%	8%	30 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							31 Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							32 Program Pemberdayaan Masyarakat Pengawasan Dan Pengendalian Dalam Sumber Daya Kelautan	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							33 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							34 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							35 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							36 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil	Kelautan dan Perikanan	Diskan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							37 Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							38 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							40 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							41 Perencanaan dan Penganggaran PD	Kelautan dan Perikanan	Diskan
			14 Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan	14 Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	2%	6%	42 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Diskan
							43 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Diskan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19 Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	1 Melaksanakan penataan kawasan dan DTW	1 Penyusunan database DTW	1 Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	61%	75%	1 Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Dispar
			2 Pembangunan daya tarik wisata baru				2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dispar
			3 Mengidentifikasi kebutuhan masing - masing DTW				3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata	Pariwisata	Dispar
				2 Tingkat Konektivitas Pendukung Pariwisata	-	100%	4 Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jebatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
		2 Menetapkan kelembagaan pengelola DTW	4 Perbaiki manajemen pengelolaan DTW	3 Jumlah pertumbuhan daya tarik wisata baru	61%	75%	5 Program Pengembangan Kemitraan	Pariwisata	Dispar
			5 Peningkatan SDM pengelola DTW				6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pariwisata	Dispar
							7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pariwisata	Dispar
							8 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pariwisata	Dispar
							9 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan PD (Renja, RKA, Renstra)	Pariwisata	Dispar

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20 Meningkatnya Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	1 Meningkatkan kualitas industri pariwisata	1 Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata 2 Kajian dan penyusunan database industri pariwisata berbasis IT 3 Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan 4 Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 2 Pertumbuhan rumah makan, bar dan restoran	28,16%	28,96%	10 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Program pengembangan pemasaran pariwisata 2 Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jebatan 3 Program pengembangan dan pengelolaan produk wisata 4 Program pengembangan kemitraan	Kebudayaan Pariwisata Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pariwisata Pariwisata Pertanian	Disbud Dispar DPUPR Dispar Dispar Diperpa
		2 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung	5 Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah	3 Luas areal pemanfaat-an potensi budidaya perikanan	135.3 Ha	141 Ha	5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) 6 Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Diskan
		3 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan	6 Meningkatkan produksi perikanan	4 Persentase produksi perikanan	2%	8%	7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan	Diskan Diskan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
					(Tahun 2015)	(Tahun 2021)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologiinformasi dan komunikasi	7 Meningkatkan tata kelola jaringan pad kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	5 Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	-	100%	9 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 10 Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dalam Penyerapan Literasi Media	Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika	Diskominfo Diskominfo

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Badung memuat program-program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta program-program strategis yang berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang disertai dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap program tersebut. Program-program prioritas dan strategis yang telah disertai kebutuhan pendanaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada Tabel 8.1 dibawah ini akan disajikan indikasi rencana program prioritas seluruh Perangkat Daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan dalam jangka waktu lima tahun (Tahun 2017-2021) yang dikelompokkan atas : (1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, (2) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Urusan Pilihan, serta (4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disamping Tabel 8.1, pada RPJMD Kabupaten Badung ini ditambahkan pula Program-Program Prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah khusus Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Tabel 8.2 berikut ini. Penyajian Program-Program Prioritas Tahun 2016 tersebut merupakan pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017.

Sedangkan Tabel 8.3 hanya memuat program-program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tertentu selama kurun waktu 2017-2021 yang berkaitan langsung dengan upaya untuk pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.403.530,63		2.320.996,79		2.302.980,02		2.494.547,87		2.719.654,57		12.241.709,88		
	01	URUSAN PENDIDIKAN			365.422,26		378.091,74		294.043,26		318.544,10		347.217,62		1.703.318,98		
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			365.422,26		378.091,74		294.043,26		318.544,10		347.217,62		1.703.318,98		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	15.547,56	100%	15.606,16	100%	15.598,37	100%	16.896,15	100%	18.420,19	100%	82.068,42	Disdikpora
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.609,70	100%	3.703,92	100%	489,60	100%	530,33	100%	578,17	100%	6.911,73	Disdikpora
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan layanan disiplin aparatur	100%	100%	3.072,32	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	3.072,32	Disdikpora
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	461,19	100%	512,89	100%	618,35	100%	669,80	100%	730,22	100%	2.992,45	Disdikpora
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	100%	14,91	100%	85,09	100%	63,68	100%	68,98	100%	75,20	100%	307,85	Disdikpora
	15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase warga Kab. Badung usia 5-6 Tahun mendapat pendidikan anak usia dini	98,83%	100%	1.056,01	100%	15.888,04	100%	2.245,67	100%	2.432,50	100%	2.651,92	100%	24.274,13	Disdikpora
	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Persentase warga Kab. Badung usia 7-15 Tahun mendapat pendidikan dasar	113,57%	100%	257.617,05	100%	159.283,50	100%	143.807,14	100%	155.808,34	100%	169.803,09	100%	886.319,12	Disdikpora
	18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.18 tahun mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	100%	536,97	100%	619,53	100%	183,96	100%	199,26	100%	217,24	100%	1.756,96	Disdikpora
	20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikasi pendidik	47%	55%	4.507,67	60%	115.410,14	65%	120.177,90	70%	130.176,71	75%	141.918,64	75%	512.191,07	Disdikpora
	21	POGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	Persentase Satuan Pendidikan berbasis Informasi	Data tidak tersedia	100%	80.998,88	100%	66.982,47	100%	10.858,59	100%	11.762,03	100%	12.822,96	100%	183.424,92	Disdikpora

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	02		URUSAN KESEHATAN				450.719,09		461.084,44		496.385,06		537.684,30		586.183,42		2.532.056,31	
			DINAS KESEHATAN				267.026,12		287.750,60		320.051,22		346.679,48		377.949,97		1.599.457,39	
	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	10.973,64	100%	15.622,79	100%	17.227,23	100%	18.660,53	100%	20.343,71	100%	82.827,90	Diskes
	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	100%	100%	18.718,72	100%	20.438,09	100%	16.514,11	100%	17.888,09	100%	19.501,59	100%	93.060,60	Diskes
	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai evaluasi LKjIP Dinas Kesehatan Kab. Badung	BB	BB	614,52	BB	640,74	A	693,07	A	750,73	A	818,45	A	3.517,50	Diskes
				Persentase laporan Keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP	84,15%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	09		PROGRAM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Data tidak tersedia	0,00	0,00	98%	11,51	98%	22,40	98%	24,26	98%	26,45	98%	84,63	Diskes
	11		PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas	78,70%	100%	3.810,50	100%	4.083,92	100%	3.813,67	100%	4.130,97	100%	4.503,59	100%	20.342,65	Diskes
	16		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	70,97%	80%	145.952,53	90%	156.044,71	100%	174.962,36	100%	189.519,23	100%	206.613,87	100%	873.092,71	Diskes
				Indeks Keluarga Sehat	Data tidak tersedia	0,5		0,6		50%		60%		70%		70%		
				Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46,15%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	62,70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	17		PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase sarana kesehatan dan toko obat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan Obat	100%	100%	88,95	100%	94,83	100%	281,06	100%	304,44	100%	331,90	100%	1.101,18	Diskes
	18		PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	Persentase Penyehat Tradisional yang menerapkan kaidah kesehatan	Data tidak tersedia	25%	0,00	50%	0,00	75%	0,00	100,0%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	Diskes
19		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Kemandirian Posyandu Purnama dan Mandiri	95%	99%	0,00	99%	0,00	99%	0,00	99%	0,00	99%	0,00	99%	0,00	Diskes	
			Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	80.16 %	82%		83%		84%		85%		86%		86%			
			Cakupan penjangkaran pendidikan dasar	100%	90%		92%		94%		96%		96%		96%			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		Target	Rp. Juta
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan	100,00%	100,00%	1.295,02	100,00%	798,23	100,00%	792,19	100,00%	858,10	100,00%	935,51	100,00%	4.679,06	Diskes	
		21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase desa yang melaksanakan STBM	0,21	58,25%	546,29	62,35%	696,57	65,40%	678,87	68,12%	735,35	0,68	801,68	68,12%	3.458,76	Diskes
				Persentase Desa/Kelurahan dengan tatanan Kabupaten Sehat	19,35%	19,35%		29%		32,26%		38,71%		45,16%		45,16%		
	22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan penanganan penderita hipertensi	Data tidak tersedia	100%	32.338,41	100%	49.508,48	100%	51.939,35	100%	56.260,71	100%	61.335,42	100%	251.382,37	Diskes	
			Cakupan penanganan penderita diabetes	Data tidak tersedia	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Data tidak tersedia	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	24 Jam	21 Jam		17 Jam		14 Jam		12 Jam		12 Jam		12 Jam			
			Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	94,32%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	Data tidak tersedia	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit bersumber binatang sesuai standar	Data tidak tersedia	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya	0,00	92,30%	1.797,85	92,30%	2.627,52	100,0%	2.365,20	100,0%	2.561,98	100,0%	2.793,07	100,0%	12.145,63	Diskes	
			Persentase Laporan Kesehatan lengkap, tepat dan akurat	89,7%	90%		100%		100%		100%		100%		100%			
	25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan	8.330 Penduduk	8.696 Penduduk	37.940,07	8.877 Penduduk	22.022,47	8.936 Penduduk	34.051,17	8.873 Penduduk	36.884,23	8.648 Penduduk	40.211,19	8.648 Penduduk	171.109,13	Diskes	
			Persentase Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	65%	65%		65%		75%		80%		85%		85%			
	28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Tenaga Kesehatan	11 Hari	3 Hari	41,90	3 Hari	51,56	3 Hari	73,78	3 Hari	79,92	2,5 Hari	87,13	2,5 Hari	334,30	Diskes	
	29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Cakupan pelayanan kesehatan balita	70%	100%	54,40	100%	60,11	100%	198,03	100%	214,51	100%	233,86	100%	760,91	Diskes	
	30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	50.03%	54%	277,36	56%	252,11	58%	0,00	60%	0,00	60%	0,00	60%	529,47	Diskes	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab																
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
	31	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	Persentase Tempat Pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	83%					87%	0,00	89%	0,00	92%	0,00	94%	0,00	Diskes																
		32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	93,69%	100%	2.519,62	100%	3.348,12	100%	3.249,65	100%	3.520,02	100%	3.837,53	100%	16.474,95	Diskes															
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	95,73%	100%		100%		100%		100%		100%		100%																		
			Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	96,9%	100%		100%		100%		100%		100%		100%																		
	36	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100%	100%	9.806,37	100%	10.690,34	100%	12.379,98	100%	13.410,00	100%	14.619,58	100%	60.906,26	Diskes																
37	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100%	100%	249,98	100%	758,49	100%	809,08	100%	876,40	100%	955,45	100%	3.649,40	Diskes																	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANGUSADA				183.692,97		173.333,84		176.333,84		191.004,82		208.233,45		932.598,91																	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	18.291,89	100%	20.025,52	100%	22.028,00	100%	24.231,00	100%	26.655,00	100%	111.231	RSUD Mangusada																
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	70%	80%	852,18	85%	1.703,81	90%	1.700,00	95%	2.850,00	100%	405,00	100%	7.511	RSUD Mangusada															
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di RSUD Kab.Badung	45%	50%	-	55%	810,24	60%	1.080,00	65%	1.080,00	70%	1.080,00	75%	4.050	RSUD Mangusada															
		26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKI/RUMAH SAKIT JIWA / RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	70%	80%	43.712,09	85%	33.794,27	90%	26.525,84	95%	32.843,82	100%	45.093,45	100%	181.969	RSUD Mangusada															
		40	PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	100%	100%	120.836,81	100%	117.000,00	100%	125.000,00	100%	130.000,00	100%	135.000,00	100%	627.837	RSUD Mangusada															
03	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.302.713,57		1.280.725,00		1.357.308,18		1.470.159,67		1.602.925,73		7.013.832,14																		
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.302.713,57		1.280.725,00		1.357.308,18		1.470.159,67		1.602.925,73		7.013.832,14																		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat ketersediaan Prasarana Administrasi Perkantoran Untuk Pelaksanaan Tugas	100%	100%	24.589,95	100%	21.764,07	100%	23.904,86	100%	26.259,70	100%	28.850,00	100%	125.368,58	PUPR																
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan	100%	100%	2.033,14	100%	9.185,57	100%	9.937,98	100%	10.931,78	100%	12.024,94	100%	44.113,41	PUPR															

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Pelaporan	100%	100%	2.742,26	100%	2.854,40	100%	3.139,84	100%	3.453,83	100%	3.799,21	100%	15.989,54	PUPR
	07	PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Persentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	94,5 %	97,50%	397.163,23	98%	-	-	-	-	-	-	-	98%	397.163,23	PUPR
	07	PROGRAM PEMBANGUNAN,PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Data tidak tersedia			98%	358.628,35	99,25%	414.240,44	100%	408.413,78	100%	446.504,43	100%	1.627.787,00	PUPR
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tingkat Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%	100%	12,74	100%	201,82	100%	222,00	100%	244,20	100%	268,62	100%	949,39	PUPR
	15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Tingkat Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%	100%	2.021,56									100%	2.021,56	PUPR
	23	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten	data tidak tersedia			30%	558,11	60%	613,92	80%	675,31	100%	742,84	100%	2.590,18	PUPR
	18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	94,50%	97,50%	13.714,86		-		-		-		-	97,50%	13.714,86	PUPR
	23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan yang memadai	100%	100%	1.282,73		-		-		-		-	100%	1.282,73	PUPR
	24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	95,72%	95,78%	127.383,36		-		-		-		-	96%	127.383,36	PUPR
	24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	94,72%			96,83%	171.782,47	97,83%	188.960,70	98,94%	207.856,76	100%	228.642,46	100%	797.242,38	PUPR
	35	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi	58,78%	60,85%	103.872,07									60,85%	103.872,07	PUPR
	35	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI	Persentase Peningkatan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi	58,78%			68,14%	17.782,16	80,88%	32.677,38	93,16%	35.945,12	100%	39.539,63	100%	125.944,30	PUPR
	37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/ GEDUNG	Persentase Infrastruktur Publik berkondisi Baik	48,00%	65%	587.605,20	75%	637.041,48	85%	616.591,82	92%	702.658,05	100%	761.460,34	100%	3.305.356,89	PUPR
42	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78%	60,85%	38.484,59									60,85%	38.484,59	PUPR	
43	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78%	60,85%	526,46									60,85%	526,46	PUPR	
44	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78%	66,67%	1.281,43		-							66,67%	1.281,43	PUPR	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab																
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
		42	PROGRAM PERENCANAAN,PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	60,00%	0%	-	60.926,56	100%	67.019,22	100%	73.721,14	100%	81.093,26	100%	282.760,19	PUPR																
	04		URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				244.635,15	136.314,24		90.562,16		98.096,93		106.945,27		676.553,75																	
			DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				244.635,15	136.314,24		90.562,16		98.096,93		106.945,27		676.553,75																	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi PD	Data tidak tersedia	100%	1.530,49	100%	1.605,51	100%	1.507,22	100%	1.507,22	100%	1.507,22	100%	7.657,67	DPKP															
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya fasilitas pelayanan yang represen tatif	Data tidak tersedia	100%	1.036,22	100%	1.026,63	100%	870,79	100%	870,79	100%	870,79	100%	4.675,23	DPKP															
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEUANGAN	Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Data tidak tersedia	100%	549,44	100%	743,49	100%	1.011,65	100%	1.011,65	100%	1.011,65	100%	4.327,89	DPKP															
		09	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	Data tidak tersedia	4 dok	10,00	4 dok	9,56	4 dok	10,25	4 dok	10,25	4 dok	10,25	20 dok	50,33	DPKP															
		16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase Jalan Lingkungan berkondisi baik	64,67%	77,36%	239.941,27	81,08%	119.856,52	84,80%	47.740,10	88,52%	55.274,88	92,24%	64.123,22	100%	526.935,98	DPKP															
		18	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Data tidak tersedia	100%	-	100%	5,68	100%	34.717,25	100%	34.717,25	100%	34.717,25	100%	104.157,44	DPKP															
		24	PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Tercapainya sarana perumahan dan permukiman yang memadai	Data tidak tersedia	100%	1.088,80	100%	983,61	100%	4.680,66	100%	4.680,66	100%	4.680,66	100%	16.114,40	DPKP															
		25	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas lingkungan permukiman	Data tidak tersedia	100%	467,00	100%	12.075,24	100%	11,06	100%	11,06	100%	11,06	100%	12.575,43	DPKP															
		26	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Persentase Penyerapan Anggaran	Data tidak tersedia	100%	11,94	100%	7,99	100%	13,15	100%	13,15	100%	13,15	100%	59,38	DPKP															
	05		URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				32.542,52	55.083,14		55.083,13		59.666,06		65.047,93		267.422,77																	
		01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5.604,39	9.411,51		9.511,51		10.302,87		11.232,19		46.062,47																	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100%	100%	1.464,20	100%	1.547,82	100%	965,77	100%	1.046,12	100%	1.140,48	100%	6.164,38	SATPOL PP															
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	443,65	100%	767,78	100%	1.100,25	100%	1.191,79	100%	1.299,29	100%	4.802,75	SATPOL PP															
		03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	306,00	100%	354,00	100%	457,00	100%	495,02	100%	539,67	100%	2.151,70	SATPOL PP															

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	100%	100%	77,14	100%	84,90	100%	227,05	100%	245,94	100%	268,12	100%	903,14	SATPOL PP
	06	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	223,64	100%	240,34	100%	222,90	100%	241,44	100%	263,22	100%	1.191,54	SATPOL PP
	07	PROGRAM PENINGKATKAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	Terwujudnya peningkatan kualitas dan penyebaran informasi	100%	-	-	-	-	100%	8,23	100%	8,91	100%	9,71	100%	26,85	SATPOL PP
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	100%	9,88	100%	9,03	100%	9,06	100%	9,81	100%	10,70	100%	48,48	SATPOL PP
	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	513,36	100%	832,98	100%	619,61	100%	671,16	100%	731,69	100%	3.368,80	SATPOL PP
	16	PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	65%	75%	2.135,18	80%	4.742,24	85%	4.668,00	90%	5.056,38	95%	5.512,46	95%	22.114,26	SATPOL PP
	19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100%	100%	431,34	100%	832,42	100%	1.233,66	100%	1.336,30	100%	1.456,84	100%	5.290,57	SATPOL PP
	02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.514,13		5.636,11		5.836,11		6.321,68		6.891,89		29.199,92	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	966,04	100%	779,03	100%	829,03	100%	898,01	100%	979,01	100%	4.451,12	Bakesbangpol
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	8 kegiatan	8 kegiatan	318,80	5 kegiatan	403,50	5 kegiatan	428,50	5 kegiatan	464,15	5 kegiatan	506,02	20 kegiatan	2.120,97	Bakesbangpol
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	180,55	100%	180,34	100%	180,34	100%	195,35	100%	212,97	100%	949,55	Bakesbangpol
	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban , Ketentraman , Keindahan)	30%	40%	1.508,57	50%	2.189,11	60%	2.105,44	75%	2.280,61	80%	2.486,32	90%	10.570,04	Bakesbangpol
	20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Jumlah sosialisasi P4GN	1140 orang	1140 orang	161,50	1140 orang	125,79	1140 orang	125,79	1140 orang	136,26	1140 orang	148,55	5700 orang	697,89	Bakesbangpol
	21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	3 kegiatan	1 kegiatan	213,82	1 kegiatan	523,50	1 kegiatan	657,92	1 kegiatan	712,66	1 kegiatan	776,94	5 kegiatan	2.884,85	Bakesbangpol
	37	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	3 kegiatan	7 kegiatan	1.164,84	7 kegiatan	1.434,84	7 kegiatan	1.509,09	7 kegiatan	1.634,65	7 kegiatan	1.782,09	35 kegiatan	7.525,50	Bakesbangpol

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			11.924,44		14.715,23		14.515,23		15.722,90		17.141,10		74.018,90		
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.529,72	100%	1.925,13	100%	1.898,16	100%	2.056,08	100%	2.241,54	100%	9.650,64	BPBD
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.743,25	100%	1.254,00	100%	742,82	100%	804,62	100%	877,19	100%	5.421,88	BPBD
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	268,72	100%	274,46	100%	247,86	100%	268,48	100%	292,69	100%	1.352,21	BPBD
		09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang saling terhubung	100%	-	-	100%	10,00	100%	10,90	100%	11,80	100%	12,87	100%	45,57	BPBD
		34	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Persentase desa/kelurahan yang Mendapat Fasilitas Pengurangan Resiko Bencana	55%	60,00%	714,63	70,00%	1.382,33	80,00%	1.323,42	90,00%	1.433,53	100%	1.562,83	100%	6.416,74	BPBD
		42	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani	100%	100%	3.557,45	100%	4.373,15	100%	4.434,41	100%	4.803,35	100%	5.236,62	100%	22.404,98	BPBD
		43	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Persentase Kerusakan/ Kerugian Bencana Yang dapat direhabilitasi dan Direkonstruksi	100%	100%	4.110,66	100%	5.496,16	100%	5.857,68	100%	6.345,03	100%	6.917,36	100%	28.726,89	BPBD
		04	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			10.499,56		25.320,28		25.220,28		27.318,61		29.782,75		118.141,48		
		1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan administrasi perkantoran	100%	100%	2.510,94	100%	3.331,17	100%	3.658,99	100%	3.963,41	100%	4.320,91	100%	17.785,42	Diskarmat
		2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.599,22	100%	3.547,83	100%	1.361,58	100%	1.474,86	100%	1.607,90	100%	9.591,39	Diskarmat
		3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	216,00	100%	236,64	100%	259,70	100%	281,31	100%	306,70	100%	1.300,35	Diskarmat
		4	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	100%	6.163,40	100%	18.194,64	100%	19.930,01	100%	21.588,18	100%	23.535,44	100%	89.411,67	Diskarmat
		5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran SKPD	3 Dokumen	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,83	3 dokumen	11,81	3 dokumen	52,64	Diskarmat
	06	URUSAN SOSIAL				7.498,05		9.698,23		9.598,23		10.396,81		11.334,60		48.525,93		
		DINAS SOSIAL				7.498,05		9.698,23		9.598,23		10.396,81		11.334,60		48.525,93		
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administarsi Perkantoran	100%	100%	1.128,64	100%	937,76	100%	1.031,53	100%	1.134,69	100%	1.248,16	100%	5.480,77	Dinsos
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	617,36	100%	1.534,12	100%	879,04	100%	966,94	100%	1.063,63	100%	5.061,09	Dinsos
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	207,20	100%	216,22	100%	237,85	100%	261,63	100%	287,79	100%	1.210,70	Dinsos

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat Ketepatan Kualitas dan kuantitas penyebaran Informasi	100%	100%	56,88	100%	59,92	100%	65,91	100%	72,50	100%	79,75	100%	334,95	Dinsos	
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD	100%	100%	10,00	100%	10,38	100%	11,41	100%	12,55	100%	13,81	100%	58,15	Dinsos	
	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	56,34%	68,81%	747,97	100,00%	715,39	84,41%	327,42	92,20%	360,17	100%	396,18	100%	2.547,14	Dinsos	
	16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL				1.832,05		2.083,94		2.490,52		2.578,33		2.734,27		11.719,11	Dinsos	
			Cakupan Penyandang disabilitas di luar panti dan/atau Lembaga yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Cakupan Anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Data tidak tersedia	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Data tidak tersedia	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100%	100%	2.897,95	100%	4.140,50	100%	4.554,55	100%	5.010,00	100%	5.511,00	100%	22.114,01	Dinsos		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2			URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				331.904,29		709.785,36		727.970,84		787.761,96		859.279,98		3.431.618,88	
	01		URUSAN TENAGA KERJA				7.171,07		9.440,43		10.718,27		11.610,03		12.657,26		51.597,05	
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				7.171,07		9.440,43		10.718,27		11.610,03		12.657,26		51.597,05	
		15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	35,74%	35,74%	4.437,92	41,39%	4.493,37	47,48%	4.127,33	54,00%	4.470,72	60,96%	4.873,98		22.403,31	Disperinaker
				Persentase Asesor instruktur Swasta yang memperoleh pelatihan	9%	23%		39%		57%		77%		100%		100%		
		16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat	50%	50%	1.868,95	50%	3.640,59	50%	4.881,58	50%	5.287,73	100%	5.764,68	50%	21.443,54	Disperinaker
		17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan penyusunan PP/PKB	864,20 50%	52%	864,20	54%	1.306,47	56%	1.709,36	58%	1.851,58	60%	2.018,59	0,600	7.750,20	Disperinaker
	02		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.593,15		1.967,55		2.120,25		2.296,66		2.503,81		11.481,43	
			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2.593,15		1.967,55		2.120,25		2.296,66		2.503,81		11.481,43	
		15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	85,71%	100%	1.150,36	100%	1.097,37	100%	1.307,45	100%	1.416,23	100%	1.543,98	100%	6.515,40	DP2KBP3A
		16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	Persentase Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100%	100%	933,72	100%	571,83	100%	407,95	100%	441,89	100%	481,75	100%	2.837,14	DP2KBP3A
		17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100%	100%	249,11	100%	72,18	100%	97,88	100%	106,02	100%	115,58	100%	640,77	DP2KBP3A
		18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Persentase Perempuan di lembaga pemerintah	11,32	30%	259,96	30%	226,17	30%	306,97	30%	332,51	30%	362,51	30%	1.488,12	DP2KBP3A

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	03		URUSAN PANGAN				1.681,38		4.489,55		3.456,39		3.248,86		3.286,98		16.163,16	
			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				1.681,38		4.489,55		3.456,39		3.248,86		3.286,98		16.163,16	
		16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Jumlah luas tanam padi pertahun	17.245 Ha	17.500 Ha	1.681,38	17.750 Ha	4.489,55	18.000 Ha	3.456,39	18.250 Ha	3.248,86	18.500 Ha	3.286,98	18.500 Ha	16.163,16	Diperpa
	04		URUSAN PERTANAHAN				934,33		159.950,99		162.502,59		175.567,41		191.832,55		690.787,87	
			BAGIAN PEMERINTAHAN				934,33		159.950,99		162.502,59		175.567,41		191.832,55		690.787,87	
		01	PROGRAM PENATAAN , PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	data tidak tersedia	100%	907,36	100%	159.915,24	100%	162.339,33	100%	175.404,14	100%	191.669,28	1156 bidang	690.235,35	Bagian Pemerintahan
		02	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	4 kasus	4 kasus	26,98	5 kasus	35,74	5 kasus	163,27	5 kasus	163,27	5 kasus	163,27	24 kasus	552,52	Bagian Pemerintahan
	05		URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				62.002,64		88.285,51		88.310,51		95.657,94		104.286,29		453.459,33	
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				62.002,64		88.285,51		88.310,51		95.657,94		104.286,29		453.459,33	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	100%	4.566,90	100%	4.695,86	100%	4.704,08	100%	5.081,99	100%	5.250,19	100%	26.360,38	DLHK
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai Penunjang Kegiatan	100%	100%	2.463,48	100%	4.957,36	100%	4.357,36	100%	4.571,98	100%	4.929,17	100%	18.169,32	DLHK
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	351,46	100%	227,30	100%	228,03	100%	275,03	100%	302,53	100%	1.406,34	DLHK
		15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%	100%	41.626,89	100%	54.444,39	100%	56.025,83	100%	61.189,93	100%	67.085,70	100%	297.250,69	DLHK
		16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	100%	2.168,74	100%	2.759,38	100%	2.825,69	100%	3.842,61	100%	4.226,87	100%	16.554,29	DLHK
		18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100%	100%	1.267,14	100%	102,30	100%	112,53	100%	123,78	100%	136,16	100%	1.741,92	DLHK
		19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningakatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	100%	586,04	100%	777,57	100%	731,16	100%	995,71	100%	1.095,28	100%	4.449,45	DLHK

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase keindahan dan keasrian taman di kabupaten badung	100%	100%	8.765,48	100%	20.114,13	100%	19.118,65	100%	19.324,26	100%	20.978,10	100%	86.346,04	DLHK
			27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	100%	195,50	100%	197,17	100%	197,17	100%	242,04	100%	268,41	100%	1.121,53	DLHK
			28	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100%	100%	11,00	100%	10,04	100%	10,00	100%	10,61	100%	13,87	100%	59,37	DLHK
06			URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9.309,06		9.485,17		9.535,17		10.328,50		11.260,13		49.918,03	
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					9.309,06		9.485,17		9.535,17		10.328,50		11.260,13		49.918,03	
			01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.887,09	100%	2.107,43	100%	2.107,43	100%	2.282,77	100%	2.488,67	100%	10.873,39	DISDUKCAPIL
			02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2.593,43	100%	1.652,55	100%	1.652,55	100%	1.790,04	100%	1.951,50	100%	9.640,07	DISDUKCAPIL
			06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	120 laporan	28 laporan	185,34	28 dokumen	185,34	28 dokumen	185,34	28 dokumen	200,76	28 dokumen	218,87	28 dokumen	975,65	DISDUKCAPIL
			09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SKPD	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD	40 buku	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,83	3 dokumen	11,81	3 dokumen	52,64	DISDUKCAPIL
			15	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	90,02%	92%	4.633,20	94%	5.529,85	95%	5.579,85	97%	6.044,10	98%	6.589,28	98%	28.376,28	DISDUKCAPIL
07			URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.176,20		11.989,70		8.883,04		9.622,11		10.490,02		46.161,06	
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.176,20		11.989,70		8.883,04		9.622,11		10.490,02		46.161,06	
			01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.114,21	100%	1.113,44	100%	1.014,14	100%	1.098,51	100%	1.197,60	100%	5.537,90	DPMD
			02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	242,26	100%	836,92	100%	616,68	100%	667,99	100%	728,24	100%	3.092,09	DPMD
			06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	183,00	100%	219,66	100%	266,34	100%	288,50	100%	314,52	100%	1.272,02	DPMD
			09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	3 dokumen	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	10,83	3 dokumen	11,81	3 dokumen	52,64	DPMD
			15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	62 desa	62 desa	340,73	62 desa	1.542,80	62 desa	1.961,05	62 desa	2.124,21	62 desa	2.315,82	62 desa	8.284,62	DPMD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	32 Pasar, 13 BUMDesa	6 Pasar, 13 BUMDesa	469,34	7 Pasar, 10 BUMDesa	456,61	7 Pasar, 8 BUMDesa	840,14	6 Pasar, 13 BUMDesa	910,04	6 Pasar, 13 BUMDesa	992,12	32 Pasar, 46 BUMDesa	3.668,24	DPMD	
	17	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab/ Kec.	12 TP PKK Kab/ Kec.	1.000,01	12 TP PKK Kab/ Kec.	1.217,37	12 TP PKK Kab/ Kec.	1.220,56	12 TP PKK Kab/ Kec.	1.322,11	12 TP PKK Kab/ Kec.	1.441,37	12 TP PKK Kab/ Kec.	6.201,43	DPMD	
	18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Jumlah Aparatur mampu menjalankan tugasnya dengan baik	262 orang	210 orang	1.203,41	200 orang	3.860,31	200 orang	1.596,65	200 orang	1.729,50	200 orang	1.885,50	1.010 orang	10.275,36	DPMD	
	19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah Desa/Kel. yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	62 Desa/Kelurahan	62 ds/kel.	613,24	62 desa	2.699,96	62 desa	1.357,47	62 desa	1.470,41	62 desa	1.603,04	62 desa	7.744,13	DPMD	
	20	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	62 Desa/Kelurahan	-	-	8.896 KPM	32,625	-	-	-	-	-	-	8.896 KPM	32,62	DPMD	
08		URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				6.365,58		8.182,51		5.835,87		6.321,41		6.891,60		33.596,97		
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				6.365,58		8.182,51		5.835,87		6.321,41		6.891,60		33.596,97		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%		100%	1.409,705	100%	1.264,350	100%	1.261,418	100%	1.366,368	100%	1.489,614	100%	6.791,456	DP2KBP3A
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana Aparatur	100%		100%	505,487	100%	1.069,993	100%	540,862	100%	585,862	100%	638,706	100%	3.340,910	DP2KBP3A
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%		100%	20,105	100%	55,141	100%	324,038	100%	350,998	100%	382,658	100%	1.132,940	DP2KBP3A
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		100%	251,835	100%	250,693	100%	286,184	100%	309,994	100%	337,956	100%	1.436,662	DP2KBP3A
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%		100%	15,000	100%	24,668	100%	60,159	100%	65,164	100%	71,042	100%	236,034	DP2KBP3A
	15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75,05		75,26	2.821,041	75,52	4.627,994	76,03	2.349,135	76,40	2.544,583	77,24	2.774,105	77,24	15.116,858	DP2KBP3A
	16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Persentase Perkawinan Remaja kurang dari 20 tahun	0,22 %		0,19 %	690,972	0,18 %	422,042	0,17 %	309,728	0,16 %	335,498	0,15 %	365,760	0,15 %	2.124,000	DP2KBP3A
	18	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)	2,1			0,000		0,000	2,2	140,800	2,2	152,515	2,1	166,272	2,1	459,587	DP2KBP3A
	23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	51,99%		53,62%	189,779	55,14%	113,870	56,56%	126,325	57,88%	136,836	59,12%	149,178	59,12%	715,987	DP2KBP3A
	31	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	91		92,000	461,660	94,000	353,763	96	437,216	98	473,592	100	516,310	100	2.242,540	DP2KBP3A

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	09		URUSAN PERHUBUNGAN				24.674,34		31.492,41		85.063,07		92.140,32		100.451,38		333.821,53	
			DINAS PERHUBUNGAN				24.674,34		31.492,41		85.063,07		92.140,32		100.451,38		333.821,53	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang memadai	94,05%	100%	1.702,10	100%	1.849,94	100%	21.048,41	100%	22.232,68	100%	24.436,71	100%	71.269,85	Dishub
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memadai	85,61%	100%	2.537,53	100%	2.311,99	100%	5.875,30	100%	5.875,30	100%	5.875,30	100%	22.475,42	Dishub
		22	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	95,01%	100%	44,45	-	-	100%	107,03	100%	-	100%	107,03	100%	258,51	
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Peningkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	96,58%	100%	378,39	100%	366,20	100%	366,61	100%	366,61	100%	366,61	100%	1.844,43	Dishub
		15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	89,39%	100%	13.634,86	100%	22.531,77	100%	53.117,75	100%	58.117,75	100%	63.117,75	100%	210.519,86	Dishub
		17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	99,34%	100%	6.367,02	100%	4.422,59	100%	4.537,89	100%	5.537,89	100%	6.537,89	100%	27.403,27	Dishub
		23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang baik	98,87%	100%	10,00	100%	9,92	100%	10,09	100%	10,09	100%	10,09	100%	50,18	Dishub
	10		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				20.527,98		142.021,56		111.562,21		120.270,84		130.595,84		524.978,42	
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				20.527,98		142.021,56		111.562,21		120.270,84		130.595,84		524.978,42	
		1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Pelayanan Administrasi yang memadai	Data tidak tersedia	100%	5.891,39	100%	1.659,99	100%	108.267,70	100%	50.024,05	100%	61.189,10	100%	227.032,22	Diskominfo
		2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang memadai	Data tidak tersedia	100%	1.850,29	100%	2.913,06	100%	1.944,87	100%	1.178,05	100%	890,56	100%	8.776,82	Diskominfo
		3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Peningkatan Penembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Data tidak tersedia	100%	310,95	100%	548,42	100%	647,67	100%	712,43	100%	783,68	100%	3.003,15	Diskominfo
		1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang baik	Data tidak tersedia	100%	10,00	100%	10,00	100%	12,10	100%	13,31	100%	8,47	100%	53,88	Diskominfo
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	Data tidak tersedia	100%	12.465,36	100%	136.855,17	100%	534,06	100%	68.171,60	100%	67.535,50	100%	285.561,69	Diskominfo
		5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DALAM PENYERAPAN LITERASI MEDIA	Terwujudnya literasi media pemahaman informasi pada media sosial bagi masyarakat	Data tidak tersedia	-	-	100%	34,92	100%	155,82	100%	171,40	100%	188,54	100%	550,67	Diskominfo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	11		URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				4.605,13		7.097,98		7.197,98		8.007,78		8.958,75		35.867,62		
			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				4.605,13		7.097,98		7.197,98		8.007,78		8.958,75		35.867,62		
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.188,01	100%	1.254,20	100%	1.348,26	100%	1.311,19	100%	1.344,85	100%	6.446,51	Diskop.UKMP	
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	696,14	100%	1.017,76	100%	583,41	100%	628,55	100%	691,41	100%	3.617,28	Diskop.UKMP	
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Laporan capaian kinerja dan Keuangan	100%	100%	242,44	100%	450,89	100%	457,68	100%	503,45	100%	553,80	100%	2.208,26	Diskop.UKMP	
		07	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%	110 Dokumen	11,00	30 Dokumen	6,60	30 Dokumen	7,26	30 Dokumen	7,98	30 Dokumen	8,78	100%	41,61	Diskop.UKMP	
		08	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Persentase Kewirausaha yang mempunyai jiwa interpreneur	100%	100%	11,53	100%	400,62	100%	190,73	100%	209,80	100%	230,78	100%	1.043,46	Diskop.UKMP	
		09	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Persentase Usaha Kecil yang melakukan kemitraan	100%	100%	647,16	100%	1.280,20	100%	1.474,85	100%	1.897,43	100%	2.334,82	100%	7.634,47	Diskop.UKMP	
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Persentase pertumbuhan UMKM	100%	100%	539,90	100%	1.176,31	100%	1.273,30	100%	1.400,63	100%	1.540,69	100%	5.930,82	Diskop.UKMP	
		11	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	100%	100%	1.243,77	100%	1.478,49	100%	1.801,21	100%	1.981,33	100%	2.179,46	100%	8.684,27	Diskop.UKMP	
		12	PROGRAM PENGEMBANGAN SITEM DATA DAN INFORMASI	Jumlah data/informasi UMKM	100%	62 buku	25,17	112 buku	32,91	112 buku	61,28	112 buku	67,41	112 buku	74,15	100%	260,92	Diskop.UKMP	
	12		URUSAN PENANAMAN MODAL				5.088,68		10.009,65		9.959,65		10.788,29		11.761,40		47.607,67		
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				5.088,68		10.009,65		9.959,65		10.788,29		11.761,40		47.607,67		
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.551,21	12 bulan	1.914,09	12 bulan	2.105,50	12 bulan	2.149,05	12 bulan	2.363,96	12 bulan	10.083,82	DPMPSTP	
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	1.369,62	12 bulan	3.508,22	12 bulan	3.346,99	12 bulan	3.681,69	12 bulan	3.944,15	12 bulan	15.850,67	DPMPSTP	
		03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	12 bulan	194,01	12 bulan	382,04	12 bulan	420,24	12 bulan	462,27	12 bulan	508,49	12 bulan	1.967,06	DPMPSTP	
		05	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Cakupan Dokumen Perencanaan	12 bulan	12 bulan	10,99	12 Bulan	9,99	12 bulan	10,99	12 bulan	12,09	12 bulan	13,30	12 bulan	57,37	DPMPSTP	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		08	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI	Cakupan Penyebaran Informasi Penanaman Modal	Data tidak tersedia	12 bulan	348,99	6 Kecamatan	422,73	6 kecamatan	465,01	6 kecamatan	511,51	6 kecamatan	562,66	6 kecamatan	2.310,89	DPMPTSP
		09	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Persentase Realisasi Investasi	Data tidak tersedia	82%	193,57	85%	265,15	87%	291,66	90%	320,83	95%	352,91	95%	1.424,12	DPMPTSP
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Cakupan data potensi investasi	Data tidak tersedia	6 kecamatan	10,45	6 kecamatan	136,13	6 kecamatan	149,75	6 kecamatan	164,72	6 kecamatan	181,19	6 kecamatan	642,25	DPMPTSP
		11	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAHUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Cakupan Kemitraan UMKM	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	7,69	6 Kecamatan	28,30	6 kecamatan	31,13	6 kecamatan	34,24	6 kecamatan	37,66	6 kecamatan	139,02	DPMPTSP
		12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	Persentase IzinTerbit Tepat Waktu	88%	91%	1.125,48	92%	2.895,32	94%	2.645,93	96%	2.910,20	98%	3.201,22	98%	12.778,15	DPMPTSP
		13	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase Pengaduan yang tertangani	12 bulan	100%	70,86	100%	24,66	100%	27,13	100%	29,84	100%	32,82	100%	185,31	DPMPTSP
		14	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang berbasis teknologi Informasi	Data tidak tersedia	33%	205,80	55%	423,02	66%	465,32	77%	511,85	88%	563,03	88%	2.169,02	DPMPTSP
13			URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				16.647,48		32.935,64		30.369,73		32.860,04		35.883,18		148.696,07	
			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				16.647,48		32.935,64		30.369,73		32.860,04		35.883,18		148.696,07	
		1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	20%	30%	746,21	35%	2.144,66	40%	2.729,50	45%	2.953,32	50%	3.225,03	50%	11.798,74	Disdikpora
		2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Jumlah prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	11 Cabang	19 Cabang	15.901,27	19 Cabang	30.790,97	19 Cabang	27.640,23	19 Cabang	29.906,72	19 Cabang	32.658,15	19 Cabang	136.897,34	Disdikpora
14			URUSAN STATISTIK				-		177,05		-		369,83		406,81		953,69	
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-		177,05		-		369,83		406,81		953,69	
		1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK	Terwujudnya pengelolaan keamanan informasi penyelenggaraan persandian daerah	Data Tidak Tersedia	-	-	100%	177,05	100%	-	100%	369,83	100%	406,81	100%	953,69	Diskominfo
15			URUSAN PERSANDIAN				-		501,13		647,55		904,94		1.506,38		3.560,00	
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-		501,13		647,55		904,94		1.506,38		3.560,00	
		1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan keamanan informasi penyelenggaraan persandian daerah	Data Tidak Tersedia	-	-	100%	501,13	100%	647,55	100%	904,94	100%	1.506,38	100%	3.560,00	Diskominfo

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1				2				3				4				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	18		URUSAN KEARSIPAN				7.834,12		2.243,99		2.652,29		2.872,96		3.132,10		18.735,45	
			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				7.834,12		2.243,99		2.652,29		2.872,96		3.132,10		18.735,45	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.610,07	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100%	1.610,07	Diskerpup
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAN APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4.328,67	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100%	4.328,67	Diskerpup
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya	98	60 orang	204,57	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	629 orang	204,57	Diskerpup
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	257,10	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	100%	257,10	Diskerpup
		09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	10,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3 dokumen	10,00	Diskerpup
		15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	98 SKPD/Desa	35 PD 62 Desa	87,71	35 PD 62 Desa	695,55	35 PD 62 Desa	563,69	35 PD 62 Desa	610,59	35 PD 62 Desa	665,66	32 PD 62 Desa	2.623,19	Diskerpup
		16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	74 dokumen	74 dokumen	604,26	74 dokumen	875,28	74 dokumen	1.021,30	74 dokumen	1.106,27	74 dokumen	1.206,06	25 jenis arsip	4.813,17	Diskerpup
		18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah pelayanan informasi yang meningkat kualitasnya	5 materi	5 materi	731,74	5 materi	673,16	5 materi	1.067,30	5 materi	1.156,10	5 materi	1.260,38	25 materi	4.888,68	Diskerpup

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3		URUSAN PILIHAN				68.204,62		107.687,11		106.082,01		115.192,21		125.608,80		522.774,76	
	01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				12.403,22		6.707,36		6.757,36		7.319,57		7.979,80		41.167,32	
		DINAS PERIKANAN				12.403,22		6.707,36		6.757,36		7.319,57		7.979,80		41.167,32	
		1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Waktu terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	12 bulan	1.550,72	12 bulan	1.499,32	12 bulan	1.499,32	12 bulan	1.539,48	12 bulan	1.583,49	60 bulan	7.672,33	Dinas Perikanan
		2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	100	665,53	100%	467,54	100%	467,54	100%	547,86	100%	635,89	100%	2.784,37	Dinas Perikanan
		3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen AKIP yang disusun	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	260,08	6 jenis dokumen	234,88	6 jenis dokumen	234,88	6 jenis dokumen	275,04	6 jenis dokumen	319,06	6 jenis dokumen	1.323,94	Dinas Perikanan
		09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 jenis	3 jenis	10,75	3 jenis	11,25	3 jenis	11,25	3 jenis	51,40	3 jenis	95,42	3 jenis	180,06	Dinas Perikanan
		15 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Jumlah produksi perikanan	155.646,48 ton	7.021,00	36,89	-	-	-	-	-	-	-	-	7.021,00	36,89	Dinas Perikanan
		16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN	Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan	5 kelompok	4 kelompok	82,26	-	-	-	-	-	-	-	-	4 kelompok	82,26	Dinas Perikanan
		19 PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	2 kawasan	1 kawasan	1.689,85	2 kawasan	485,65	2 kawasan	485,65	2 kawasan	525,80	2 kawasan	613,83	2 kawasan	3.800,79	Dinas Perikanan
		20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah Produksi perikanan budidaya	586.80 ton	598	1.219,49	603,00	2.013,40	611,00	2.013,40	617,00	2.053,56	623,00	2.097,58	3.052,00	9.397,44	Dinas Perikanan
		21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.890,70 ton	6.423,00 ton	645,87	6.551,00 ton	1.712,15	6.682,00 ton	1.712,15	6.816,00 ton	1.752,30	6.952,00 ton	1.796,32	33.424,00 ton	7.618,78	Dinas Perikanan
		23 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	5.062	8,25	5.164	6,19	5.267	6,19	5.372	46,34	5.480	90,36	26.345	157,33	Dinas Perikanan
		26 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah pemasaran produksi hasil perikanan	8.931 ton	9.325	51,00	9.371	42,30	9.417	42,30	9.464	82,46	9.511	126,47	47.088	344,52	Dinas Perikanan
		30 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah dokumen data/informasi perikanan	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	308,02	3 jenis dokumen	152,80	3 jenis dokumen	202,80	3 jenis dokumen	242,96	3 jenis dokumen	286,97	3 jenis dokumen	1.193,54	Dinas Perikanan
		34 PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	5.063	5,46	5.164	52,22	5.267	52,22	5.373	92,38	5.480	136,40	5.480,159	338,68	Dinas Perikanan
		15 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	Data tidak tersedia	-	-	50 kelompok	16,87	50 kelompok	16,87	50 kelompok	57,03	50 kelompok	101,05	200 kelompok	191,83	Dinas Perikanan
		16 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA	Jumlah kawasan pesisir yang tertata untuk mendukung pariwisata	Data tidak tersedia	1 kawasan	5.869,05	1 kawasan	12,80	1 kawasan	12,80	1 kawasan	52,96	2 kawasan	96,97	6 kawasan	6.044,57	Dinas Perikanan
	02	URUSAN PARIWISATA				21.860,37		57.406,68		57.456,68		62.237,08		67.850,86		266.811,67	
		DINAS PARIWISATA				21.860,37		57.406,68		57.456,68		62.237,08		67.850,86		266.811,67	
		01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2.328	12 Bulan	2.604,17	12 Bulan	2.750,00	12 Bulan	2.802	60 Bulan	2.925,00	5 paket	13.409,31	Dispar

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab																
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang Tersedia	1 Tahun	12 Bulan	1.637,52	12 Bulan	2.688,58	12 Bulan	1.148,27	12 Bulan	2.016,04	12 Bulan	2.116,90	60 Bulan	9.607,31	Dispar															
		03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 paket	1 paket	304,72	1 paket	342,10	1 paket	357,76	1 paket	375,65	1 paket	375,65	5 paket	1.755,88	Dispar															
		04	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan	25 buku	25 buku	11,00	25 buku	10,00	25 buku	10,00	25 buku	10,00	25 buku	10,00	125 buku	51,00	Dispar															
		01	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	4.000.000 orang wisatawan mancanegara	5.080.000 wisatawan mancanegar	12.032,31	6.502.400 wisatawan mancanegar	39.468,19	8.388.096 wisatawan mancanegar	48.452,00	10.904.524 wisatawan mancanegar	48.452,00	14.284.926 wisatawan mancanegar	49.952,00	45.159.946 wisatawan Mancanegar	198.356,51	Dispar															
		02	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Prosentase DTW yang ditata	61%	64%	4.828,36	66%	9.902,07	69%	2.455,20	72%	6.297,94	75%	9.297,94	75%	32.781,51	Dispar															
		03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	200 orang	334 orang	502,00	972 orang	1.039,23	1012 orang	1.361,18	1012 orang	1.361,18	1012 orang	1.861,18	4342 orang	6.124,78	Dispar															
		04.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	jumlah produk wisata yang dibina	180 usaha + 4 daya tarik wisata	615 usaha +23 daya tarik wisata	216,33	925 usaha +24 daya tarik wisata	1.352,35	925 usaha +25 daya tarik wisata	922,26	925 usaha +26 daya tarik wisata	922,26	925 usaha +27 daya tarik wisata	1.312,19	4.315 usaha + 22 daya tarik wisata	4.725,38	Dispar															
03		URUSAN PERTANIAN							23.239,32		32.439,81			33.397,97		36.671,78			40.234,50					165.983,39									
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							23.239,32		32.439,81			33.397,97		36.671,78			40.234,50					165.983,39									
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran	60 bulan	12 bulan	3.929,52	12 bulan	4.672,74	12 bulan	4.672,74	12 bulan	5.140,02	12 bulan	5.549,57	60 bulan	23.964,59	DIPERPA															
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur	60 bulan	12 bulan	1.826,91	12 bulan	1.577,28	12 bulan	1.577,28	12 bulan	1.617,11	12 bulan	1.778,82	60 bulan	8.377,40	DIPERPA															
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN APARATUR	Pengelolaan keuangan kegiatan SKPD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	60 Bulan	12 Bulan	368,48	12 Bulan	463,72	12 Bulan	463,72	12 Bulan	561,10	12 Bulan	617,21	60 Bulan	2.474,23	DIPERPA															
		26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis	3 Jenis	10,99	2 Jenis	8,16	2 Jenis	8,16	2 Jenis	9,87	3 Jenis	10,86	3 Jenis	48,05	DIPERPA															
		15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah peserta pelatihan	280 orang	345 orang	482,40	345 orang	368,79	110 orang	368,79	110orang	405,67	110 orang	446,23	1.020 orang	2.071,89	DIPERPA															
		17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian / perkebunan	15 kali	4 Kali	1.925,09	5 kali	2.083,24	5 kali	2.083,24	5 kali	2.291,57	5 kali	2.520,72	24 Kali	10.903,87	DIPERPA															
		19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	120,972 ton	122.500 ton	9.554,31	125.000 ton	9.890,87	127.500 ton	9.890,87	130.000 ton	10.879,95	132.500 ton	11.967,95	132.500 ton	52.183,95	DIPERPA															
		20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	50 orang	50 orang	1.312,38	50 orang	2.011,89	50 orang	1.658,22	50 orang	1.824,04	50 orang	2.006,45	50 orang	8.812,97	DIPERPA															
		21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan ternak	65.427 ekor	65500 ekor	3.076,30	66300 ekor	2.531,44	67300 ekor	2.773,04	68800 ekor	3.050,34	70000 ekor	3.355,37	71000 ekor	14.786,49	DIPERPA															
		25	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah Populasi ternak	1.494.309 ekor	1.501.775 ekor	24,399	1.509.284 ekor	59,530	1.516.831 ekor	333,670	1.524.914 ekor	367,043	1.532.036 ekor	403,741	1.532.036 ekor	1.188,38	DIPERPA															
		27	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah komoditi yang dibina	Data tidak tersedia	-	-	43 paket	7.960,85	43 paket	8.756,93	43 paket	9.632,63	43 paket	10.595,89	43 paket	36.946,29	DIPERPA															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	28	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN	Jumlah data yang informatif	3 jenis	3 jenis	606,96	3 jenis	632,38	3 jenis	632,38	3 jenis	695,62	3 jenis	765,18	3 jenis	3.332,54	DIPERPA	
	31	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Jumlah produksi daging	16.037 ton	16.679 ton	121,59	16.694 ton	178,92	16.728 ton	178,92	16.862 ton	196,82	16.947 ton	216,50	83911	892,76	DIPERPA	
04			URUSAN KEHUTANAN			292,41		0,00		0,00		0,00		0,00		292,41		
			BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			292,41		0,00		0,00		0,00		0,00		292,41		
	16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	Data tidak tersedia	20 kelompok	41,38	-	-	-	-	-	-	-	-	20 kelompok	41,38	Bagian Sumber Daya Alam	
	23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok tani/ masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hutan lestari	Data tidak tersedia	9 kelompok	11,62	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kelompok	11,62	Bagian Sumber Daya Alam	
	22	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI KEHUTANAN	Jumlah data base dan peta potensi kehutanan	Data tidak tersedia	1 paket	239,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	239,41	Bagian Sumber Daya Alam	
05			URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			115,28		158,84		0,00		0,00		0,00		274,12		
			BAGIAN PEREKONOMIAN			115,28		158,84		0,00		0,00		0,00		274,12		
	15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Mewujudkan Tertib Usaha Di Bidang ESDM	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	105,30	6 Kecamatan	142,15	-	-	-	-	-	-	6 Kecamatan	247,45	Bagian Perekonomian	
	17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Mewujudkan tertib Usaha di Bidang ketenagalistrikan	Data tidak tersedia	6 Kec	9,98	6 Kec	16,69	-	-	-	-	-	-	6 Kec	26,66	Bagian Perekonomian	
06			URUSAN PERDAGANGAN			6.510,47		2.535,17		2.535,17		2.535,17		2.535,17		16.651,14		
			DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN			6.510,47		2.535,17		2.535,17		2.535,17		2.535,17		16.651,14		
	15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase perlindungan terhadap Konsumen	100%	100%	1.751,76	100%	315,49	100%	325,92	100%	358,51	100%	394,36	100%	3.146,03	Diskop.UKMP	
	16	PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR	Persentase Pelaksanaan Tertib Ukur	Data tidak tersedia	-	-	100%	1.280,54	100%	933,94	100%	1.199,00	100%	1.065,38	100%	4.478,86	Diskop.UKMP	
	17	PEOGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase Efisiensi Perdagangan dalam negeri	100%	100%	4.758,71	100%	766,05	100%	1.096,05	100%	780,47	100%	858,52	100%	8.259,80	Diskop.UKMP	
	18	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase realisasi ekspor Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	-	-	100%	173,09	100%	179,26	100%	197,19	100%	216,91	100%	766,45	Diskop.UKMP	
07			URUSAN PERINDUSTRIAN			3.783,54		8.439,25		5.934,83		6.428,61		7.008,47		31.594,71		
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			3.783,54		8.439,25		5.934,83		6.428,61		7.008,47		31.594,71		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administarsi perkantoran	Data tidak terseda	100%	1.200,94	100%	1.187,84	100%	1.248,23	100%	1.352,09	100%	1.474,04	100%	6.463,14	Disperinaker	
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Data tidak terseda	100%	785,41	100%	1.598,32	100%	331,66	100%	359,26	100%	391,66	100%	3.466,32	Disperinaker	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Data tidak terseda	100%	278,00	100%	291,66	100%	292,16	100%	316,47	100%	345,02	100%	1.523,31	Disperinaker	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021								
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta							
1		2		3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Kesesuaian Renia PD denqan RKPd	Data tidak tersedia	100%	15,00	100%	9,45	100%	12,31	100%	13,33	100%	14,53	100%	64,62	Disperinaker			
		11	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	Data tidak tersedia	100%	160,12	100%	882,42	100%	374,86	100%	406,05	100%	442,68	100%	2.266,13	Disperinaker			
		16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	1.000 orang 32 IKM 90 unit usaha	12 bulan	1.318,56	12 bulan	4.050,25	12 bulan	3.614,47	12 bulan	3.915,19	12 bulan	4.268,35	60 bulan	17.166,82	Disperinaker			
		17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah kelompok IKM yang mampu menerapkan teknologi industri	17 ququs	1 ququs	25,52	1 ququs	419,31	1 ququs	61,13	1 ququs	66,22	1 ququs	72,19	5 ququs	644,38	Disperinaker			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			373.464,22		475.181,05		424.789,11		460.586,97		501.702,96		2.235.724,32		
	01	FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			274.624,65		333.651,90		296.087,29		321.177,15		349.718,39		1.575.259,37		
		SEKRETARIAT DPRD			83.377,91		103.003,57		96.732,10		104.780,21		114.231,39		502.125,18		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.488,63	100%	4.605,76	100%	5.066,34	100%	5.572,97	100%	6.130,27	100%	26.863,99	Setwan
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4.827,12	100%	7.923,22	100%	8.715,54	100%	9.587,10	100%	10.545,81	100%	41.598,79	Setwan
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	409,68	100%	459,04	100%	504,95	100%	555,44	100%	610,99	100%	2.540,10	Setwan
	15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	78%	80%	72.416,94	81%	89.749,80	82%	82.152,95	83%	88.743,15	84%	96.590,62	84%	429.653,46	Setwan
	26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Raperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100%	100%	235,53	100%	265,74	100%	292,32	100%	321,55	100%	353,70	100%	1.468,85	Setwan
		SEKRETARIAT DAERAH			144.544,18		183.080,34		155.382,30		168.765,51		183.559,21		835.331,54		
	a.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			4.790,93		4.433,42		4.383,42		4.748,12		5.176,41		23.532,30		
	01	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Proposal yang diverifikasi administratif sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	4.790,93	100%	4.433,42	100%	4.383,42	100%	4.748,12	100%	5.176,41	100%	23.532,30	Baqian Kesra
	b.	BAGIAN PEMERINTAHAN			2.956,22		7.504,84		5.180,56		6.066,97		6.185,25		27.893,84		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pembayaran iuran anqqota APKASI	1 kali	1 kali	25,08	1 kali	25,18	1 kali	25,18	1 kali	25,18	1 kali	25,18	1 kali	125,78	Bagian Pemerintahan
	05	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	- Jumlah peringatan hari besar yang dilaksanakan - Jumlah kecamatan yang	3 Hari besar 6 Kecamatan	3 Hari besar	1.728,20	3 Hari besar	3.912,26	3 Hari besar	2.173,39	3 Hari besar	2.098,39	3 Hari besar	2.044,93	3 Hari besar	11.957,18	Bagian Pemerintahan
	27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab Badung	100%	100%	1.108,81	100%	3.202,60	100%	2.533,99	100%	3.500,66	100%	3.672,40	100%	14.018,47	Bagian Pemerintahan
	25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Jumlah naskah kerja sama antar pemerintah di kabupaten badung	Data tidak tersedia	10 naskah	70,90	30 naskah	364,80	30 naskah	370,06	30 naskah	364,80	30 naskah	364,80	130 naskah	1.535,36	Bagian Pemerintahan
	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	12 bulan	23,23	-	-	12 bulan	77,94	12 bulan	77,94	12 bulan	77,94	48 bulan	257,05	Bagian Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	c.	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN			9.926,66		13.425,64		11.162,96		12.091,71		13.182,39		59.789,35		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	1.017,85	15 kegiatan	1.497,23	15 kegiatan	1.646,96	15 kegiatan	1.811,65	15 kegiatan	1.992,82	15 kegiatan	7.966,51	Bagian Humas
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman	Data tidak tersedia	-	-	74 Setel	160,38	-	61,50	74 Setel	176,41	-	67,65	74 Setel	465,94	Bagian Humas
	36	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	2 paket	1.163,78	2 paket	1.522,97	2 paket	1.675,27	2 paket	1.842,80	2 paket	2.027,08	2 paket	8.231,90	Bagian Humas
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DATA APARATUR	Forum peningkatan kapasitas kelembagaan	Data tidak tersedia	30 orang	26,01	30 orang	423,70	-	466,07	30 orang	512,67	-	563,94	90 orang	1.992,39	Bagian Humas
	35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Kepala Lingkungan yang dilantik	5 kaling	5 kaling	1.649,34	5 kaling	2.540,94	5 kaling	2.582,41	5 kaling	2.840,66	5 kaling	3.124,72	5 kaling	12.738,07	Bagian Humas
	37	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	6.069,68	3 dokumen	7.280,41	3 dokumen	4.730,75	3 dokumen	4.907,52	3 dokumen	5.406,18	3 dokumen	28.394,55	Bagian Humas
	d.	BAGIAN HUKUM DAN HAM			3.606,90		4.245,29		4.215,29		4.566,01		4.977,86		21.611,36		
	01	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	2.537 Produk Hukum Daerah	2000 Produk Hukum Daerah	3.606,90	2000 Produk Hukum Daerah	4.245,29	2000 Produk Hukum Daerah	4.215,29	2000 Produk Hukum Daerah	4.566,01	2000 Produk Hukum Daerah	4.977,86	10.000 Produk Hukum Daerah	21.611,36	Baq. Hukum dan HAM
	e.	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			441,56		956,65		752,58		815,19		888,72		3.854,69		
	16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok tani yang memiliki pemahaman tentang konservasi	Data tidak tersedia	-	-	15 Kelompok	166,30	15 Kelompok	180,54	15 kelompok	243,16	15 kelompok	243,16	75 kelompok	833,16	Bagian Sumber Daya Alam
	23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok tani/ masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hutan lestari	Data tidak tersedia	-	-	9 kelompok	45,48	9 kelompok	45,67	9 kelompok	45,66	9 kelompok	45,66	45 kelompok	182,47	Bagian Sumber Daya Alam
	75	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Jumlah produk pangan olahan non beras yang di pamerkan	Data tidak tersedia	20 jenis	232,74	20 jenis	693,66	20 jenis	475,61	20 jenis	475,61	20 jenis	549,14	100 jenis	2.426,76	Bagian Sumber Daya Alam
	100	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah KTNA yang menjadi wirausaha berbasis agribisnis	Data tidak tersedia	5 orang KTNA	40,51	5 orang KTNA	51,21	5 orang KTNA	50,76	5 orang KTNA	50,76	5 orang KTNA	50,76	25 orang KTNA	244,00	Bagian Sumber Daya Alam
	114	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Masyarakat miskin di Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	9.883 RTS -PM	168,31								9.883 RTS -PM	168,31	Bagian Sumber Daya Alam	
	f.	BAGIAN PEREKONOMIAN			3.494,02		2.069,54		2.328,38		2.522,10		2.749,60		13.163,65		
	56	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Memperkuat Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa	Data tidak tersedia	122 LPD	3.301,61	122 LPD	1.689,11	122 LPD	1.789,11	122 LPD	1.889,11	122 LPD	1.989,11	122 LPD	10.658,07	Bagian Perekonomian
	111	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	65,56	6 Kecamatan	111,67	6 Kecamatan	111,67	6 Kecamatan	111,67	6 Kecamatan	211,67	6 Kecamatan	612,23	Bagian Perekonomian
	112	PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN EKONOMI	Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	2 Prsh Daerah	57,13	2 Prsh Daerah	128,90	2 Prsh Daerah	128,90	2 Prsh Daerah	128,90	2 Prsh Daerah	128,90	2 Prsh Daerah	572,74	Bagian Perekonomian
	113	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Penyediaan Informasi Produk Unggulan Daerah	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	69,72	6 Kecamatan	139,86	6 Kecamatan	139,86	6 Kecamatan	199,86	6 Kecamatan	227,36	6 Kecamatan	776,65	Bagian Perekonomian

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	xx	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Mewujudkan Tertib Usaha Di Bidang ESDM	Data tidak tersedia	-	-	-	-	6 Kecamatan	142,15	6 Kecamatan	175,87	6 Kecamatan	175,87	6 Kecamatan	493,89	Bagian Perekonomian
	xx	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Mewujudkan tertib Usaha di Bidang ketenagalistrikan	Data tidak tersedia	-	-	-	-	6 Kec	16,69	6 Kec	16,69	6 Kec	16,69	18 Kec	50,07	Bagian Perekonomian
	q	BAGIAN PEMBANGUNAN				3.034,48		9.372,36		9.432,36		10.217,13		11.138,72		43.195,04	
	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	1 paket	1 paket	59,04	1 paket	1.193,80	1 paket	1.313,18	1 paket	1.444,50	1 paket	1.588,95	5 paket	5.599,47	Bagian Pembangunan
	20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	3 paket	4 paket	2.863,28	4 paket	7.360,89	4 paket	7.219,74	4 paket	7.783,25	4 paket	8.461,46	20 paket	33.688,62	Bagian Pembangunan
	39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	data tidak tersedia	1 dokumen	92,65	1 dokumen	550,54	1 dokumen	605,59	1 dokumen	666,15	1 dokumen	732,77	5 dokumen	2.647,70	Bagian Pembangunan
	89	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah	1 Paket	1 Paket	19,51	1 Paket	267,13	1 Paket	293,84	1 Paket	323,22	1 Paket	355,55	1 Paket	1.259,25	Bagian Pembangunan
	h.	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				4.520,95		4.646,73		4.656,73		5.044,17		5.499,15		24.367,72	
	01	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	100%	100%	4.267,13	100%	4.428,14	100%	4.483,13	100%	4.857,58	100%	5.293,89	100%	23.329,88	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	100%	100%	253,82	100%	218,58	100%	173,59	100%	186,59	100%	205,25	100%	1.037,84	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
	i.	BAGIAN ORGANISASI				2.544,14		4.293,74		3.982,87		4.314,24		4.703,39		19.838,38	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pembavaran iuran FORSESDASI	1 Orang	1 Orang	10,00	1 Orang	13,67	1 Orang	15,03	1 Orang	16,28	1 Orang	17,75	5 Orang	72,73	Bagian Orqanisasi
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah ASN yang memahami Budaya Kerja	248 Orang	125 Orang	229,49	125 Orang	699,45	125 Orang	358,55	125 Orang	388,38	125 Orang	423,41	620 Orang	2.099,28	Bagian Orqanisasi
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah PD yang diasistensi dan pelaporan LKIP tepat waktu	53 SKPD	38 PD	1.060,04	38 PD	2.672,58	38 PD	2.177,10	38 PD	2.358,23	38 PD	2.570,95	38 PD	10.838,89	Bagian Orqanisasi
	28	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan ketatalaksanaannya	53 SKPD	38 PD	1.225,86	38 PD	875,64	38 PD	1.364,92	38 PD	1.478,48	38 PD	1.611,84	38 PD	6.556,75	Bagian Orqanisasi
	39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pervataan standar SPM yang dipenuhi	Data tidak tersedia	100%	18,74	100%	32,41	100%	67,27	100%	72,87	100%	79,44	100%	270,73	Bagian Orqanisasi
	j.	BAGIAN UMUM				47.079,15		60.735,32		55.483,07		60.099,26		65.520,22		288.917,02	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	44.409,59	100%	56.867,72	100%	50.753,37	100%	54.976,05	100%	59.934,89	100%	266.941,63	Bagian Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2.093,73	100%	3.235,01	100%	4.302,30	100%	4.660,25	100%	5.080,61	100%	19.371,92	Baqian Umum
		03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	100%	55,52	100%	110,32	100%	110,32	100%	119,49	100%	130,27	100%	525,92	Baqian Umum
		16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	36 kunjungan	36 kunjungan	500,00	36 kunjungan	500,00	36 kunjungan	300,00	36 kunjungan	324,96	36 kunjungan	354,27	180 kunjungan	1.979,23	Baqian Umum
		37	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	1890 buah	1890 buah	20,30	1890 buah	22,28	1890 buah	17,08	1890 buah	18,50	1890 buah	20,17	9450 buah	98,32	Baqian Umum
	k.	BAGIAN KEUANGAN				2.416,85		2.626,27		2.526,27		2.736,46		2.983,29		13.289,16		
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Data tidak tersedia	12 bulan	995,37	12 bulan	794,69	12 bulan	794,69	12 bulan	894,69	12 bulan	994,69	12 bulan	4.474,12	Baq. Keuangan
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Tri wulan dan Semesteran	Data tidak tersedia	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	1.209,30	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	1.306,93	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	1.306,93	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	1.317,12	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	1.317,12	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	6.457,41	Bag. Keuangan
		17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	Data tidak tersedia	12 bulan	98,67	12 bulan	459,58	12 bulan	359,58	12 bulan	459,58	12 bulan	559,58	12 bulan	1.937,00	Baq. Keuangan
		18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	Terciptanya SPJ di masing-masing SKPD yang akuntabel	Data tidak tersedia	12 bulan	113,51	12 bulan	65,07	12 bulan	65,07	12 bulan	65,07	12 bulan	111,90	12 bulan	420,64	Bag. Keuangan
		I.	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN				59.732,32		68.770,54		51.277,82		55.544,13		60.554,22		295.879,03	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	8Paket	8Paket	3.236,46	8Paket	23.796,36	8 Paket	4.178,92	8Paket	4.387,87	8Paket	4.607,26	40Paket	40.206,86	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dikelola	8Paket	8Paket	56.472,04	11Paket	44.943,45	8Paket	47.066,64	8Paket	51.122,39	8Paket	55.911,39	43Paket	255.515,91	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
		33	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	13 Dokumen	15 Dok.	23,82	15 Dok.	30,73	15 Dok.	32,27	15 Dok.	33,88	15 Dok.	35,57	75Dok.	156,27	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
			KANTOR CAMAT KUTA				10.911,35		10.209,12		10.109,12		10.950,20		11.937,91		54.117,69	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	17 kegiatan	17 kegiatan	4.830,19	17 kegiatan	4.963,79	17 kegiatan	4.095,13	17 kegiatan	4.358,92	17 kegiatan	4.704,56	17 kegiatan	22.952,59	Kec. Kuta
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	2 paket	2 paket	1.852,40	2 paket	1.734,61	2 paket	2.009,82	2 paket	2.210,80	2 paket	2.431,88	2 paket	10.239,51	Kec. Kuta
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik	9 Orang	9 Orang	7,93	2 orang	10,76		22,23		22,43		22,45	9 Orang	85,80	Kec. Kuta

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	163,56	2 jenis	199,20	2 jenis	219,12	2 jenis	241,03	2 jenis	265,14	2 jenis	1.088,04	Kec. Kuta
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	12 jenis	635,68	12 jenis	567,43	12 jenis	624,17	12 jenis	686,58	12 jenis	755,24	60 jenis	3.269,10	Kec. Kuta
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	9,38	3 jenis	10,00	3 jenis	11,00	3 jenis	12,10	3 jenis	13,31	3 jenis	55,79	Kec. Kuta
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	145,20	1 dokumen	63,09	1 dokumen	69,40	1 dokumen	76,34	1 dokumen	83,97	1 dokumen	438,00	Kec. Kuta
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/STATISTIK DAERAH	Jenis dokumen Data	2 jenis	2 jenis	136,64	2 jenis	5,54	2 jenis	6,10	2 jenis	6,71	2 jenis	7,38	2 jenis	162,36	Kec. Kuta
	78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya	5 Lokasi	5 Lokasi	319,93	5 Lokasi	313,04	5 Lokasi	344,34	5 Lokasi	378,78	5 Lokasi	416,66	5 Lokasi	1.772,75	Kec. Kuta
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	2 kegiatan	3 kegiatan	991,87	3 kegiatan	166,98	3 kegiatan	335,50	3 kegiatan	352,70	3 kegiatan	379,45	15 kegiatan	2.226,51	Kec. Kuta
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	2 jenis	2 jenis	17,88		18,03		0,00		0,00		0,00	2 jenis	35,91	Kec. Kuta
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	192,89	7 hari besar	357,21	7 hari besar	392,93	7 hari besar	432,23	7 hari besar	475,45	7 hari besar	1.850,71	Kec. Kuta
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	1 jenis	369,16	2 jenis	477,58	2 jenis	525,33	2 jenis	575,07	2 jenis	629,49	9 jenis	2.576,63	Kec. Kuta
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	436,04	7 jenis	363,62	7 jenis	399,98	7 jenis	439,98	7 jenis	483,98	7 jenis	2.123,60	Kec. Kuta
	86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jenis Sekolah yang dibina	7 jenis	7 jenis	0,00	7 jenis	29,41	7 jenis	32,35	7 jenis	32,64	7 jenis	32,67	7 jenis	127,06	Kec. Kuta
	87	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	28 lingkungan	28 lingkungan	789,59	28 lingkungan	913,79	28 lingkungan	1.005,16	28 lingkungan	1.105,68	28 lingkungan	1.216,25	28 lingkungan	5.030,47	Kec. Kuta
	90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	3,82	106 RTM, 101 RTS	4,40	106 RTM, 101 RTS	4,84	106 RTM, 101 RTS	5,33	106 RTM, 101 RTS	5,86	106 RTM, 101 RTS	24,25	Kec. Kuta
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 Lokasi	5 Lokasi	9,21	5 Lokasi	10,65	5 Lokasi	11,71	5 Lokasi	12,88	5 Lokasi	14,17	5 Lokasi	58,62	Kec. Kuta

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KANTOR CAMAT KUTA UTARA				8.207,66		8.388,57		7.097,68		7.688,20		8.381,68		39.763,79	
01	PROGRAM PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 Kegiatan	15 Kegiatan	3.858,98	15 Kegiatan	4.282,54	15 Kegiatan	1.926,10	15 Kegiatan	2.004,18	15 Kegiatan	2.129,25	15 Kegiatan	14.201,05	Kecamatan Kuta Utara
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN SARANA APARATUR	Jumlah Paket Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	10 Kegiatan	10 Kegiatan	1.127,80	10 Kegiatan	1.245,76	10 Kegiatan	1.867,53	10 Kegiatan	2.054,29	10 Kegiatan	2.259,71	10 Kegiatan	8.555,09	Kecamatan Kuta Utara
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Jumlah sumber daya	data tidak tersedia	7 Kaling	3.30	6 Desa	22.96	6 Desa	18.01	6 Desa	15.09	6 Desa	16.60	6 Desa	75.96	Kecamatan Kuta Utara
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	252,42	4 dokumen	160,68	4 dokumen	176,75	4 dokumen	194,42	4 dokumen	213,86	4 dokumen	998,12	Kecamatan Kuta Utara
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya	3 jenis	3 jenis	518,93	3 jenis	632,37	3 jenis	695,61	3 jenis	765,17	3 jenis	841,69	15 jenis	3.453,77	Kecamatan Kuta Utara
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	3 jenis	3 Jenis	11,10	3 Jenis	10,00	2 Jenis	11,00	2 Jenis	12,10	2 Jenis	13,31	2 Jenis	57,51	Kecamatan Kuta Utara
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 dokumen	102,59	1 dokumen	77,55	1 dokumen	85,31	1 dokumen	93,84	1 dokumen	103,22	5 dokumen	462,51	Kecamatan Kuta Utara
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data	2 Jenis	2 Jenis	127,21	2 Jenis	29,67	2 Jenis	32,64	2 Jenis	35,90	2 Jenis	39,49	2 Jenis	264,92	Kecamatan Kuta Utara
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dinantau	6 desa/kel	6 Desa/Kel	328,86	6 Desa/Kel	101,00	6 Desa/Kel	111,10	6 Desa/Kel	122,21	6 Desa/Kel	134,43	6 Desa/Kel	797,61	Kecamatan Kuta Utara
79	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	6 desa/kel	6 desa/kel	473,64	6 desa/kel	274,82	6 desa/kel	302,31	6 Desa/Kel	332,54	6 Desa/Kel	365,79	6 Desa/Kel	1.749,09	Kecamatan Kuta Utara
82	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Pembinaan UKS	data tidak tersedia	3 kegiatan	35,58	3 kegiatan	12,34	3 kegiatan	13,57	3 kegiatan	14,93	3 kegiatan	16,43	3 kegiatan	92,86	Kecamatan Kuta Utara
82	PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	143,40	7 hari besar	153,42	7 hari besar	168,77	7 hari besar	185,64	7 hari besar	204,21	7 hari besar	855,44	Kecamatan Kuta Utara
83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	1 Jenis	1 Jenis	391,15	1 Jenis	416,72	1 Jenis	458,39	1 Jenis	504,23	1 Jenis	554,65	1 Jenis	2.325,14	Kecamatan Kuta Utara
85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	7 Jenis	302,56	7 Jenis	346,28	7 Jenis	380,91	7 Jenis	419,00	7 Jenis	460,90	7 Jenis	1.909,64	Kecamatan Kuta Utara
86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah karang Taruna dan PSM yang dibina	1 kegiatan	-	-	1 karang taruna dan 1 org PSM	6,00	1 karang taruna dan 1 org PSM	171,60	1 karang taruna dan 1 org PSM	188,76	1 karang taruna dan 1 org PSM	207,63	1 karang taruna dan 1 org PSM	573,98	Kecamatan Kuta Utara
87	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kebersihan Lingkungan	3 kelurahan	3 kelurahan	495,56	3 kelurahan	558,41	3 kelurahan	614,25	3 kelurahan	675,68	3 kelurahan	743,25	3 kelurahan	3.087,16	Kecamatan Kuta Utara
92	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM yang Didata	462 RTM	400 RTM	4,95	370 RTM	5,46	340 RTM	6,00	310 RTM	6,60	280 RTM	7,26	280 RTM	30,28	Kecamatan Kuta Utara

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/Kel	6 desa/kel	4,47	6 Desa/Kel	52,58	6 Desa/Kel	57,84	6 Desa/Kel	63,62	6 Desa/Kel	69,99	6 Desa/Kel	248,50	Kecamatan Kuta Utara
		118	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KECAMATAN	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	25,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	25,15	Kecamatan Kuta Utara
			KANTOR CAMAT KUTA SELATAN				8.028,40		8.056,49		8.156,49		8.835,11		9.632,04		42.708,54	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Pelavanoan Perkantoran	15 Kegiatan	16 kegiatan	3.672,54	16 kegiatan	4.485,12	16 kegiatan	3.910,21	16 kegiatan	4.164,20	16 kegiatan	4.494,04	16 kegiatan	20.726,11	Kec. Kuta Selatan
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan sarana dan prasarana Aparatur	2 paket	2 paket	849,98	2 paket	457,25	2 paket	820,90	2 paket	902,99	2 paket	993,29	10 paket	4.024,40	Kec. Kuta Selatan
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kepala Lingkungan yang dilantik	5 Kaling	4 Kaling	5,42	0	11,15	0,000	4,09	0,000	4,50	0,000	4,95	4 kaling	30,10	Kec. Kuta Selatan
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 Jenis	254,22	2 jenis	160,30	2 jenis	176,33	2 jenis	193,96	2 jenis	213,35	10 jenis	998,16	Kec. Kuta Selatan
		08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	50 buku	10,00	50 buku	10,00	50 buku	11,00	50 buku	12,10	50 buku	13,31	50 buku	56,41	Kec. Kuta Selatan
		09	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	11 jenis	11 jenis	441,30	11 jenis	639,49	11 jenis	703,44	11 jenis	773,79	11 jenis	851,17	11 jenis	3.409,19	Kec. Kuta Selatan
		29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	99,28	1 dokumen	118,11	1 dokumen	129,93	1 dokumen	142,92	1 dokumen	157,21	1 dokumen	647,45	Kec. Kuta Selatan
		38	PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah Dokumen Data	3 jenis	3 jenis	157,91	3 jenis	12,44	3 jenis	13,68	3 jenis	15,05	3 jenis	16,55	3 jenis	215,63	Kec. Kuta Selatan
		78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Lokasi yang dipantau	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	231,24	3 desa dan 3 kelurahan	128,15	3 desa dan 3 kelurahan	140,96	3 desa dan 3 kelurahan	155,06	3 desa dan 3 kelurahan	170,56	3 desa dan 3 kelurahan	825,97	Kec. Kuta Selatan
		79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	750,89	3 kegiatan	310,63	3 kegiatan	349,71	3 kegiatan	384,68	3 kegiatan	423,15	3 kegiatan	2.219,06	Kec. Kuta Selatan
		81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kegiatan untuk memberdayakan masyarakat	data tidak tersedia	1 kegiatan	87,06	1 Kegiatan	10,69	1 Kegiatan	11,76	1 Kegiatan	12,93	1 Kegiatan	14,22	1 Kegiatan	136,66	Kec. Kuta Selatan
		82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Peringatan Hari Besar	7 hari besar	7 hari besar	141,18	7 hari besar	180,27	7 hari besar	198,30	7 hari besar	218,13	7 hari besar	239,95	7 hari besar	977,83	Kec. Kuta Selatan
		85	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan Keragaman Budava	1 jenis	1 jenis	407,27	1 jenis	444,32	1 jenis	488,76	1 jenis	537,63	1 jenis	591,40	1 jenis	2.469,38	Kec. Kuta Selatan
		87	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	448,17	7 jenis	536,00	7 jenis	589,60	7 jenis	648,56	7 jenis	713,42	7 jenis	2.935,76	Kec. Kuta Selatan
		93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Desa/ Kelurahan yang dilaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	6 desa / kelurahan	6 desa / kelurahan	6,17	6 desa / kelurahan	14,03	6 desa / kelurahan	15,43	6 desa / kelurahan	16,98	6 desa / kelurahan	18,67	6 desa / kelurahan	71,28	Kec. Kuta Selatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		94	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jenis kegiatan dalam mengelola kebersihan lingkungan	6 desa/ kelurahan	6 desa/ kelurahan	465,77	6 desa/ kelurahan	530,85	6 desa/ kelurahan	583,94	6 desa/ kelurahan	642,33	6 desa/ kelurahan	706,56	6 desa/ kelurahan	2.929,45	Kec. Kuta Selatan
		99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Karang Taruna/PSM yang dibina	1 karang taruna	1 karang taruna	-	1 karang taruna	7,69	1 karang taruna	8,46	1 karang taruna	9,31	1 karang taruna	10,24	1 karang taruna	35,70	Kec. Kuta Selatan
			KANTOR CAMAT MENGWI				11.779,15		11.533,92		9.179,72		9.943,47		10.840,37		53.276,63	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	17 kegiatan	16 kegiatan	5.224,67	15 Kegiatan	4.726,21	15 Kegiatan	2.582,83	15 Kegiatan	2.687,89	15 Kegiatan	2.860,23	15 Kegiatan	18.081,83	Kec.Mengwi
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	13 Kegiatan	13 Kegiatan	2.291,58	12 Kegiatan	1.372,91	12 Kegiatan	1.510,20	12 Kegiatan	1.661,22	12 Kegiatan	1.827,34	12 Kegiatan	8.663,23	Kec.Mengwi
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	2 Kegiatan	308,46	2 Kegiatan	344,97	2 Kegiatan	379,47	2 Kegiatan	417,41	2 Kegiatan	459,15	2 Kegiatan	1.909,46	Kec.Mengwi
		05	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	Data tidak tersedia	-	-	3 Kegiatan	211,58	3 Kegiatan	232,74	3 Kegiatan	256,01	3 Kegiatan	281,61	3 Kegiatan	981,93	Kec.Mengwi
		08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	3 Kegiatan	4 Kegiatan	483,80	6 Kegiatan	1.090,79	6 Kegiatan	1.226,27	6 Kegiatan	1.348,89	6 Kegiatan	1.483,78	6 Kegiatan	5.633,53	Kec.Mengwi
		09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran PD	3 Dokumen	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	50,00	Kec.Mengwi
		29	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	4 Kegiatan	161,59	2 Kegiatan	926,25	2 Kegiatan	101,89	2 Kegiatan	112,08	2 Kegiatan	123,28	2 Kegiatan	1.425,09	Kec.Mengwi
		38	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Cakupan Data/Informasi Propil Desa/kelurahan	2 Dokumen	3 Kegiatan	135,41	1 Kegiatan	5,75	1 Kegiatan	6,33	1 Kegiatan	6,96	1 Kegiatan	7,65	1 Kegiatan	162,11	Kec.Mengwi
		78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	20 Desa/Kelurahan	3 Kegiatan	296,29	2 Kegiatan	108,82	2 Kegiatan	119,70	2 Kegiatan	131,67	2 Kegiatan	144,84	2 Kegiatan	801,31	Kec.Mengwi
		98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Jumlah Desa Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Data tidak tersedia	-	-	1 Kegiatan	21,27	1 Kegiatan	23,40	1 Kegiatan	25,74	1 Kegiatan	28,31	1 Kegiatan	98,73	Kec.Mengwi
		79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	13 Kegiatan	13 kegiatan	812,34	9 Kegiatan	468,95	9 Kegiatan	515,84	9 Kegiatan	567,43	9 Kegiatan	624,17	9 Kegiatan	2.988,72	Kec.Mengwi
		81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	20 Desa/Kelurahan	1 Kegiatan	22,03		0,00		0,00		0,00		0,00		22,03	Kec.Mengwi
		82	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah Hari - Hari Besar Yang Diperingati	7 hari Besar	7 Kegiatan	154,17	7 Kegiatan	173,33	7 Kegiatan	190,66	7 Kegiatan	209,73	7 Kegiatan	230,70	7 Kegiatan	958,59	Kec.Mengwi
		83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	jumlah kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	393,90	2 Kegiatan	422,11	2 kegiatan	464,32	2 Kegiatan	510,75	2 Kegiatan	561,83	2 Kegiatan	2.352,90	Kec.Mengwi

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jumlah pelayanan penataan administrasi kependudukan	7 Pelayanan	1 Kegiatan	237,85	2 Kegiatan	296,96	2 Kegiatan	326,65	2 Kegiatan	359,32	2 Kegiatan	395,25	2 Kegiatan	1.616,03	Kec.Mengwi
	87	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah Kegiatan Kebrsihan Lingkungan	20 Desa/Kelurahan	1 Kegiatan	804,24	2 Kegiatan	1.170,54	2 Kegiatan	1.287,60	2 Kegiatan	1.416,36	2 Kegiatan	1.557,99	2 Kegiatan	6.236,74	Kec.Mengwi
	90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM di Kecamatan Mengwi	3701 RTM	1 Kegiatan	11,28	1 Kegiatan	17,75	1 Kegiatan	19,52	1 Kegiatan	21,48	1 Kegiatan	23,62	1 Kegiatan	93,66	Kec.Mengwi
	95	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	416,77		0,00		0,00		0,00		0,00		416,77	Kec.Mengwi
	99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan	Data tidak tersedia	-	-	1 Kegiatan	86,78	1 Kegiatan	95,46	1 Kegiatan	105,01	1 Kegiatan	115,51	1 Kegiatan	402,77	Kec.Mengwi
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	jumlah kegiatan pemberdayaan Aparatur Pemerintah	20 Desa/Kelurahan	1 kegiatan	14,78	1 Kegiatan	78,95	1 Kegiatan	86,85	1 Kegiatan	95,53	1 Kegiatan	105,09	1 Kegiatan	381,20	Kec.Mengwi
		KANTOR CAMAT ABIANSEMAL				4.069,19		4.356,64		4.381,64		4.746,19		5.174,29		22.727,95	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan kebutuhan perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	1.763,88	15 kegiatan	1.685,51	15 kegiatan	1.134,00	15 kegiatan	1.173,78	15 kegiatan	1.141,18	15 kegiatan	6.898,36	Kecamatan Abiansemal
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Paket pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	8 kegiatan	8 kegiatan	801,88	8 kegiatan	478,20	8 kegiatan	643,92	8 kegiatan	708,31	8 kegiatan	779,14	8 kegiatan	3.411,46	Kecamatan Abiansemal
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	135,24	2 Kegiatan	145,56	2 Kegiatan	163,42	2 Kegiatan	179,76	2 Kegiatan	197,73	2 Kegiatan	821,70	Kecamatan Abiansemal
	08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	meningkatnya nilai budaya	2 Kegiatan	2 Kegiatan	418,59	2 Kegiatan	650,17	2 Kegiatan	715,18	2 Kegiatan	786,70	2 Kegiatan	865,37	2 Kegiatan	3.436,01	Kecamatan Abiansemal
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Dokumen perencanaan	1 kegiatan	1 kegiatan	10,00	1 kegiatan	10,00	1 kegiatan	11,00	1 kegiatan	12,10	1 kegiatan	13,31	1 kegiatan	56,41	Kecamatan Abiansemal
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40,44	2 Kegiatan	52,54	2 Kegiatan	57,79	2 Kegiatan	63,57	2 Kegiatan	69,92	2 Kegiatan	284,26	Kecamatan Abiansemal
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN	Jumlah dokumen data	2 kegiatan	2 kegiatan	23,38	2 kegiatan	6,43	2 kegiatan	7,07	2 kegiatan	7,78	2 kegiatan	8,56	2 kegiatan	53,22	Kecamatan Abiansemal
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN	meningkatnya keamanan	18 desa	18 desa	86,61	18 desa	160,67	18 desa	176,74	18 desa	194,41	18 desa	213,85	18 desa	832,28	Kecamatan Abiansemal
	79	PROGRAM PENINGKATANAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masvarakat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	89,08	5 Kegiatan	233,85	5 Kegiatan	392,68	5 Kegiatan	431,94	5 Kegiatan	475,14	5 Kegiatan	1.622,68	Kecamatan Abiansemal
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis kegiatan promosi kesehatan	1 kegiatan	1 kegiatan	131,17	1 kegiatan	171,54	1 kegiatan	188,49	1 kegiatan	207,34	1 kegiatan	228,08	5 kegiatan	926,62	Kecamatan Abiansemal
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN	Jumlah Pengelolaan	1 kegiatan	1 kegiatan	362,13	1 kegiatan	424,53	1 kegiatan	466,98	1 kegiatan	513,68	1 kegiatan	565,05	1 kegiatan	2.332,37	Kecamatan Abiansemal
	85	PROGRAM PENATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi	2 kegiatan	2 kegiatan	190,47	2 kegiatan	237,34	2 kegiatan	291,09	2 kegiatan	320,19	2 kegiatan	352,21	2 kegiatan	1.391,31	Kecamatan Abiansemal
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	79,72	1 Kegiatan	87,69	1 Kegiatan	96,46	1 Kegiatan	237,34	1 Kegiatan	501,22	Kecamatan Abiansemal	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Pengetasan kemiskinan	18 desa	18 desa	6,42	18 desa	7,46	18 desa	8,21	18 desa	9,03	18 desa	9,93	18 desa	41,05	Kecamatan Abiansemai
		98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Perbeker yang terpilih	3 desa	3 desa	5,10	2 desa	-	9 desa	22,95	4 desa	25,25	-	-	18 desa	53,29	Kecamatan Abiansemai
		99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Pembinaan penvelenqqaraan	18 kali	18 kali	4,82	18 kali	13,12	18 kali	14,43	18 kali	15,88	18 kali	17,47	18 kali	65,72	Kecamatan Abiansemai
		KECAMATAN PETANG					3.706,81		5.023,24		5.048,24		5.468,26		5.961,50		25.208,05	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran	15 Kegiatan	15 kegiatan	1.354,93	15 Kegiatan	1.550,98	15 Kegiatan	1.198,13	15 Kegiatan	1.234,13	15 Kegiatan	1.304,96	15 Kegiatan	6.643,13	kec.Petang
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	13 Kegiatan	858,14	12 Kegiatan	1.370,39	12 Kegiatan	1.279,44	12 Kegiatan	1.407,39	12 Kegiatan	1.548,13	12 Kegiatan	6.463,50	kec.Petang
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 Kegiatan	133,38	2 Kegiatan	143,85	2 Kegiatan	379,47	2 Kegiatan	417,41	2 Kegiatan	459,15	2 Kegiatan	1.533,26	kec.Petang
		05	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah kegiatan	-	-	-	3 Kegiatan	0,00	3 Kegiatan	90,49	3 Kegiatan	99,54	3 Kegiatan	109,49	3 Kegiatan	299,51	kec.Petang
		08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	pengembangan nilai budaya	12 jenis	4 Kegiatan	411,40	6 Kegiatan	446,02	6 Kegiatan	725,10	6 Kegiatan	797,61	6 Kegiatan	877,38	6 Kegiatan	3.257,52	kec.Petang
		09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Dokumen Perencanaan	3 Jenis	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	40,00	kec.Petang
		29	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	4 Kegiatan	43,15	2 Kegiatan	32,38	2 Kegiatan	101,89	2 Kegiatan	112,08	2 Kegiatan	123,28	2 Kegiatan	412,78	kec.Petang
		38	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Dokumen Data	2 Jenis	3 Kegiatan	23,97	1 Kegiatan	4,34	1 Kegiatan	6,33	1 Kegiatan	6,96	1 Kegiatan	7,65	1 Kegiatan	49,25	kec.Petang
		78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah desa yang dijaga ketertibannya	7 Desa	3 Kegiatan	91,08	2 Kegiatan	121,81	2 Kegiatan	119,70	2 Kegiatan	131,67	2 Kegiatan	144,84	2 Kegiatan	609,10	kec.Petang
		79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	2 kegiatan	13 kegiatan	64,44	9 Kegiatan	482,13	9 Kegiatan	85,95	9 Kegiatan	94,55	9 Kegiatan	104,00	9 Kegiatan	831,08	kec.Petang
		82	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 Kegiatan	129,17	7 Kegiatan	150,10	7 Kegiatan	190,66	7 Kegiatan	209,73	7 Kegiatan	230,70	7 Kegiatan	910,36	kec.Petang
		83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya	3 Jenis	1 Kegiatan	355,35	2 Kegiatan	361,31	2 kegiatan	445,49	2 Kegiatan	490,04	2 Kegiatan	539,05	2 Kegiatan	2.191,25	kec.Petang
		85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan Administrasi kependudukan	7 jenis	1 Kegiatan	214,89	2 Kegiatan	287,37	2 Kegiatan	309,21	2 Kegiatan	340,14	2 Kegiatan	374,15	2 Kegiatan	1.525,76	kec.Petang
		90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	392 RTM	1 Kegiatan	6,70	1 Kegiatan	5,70	1 Kegiatan	19,52	1 Kegiatan	21,48	1 Kegiatan	23,62	1 Kegiatan	77,03	kec.Petang
		99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Karang Taruna/PSM yang dibina	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	1 kegiatan	4,48	1 Kegiatan	54,27	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	58,75	kec.Petang
		99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7 desa	1 kegiatan	5,72	1 Kegiatan	12,59	1 Kegiatan	86,85	1 Kegiatan	95,53	1 Kegiatan	105,09	1 Kegiatan	305,78	kec.Petang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
02	FUNGSI PENGAWASAN				4.667,17		4.975,58		4.589,77		4.971,64		5.420,08		24.624,24		
	INSPEKTORAT				4.667,17		4.975,58		4.589,77		4.971,64		5.420,08		24.624,24		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.094,85	100%	1.069,98	100%	1.186,49	100%	1.285,21	100%	1.401,13	100%	6.037,66	Inspekorat
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	559,80	100%	551.13	100%	378.74	100%	410.25	100%	447.26	100%	2.347,17	Inspekorat
	06	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan Waktu pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	117.60	100%	119.27	100%	119.24	100%	129.16	100%	140.81	100%	626.07	Inspekorat
	09	PERENCANAAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Kesesuaian antara Renia SKPD dan	100%	100%	15,00	100%	9,58	100%	9,89	100%	10,71	100%	11,68	100%	56.87	Inspekorat
	20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Kategori Kepatuhan Terhadap Kebijakan KDH Kebijakan KDH	CC	B	1.742.25	BB	2.383.49	BB	2.159.98	A	2.339.69	A	2.550.73	A	11.176,13	Inspekorat
	21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	80%	100%	139,44	100%	223.49	100%	58.93	100%	63.83	100%	69.59	100%	555,28	Inspekorat
	22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase Penetapan Sistem Prosedur	100%	100%	998,22	100%	618,64	100%	676,50	100%	732,80	100%	798,89	100%	3.825,05	Inspekorat
03	FUNGSI PERENCANAAN				12.829,51		13.930,17		13.632,86		14.767,11		16.099,10		71.258,75		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				12.829,51		13.930,17		13.632,86		14.767,11		16.099,10		71.258,75		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	1 paket	1 paket	1.979,16	1 paket	1.761,49	1 paket	2.160,19	1 paket	2.339,91	1 paket	2.550,97	1 paket	10.791,72	Bappeda
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	1 paket	1.116,52	1 paket	1.098,93	1 paket	1.172,52	1 paket	1.270,07	1 paket	1.384,63	1 paket	6.042,66	Bappeda
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Aparat yang mendapat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Data tidak tersedia	1 Paket	595,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	595,81	Bappeda
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	12 bulan	12 bulan	485,52	12 bulan	710,65	12 bulan	781,72	12 bulan	846,76	12 bulan	923,14	12 bulan	3.747,78	Bappeda
	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	7.008,97	100%	7.758,69	100%	7.110,81	100%	7.702,43	100%	8.397,19	100%	37.978,10	Bappeda
	27	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%	16,36%	491,44	20,00%	1.196,60	23,64%	983,47	27,27%	1.065,29	30,91%	1.161,38	30,91%	4.898,18	Bappeda
	07	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian	100%	100%	183,13	100%	9,27	100%	466,14	100%	504,92	100%	550,47	100%	1.713,94	Bappeda

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab																
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
		15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	tersedianya data dan informasi yang memadai	1 paket	1 paket	418,30	1 paket	127,37	1 paket	140,11	1 paket	151,76	1 paket	165,45	1 paket	1.002,99	Bappeda															
		22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam	6 Kecamatan	6 Kecamatan	247,04	6 Kecamatan	402,14	6 Kecamatan	442,35	6 Kecamatan	479,16	6 Kecamatan	522,38	6 Kecamatan	2.093,07	Bappeda															
		24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 paket	303,64	4 paket	865,02	3 paket	375,55	3 paket	406,80	2 paket	443,49	15 paket	2.394,50	Bappeda															
04		FUNGSI KEUANGAN				65.581,05		81.552,68		72.145,54		78.148,04		85.196,99		382.624,30																	
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				22.130,93		26.269,66		24.211,69		26.226,10		28.591,69		127.430,08																	
		01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Selama Satu Tahun	Data tidak tersedia	12 bulan	1.518,71	12 bulan	1.602,58	12 bulan	1.618,71	12 bulan	1.602,03	12 bulan	1.602,03	60 bulan	7.944,07	BPKAD														
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur selama satu tahun	Data tidak tersedia	12 Bulan	1.127,76	12 Bulan	2.903,78	12 Bulan	2.600,65	12 Bulan	2.903,78	12 Bulan	3.203,78	60 Bulan	12.739,75	BPKAD															
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai di Masing-Masing PD yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / sejenisnya	Data tidak tersedia	53 PD dan 12 puskesmas	58,44	38 PD dan 13 puskesmas	50,70	38 PD dan 13 puskesmas	58,44	38 PD dan 13 puskesmas	50,70	38 PD dan 13 puskesmas	60,70	38 PD dan 13 puskesmas	278,98	BPKAD															
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel	Data tidak tersedia	100%	885,33	100%	762,37	100%	893,33	100%	762,37	100%	862,37	495 bk	4.165,77	BPKAD															
		07	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RPKD	Data tidak tersedia	100%	10,87	100%	6,00	100%	10,87	100%	6,00	100%	6,59	100%	40,34	BPKAD															
		09	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Data tidak tersedia	100%	13.975,50	100%	13.428,16	100%	13.475,38	100%	13.428,16	100%	14.428,16	100%	68.735,37	BPKAD															
		10	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	pada seluruh SKPD di Kab. BadungPersentase Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel	Data tidak tersedia	100%	133,95	100%	107,98	100%	133,95	100%	107,98	100%	107,98	100%	591,84	BPKAD															
		11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Data tidak tersedia	100%	2.419,68	100%	5.407,50	100%	3.419,68	100%	5.364,50	100%	6.319,50	100%	22.930,85	BPKAD															
		12	PROGRAM ASURASNI BARANG MILIK DAERAH	Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover Asuransi selama satu tahun	Data tidak tersedia	2 jenis polis asuransi	2.000,68	2 jenis polis asuransi	2.000,58	2 jenis polis asuransi	2.000,68	2 jenis polis asuransi	2.000,58	2 jenis polis asuransi	2.000,58	2 jenis polis asuransi	10.003,11	BPKAD															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG			43.450,12		55.283,02		47.933,84		51.921,94		56.605,30		255.194,22		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	3.848,68	12 bulan	3.973,05	12 bulan	4.289,48	12 bulan	4.999,20	12 bulan	5.217,38	60 bulan	22.327,78	Bappenda
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	11.974,84	12 Bulan	5.065,50	12 Bulan	3.807,62	12 Bulan	2.606,58	12 Bulan	2.866,63	60 Bulan	26.321,16	Bappenda
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	waktu pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan	12 Bulan	308,81	12 Bulan	275,25	12 Bulan	278,01	12 Bulan	408,04	12 Bulan	448,35	60 Bulan	1.718,46	Bappenda
	08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Jumlah Lembaga Subak yang dilestarikan	214 Subak	214 Subak	13.537,14	214 Subak	17.600,87	214 Subak	16.616,40	214 Subak	16.645,47	214 Subak	16.733,40	214 Subak	81.133,28	Bappenda
	07	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran PD	12 Bulan	12 Bulan	10,98	12 Bulan	9,00	12 Bulan	9,96	12 Bulan	9,00	12 Bulan	9,00	60 Bulan	47,93	Bappenda
	09	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	13.769,67	10 Jenis Pajak	28.359,35	10 Jenis Pajak	22.932,39	10 Jenis Pajak	27.253,65	10 Jenis Pajak	31.330,55	10 Jenis Pajak	123.645,61	Bappenda
05		FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN			10.052,07		30.324,47		27.657,40		29.958,50		32.660,75		130.653,19		
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			10.052,07		30.324,47		27.657,40		29.958,50		32.660,75		130.653,19		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	15 kegiatan	17 kegiatan	1.144,63	17 kegiatan	1.077,38	17 kegiatan	1.469,74	17 kegiatan	1.592,02	17 kegiatan	1.735,62	17 kegiatan	7.019,39	BKPSDM
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Jumlah Paket Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	2 paket	3 paket	1437,46	3 paket	629,19	3 paket	630,85	3 paket	683,34	3 paket	744,97	3 paket	4.125,80	BKPSDM
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kehadiran Pegawai Yang Mentaati Jam Kerja	80%	96%	36,41	97%	15.062,58	98%	8.495,60	99%	9.202,43	99%	10.032,49	99%	42.829,51	BKPSDM
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan BinteK/Sejenisnya Di Pemerintah Kabupaten Badung	12%	96%	5.841,86	97%	12.070,51	98%	14.579,36	99%	15.792,36	100%	17.216,83	100%	65.500,93	BKPSDM
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja	73	76,55	205,92	76,80	243,30	78,00	215,64	80,05	233,58	80,10	254,65	75	1.153,09	BKPSDM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Cakupan Dokumen Perencanaan Yang Disusun	3 dokumen	3 dokumen	15,00	3 dokumen	10,00	3 dokumen	15,00	3 dokumen	16,25	3 dokumen	17,71	15 dokumen	73,96	BKPSDM
		11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Yang Terisi	100%	72,50%	1186,39	74,00%	952,45	75,50%	1.047,70	76,00%	1.134,87	76,50%	1.237,23	76,50%	5.558,65	BKPSDM
		12	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEGAWAIAAN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Dapat Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	51,35	100%	178,99	100%	193,58	100%	209,69	100%	228,60	100%	862,21	BKPSDM
		13	PROGRAM PENINGKATAN SDM	Prosentase Akurasi Update Data Kepegawaian	Data tidak tersedia	96%	133,05	97%	57,59	99%	919,02	99%	995,48	100%	1.085,27	100%	3.190,40	BKPSDM
		14	PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase Sasaran Kinerja Asn Yang Berkinerja Baik	Data tidak tersedia	96%	0,00	97%	42,48	98%	90,92	99%	98,49	99%	107,37	99%	339,25	BKPSDM
07			FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.709,78		10.746,26		10.676,26		11.564,53		12.607,65		51.304,48	
			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.709,78		10.746,26		10.676,26		11.564,53		12.607,65		51.304,48	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	Data tidak tersedia	16 kegiatan	1.009,32	16 kegiatan	1.004,78	16 kegiatan	983,20	16 kegiatan	1.048,83	16 kegiatan	1.121,52	16 kegiatan	5.167,66	Balitbang
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	Data tidak tersedia	100%	1.084,15	100%	1.209,16	100%	1.245,13	100%	1.679,14	100%	1.505,56	100%	6.723,13	Balitbang
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	Data tidak tersedia	1 laporan	220,84	1 laporan	273,68	1 laporan	300,76	1 laporan	330,23	1 laporan	362,65	1 laporan	1.488,17	Balitbang
		09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Data tidak tersedia	100%	13,00	100%	10,00	100%	20,00	100%	20,00	100%	20,00	100%	83,00	Balitbang
		15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data dan Informasi yang memadai	Data tidak tersedia	100%	-	100%	75,35	100%	540,42	100%	308,50	100%	130,20	100%	1.054,46	Balitbang
		26	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	Data tidak tersedia	12 Bulan.	3.210,85	12 Bulan.	6.871,57	12 Bulan.	6.242,47	12 Bulan.	6.699,11	12 Bulan.	7.841,13	12 Bulan.	30.865,13	Balitbang
		28	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	12 Bulan.	12 Bulan.	171,62	12 Bulan.	1.301,72	12 Bulan.	1.344,29	12 Bulan.	1.478,72	12 Bulan.	1.626,59	12 Bulan.	5.922,93	Balitbang

Tabel 8.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7
1	URUSAN WAJIB			2.319.465,57	
01	URUSAN PENDIDIKAN			421.446,07	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH			421.446,07	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 Paket	20.602,84	DISDIKPORA
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	2.414,18	DISDIKPORA
	03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Paket	3.825,60	DISDIKPORA
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	370,27	DISDIKPORA
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	1 Paket	9,76	DISDIKPORA
	15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	APK TK	1 Paket	536,80	DISDIKPORA
	16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	APK SD	1 Paket	377.649,93	DISDIKPORA
	17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	APK SM	1 Paket	10.070,49	DISDIKPORA
	18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Peningkatan profesionalisme dan keterampilan lembaga pendidikan non formal	1 Paket	4.834,91	DISDIKPORA
	20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peningkatan Kualifikasi Guru S.1	1 Paket	1.131,28	DISDIKPORA
02	URUSAN KESEHATAN			353.265,39	
	DINAS KESEHATAN			160.416,98	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung Tupoksi SKPD	1 Paket	9.354,90	DISKES
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	8.847,79	DISKES
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	338,68	DISKES
	15 PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	100%	3.774,12	DISKES
	16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan penjangkaran kesehatan anak SD dan setingkat	100%	48.009,23	DISKES
	17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	100%	85,23	DISKES
	20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan anak balita gizi buruk	100%	526,54	DISKES

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
1			2	3	5	6	7
	21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Cakupan Rumah Sehat	100%	375,02	DISKES	
			Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) Sehat	100%		DISKES	
	22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA+	100%	17.124,60	DISKES	
	23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kualifikasi pelayanan	100%	5.374,31	DISKES	
	25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang pelayanan pada puskesmas/pustu/BKIA	100%	52.910,42	DISKES	
	28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase perijinan praktek tenaga kesehatan	100%	37,68	DISKES	
29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Angka kematian balita per 1.000 Balita	100%	165,88	DISKES		
30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Cakupan lansia mendapat pelayanan kesehatan	100%	1.225,20	DISKES		
32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	100.000 kelahiran hidup	4.049,49	DISKES		
36	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Jumlah puskesmas mendapat bahan penunjang medis	6 Kecamatan	7.968,50	DISKES		
37	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Jumlah alkes puskesmas yang	13 Puskesmas, 54 Pustu	249,38	DISKES		
			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)		192.848,41		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	16.740,14	RSUD	
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	100%	47.035,16	RSUD	
	26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	100%	1.873,51	RSUD	
	40	PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Meningkatnya kemampuan BLUD untuk membiaya operasionalnya secara mandiri	6 Paket	127.199,60	RSUD	
03			URUSAN PEKERJAAN UMUM		697.782,97		
			DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN		617.845,17		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	4.090,86	DINAS BMP	
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang	1 Paket	2.293,57	DINAS BMP	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	807,39	DINAS BMP	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	07	PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	1 paket	448.921,04	DINAS BMP
	09	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Paket	10,00	DINAS BMP
	15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah ruas jalan dan jembatan yang terbangun	1 Paket	373,25	DINAS BMP
	18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Terpeliharanya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap di Kabupaten Badung	1 Paket	38.774,81	DINAS BMP
	23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Tersedianya prasarana dan sarana kebinamargaan yang memadai	1 Paket	1.127,31	DINAS BMP
	24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Prosentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	1 Paket	121.446,95	DINAS BMP
		DINAS CIPTA KARYA			79.937,80	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	1.296,59	DCK
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah sarana prasarana aparatur yang ditingkatkan	1 paket	983,44	DCK
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	1 Paket	805,23	DCK
	09	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 laporan	9,98	DCK
	17	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 buku	3,09	DCK
	35	PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Tercapainya sarana prasarana air bersih dengan spam untuk perluasan cakupan layanan 80% (30 paket pekerjaan) th 2014	1 Paket	34.635,99	DCK
	37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Jumlah fasilitas umum yang tertata	1 paket	42.191,88	DCK
	38	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Meningkatnya sistem pengawasan insternal keciptakaryaan	1 Paket	11,60	DCK
	04	URUSAN PERUMAHAN			232.139,70	
		DINAS CIPTA KARYA			223.390,42	
	16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	1 Paket	223.390,42	DCK
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN			8.749,28	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya pelayanan Administrasi perkkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 Bulan.	1.901,52	DISDAMKAR
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran	12 Bulan	653,86	DISDAMKAR

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 Bulan	98,60	DISDAMKAR
	19	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Terlaksananya program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kab.Badung	12 Bulan.	6.085,30	DISDAMKAR
	23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terlaksananya program kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kab.Badung	12 Bulan	10,00	DISDAMKAR
05		URUSAN PENATAAN RUANG			14.736,67	
		DINAS CIPTA KARYA			13.422,32	
	16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Tertatanya ruang di wilayah Kabupaten Badung	1 paket	13.314,72	DCK
	17	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Terwujudnya pengendalian ruang di Kab. Badung	1 paket	107,60	DCK
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.314,35	
	18	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Tersedianya rencana tata ruang sebagai pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan	1 Paket	1.314,35	BAPPEDA LITBANG
06		URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN			9.634,83	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			9.634,83	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi SKPD	1 Paket	1.037,17	BAPPEDA LITBANG
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	2.550,12	BAPPEDA LITBANG
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	362,23	BAPPEDA LITBANG
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	95%	31,32	BAPPEDA LITBANG
	15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data	1 Paket	963,98	BAPPEDA LITBANG
	21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	95%	3.982,49	BAPPEDA LITBANG
	22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	394,47	BAPPEDA LITBANG
	24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	145,24	BAPPEDA LITBANG
	26	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	12 Bulan.	83,09	BAPPEDA LITBANG
	28	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Terbinanya ilmu pengetahuan dan teknologi	12 Bulan.	84,71	BAPPEDA LITBANG

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8
07	URUSAN PERHUBUNGAN					59.250,73	
	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					59.250,73	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 paket	22.025,82	DISHUBKOMINFO	
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	1.304,98	DISHUBKOMINFO	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	384,29	DISHUBKOMINFO	
	15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai	1 paket	29.198,25	DISHUBKOMINFO	
	17	POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan	1 paket	6.327,40	DISHUBKOMINFO	
	23	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan anggaran SKPD sesuai dengan Rencana	1 paket	9,99	DISHUBKOMINFO	
08	URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP					52.994,60	
	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN					49.916,80	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	3.481,00	DKP	
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	930,57	DKP	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	195,40	DKP	
	15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase penanganan sampah	100%	36.614,94	DKP	
	24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	terpeliharanya ruang terbuka hijau di Kabupaten Badung	100%	8.684,88	DKP	
	28	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, Renja, Renstra)	100%	10,00	DKP	
	BADAN LINGKUNGAN HIDUP					3.077,81	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	meningkatnya kinerja pelayanan	100%	791,38	BLH	
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	247,29	BLH	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	106,18	BLH	
	16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	nilai baku mutu kualitas air, udara, dan air laut	20 lokasi	835,61	BLH	
	18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	terlaksananya pelestarian sumber daya alam	100%	398,70	BLH	
	19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketersedian database lingkungan hidup diKabupaten Badung	1 paket	538,95	BLH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah kelompok masyarakat yang terbina dibidang lingkungan hidup	1 paket	149,69 BLH
	28	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA,RKA)	tersusunnya laporan hsil kinerja SKPD	1 dokumen	10,00 BLH
09	URUSAN PERTANAHAN			910,36	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM			910,36	
	16	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Tertanganinya permasalahan tanah	100%	892,66 BAG ADM PEM UMUM
	17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Terselesaikannya konflik-konflik pertanahan	4 kasus	17,70 BAG ADM PEM UMUM
10	URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			6.074,99	
	DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL			6.074,99	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	12 bulan	1.385,72 DISDUKCAPIL
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	3.236,80 DISDUKCAPIL
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	97,06 DISDUKCAPIL
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Paket	10,00 DISDUKCAPIL
	15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pelayanan kependudukan	12 bulan	1.345,41 DISDUKCAPIL
11	URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.097,46	
	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2.097,46	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya pelayanan Administrasi perkkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 bulan	403,58 KPP
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan Prasarana aparatur yang memadai	1 paket	79,15 KPP
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	68,49 KPP
	09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 paket	9,99 KPP
	15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Terwujudnya kualitas keluarga dan institusi masvarakat	1 paket	548,98 KPP
	16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	Terlaksananya pemberdayaan perempuan< PUG dan perlindungan anak	1 paket	703,69 KPP
	17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Terbangunnya kesepahaman perlindungan perempuan dan anak	1 paket	154,31 KPP

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender	1 paket	129,28	KPP
	12	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			4.237,39	
		BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			4.237,39	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung Tupoksi SKPD	1 Paket	931,07	BKBKS
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	454,50	BKBKS
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya kegiatan yang berorientasi peningkatan wawasan bidang keluarga berencana	1 kali	17,60	BKBKS
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	101,56	BKBKS
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Program SKPD	3 jenis dokumen	9,45	BKBKS
	15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya cakupan jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	100%	1.322,32	BKBKS
	16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Meningkatnya cakupan orientasi kesehatan reproduksi bagi remaja	100%	448,66	BKBKS
	23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Terwujudnya tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	1 Paket	210,79	BKBKS
	26	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT	Terpenuhinya jumlah kader yang secara suka rela berperan aktif melaksanakan /mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat desa/ kelurahan.	1 Paket	132,42	BKBKS
	31	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Cakupan wilayah yang mendapatkan pembinaan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS secara berkelanjutan	1 Paket	609,01	BKBKS
	13	URUSAN WAJIB SOSIAL			5.310,50	
		DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA			5.310,50	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	1.001,67	DISOSNAKER
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	790,34	DISOSNAKER
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dengan kualitas yang baik	4 Hari besar nasional	2.017,67	DISOSNAKER
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Paket	153,50	DISOSNAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	08 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Peningkatan Kualitas Bursa Kerja	1 Paket	42,20	DISOSNAKER
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD	1 Paket	9,80	DISOSNAKER
	15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	Peningkatan kemandirian Fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya	1 Paket	257,32	DISOSNAKER
	16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAN SOSIAL	Peningkatan UEP dan RTM	1 Paket	774,07	DISOSNAKER
	21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Terlaksananya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 Paket	263,93	DISOSNAKER
14	URUSAN KETENAGAKERJAAN			4.347,88	
	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA			4.347,88	
	15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100%	3.136,38	DISOSNAKER
	16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Terkendalinya angka pengangguran	1 Paket	494,80	DISOSNAKER
	17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1 Paket	716,69	DISOSNAKER
15	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			4.643,03	
	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN			4.643,03	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 bulan	929,00	DISKOPERINDAG
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 bulan	1.016,79	DISKOPERINDAG
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	12 bulan	147,17	DISKOPERINDAG
	15 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF	Meningkatnya produktifitas,kualitas, kuantitas, pemasaran, pendapatan dan daya saing bagi UMKM	3 koperasi	122,06	DISKOPERINDAG
	17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap hasil produk jiwa kewirausahaan serta pemahaman terhadap peraturan yang berlaku bagi UKM	12 bulan	1.153,92	DISKOPERINDAG
	18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Terwujudnya koperasi yang sehat dan berkualitas	12 bulan	971,38	DISKOPERINDAG
	19 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen yang disusunperencanaan	12 bulan	9,99	DISKOPERINDAG
	21 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/ INFORMASI	Tersedianya buku profil dan buku laporan kegiatan SKPD	62 buku	292,72	DISKOPERINDAG
16	URUSAN PENANAMAN MODAL			52,57	
	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			52,57	
	17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA, DAN PRASARANA DAERAH	Tersusunnya buku informasi produk unggulan daerah	6 Kecamatan	32,44	BAG. PEREKONOMIAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	18	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	6 Kecamatan	20,13	BAG. PEREKONOMIAN
	17	URUSAN KEBUDAYAAN			52.845,49	
		DINAS KEBUDAYAAN			52.845,49	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupuksi SKPD	1 Paket	1.951,66	KEBUDAYAAN
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	570,42	KEBUDAYAAN
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	1 paket	14,95	KEBUDAYAAN
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	138,57	KEBUDAYAAN
	09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	9,29	KEBUDAYAAN
	15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan adat dan budaya Bali	1 paket	49.253,54	KEBUDAYAAN
	16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Terinventarisasinya produk budaya masyarakat melalui Museum Yadnya	1 paket	907,07	KEBUDAYAAN
	18	URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			9.194,54	
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA			9.194,54	
	16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Meningkatnya peran serta pemuda dalam penyebaran nilai-nilai kebangsaan dan kepeloporan	1 Paket	829,86	DISDIKPORA
	20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam olah raga	1 Paket	8.364,68	DISDIKPORA
	19	URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			12.424,98	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			3.607,90	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	12 bln	971,33	SATPOLPP
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	307,64	SATPOLPP
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkat disiplin aparatur dalam menjalankan tugas dan mengenakan kelengkapan pakaian serta atribut	100%	307,67	SATPOLPP
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Keterampilan dan wawasan serta taktis dan teknis anggota satpol. PP	100%	79,14	SATPOLPP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
1			2	3	5	6	7
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	102,82	SATPOLPP
		08	PROGRAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	Tersedianya informasi dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di	1 paket	6,95	SATPOLPP
		09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan perencanaan dan penganggaran	1 paket	9,88	SATPOLPP
		15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya situasi, kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di kabupaten Badung	100%	321,58	SATPOLPP
		16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANKAMTRIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak kriminal melalui penegakan Perda dan Perbup	100%	1.500,89	SATPOLPP
			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS			1.603,05	KESBANG LINMAS
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 paket	616,70	KESBANG LINMAS
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	1 paket	133,32	KESBANG LINMAS
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia	1 paket	37,99	KESBANG LINMAS
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	81,35	KESBANG LINMAS
		15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten	1 paket	337,33	KESBANG LINMAS
		19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	1 paket	170,79	KESBANG LINMAS
		21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam berpolitik	1 paket	75,65	KESBANG LINMAS
		37	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Terlaksananya Penguatan Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1 paket	149,93	KESBANG LINMAS
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			7.214,03	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	1.234,51	BPBD
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana prasarana aparatur yang memadai	100 %	482,45	BPBD
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	135,39	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	34	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PERINGATAN DINI	jumlah desa/kelurahan tangguh bencana, sekolah aman bencana dan pusat pemerintahan siaga bencana yang terbentuk	100 %	10,66 BPBD
	35	PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Meningkatnya penanganan terhadap korban bencana	100 %	135,82 BPBD
	39	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA	Meningkatnya Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana	1 paket	89,76 BPBD
	40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menghadapi bencana	1 paket	206,54 BPBD
	41	PROGRAM KESIAPSiagaAN	Terwujudnya TRC yang siap dalam menghadapi bencana	1 paket	28,38 BPBD
	42	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Meningkatnya Penanganan Darurat Kebencanaan	1 paket	1.862,92 BPBD
	43	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Terlaksananya pemulihan pasca bencana	100 %	3.027,60 BPBD
20	URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUDA, PRANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN			308.402,82	
	SEKERTARIAT DAERAH			157.624,09	
	BAGIAN UMUM			65.963,42	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket	51.058,14 BAG. UMUM
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas	1 Paket	3.849,20 BAG. UMUM
	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkat disiplin aparatur dalam menjalankan tugas	1 paket	9.867,52 BAG. UMUM
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	688,56 BAG. UMUM
	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Terwujudnya pelayanan kedinasan bagi kepala	1 Paket	500,00 BAG. UMUM
	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL			8.579,15	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	4 Paket	919,46 HUMAS DAN PROTOKOL
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	606,32 HUMAS DAN PROTOKOL
	35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Meningkatnya Responsibilitas Pemerintah terhadap berbagai informasi di media massa	12 bulan	950,15 HUMAS DAN PROTOKOL
	36	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Meningkatnya Kerjasama Informasi dengan Media Massa	12 Bulan	1.010,99 HUMAS DAN PROTOKOL

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Target	Rp. Juta		
1		2	3	5	6	7	
		37	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Meningkatnya komunikasi Informasi Dengan Media Massa	12 bulan	5.092,23	HUMAS DAN PROTOKOL
			BAGIAN PERLENGKAPAN DAN ASSET DAERAH			64.676,29	
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	59.497,87	BAG. ASSET DAERAH
		20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Paket	1.628,46	BAG. ASSET DAERAH
		33	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan asset daerah	12 Bulan	1.349,29	BAG. ASSET DAERAH
		34	PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	Terasuransinya gedung - gedung yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kab Badung	1 Paket	2.200,67	BAG. ASSET DAERAH
			BAGIAN ADMINISTRASI KESRA			2.526,08	
		91	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya jumlah Proposal yang diproses tepat waktu	100%	2.526,08	BAG KESRA
			BAGIAN KEUANGAN			6.601,49	
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pembinaan untuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	53 SKPD	57,44	BAG.KEUANGAN
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan pelaporan keuangan yang akuntabel	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	235,54	BAG.KEUANGAN
		17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tersusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penganggaran, penataausahaan dan pelaporan/akuntansi pemerintah daerah	12 bulan	6.191,26	BAG.KEUANGAN
		18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada	1572 SPMUP/GU/TU	117,25	BAG.KEUANGAN
			BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			752,98	
		56	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Meningkatnya sistem administrasi pengelolaan LPD	122 LPD	406,10	BAG. PEREKONOMIAN
		75	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Tercapainya produktivitas pertanian yang memadai	6 Kecamatan	138,18	BAG. PEREKONOMIAN
		92	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan	6 Kecamatan	104,64	BAG. PEREKONOMIAN
		00	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya Profesionalisme Organisasi KTNA	60 Orang	27,41	BAG. PEREKONOMIAN
		11	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	6 kecamatan	19,38	BAG. PEREKONOMIAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	12	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi	12 bulan	57,27	BAG. PEREKONOMIAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM			1.017,06	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	25,08	BAG ADM PEM UMUM
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	925,68	BAG ADM PEM UMUM
	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	24 kunjungan	19,60	BAG ADM PEM UMUM
	27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Tertatanya Daerah Otonomi Baru	6 Lokasi	46,71	BAG ADM PEM UMUM
		BAGIAN HUKUM DAN HAM			1.907,48	
	26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	1.900,38	BAG. HUKUM DAN HAM
	03	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Hukum	1 Paket	7,11	BAG. HUKUM DAN HAM
		BAGIAN ORGANISASI TATALAKSANA			832,00	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk kelancaran pelaksanaan tugas	4 Paket	10,00	BAG.ORTAL
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah SKPD yang ditingkatkan sumber daya aparaturnya	53 SKPD	28,74	BAG.ORTAL
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	403,16	BAG.ORTAL
	28	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAAAN	Jumlah SKPD yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	6 SKPD	359,18	BAG.ORTAL
	39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Jumlah SKPD yang ditingkatkan kualitas pelayanan minimal	16 SKPD/Unit Kerja	30,92	BAG.ORTAL
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			4.768,14	
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa	53 SKPD	214,98	BAG. ADM PEMBANGUNAN
	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	6 Kecamatan	98,82	BAG. ADM PEMBANGUNAN
	20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik	53 SKPD	4.442,77	BAG. ADM PEMBANGUNAN
	89	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pelaksanaan operasional administrasi pembangunan	100 %	11,57	BAG. ADM PEMBANGUNAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
	1	2	3	5	6	7
		SEKRETARIAT DPRD			67.473,06	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	3.805,08	SEKWAN
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	17.328,40	SEKWAN
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedinya dokumen pelaporan dan capaian kinerja	1 paket	163,18	SEKWAN
	15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	45.937,49	SEKWAN
	26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	Tertatanya Peraturan Perundang - Undangan	100%	238,92	SEKWAN
		INSPEKTORAT			3.974,40	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran	1 Paket	771,33	INSPEKTORAT
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	295,46	INSPEKTORAT
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terlaksananya Training Of Trainer (TOT) Tunas Integritas	1 Paket	27,43	INSPEKTORAT
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya honor pelaksana kegiatan	1 Paket	202,80	INSPEKTORAT
	09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	3 Dokumen	8,38	INSPEKTORAT
	20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terlaksananya pemeriksaan yang komprehensif terhadap 5 aspek pemeriksaaan	12 Obrik	1.955,09	INSPEKTORAT
	21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Terlaksananya pelatihan tenaga tenaga pemeriksa dan pengawas	1 Paket	37,88	INSPEKTORAT
	22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Terlaksananya Reviu terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, sehingga terjamin adanya pelaksanaan tertib administrasi keuangan	100%	676,02	INSPEKTORAT
		DINAS PENDAPATAN / PASEDAHAN AGUNG			16.328,61	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 Bulan	2.212,23	DISPENDA
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 Bulan	816,64	DISPENDA
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	12 Bulan	187,96	DISPENDA
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Meningkatnya Subak Abian/yeh di Kab. Badung yang memiliki Awig-Awig	12 Bulan	4.184,42	DISPENDA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1	2	3	5	6	7	
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12 Bulan	10,00	DISPENDA
	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	12 Bulan	8.917,35	DISPENDA
		KECAMATAN KUTA			5.101,68	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1.436,88	KEC KUTA
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	1.074,85	KEC KUTA
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	87,25	KEC KUTA
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1.530,83	KEC KUTA
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9,45	KEC KUTA
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	1 paket	35,49	KEC KUTA
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,10	KEC KUTA
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	5 kelurahan	25,71	KEC KUTA
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	66,77	KEC KUTA
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	44,40	KEC KUTA
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	8 hari besar	109,18	KEC KUTA
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	410,55	KEC KUTA
	85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1867 KK, 4284 KTP	56,30	KEC KUTA
	86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 kegiatan	4,57	KEC KUTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	1 paket	7,54	KEC KUTA
	90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	5 kelurahan	3,34	KEC KUTA
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	5 kelurahan	4,71	KEC KUTA
	06	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	2 unit	190,78	KEC KUTA
	KECAMATAN KUTA UTARA			4.153,59	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	12 Bulan	1.225,44	KEC KUTA UTARA
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100%	402,77	KEC KUTA UTARA
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1 paket	84,98	KEC KUTA UTARA
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	1 paket	1.544,62	KEC KUTA UTARA
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	1 paket	9,54	KEC KUTA UTARA
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6 kali	28,64	KEC KUTA UTARA
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	1 paket	3,27	KEC KUTA UTARA
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1 paket	22,10	KEC KUTA UTARA
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1 paket	120,61	KEC KUTA UTARA
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 paket	72,87	KEC KUTA UTARA
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	8 peringatan	109,31	KEC KUTA UTARA
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	1 paket	390,06	KEC KUTA UTARA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	85,14	KEC KUTA UTARA
	86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	5,01	KEC KUTA UTARA
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	8,76	KEC KUTA UTARA
	90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	4,42	KEC KUTA UTARA
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Terlaksananya penataan bangunan / gedung kantor	1 paket	36,04	KEC KUTA UTARA
		KECAMATAN KUTA SELATAN			4.181,40	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	100 %	936,89	KEC KUTA SELATAN
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	697,51	KEC KUTA SELATAN
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	87,21	KEC KUTA SELATAN
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	8 Kegiatan	1.559,24	KEC KUTA SELATAN
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9,99	KEC KUTA SELATAN
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	1 paket	31,65	KEC KUTA SELATAN
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,37	KEC KUTA SELATAN
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	6 desa /kelurahan	27,28	KEC KUTA SELATAN
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	105,11	KEC KUTA SELATAN
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	67,27	KEC KUTA SELATAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
1			2	3	5	6	7
		82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	7 hari besar	108,37	KEC KUTA SELATAN
		83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	363,62	KEC KUTA SELATAN
		85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	133,07	KEC KUTA SELATAN
		86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	4,34	KEC KUTA SELATAN
		87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	7,76	KEC KUTA SELATAN
		90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	4,50	KEC KUTA SELATAN
		99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	6 desa /kelurahan	34,22	KEC KUTA SELATAN
			KECAMATAN MENGWI			5.199,34	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1.309,41	KEC MENGWI
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	1.253,86	KEC MENGWI
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	84,59	KEC MENGWI
		08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestriaian nilai-nilai budaya	1 paket	1.557,03	KEC MENGWI
		09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	10,00	KEC MENGWI
		29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	1 paket	46,50	KEC MENGWI
		38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,17	KEC MENGWI
		78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	25,90	KEC MENGWI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	171,81	KEC MENGWI	
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	81,35	KEC MENGWI	
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	1 paket	114,53	KEC MENGWI	
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	419,80	KEC MENGWI	
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	51,52	KEC MENGWI	
	86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	36,59	KEC MENGWI	
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	11,32	KEC MENGWI	
	90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	6,48	KEC MENGWI	
	98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	1 paket	6,65	KEC MENGWI	
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 paket	8,82	KEC MENGWI	
		KECAMATAN ABIANSEMAL			4.760,91		
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1.189,84	KEC ABIANSEMAL	
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	992,79	KEC ABIANSEMAL	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	92,39	KEC ABIANSEMAL	
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1.556,42	KEC ABIANSEMAL	
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9,99	KEC ABIANSEMAL	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	1 paket	28,73	KEC ABIANSEMAL
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,08	KEC ABIANSEMAL
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	32,00	KEC ABIANSEMAL
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	144,07	KEC ABIANSEMAL
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	69,63	KEC ABIANSEMAL
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	1 paket	103,33	KEC ABIANSEMAL
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	446,13	KEC ABIANSEMAL
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	62,92	KEC ABIANSEMAL
	86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	4,31	KEC ABIANSEMAL
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	10,63	KEC ABIANSEMAL
	90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	5,06	KEC ABIANSEMAL
	98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	1 paket	4,65	KEC ABIANSEMAL
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 paket	4,96	KEC ABIANSEMAL
		KECAMATAN PETANG			4.527,54	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	1 paket	1.505,95	KEC PETANG

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	525,21	KEC PETANG
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	73,92	KEC PETANG
	08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 paket	1.547,67	KEC PETANG
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	1 paket	9,87	KEC PETANG
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dngan aturan	1 paket	36,78	KEC PETANG
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 paket	3,97	KEC PETANG
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1 paket	36,20	KEC PETANG
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	1 paket	124,17	KEC PETANG
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup sehat	1 paket	65,99	KEC PETANG
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	1 paket	103,77	KEC PETANG
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa Adat	1 paket	408,64	KEC PETANG
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	1 paket	54,20	KEC PETANG
	86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 paket	9,94	KEC PETANG
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	1 paket	11,04	KEC PETANG
	90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan	1 paket	2,78	KEC PETANG
	98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa	1 paket	4,58	KEC PETANG

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Rp. Juta	
1				2	3	5	6	7
		99		PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 paket	2,86	KEC PETANG
				BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT			7.844,34	
		01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	908,18	BKD DIKLAT
		02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Server, 3 Printer, 1 laptop, 9 UPS	1.113,07	BKD DIKLAT
		03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	500 orang	82,05	BKD DIKLAT
		05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan bintek /sejenisnya di Pemkab. Badung	10 orang	4.357,11	BKD DIKLAT
		06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai akuntabilitas kinerja	1 LS	122,89	BKD DIKLAT
		09		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	9,99	BKD DIKLAT
		69		PROGRAM PENINGKATAN SDM	Persentase urusan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	12 bulan	1.208,73	BKD DIKLAT
		96		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase update database kepegawaian	1 LS	42,31	BKD DIKLAT
				KELURAHAN KUTA			1.766,46	
		01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	931,49	KEL KUTA
		02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	7 kegiatan	327,39	KEL KUTA
		06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	65	63,74	KEL KUTA
		09		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10,00	KEL KUTA
		29		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	100 Usulan	19,32	KEL KUTA
		38		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data /informasi statistik daerah	2 Dokumen	43,23	KEL KUTA
		73		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Jumlah lokasi fogging masal	2 kegiatan	42,36	KEL KUTA
		78		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	8 kali	73,86	KEL KUTA
		79		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	13 Lingkungan, 4 Duta	91,20	KEL KUTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1Kali	3,45	KEL KUTA
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL KUTA
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	13 Lingkungan	148,09	KEL KUTA
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	13 Lingkungan	7,34	KEL KUTA
	KELURAHAN LEGIAN			1.197,78	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	425,32	KEL LEGIAN
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 Paket	215,87	KEL LEGIAN
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	62,85	KEL LEGIAN
	08 PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Jenis pengembangan Nilai Budaya	2 Jenis	162,89	KEL LEGIAN
	09 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10,00	KEL LEGIAN
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencaaan pemangunan daerah	1 dokumen	15,33	KEL LEGIAN
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data/informasi Statistik Daerah	2 Jenis	15,63	KEL LEGIAN
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang dipantau	3 Lingkungan	33,64	KEL LEGIAN
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	4 jenis	91,86	KEL LEGIAN
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	2 Jenis	2,42	KEL LEGIAN
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 Hari Basar	5,00	KEL LEGIAN
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	3 Klingkungan	150,34	KEL LEGIAN
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	7 Jenis	6,63	KEL LEGIAN
	KELURAHAN SEMINYAK			1.131,21	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 kegiatan	436,91	KEL SEMINYAK
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	1 paket	270,68	KEL SEMINYAK
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	66,90	KEL SEMINYAK
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terlaksannya perencanaan dan penganggaran SKPD yang baik	3 dokumen	10,00	KEL SEMINYAK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksannya perencanaan pembangunan daerah yang baik	1 paket	17,23	KEL SEMINYAK
	38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 dokumen	13,36	KEL SEMINYAK
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	6 lingkungan	59,66	KEL SEMINYAK
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 paket	86,99	KEL SEMINYAK
	81 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 Jenis	3,33	KEL SEMINYAK
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5,00	KEL SEMINYAK
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	2 lingkungan	146,23	KEL SEMINYAK
	94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	2 Lingkungan	14,93	KEL SEMINYAK
	KELURAHAN TUBAN			1.352,69	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	546,43	KEL TUBAN
	02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	300,76	KEL TUBAN
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	62,10	KEL TUBAN
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10,00	KEL TUBAN
	29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Jenis	16,90	KEL TUBAN
	38 POGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	1 dokumen	21,91	KEL TUBAN
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	4 Lingkungan	35,18	KEL TUBAN
	79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	169,78	KEL TUBAN
	82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL TUBAN
	87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	4 Lingkungan	154,29	KEL TUBAN
	94 PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	7 Jenis	30,34	KEL TUBAN
	KELURAHAN KEDONGANAN			1.177,46	
	01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	684,56	KEL KEDONGANAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	86,65	KEL KEDONGANAN
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	62,85	KEL KEDONGANAN
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9,96	KEL KEDONGANAN
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Jenis	16,55	KEL KEDONGANAN
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	18,73	KEL KEDONGANAN
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	6 Lingkungan	33,61	KEL KEDONGANAN
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	95,79	KEL KEDONGANAN
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 kegiatan	6,06	KEL KEDONGANAN
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL KEDONGANAN
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	6 Lingkungan	144,47	KEL KEDONGANAN
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	13,24	KEL KEDONGANAN
		KELURAHAN KEROBOKAN			1.301,25	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	597,81	KEL KEROBOKAN
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	209,67	KEL KEROBOKAN
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	1 paket	69,10	KEL KEROBOKAN
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10,00	KEL KEROBOKAN
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	19,61	KEL KEROBOKAN
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	25,32	KEL KEROBOKAN
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	10 lingkungan	33,76	KEL KEROBOKAN
	79	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	96,23	KEL KEROBOKAN
	81	PROGRAM PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	10 Lingkungan	44,65	KEL KEROBOKAN
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL KEROBOKAN

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	158,32	KEL KEROBOKAN
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	31,77	KEL KEROBOKAN
		KELURAHAN KEROBOKAN KAJA			1.624,06	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	1.078,43	KEL KEROBOKAN KAJA
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	73,22	KEL KEROBOKAN KAJA
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	64,70	KEL KEROBOKAN KAJA
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10,00	KEL KEROBOKAN KAJA
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	19,26	KEL KEROBOKAN KAJA
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	44,18	KEL KEROBOKAN KAJA
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	23 lingkungan	34,84	KEL KEROBOKAN KAJA
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	116,73	KEL KEROBOKAN KAJA
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL KEROBOKAN KAJA
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	154,46	KEL KEROBOKAN KAJA
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	23,25	KEL KEROBOKAN KAJA
		KELURAHAN KEROBOKAN KELOD			1.322,64	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	729,00	KEL KEROBOKAN KELOD
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	158,17	KEL KEROBOKAN KELOD
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	50,35	KEL KEROBOKAN KELOD
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10,00	KEL KEROBOKAN KELOD
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	16,97	KEL KEROBOKAN KELOD
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	32,89	KEL KEROBOKAN KELOD
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	13 lingkungan	33,62	KEL KEROBOKAN KELOD
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	5 jenis	105,27	KEL KEROBOKAN KELOD
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	13 lingkungan	3,75	KEL KEROBOKAN KELOD

Kode	1	2	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
					5	6	
			82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 Paket	5,00	KEL KEROBOKAN KELOD
			87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	154,85	KEL KEROBOKAN KELOD
			94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	22,76	KEL KEROBOKAN KELOD
			KELURAHAN BENOA			1.625,95	
			01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	1.020,63	KEL BENOA
			02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	126,41	KEL BENOA
			06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	65,83	KEL BENOA
			09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9,94	KEL BENOA
			29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	18,07	KEL BENOA
			38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	81,32	KEL BENOA
			78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33,68	KEL BENOA
			79 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	101,08	KEL BENOA
			82 PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar nasional	5,00	KEL BENOA
			87 PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 Lingkungan	145,98	KEL BENOA
			94 PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	18,00	KEL BENOA
			KELURAHAN TANJUNG BENOA			1.779,48	
			01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	699,00	KEL TANJUNG BENOA
			02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	436,55	KEL TANJUNG BENOA
			06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	75,23	KEL TANJUNG BENOA
			09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9,00	KEL TANJUNG BENOA
			29 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	17,42	KEL TANJUNG BENOA
			38 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	18,46	KEL TANJUNG BENOA
			78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33,61	KEL TANJUNG BENOA

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	99,42	KEL TANJUNG BENOA
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5,00	KEL TANJUNG BENOA
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	6 Lingkungan	151,94	KEL TANJUNG BENOA
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	6 Lingkungan	36,87	KEL TANJUNG BENOA
	06	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	jumlah bangunan/gedung yang ditata	1 paket	196,99	KEL TANJUNG BENOA
		KELURAHAN JIMBARAN			1.476,36	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	899,09	KEL JIMBARAN
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	121,96	KEL JIMBARAN
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	61,63	KEL JIMBARAN
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	9,53	KEL JIMBARAN
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	16,53	KEL JIMBARAN
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	34,15	KEL JIMBARAN
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33,63	KEL JIMBARAN
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	126,38	KEL JIMBARAN
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL JIMBARAN
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 Paket	142,92	KEL JIMBARAN
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	25,54	KEL JIMBARAN
		KELURAHAN SEMPIDI			1.321,21	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	645,89	KEL SEMPIDI
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	215,61	KEL SEMPIDI
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	66,91	KEL SEMPIDI
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	1 kegiatan	27,48	KEL SEMPIDI
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Jenis	10,00	KEL SEMPIDI
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	32,24	KEL SEMPIDI

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
1			2	3	5	6	7
		38	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	16,09	KEL SEMPIDI
		78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	34,36	KEL SEMPIDI
		79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	114,82	KEL SEMPIDI
		82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	8 hari besar	5,00	KEL SEMPIDI
		87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	10 lingkungan	146,72	KEL SEMPIDI
		94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	6,08	KEL SEMPIDI
			KELURAHAN LUKLUK			1.324,57	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	671,53	KEL LUKLUK
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	206,20	KEL LUKLUK
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	65,52	KEL LUKLUK
		09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10,00	KEL LUKLUK
		29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	18,14	KEL LUKLUK
		38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	25,51	KEL LUKLUK
		78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	33,73	KEL LUKLUK
		79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	121,79	KEL LUKLUK
		82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5,00	KEL LUKLUK
		87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	9 lingkungan	160,57	KEL LUKLUK
		94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	6,58	KEL LUKLUK
			KELURAHAN KAPAL			1.904,56	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	965,01	KEL KAPAL
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	221,66	KEL KAPAL
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	77,05	KEL KAPAL
		09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	10,00	KEL KAPAL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Target	Rp. Juta	
			5	6	
1	2	3	5	6	7
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 Paket	16,52	KEL KAPAL
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	2 jenis	31,36	KEL KAPAL
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	16 Lingkungan	33,86	KEL KAPAL
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1 Paket	175,96	KEL KAPAL
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16 lingkungan	11,94	KEL KAPAL
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	1 paket	5,00	KEL KAPAL
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	16 lingkungan	144,91	KEL KAPAL
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1 Paket	7,00	KEL KAPAL
	05	PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	1 paket	204,30	KEL KAPAL
	KELURAHAN ABIANBASE			1.376,97	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15 Kegiatan	803,07	KEL ABIANBASE
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2 paket	133,56	KEL ABIANBASE
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	2 Jenis	67,68	KEL ABIANBASE
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	3 Dokumen	9,97	KEL ABIANBASE
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1 Paket	18,41	KEL ABIANBASE
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	2 jenis	18,35	KEL ABIANBASE
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	13 lingkungan	33,91	KEL ABIANBASE
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	1 Paket	124,68	KEL ABIANBASE
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16 lingkungan	7,40	KEL ABIANBASE
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	1 paket	5,00	KEL ABIANBASE
	87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	16 lingkungan	150,78	KEL ABIANBASE
	94	PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1 Paket	4,16	KEL ABIANBASE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8
			KELURAHAN SADING			1.263,55	
	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran	15 Kegiatan	580,25	KEL SADING
	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	2 paket	211,48	KEL SADING
	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	61,92	KEL SADING
	08		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Terwujudnya kelestraian nilai-nilai budaya	1 Paket	43,46	KEL SADING
	09		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	9,95	KEL SADING
	29		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Paket	12,62	KEL SADING
	38		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	tersedianya data dan informasi statistik daerah yang memadai	2 jenis	20,30	KEL SADING
	78		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	1 Paket	34,06	KEL SADING
	79		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Paket	123,65	KEL SADING
	82		PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	1 paket	5,00	KEL SADING
	87		PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	16 lingkungan	155,58	KEL SADING
	94		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah jenis pelayanan adminstrasi kependudukan	1 Paket	5,26	KEL SADING
			BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU			4.287,67	
	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah izin yang diterbitkan	100%	1.560,54	BPPT
	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 paket	2.494,60	BPPT
	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	93,34	BPPT
	24		PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Jumlah pengaduan yang tertangani	100%	47,32	BPPT
	37		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Tersedianya informasi perizinan dan non perizinan	1 paket	81,94	BPPT
	09		PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	tersusunnya laporan hsil kinerja SKPD	1 paket	9,93	BPPT
21			URUSAN KETAHANAN PANGAN			26.982,17	
	01		DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN			26.982,17	
	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Produktivitas bahan pangan Utama (padi)	6 Kecamatan	26.982,17	DISTANBUNHUT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
	1	2	3	5	6	7
22		URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.272,38	
		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMDES			5.272,38	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	12 bulan	785,42	BPMD DAN PEMDES
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	444,27	BPMD DAN PEMDES
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	116,30	BPMD DAN PEMDES
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 bulan	10,00	BPMD DAN PEMDES
	10	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	150,74	BPMD DAN PEMDES
	16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Terwujudnya sistem pengelolaan Pasar Desa/Adat dan BUMDA sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 bulan	143,65	BPMD DAN PEMDES
	18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 bulan	1.268,70	BPMD DAN PEMDES
	19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Meningkatnya keterampilan kelompok masyarakat di bidang IPTEK	12 bulan	1.983,26	BPMD DAN PEMDES
	23	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Tersalurnya beras untuk RTS-PM Raskin di Desa/Kelurahan	9043 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin	171,11	BPMD DAN PEMDES
	24	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	12 bulan	198,92	BPMD DAN PEMDES
24		URUSAN KEARSIPAN			4.808,32	
		KANTOR ARSIP DAERAH			4.808,32	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang memadai	12 bulan	660,53	K. ARSIP DAERAH
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	3.289,77	K. ARSIP DAERAH
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya tatakelola kearsipan di kab. Badung	129 orang	68,30	K. ARSIP DAERAH
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan	68,30	K. ARSIP DAERAH
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 BULAN	10,00	K. ARSIP DAERAH
	15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Terwujudnya penataan arsip unit kerja peserta lomba	12 bulan	158,14	K. ARSIP DAERAH

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
1			2	3	5	6	7
		16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Terselamatnya arsip yang mempunyai nilai guna dan arsip statis	12 bulan	447,47	K. ARSIP DAERAH
		17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Tertata dan terpeliharanya arsip SKPD pada KAD Badung	12 bulan	67,28	K. ARSIP DAERAH
		18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Terwujudnya penataan arsip di lingkungan Pemkab Badung	12 bulan	38,54	K. ARSIP DAERAH
		25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			28.660,62	
			DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			28.660,62	
		15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan pelayanan komunikasi, informasi media komunikasi, informasi media massa	31 %	28.660,62	
		26	URUSAN PERPUSTAKAAN			1.949,10	
			KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH			1.949,10	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	12 bulan	568,76	K. PERPUSTAKAAN D.
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 bulan	339,83	K. PERPUSTAKAAN D.
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya pengetahuan petugas perpustakaan Sekolah di bidang layanan pustaka	12 bulan	43,22	K. PERPUSTAKAAN D.
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 bulan	69,20	K. PERPUSTAKAAN D.
		19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya jumlah kunjungan ke Perpustakaan	12 bulan	918,09	K. PERPUSTAKAAN D.
		20	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	12 bulan	10,00	K. PERPUSTAKAAN D.
		2	URUSAN PILIHAN			50.688,93	
		01	URUSAN PERTANIAN			26.219,25	
		01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN			14.758,70	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terealisasinya Pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien	12 Bulan	2.701,97	DISTANBUNHUT
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terealisasinya sarana/prasarana pendukung kinerja aparatur	12 bulan	1.186,29	DISTANBUNHUT
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terlaksananya dukungan kegiatan SKPD	12 bulan	216,83	DISTANBUNHUT

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Terwujudnya Pembinaan dan pelatihan keterampilan petani	12 Bulan	190,09	DISTANBUNHUT
	17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Terselenggaranya promosi pemasaran hasil pertanian/perkebunan	6 Kecamatan	1.267,94	DISTANBUNHUT
	19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Terwujudnya peningkatan luas tanam padi	100000 Ha	2.381,79	DISTANBUNHUT
	20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan penyuluh	63 Penyuluh	6.611,31	DISTANBUNHUT
	26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Tersedianya pedoman yang jelas dalam melaksanakan kegiatan	3 Jenis	7,69	DISTANBUNHUT
	27	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Terwujudnya Pengembangan agribisnis	4 Kecamatan	18,21	DISTANBUNHUT
	28	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	Tersedianya data pola harapan ketersediaan pangan di kabupaten badung	3 Jenis	176,59	DISTANBUNHUT
	02	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN			11.460,55	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun anggaran	2.122,21	DISNAKANLUT
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang operasional kantor	1 SKPD	2.035,52	DISNAKANLUT
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 tahun anggaran	188,00	DISNAKANLUT
	21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah populasi ternak yang tertangani dari serangan penyakit	1 tahun anggaran	2.564,24	DISNAKANLUT
	22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Jumlah populasi dan produksi hasil peternakan	6 kecamatan	4.047,07	DISNAKANLUT
	23	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Peningkatan jumlah produksi hasil peternakan yang dipasarkan	1 paket	259,33	DISNAKANLUT
	26	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD	1 Tahun anggaran	10,00	DISNAKANLUT
	30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PETERNAKAN	Tersedianya data/informasi peternakan	1 paket	137,57	DISNAKANLUT
	31	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Tersedianya bahan pangan ternak yang bermutu	1 Tahun Anggaran	96,62	DISNAKANLUT

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8
02	URUSAN KEHUTANAN				118,77		
01	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN				118,77		
16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	6 Kecamatan	109,58	DISTANBUNHUT		
17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Terciptanya Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	1767.87 Ha	5,11	DISTANBUNHUT		
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN	Jumlah Desa yang dibina, dimonitor dan diawasi peredaran hasil	10 Desa	4,09	DISTANBUNHUT		
03	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				661,59		
	DINAS CIPTA KARYA				661,59		
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Tercapainya Upaya Pembinaan bidang SDA	1 paket	146,13	DCK		
16	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN	Tertibnya Kegiatan Pertambangan rakyat yang diusahakan oleh masyarakat	1 Paket	505,84	DCK		
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Tercapainya Upaya Pembinaan bidang energi	1 Paket	9,62	DCK		
04	URUSAN PARIWISATA				16.174,86		
	DINAS PARIWISATA				16.174,86		
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tertelaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	100%	1.774,85	DIPARDA		
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	1.456,35	DIPARDA		
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	100%	153,25	DIPARDA		
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya promosi	100%	10.277,54	DIPARDA		
16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Berkembangnya Destinasi Pariwisata	1 paket	2.025,41	DIPARDA		
17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Berkembangnya Kemitraan dalam bidang kepariwisataan	1 paket	427,35	DIPARDA		
18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	Meningkatnya kualitas Produk wisata	1 paket	50,13	DIPARDA		
19	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	tersedianya dokumen perencanaan SKPD (RKA, Renja, Renstra)	100%	10,00	DIPARDA		
05	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.572,27		
02	DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN				5.572,27		
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESIRIR	Peningkatan produksi hasil perikanan laut	2 Kelompok	69,02	DISNAKANLUT		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Target	Rp. Juta	
1		2	3	5	6	7
	16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	Peningkatan kelompok masyarakat pengawas pemanfaatan sumberdaya kelautan	1 tahun anggaran	46,43	DISNAKANLUT
	19	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Terlaksananya Peringatan Hari Nusantara	4 kecamatan	3,44	DISNAKANLUT
	20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	peningkatan produksi budidaya perikanan	1 Paket	443,10	DISNAKANLUT
	21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap	1 Paket	4.805,99	DISNAKANLUT
	23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Peningkatan produksi hasil pengolahan komoditi perikanan	1 Paket	4,15	DISNAKANLUT
	29	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PETERNAKAN,PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah tenaga penyuluh dan petugas peternakan, perikanan dan kelautan yang meningkat Pengetahuan dan ketrampilan teknis di bidang peternakan dan perikanan	1 tahun anggaran	26,79	DISNAKANLUT
	30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Tersedianya data/informasi perikanan dan kelautan	1 Paket	168,25	DISNAKANLUT
	34	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Hasil Olahan Perikanan	1 Paket	5,08	DISNAKANLUT
06		URUSAN PERDAGANGAN			1.457,17	
		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			1.457,17	
	15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Terwujudnya perdagangan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen	12 bulan	438,23	DISKOPERINDAG
	18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan proses perijinan dan Peningkatan Promosi	12 bulan	1.018,94	DISKOPERINDAG
07		URUSAN PERINDUSTRIAN			485,01	
		DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			485,01	
	16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Untuk menumbuh kembangkan produktifitas dan kualitas kerajinan serta meningkatkan perekonomian kerakyatan melalui industri kecil kerajinan rumah tangga dan tersedianya data yang muktahir dan akurat	12 bulan	329,16	DISKOPERINDAG
	17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Terbangunnya gerakan nasional penerapan GKM melalui percepatan peningkatan mutu dan produktifitas	12 bulan	155,85	DISKOPERINDAG
JUMLAH					2.370.154,50	

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.285.821,29		2.187.119,54		2.172.242,65		2.351.202,29		2.565.755,85		11.562.141,62		
	01	URUSAN PENDIDIKAN			344.716,57		358.183,68		277.273,25		300.378,84		327.413,85		1.607.966,20		
		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			344.716,57		358.183,68		277.273,25		300.378,84		327.413,85		1.607.966,20		
	15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase warga Kab. Badung usia 5-6 Tahun mendapat pendidikan anak usia dini	98,83%	100%	1.056,01	100%	15.888,04	100%	2.245,67	100%	2.432,50	100%	2.651,92	100%	24.274,13	Disdikpora
	16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Persentase warga Kab. Badung usia 7-15 Tahun mendapat pendidikan dasar	113,57%	100%	257.617,05	100%	159.283,50	100%	143.807,14	100%	155.808,34	100%	169.803,09	100%	886.319,12	Disdikpora
	18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d.18 tahun mendapatkan pendidikan kesetaraan	100%	100%	536,97	100%	619,53	100%	183,96	100%	199,26	100%	217,24	100%	1.756,96	Disdikpora
	20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikasi pendidik	47%	55%	4.507,67	60%	115.410,14	65%	120.177,90	70%	130.176,71	75%	141.918,64	75%	512.191,07	Disdikpora
	21	POGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	Persentase Satuan Pendidikan berbasis Informasi	Data tidak tersedia	100%	80.998,88	100%	66.982,47	100%	10.858,59	100%	11.762,03	100%	12.822,96	100%	183.424,92	Disdikpora
	02	URUSAN KESEHATAN			401.268,14		402.641,97		438.200,25		473.279,68		518.433,22		2.233.823,27		
		DINAS KESEHATAN			236.719,25		251.037,47		285.594,41		309.355,87		337.259,77		1.419.966,77		
	11	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial di Puskesmas	78,70%	100%	3.810,50	100%	4.083,92	100%	3.813,67	100%	4.130,97	100%	4.503,59	100%	20.342,65	Diskes
	16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan	70,97%	80%	145.952,53	90%	156.044,71	100%	174.962,36	100%	189.519,23	100%	206.613,87	100%	873.092,71	Diskes
			Indeks Keluarga Sehat	Data tidak tersedia	0,5		0,6		50%		60%		70%		70%		
			Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46,15%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	62,70%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase sarana kesehatan dan toko obat yang memenuhi syarat dalam pengelolaan Obat	100%	100%	88,95	100%	94,83	100%	281,06	100%	304,44	100%	331,90	100%	1.101,18	Diskes

[illegible]

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori madya	0,00	92,30%	1.797,85	92,30%	2.627,52	100,0%	2.365,20	100,0%	2.561,98	100,0%	2.793,07	100,0%	12.145,63	Diskes	
			Persentase Laporan Kesehatan lengkap, tepat dan akurat	89,7%	90%		100%		100%		100%		100%		100%			
	25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Rasio Penduduk terhadap Sarana Pelayanan Kesehatan	8.330 Penduduk	8.696 Penduduk	37.940,07	8.877 Penduduk	22.022,47	8.936 Penduduk	34.051,17	8.873 Penduduk	36.884,23	8.648 Penduduk	40.211,19	8.648 Penduduk	171.109,13	Diskes	
			Persentase Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	65%	65%		65%		75%		80%		85%		85%			
	28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan Tenaga Kesehatan	11 Hari	3 Hari	41,90	3 Hari	51,56	3 Hari	73,78	3 Hari	79,92	2,5 Hari	87,13	2,5 Hari	334,30	Diskes	
	29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Cakupan pelayanan kesehatan balita	70%	100%	54,40	100%	60,11	100%	198,03	100%	214,51	100%	233,86	100%	760,91	Diskes	
	30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	50.03%	54%	277,36	56%	252,11	58%	0,00	60%	0,00	60%	0,00	60%	529,47	Diskes	
	31	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN	Persentase Tempat Pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	83%				87%	0,00	89%	0,00	92%	0,00	94%	0,00		Diskes	
	32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	93,69%	100%	2.519,62	100%	3.348,12	100%	3.249,65	100%	3.520,02	100%	3.837,53	100%	16.474,95	Diskes	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	95,73%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	96,9%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	36	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100%	100%	9.806,37	100%	10.690,34	100%	12.379,98	100%	13.410,00	100%	14.619,58	100%	60.906,26	Diskes	
	37	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100%	100%	249,98	100%	758,49	100%	809,08	100%	876,40	100%	955,45	100%	3.649,40	Diskes	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						164.548,90		151.604,50		152.605,84		163.923,82		181.173,45		813.856,50		
05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase pegawai yang mendapat Diklat/Bimtek sejenisnya di RSUD Kab. Badung	70%		-	55%	810,24	60%	1.080,00	65%	1.080,00	70%	1.080,00	75%	4.050,24	RSUD Mangusada	
26		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	70%	80%	43.712,09	85%	33.794,26	90%	26.525,84	95%	32.843,82	100%	45.093,45	100%	181.969,45	RSUD Mangusada	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40			PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	100%	100%	120.836,81	100%	117.000,00	100%	125.000,00	100%	130.000,00	100%	135.000,00	100%	627.836,81	RSUD Manqusada
03			URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN				1.272.052,76		1.246.161,02		1.319.489,59		1.428.594,87		1.557.240,12		6.823.538,35	
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.272.052,76		1.246.161,02		1.319.489,59		1.428.594,87		1.557.240,12		6.823.538,35	
07			PROGRAM PENINGKATAN JALAN & JEMBATAN	Persentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	94,5 %	97,50%	397.163,23	98%	-	-	-	-	-	-	98%	397.163,23	PUPR	
07			PROGRAM PEMBANGUNAN,PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	Data tidak tersedia			98%	358.628,35	99,25%	414.240,46	100%	408.413,78	100%	446.504,43	100%	1.627.787,01	PUPR
15			PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Tingkat Penyelesaian Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100%	100%	2.021,56								100%	2.021,56	PUPR	
18			PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan Kabupaten Berkondisi Baik	94,50%	97,50%	13.714,86		-		-		-		97,50%	13.714,86	PUPR	
24			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	95,72%	95,78%	127.383,36		-		-		-		96%	127.383,36	PUPR	
24			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase jaringan irigasi berkondisi baik	94,72%			96,83%	171.782,46	97,83%	188.960,71	98,94%	207.856,78	100%	228.642,46	100%	797.242,40	PUPR
35			PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase Peningkatan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi	58,78%	60,85%	103.872,07								60,85%	103.872,07	PUPR	
35			PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI	Persentase Peningkatan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi	58,78%			68,14%	17.782,16	80,88%	32.677,38	93,16%	35.945,12	100%	39.539,63	100%	125.944,30	PUPR
37			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/ GEDUNG	Persentase Infrastruktur Publik berkondisi Baik	48,00%	65%	587.605,20	75%	637.041,48	85%	616.591,82	92%	702.658,05	100%	761.460,34	100%	3.305.356,89	PUPR
42			PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78%	60,85%	38.484,59								60,85%	38.484,59	PUPR	
43			PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78%	60,85%	526,46								60,85%	526,46	PUPR	
44			PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	58,78%	66,67%	1.281,43		-						66,67%	1.281,43	PUPR	
42			PROGRAM PERENCANAAN,PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	60,00%	0%	-		60.926,56	100%	67.019,22	100%	73.721,14	100%	81.093,26	100%	282.760,19	PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				241.497,06		132.921,06		87.149,08		94.683,86		103.532,20		659.783,25	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				241.497,06		132.921,06		87.149,08		94.683,86		103.532,20		659.783,25	
	16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase Jalan Lingkungan berkondisi baik	64,67%	77,36%	239.941,27	81,08%	119.856,52	84,80%	47.740,10	88,52%	55.274,88	92,24%	64.123,22	100%	526.935,98	DPKP
	18 PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	Data tidak tersedia	100%	-	100%	5.68	100%	34.717,25	100%	34.717,25	100%	34.717,25	100%	104.157,44	DPKP
	24 PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Tercapainya sarana perumahan dan permukiman yang memadai	Data tidak tersedia	100%	1.088,80	100%	983,61	100%	4.680,66	100%	4.680,66	100%	4.680,66	100%	16.114,40	DPKP
	25 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas lingkungan permukiman	Data tidak tersedia	100%	467,00	100%	12.075,24	100%	11,06	100%	11,06	100%	11,06	100%	12.575,43	DPKP
05	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				20.751,90		40.212,06		42.692,07		46.244,04		50.415,26		200.315,33	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				3.157,02		6.492,54		6.748,32		7.309,78		7.969,12		31.676,77	
	05 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	100%	100%	77,14	100%	84,90	100%	227,05	100%	245,94	100%	268,12	100%	903,14	SATPOL PP
	15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	513,36	100%	832,98	100%	619,61	100%	671,16	100%	731,69	100%	3.368,80	SATPOL PP
	16 PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	65%	75%	2.135,18	80%	4.742,24	85%	4.668,00	90%	5.056,38	95%	5.512,46	95%	22.114,26	SATPOL PP
	19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100%	100%	431,34	100%	832,42	100%	1.233,66	100%	1.336,30	100%	1.456,84	100%	5.290,57	SATPOL PP
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.048,73		4.273,24		4.398,24		4.764,17		5.193,90		21.678,29	
	15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban , Ketentraman, Keindahan)	30%	40%	1.508,57	50%	2.189,11	60%	2.105,44	75%	2.280,61	80%	2.486,32	90%	10.570,04	Bakesbangpol
	20 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Jumlah sosialisasi P4GN	1140 orang	1140 orang	161,50	1140 orang	125,79	1140 orang	125,79	1140 orang	136,26	1140 orang	148,55	5700 orang	697,89	Bakesbangpol
	21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	3 kegiatan	1 kegiatan	213,82	1 kegiatan	523,50	1 kegiatan	657,92	1 kegiatan	712,66	1 kegiatan	776,94	5 kegiatan	2.884,85	Bakesbangpol
	37 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	3 kegiatan	7 kegiatan	1.164,84	7 kegiatan	1.434,84	7 kegiatan	1.509,09	7 kegiatan	1.634,65	7 kegiatan	1.782,09	35 kegiatan	7.525,50	Bakesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			8.382,75		11.251,64		11.615,50		12.581,91		13.716,80		57.548,60		
	34	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Persentase desa/kelurahan yang Mendapat Fasilitas Pengurangan Resiko Bencana	55%	60,00%	714,63	70,00%	1.382,33	80,00%	1.323,42	90,00%	1.433,53	100%	1.562,83	100%	6.416,74	BPBD
	42	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase Kejadian Bencana yang Dapat Ditangani	100%	100%	3.557,45	100%	4.373,15	100%	4.434,41	100%	4.803,35	100%	5.236,62	100%	22.404,98	BPBD
	43	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Persentase Kerusakan/ Kerugian Bencana Yang dapat direhabilitasi dan Direkonstruksi	100%	100%	4.110,66	100%	5.496,16	100%	5.857,68	100%	6.345,03	100%	6.917,36	100%	28.726,89	BPBD
		DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			6.163,40		18.194,64		19.930,01		21.588,18		23.535,44		89.411,67		
	4	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	100%	6.163,40	100%	18.194,64	100%	19.930,01	100%	21.588,18	100%	23.535,44	100%	89.411,67	Diskarmat
06		URUSAN SOSIAL			5.534,86		6.999,75		7.438,40		8.021,00		8.721,21		36.715,22		
		DINAS SOSIAL			5.534,86		6.999,75		7.438,40		8.021,00		8.721,21		36.715,22		
	08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat Ketepatan Kualitas dan kuantitas penyebaran Informasi	100%	100%	56,88	100%	59,92	100%	65,91	100%	72,50	100%	79,75	100%	334,95	Dinsos
	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	56,34%	68,81%	747,97	100,00%	715,39	84,41%	327,42	92,20%	360,17	100%	396,18	100%	2.547,14	Dinsos
	16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan Penyandang disabilitas di luar panti dan/atau Lembaga yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar	100%	100%	1.832,05	100%	2.083,94	100%	2.490,52	100%	2.578,33	100%	2.734,27	100%	11.719,11	Dinsos
			Cakupan Anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%			
			Cakupan lanjut usia terlanjar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%			
			Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan,tempat tinggal sementara, dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Data tidak tersedia	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100%	100%	2.897,95	100%	4.140,50	100%	4.554,55	100%	5.010,00	100%	5.511,00	100%	22.114,01	Dinsos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			288.035,22		665.321,32		556.340,97		671.571,19		727.064,72		2.814.059,47		
01		URUSAN TENAGA KERJA			7.171,07		9.440,43		10.718,27		11.610,03		12.657,26		51.597,05		
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			7.171,07		9.440,43		10.718,27		11.610,03		12.657,26		51.597,05		
	15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	35,74%	35,74%	4.437,92	41,39%	4.493,37	47,48%	4.127,33	54,00%	4.470,72	60,96%	4.873,98	22.403,31	Disperinaker	
			Persentase Asesor instruktur Swasta yang memperoleh pelatihan	9%	23%		39%		57%		77%		100%	100%			
	16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan dan masyarakat	50%	50%	1.868,95	50%	3.640,59	50%	4.881,58	50%	5.287,73	100%	5.764,68	50%	21.443,54	Disperinaker
	17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA	Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan penyusunan PP/PKB	864,20 50%	52%	864,20	54%	1.306,47	56%	1.709,36	58%	1.851,58	60%	2.018,59	0,600	7.750,20	Disperinaker
02		URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.593,15		1.967,55		2.120,25		2.296,66		2.503,81		11.481,43		
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.593,15		1.967,55		2.120,25		2.296,66		2.503,81		11.481,43		
	15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	85,71%	100%	1.150,36	100%	1.097,37	100%	1.307,46	100%	1.416,24	100%	1.543,98	100%	6.515,40	DP2KBP3A
	16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	Persentase Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100%	100%	933,72	100%	571,83	100%	407,95	100%	441,89	100%	481,75	100%	2.837,14	DP2KBP3A
	17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100%	100%	249,11	100%	72,18	100%	97,88	100%	106,02	100%	115,58	100%	640,77	DP2KBP3A
	18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Persentase Perempuan di lembaga pemerintah	11,32	30%	259,96	30%	226,17	30%	306,97	30%	332,51	30%	362,51	30%	1.488,12	DP2KBP3A
03		URUSAN PANGAN			1.681,38		4.489,55		3.456,39		3.248,86		3.286,98		16.163,16		
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			1.681,38		4.489,55		3.456,39		3.248,86		3.286,98		16.163,16		
	16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Jumlah luas tanam padi pertahun	17.245 Ha	17.500 Ha	1.681,38	17.750 Ha	4.489,55	18.000 Ha	3.456,39	18.250 Ha	3.248,86	18.500 Ha	3.286,98	18.500 Ha	16.163,16	DIPERPA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04	URUSAN PERTANAHAN				934,33		159.950,99		162.502,59		175.567,41		191.832,55		690.787,87	
	BAGIAN PEMERINTAHAN				934,33		159.950,99		162.502,59		175.567,41		191.832,55		690.787,87	
01	PROGRAM PENATAAN , PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100%	100%	907,36	100%	159.915,24	100%	162.339,33	100%	175.404,14	100%	191.669,28	1156 bidang	690.235,35	BAGIAN PEMERINTAHAN
02	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian	4 kasus	4 kasus	26,98	5 kasus	35,74	5 kasus	163,27	5 kasus	163,27	5 kasus	163,27	24 kasus	552,52	BAGIAN PEMERINTAHAN
05	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				54.609,79		78.394,95		79.011,04		85.718,33		93.790,52		297.250,69	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				54.609,79		78.394,95		79.011,04		85.718,33		93.790,52		297.250,69	
15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100%	100%	41.626,89	100%	54.444,39	100%	56.025,83	100%	61.189,93	100%	67.085,70	100%	297.250,69	DLHK
16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	100%	2.168,74	100%	2.759,38	100%	2.825,69	100%	3.842,61	100%	4.226,87	100%	16.554,29	DLHK
18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100%	100%	1.267,14	100%	102,30	100%	112,53	100%	123,78	100%	136,16	100%	1.741,92	DLHK
19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	100%	586,04	100%	777,57	100%	731,16	100%	995,71	100%	1.095,28	100%	4.449,45	DLHK
24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase keindahan dan keasrian taman di kabupaten badung	100%	100%	8.765,48	100%	20.114,13	100%	19.118,65	100%	19.324,26	100%	20.978,10	100%	86.346,04	DLHK
27	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup	100%	100%	195,50	100%	197,17	100%	197,17	100%	242,04	100%	268,41	100%	1.121,53	DLHK
06	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.633,20		5.529,85		5.579,85		6.044,10		6.589,28		28.376,28	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4.633,20		5.529,85		5.579,85		6.044,10		6.589,28		28.376,28	
15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	90,02%	92%	4.633,20	94%	5.529,85	95%	5.579,85	97%	6.044,10	98%	6.589,28	98%	28.376,28	DISDUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.626,73		9.809,68		6.975,88		7.556,27		8.237,85		36.206,41	
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.626,73		9.809,68		6.975,88		7.556,27		8.237,85		36.206,41	
15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	62 desa	62 desa	340,73	62 desa	1.542,80	62 desa	1.961,05	62 desa	2.124,21	62 desa	2.315,82	62 desa	8.284,62	DPMD
16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	32 Pasar, 13 BUMDesa	6 Pasar, 13 BUMDesa	469,34	7 Pasar, 10 BUMDesa	456,61	7 Pasar, 8 BUMDesa	840,14	6 Pasar, 13 BUMDesa	910,04	6 Pasar, 13 BUMDesa	992,12	32 Pasar, 46 BUMDesa	3.668,24	DPMD
17	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab/ Kec.	12 TP PKK Kab/ Kec.	1.000,01	12 TP PKK Kab/ Kec.	1.217,37	12 TP PKK Kab/ Kec.	1.220,56	12 TP PKK Kab/ Kec.	1.322,11	12 TP PKK Kab/ Kec.	1.441,37	12 TP PKK Kab/ Kec.	6.201,43	DPMD
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Jumlah Aparatur mampu menjalankan tugasnya dengan baik	262 orang	210 orang	1.203,41	200 orang	3.860,31	200 orang	1.596,65	200 orang	1.729,50	200 orang	1.885,50	1.010 orang	10.275,36	DPMD
19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah Desa/Kel. yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	62 Desa/Kelurahan	62 ds/kel.	613,24	62 desa	2.699,96	62 desa	1.357,47	62 desa	1.470,41	62 desa	1.603,04	62 desa	7.744,13	DPMD
23	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumlah RTS-PM yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	62 Desa/Kelurahan	-	-	8.896 KPM	32.625	-	-	-	-	-	-	8.896 KPM	32,62	DPMD
08	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.163,45		5.517,67		3.363,20		3.643,02		3.971,63		20.658,97	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.163,45		5.517,67		3.363,20		3.643,02		3.971,63		20.658,97	
15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75,05	75,26	2.821,041	75,52	4.627,994	76,03	2.349,135	76,40	2.544,583	77,24	2.774,105	77,24	15.116,86	DP2KBP3A
16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Persentase Perkawinan Remaja kurang dari 20 tahun	0,22 %	0,19 %	690,972	0,18 %	422,042	0,17 %	309,728	0,16 %	335,498	0,15 %	365,760	0,15 %	2.124,00	DP2KBP3A
18	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)	2,1	2,3	0,000	0	0,000	2,2	140,800	2,2	152,515	2,1	166,272	2,1	459,59	DP2KBP3A
23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	51,99%	53,62%	189,779	55,14%	113,870	56,56%	126,325	57,88%	136,836	59,12%	149,178	59,12%	715,99	DP2KBP3A
31	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	91%	92	461.660	94	353.763	96	437.216	98	473.592	100	516.310	100	2.242,54	DP2KBP3A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
09	URUSAN PERHUBUNGAN				20.001,88		26.954,35		57.655,63		63.655,63		69.655,63		237.923,14	
	DINAS PERHUBUNGAN				20.001,88		26.954,35		57.655,63		63.655,63		69.655,63		237.923,14	
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terwujudnya Pembanunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	89,39%	100%	13.634,86	100%	22.531,77	100%	53.117,75	100%	58.117,75	100%	63.117,75	100%	210.519,86	Dishub
17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	99,34%	100%	6.367,02	100%	4.422,59	100%	4.537,89	100%	5.537,89	100%	6.537,89	100%	27.403,27	Dishub
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.465,36		136.890,09		689,88		68.343,00		67.724,03		286.112,36	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.465,36		136.890,09		689,88		68.343,00		67.724,03		286.112,36	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	Data tidak tersedia	100%	12.465,36	100%	136.855,17	100%	534,06	100%	68.171,60	100%	67.535,50	100%	285.561,69	Diskominfo
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DALAM PENYERAPAN LITERASI MEDIA	Terwujudnya literasi media pemahaman informasi pada media sosial bagi masyarakat	Data tidak tersedia	-	-	100%	34,92	100%	155,82	100%	171,40	100%	188,54	100%	550,67	Diskominfo
11	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				2.467,54		4.368,53		4.801,37		5.556,60		6.359,91		23.553,95	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				2.467,54		4.368,53		4.801,37		5.556,60		6.359,91		23.553,95	
08	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Persentase Kewirausaha yang mempunyai jiwa interpreneur	100%	100%	11,53	100%	400,62	100%	190,73	100%	209,80	100%	230,78	100%	1.043,46	Diskop.UKMP
09	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Persentase Usaha Kecil yang melakukan kemitraan	100%	100%	647,16	100%	1.280,20	100%	1.474,85	100%	1.897,43	100%	2.334,82	100%	7.634,47	Diskop.UKMP
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Persentase pertumbuhan UMKM	100%	100%	539,90	100%	1.176,31	100%	1.273,30	100%	1.400,63	100%	1.540,69	100%	5.930,82	Diskop.UKMP
11	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi	100%	100%	1.243,77	100%	1.478,49	100%	1.801,21	100%	1.981,33	100%	2.179,46	100%	8.684,27	Diskop.UKMP
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SITEM DATA DAN INFORMASI	Jumlah data/informasi UMKM	100%	62 buku	25,17	112 buku	32,91	112 buku	61,28	112 buku	67,41	112 buku	74,15	100%	260,92	Diskop.UKMP
12	URUSAN PENANAMAN MODAL				1.962,85		4.195,30		4.075,92		4.483,18		4.931,50		19.648,76	
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				1.962,85		4.195,30		4.075,92		4.483,18		4.931,50		19.648,76	
08	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI	Cakupan Penyebaran Informasi Penanaman Modal	Data tidak tersedia	12 bulan	348,99	6 Kecamatan	422,73	6 kecamatan	465,01	6 kecamatan	511,51	6 kecamatan	562,66	6 kecamatan	2.310,89	DPMPPTSP
09	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Persentase Realisasi Investasi	Data tidak tersedia	82%	193,57	85%	265,15	87%	291,66	90%	320,83	95%	352,91	95%	1.424,12	DPMPPTSP
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Cakupan data potensi investasi	Data tidak tersedia	6 kecamatan	10,45	6 kecamatan	136,13	6 kecamatan	149,75	6 kecamatan	164,72	6 kecamatan	181,19	6 kecamatan	642,25	DPMPPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	11	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAHUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Cakupan Kemitraan UMKM	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	7,69	6 Kecamatan	28,30	6 kecamatan	31,13	6 kecamatan	34,24	6 kecamatan	37,66	6 kecamatan	139,02	DPMPTSP
	12	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK PUBLIK	Persentase IzinTerbit Tepat Waktu	88%	91%	1.125,48	92%	2.895,32	94%	2.645,93	96%	2.910,20	98%	3.201,22	98%	12.778,15	DPMPTSP
	13	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Persentase Pengaduan yang tertangani	12 bulan	100%	70,86	100%	24,66	100%	27,13	100%	29,84	100%	32,82	100%	185,31	DPMPTSP
	14	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang berbasis teknologi informasi	Data tidak tersedia	33%	205,80	55%	423,02	66%	465,32	77%	511,85	88%	563,03	88%	2.169,02	DPMPTSP
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				16.647,48		32.935,64		30.369,73		32.860,05		35.883,18		148.696,08		
	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				16.647,48		32.935,64		30.369,73		32.860,05		35.883,18		148.696,08		
	1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase bidang kepeloporan yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	20%	30%	746,21	35%	2.144,66	40%	2.729,50	45%	2.953,32	50%	3.225,03	50%	11.798,74	Disdikpora
	2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Jumlah prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	11 Cabang	19 Cabang	15.901,27	19 Cabang	30.790,97	19 Cabang	27.640,23	19 Cabang	29.906,73	19 Cabang	32.658,15	19 Cabang	136.897,35	Disdikpora
14	URUSAN STATISTIK				-		177,05		-		369,83		406,81		953,69		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-		177,05		-		369,83		406,81		953,69		
	1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK	Terwujudnya pengelolaan keamanan informasi penyelenggaraan persandian daerah	Data Tidak Tersedia	100%	0,00	100%	177,05	100%	-	100%	369,83	100%	406,81	100%	953,69	Diskominfo
	15	URUSAN PERSANDIAN				-		501,13		647,55		904,94		1.506,38		3.560,00	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-		501,13		647,55		904,94		1.506,38		3.560,00		
	07	PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH	Terwujudnya pengelolaan keamanan informasi penyelenggaraan persandian daerah	Data tidak tersedia	100%	-	100%	501,13	100%	647,55	100%	904,94	100%	1.506,38	100%	3.560,00	Diskominfo
	16	URUSAN KEBUDAYAAN				152.787,32		180.365,07		180.640,81		195.670,12		213.319,57		922.782,89	
	DINAS KEBUDAYAAN				152.787,32		180.365,07		180.640,81		195.670,12		213.319,57		922.782,89		
	15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA			151.117,05		178.620,04		178.475,62		193.324,80		210.762,69		912.300,21	DISBUD	
	16	PROGRAM PENGELOLA KEKAYAAN BUDAYA	1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan upacara keagamaan	108 upacara keagamaan	114 upacara keagamaan		114 upacara keagamaan	114 upacara keagamaan	114 upacara keagamaan	114 upacara keagamaan	114 upacara keagamaan	114 upacara keagamaan	114 upacara keagamaan	114 upacara keagamaan	114 upacara keagamaan		
			2. Jumlah Desa Adat yang dibina	10 Desa Adat	40 Desa Adat		40 Desa Adat	42 Desa Adat	-	-	-	-	-	-	122 Desa Adat		
			3. Jumlah Karya seni yang di revitalisasi	98 karya seni	104 sekaa		110 sekaa	114 sekaa	118 sekaa	123 sekaa	123 sekaa	123 sekaa	123 sekaa	123 sekaa	123 sekaa		
			1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	70 cakep	90 cakep		110 cakep	125 cakep	140 cakep	150 cakep	615 cakep						
			2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	52 situs	-		54 situs	-	56 situs	58 situs	58 situs	58 situs					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	URUSAN PERPUSTAKAAN				865,98		1.589,50		1.080,30		1.170,18		1.275,73		5.981,69	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				865,98		1.589,50		1.080,30		1.170,18		1.275,73		5.981,69	
19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	12305 orang	5100 orang	865,98	11000 orang	1.589,50	11000 orang	1.080,30	11000 orang	1.170,18	11000 orang	1.275,73	50000 orang	5.981,69	Diskerpus
18	URUSAN KEARSIPAN				1.423,71		2.243,99		2.652,29		2.872,96		3.132,10		12.325,04	
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				1.423,71		2.243,99		2.652,29		2.872,96		3.132,10		12.325,04	
15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	98 SKPD/Desa	35 PD 62 Desa	87,71	35 PD 62 Desa	695,55	35 PD 62 Desa	563,69	35 PD 62 Desa	610,59	35 PD 62 Desa	665,66	32 PD 62 Desa	2.623,19	Diskerpus
16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	74 dokumen	74 dokumen	604,26	74 dokumen	875,28	74 dokumen	1.021,30	74 dokumen	1.106,27	74 dokumen	1.206,06	25 jenis arsip	4.813,17	Diskerpus
18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah pelayanan informasi yang meningkat kualitasnya	5 materi	5 materi	731,74	5 materi	673,16	5 materi	1.067,30	5 materi	1.156,10	5 materi	1.260,38	25 materi	4.888,68	Diskerpus

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta		
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3		URUSAN PILIHAN			53.020,91		90.020,11		90.996,72		98.205,50		107.365,69		439.608,93		
01		URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			9.916,14		4.494,37		4.544,37		4.905,79		5.345,95		29.206,63		
		DINAS PERIKANAN			9.916,14		4.494,37		4.544,37		4.905,79		5.345,95		29.206,63		
	15	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESIRIR	Jumlah produksi perikanan	155.646,48 ton	7.021,00	36,89	-	-	-	-	-	-	-	7.021,00	36,89	Dinas Perikanan	
	16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN	Jumlah pokmaswas yang dibina dan ditumbuhkembangkan	5 kelompok	4 kelompok	82,26	-	-	-	-	-	-	-	4 kelompok	82,26	Dinas Perikanan	
	19	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	2 kawasan	1 kawasan	1.689,85	2 kawasan	485,65	2 kawasan	485,65	2 kawasan	525,80	2 kawasan	613,83	2 kawasan	3.800,79	Dinas Perikanan
	20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah Produksi perikanan budidaya	586.80 ton	598	1.219,49	603,00	2.013,40	611,00	2.013,40	617,00	2.053,56	623,00	2.097,58	3.052,00	9.397,44	Dinas Perikanan
	21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6.890,70 ton	6.423,00 ton	645,87	6.551,00 ton	1.712,15	6.682,00 ton	1.712,15	6.816,00 ton	1.752,30	6.952,00 ton	1.796,32	33.424,00 ton	7.618,78	Dinas Perikanan
	23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	5.062	8,25	5.164	6,19	5.267	6,19	5.372	46,34	5.480	90,36	26.345	157,33	Dinas Perikanan
	26	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah pemasaran produksi hasil perikanan	8,931 ton	9.325	51,00	9.371	42,30	9.417	42,30	9.464	82,46	9.511	126,47	47.088	344,52	Dinas Perikanan
	30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah dokumen data/informasi perikanan	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	308,02	3 jenis dokumen	152,80	3 jenis dokumen	202,80	3 jenis dokumen	242,96	3 jenis dokumen	286,97	3 jenis dokumen	1.193,54	Dinas Perikanan
	34	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.866,22 ton	5.063	5,46	5.164	52,22	5.267	52,22	5.373	92,38	5.480	136,40	5.480,159	338,68	Dinas Perikanan
	xx	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	Data tidak tersedia	-	-	50 kelompok	16,87	50 kelompok	16,87	50 kelompok	57,03	50 kelompok	101,05	200 kelompok	191,83	Dinas Perikanan
	xx	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA	Jumlah kawasan pesisir yang tertata untuk mendukung pariwisata	Data tidak tersedia	1 kawasan	5.869,05	1 kawasan	12,80	1 kawasan	12,80	1 kawasan	52,96	2 kawasan	96,97	6 kawasan	6.044,57	Dinas Perikanan
02		URUSAN PARIWISATA			17.578,99		51.761,84		53.190,65		57.033,39		62.423,32		241.988,18		
		DINAS PARIWISATA			17.578,99		51.761,84		53.190,65		57.033,39		62.423,32		241.988,18		
01		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung	4.000.000 orang wisatawan mancanegara	5.080.000 wisatawan mancanegar	12.032,31	6.502.400 wisatawan mancanegar	39.468,19	8.388.096 wisatawan mancanegar	48.452,00	10.904.524 wisatawan mancanegar	48.452,00	14.284.926 wisatawan mancanegar	49.952,00	45.159.946 wisatawan Mancanegara	198.356,51	Dispar
02		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Prosentase DTW yang ditata	61%	64%	4.828,36	66%	9.902,07	69%	2.455,20	72%	6.297,94	75%	9.297,94	75%	32.781,51	Dispar
03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	200 orang	334 orang	502,00	972 orang	1.039,23	1012 orang	1.361,18	1012 orang	1.361,18	1012 orang	1.861,18	4342 orang	6.124,78	Dispar
04.		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	jumlah produk wisata yang dibina	180 usaha + 4 daya tarik wisata	615 usaha a tarik wisata	216,33 +24 daya tarik wisata	925 usaha +25 daya tarik wisata	1.352,35 +25 daya tarik wisata	925 usaha +25 daya tarik wisata	922,26 +26 daya tarik wisata	925 usaha +27 daya tarik wisata	922,26 +27 daya tarik wisata	925 usaha +22 daya tarik wisata	1.312,19 + 22 daya tarik wisata	4.315 usaha	4.725,38	Dispar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
03	URUSAN PERTANIAN				17.103,43		25.717,91		26.676,07		29.343,68		32.278,04		131.119,13	
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				17.103,43		25.717,91		26.676,07		29.343,68		32.278,04		131.119,13	
	08 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah peserta pelatihan	280 orang	345 orang	482,40	345 orang	368,79	110 orang	368,79	110orang	405,67	110 orang	446,24	1.020 orang	2.071,89	DIPERPA
	09 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN	Jumlah data yang informatif	3 jenis	3 jenis	606,96	3 jenis	632,38	3 jenis	632,38	3 jenis	695,62	3 jenis	765,18	3 jenis	3.332,54	DIPERPA
	10 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian / perkebunan	15 kali	4 Kali	1.925,09	5 kali	2.083,24	5 kali	2.083,24	5 kali	2.291,57	5 kali	2.520,72	24 Kali	10.903,87	DIPERPA
	11 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pertanian bertahun	120,972 ton	122.500 ton	9.554,32	125.000 ton	9.890,87	127.500 ton	9.890,87	130.000 ton	10.879,95	132.500 ton	11.967,95	132.500 ton	52.183,95	DIPERPA
	12 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	50 orang	50 orang	1.312,38	50 orang	2.011,89	50 orang	1.658,22	50 orang	1.824,04	50 orang	2.006,45	50 orang	8.812,97	DIPERPA
	13 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan ternak	65.427 ekor	65500 ekor	3.076,30	66300 ekor	2.531,44	67300 ekor	2.773,04	68800 ekor	3.050,34	70000 ekor	3.355,37	71000 ekor	14.786,49	DIPERPA
	14 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah Populasi ternak	1.494.309 ekor	1.501.775	24,399	1.509.284	59,530	1.516.831	333,670	1.524.914	367,043	1.532.036	403,741	1.532.036	1.188,38	DIPERPA
15 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah komoditi yang dibina	Data tidak tersedia	-	-	43 paket	7.960,85	43 paket	8.756,93	43 paket	9.632,63	43 paket	10.595,89	43 paket	36.946,29	DIPERPA	
17 PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Jumlah produksi daging	16.037 ton	16.679 ton	121,59	16.694 ton	178,92	16.728 ton	178,92	16.862 ton	196,82	16.947 ton	216,50	83911	892,76	DIPERPA	
04	URUSAN KEHUTANAN				292,41		0,00		0,00		0,00		0,00		292,41	
	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM				292,41		0,00		0,00		0,00		0,00		292,41	
	16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	Data tidak tersedia	20 kelompok	41,38	-	-	-	-	-	-	-	-	20 kelompok	41,38	SDA Bagian Sumber Daya Alam
	23 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok tani/ masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hutan lestari	Data tidak tersedia	9 kelompok	11,62	-	-	-	-	-	-	-	-	9 kelompok	11,62	Bagian Sumber Daya Alam
	22 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI KEHUTANAN	Jumlah data base dan peta potensi kehutanan	Data tidak tersedia	1 paket	239,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	239,41	Bagian Sumber Daya Alam
05	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				115,28		158,84		0,00		0,00		0,00		274,12	
	BAGIAN PEREKONOMIAN				115,28		158,84		0,00		0,00		0,00		274,12	
	15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Mewujudkan Tertib Usaha Di Bidang ESDM	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	105,30	6 Kecamatan	142,15	-	-	-	-	-	-	6 Kecamatan	247,45	Bagian Perekonomian
	17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Mewujudkan tertib Usaha di Bidang ketenagalistrikan	Data tidak tersedia	6 Kec	9,98	6 Kec	16,69	-	-	-	-	-	-	6 Kec	26,66	Bagian Perekonomian
06	URUSAN PERDAGANGAN				6.510,47		2.535,17		2.535,17		2.535,17		2.535,17		16.651,14	
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN				6.510,47		2.535,17		2.535,17		2.535,17		2.535,17		16.651,14	
	15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase perlindungan terhadap Konsumen	100%	100%	1.751,76	100%	315,49	100%	325,92	100%	358,51	100%	394,36	100%	3.146,03	Diskop.UKMP

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab																
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
		16	PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR	Persentase Pelaksanaan Tertib Ukur	Data tidak tersedia	-	-	100%	1.280,54	100%	933,94	100%	1.199,00	100%	1.065,38	100%	4.478,86	Diskop.UKMP															
		17	PEOGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase Efisiensi Perdagangan dalam negeri	100%	100%	4.758,71	100%	766,05	100%	1.096,05	100%	780,47	100%	858,52	100%	8.259,80	Diskop.UKMP															
		18	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase realisasi ekspor Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	-	-	100%	173,09	100%	179,26	100%	197,19	100%	216,91	100%	766,45	Diskop.UKMP															
07		URUSAN PERINDUSTRIAN					1.504,20		5.351,99		4.050,47		4.387,46		4.783,21		20.077,33																
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					1.504,20		5.351,99		4.050,47		4.387,46		4.783,21		20.077,33																
		11	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	Data tidak terseda	100%	160,12	100%	882,42	100%	374,86	100%	406,05	100%	442,68	100%	2.266,13	Disperinaker															
		16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Jumlah IKM yang sudah menerapkan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri	1.000 orang 32 IKM 90 unit usaha	12 bulan	1.318,56	12 bulan	4.050,25	12 bulan	3.614,47	12 bulan	3.915,19	12 bulan	4.268,35	60 bulan	17.166,82	Disperinaker															
		17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Jumlah kelompok IKM yang mampu menerapkan teknologi industri	17 gugus	1 gugus	25,52	1 gugus	419,31	1 gugus	61,13	1 gugus	66,22	1 gugus	72,19	5 gugus	644,38	Disperinaker															

Tabel 8.3
Indikasi Rencana Program Strategis Pembangunan yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 - 2021
Kabupaten Badung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				254.336,84		342.862,35		306.179,15		333.307,61		364.043,21		1.600.729,16	
	01		FUNGSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				183.452,12		221.793,79		197.954,55		215.184,51		234.569,68		1.052.954,66	
			SEKRETARIAT DPRD				72.652,47		90.015,54		82.445,27		89.064,70		96.944,32		431.122,31	
		15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	78%	80%	72.416,94	81%	89.749,80	82%	82.152,95	83%	88.743,15	84%	96.590,62	84%	429.653,46	Setwan
		26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Raperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100%	100%	235,53	100%	265,74	100%	292,32	100%	321,55	100%	353,70	100%	1.468,85	Setwan
			SEKRETARIAT DAERAH				96.027,46		115.254,19		97.954,47		106.819,04		116.268,34		532.323,50	
		a.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.790,93		4.433,42		4.383,42		4.748,12		5.176,41		23.532,30	
		01	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Proposal yang diverifikasi administratif sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	4.790,93	100%	4.433,42	100%	4.383,42	100%	4.748,12	100%	5.176,41	100%	23.532,30	Bagian Kesra
		b.	BAGIAN PEMERINTAHAN				1.202,95		0,00		2.981,99		3.943,40		4.115,14		12.243,48	
		27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab.Badung	100%	100%	1.108,81	100%	3.202,60	100%	2.533,99	100%	3.500,66	100%	3.672,40	100%	10.815,867	Bagian Pemerintahan
		25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Jumlah naskah kerja sama antar pemerintah di kabupaten badung	-	10 naskah	70,90	30 naskah	364,80	30 naskah	370,06	30 naskah	364,80	30 naskah	364,80	130 naskah	1.170,561	Bagian Pemerintahan
		16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	12 bulan	23,23	-	-	12 bulan	77,94	12 bulan	77,94	12 bulan	77,94	48 bulan	257,053	Bagian Pemerintahan
		c.	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN				9.926,66		13.425,64		11.162,96		12.091,71		13.182,39		59.789,35	
	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Pelayanan Perkantoran	15 kegiatan	15 kegiatan	1.017,85	15 kegiatan	1.497,23	15 kegiatan	1.646,96	15 kegiatan	1.811,65	15 kegiatan	1.992,82	15 kegiatan	7.966,51	Bagian Humas
	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		data tidak tersedia	-	-	74 Setel	160,38	-	61,50	74 Setel	176,41	-	67,65	74 Setel	465,94	Bagian Humas
	36		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI	Cakupan layanan sarana dan	2 paket	2 paket	1.163,78	2 paket	1.522,97	2 paket	1.675,27	2 paket	1.842,80	2 paket	2.027,08	2 paket	8.231,90	Bagian Humas
	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DATA APARATUR		data tidak tersedia	30 orang	26,01	30 orang	423,70	-	466,07	30 orang	512,67	-	563,94	90 orang	1.992,39	
	35		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Kepala Lingkungan yang dilantik	5 kaling	5 kaling	1.649,34	5 kaling	2.540,94	5 kaling	2.582,41	5 kaling	2.840,66	5 kaling	3.124,72	5 kaling	12.738,07	Bagian Humas
	37		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	6.069,68	3 dokumen	7.280,41	3 dokumen	4.730,75	3 dokumen	4.907,52	3 dokumen	5.406,18	3 dokumen	28.394,55	Bagian Humas

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	d.	BAGIAN HUKUM DAN HAM				3.606,90		4.245,29		4.215,29		4.566,01		4.977,86		21.611,36	
	01	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	2.537 Produk Hukum Daerah	2000 Produk Hukum Daerah	3.606,90	2000 Produk Hukum Daerah	4.245,29	2000 Produk Hukum Daerah	4.215,29	2000 Produk Hukum Daerah	4.566,01	2000 Produk Hukum Daerah	4.977,86	10.000 Produk Hukum Daerah	21.611,36	Bag. Hukum dan HAM
	e.	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM				441,56		956,65		752,58		815,19		888,72		3.854,69	
	16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok tani yang memiliki pemahaman tentang konservasi	Data tidak tersedia	-	-	15 Kelompok	166,30	15 Kelompok	180,54	15 kelompok	243,16	15 kelompok	243,16	75 kelompok	833,16	Bagian Sumber Daya Alam
	23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok tani/ masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hutan lestari	Data tidak tersedia	-	-	9 kelompok	45,48	9 kelompok	45,67	9 kelompok	45,66	9 kelompok	45,66	45 kelompok	182,46	Bagian Sumber Daya Alam
	75	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Jumlah produk pangan olahan non beras yang di pamerkan	Data tidak tersedia	20 jenis	232,74	20 jenis	693,66	20 jenis	475,61	20 jenis	475,61	20 jenis	549,14	100 jenis	2.426,76	Bagian Sumber Daya Alam
	100	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah KTNA yang menjadi wirausaha berbasis agribisnis	Data tidak tersedia	5 orang KTNA	40,51	5 orang KTNA	51,21	5 orang KTNA	50,76	5 orang KTNA	50,76	5 orang KTNA	50,76	25 orang KTNA	244,00	Bagian Sumber Daya Alam
	114	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Masyarakat miskin di Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	9.883 RTS -PM	168,31								9.883 RTS -PM	168,31	Bagian Sumber Daya Alam	
	f.	BAGIAN PEREKONOMIAN				3.487,72		2.069,54		2.328,38		2.522,10		2.749,60		13.157,35	
	56	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Memperkuat Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa	Data tidak tersedia	122 LPD	3.301,61	122 LPD	1.689,11	122 LPD	1.789,11	122 LPD	1.889,11	122 LPD	1.989,11	122 LPD	10.658,07	Bagian Perekonomian
	111	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	65,56	6 Kecamatan	111,67	6 Kecamatan	111,67	6 Kecamatan	111,67	6 Kecamatan	211,67	6 Kecamatan	612,23	Bagian Perekonomian
	112	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	Data tidak tersedia	2 Prsh Daerah	57,13	2 Prsh Daerah	128,90	2 Prsh Daerah	128,90	2 Prsh Daerah	128,90	2 Prsh Daerah	128,90	2 Prsh Daerah	572,74	Bagian Perekonomian
	113	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Penyediaan Informasi Produk Unggulan Daerah	Data tidak tersedia	6 Kecamatan	63,42	6 Kecamatan	139,86	6 Kecamatan	139,86	6 Kecamatan	199,86	6 Kecamatan	227,36	6 Kecamatan	770,35	Bagian Perekonomian
	XX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Mewujudkan Tertib Usaha Di Bidang ESDM	Data tidak tersedia	-	-	-	-	6 Kecamatan	142,15	6 Kecamatan	175,87	6 Kecamatan	175,87	6 Kecamatan	493,89	Bagian Perekonomian
	XX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Mewujudkan tertib Usaha di Bidang ketenagalistrikan	Data tidak tersedia	-	-	-	-	6 Kec	16,69	6 Kec	16,69	6 Kec	16,69	18 Kec	50,07	Bagian Perekonomian
	g	BAGIAN PEMBANGUNAN				3.034,48		9.372,36		9.432,36		10.217,13		11.138,72		43.195,04	
	16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	1 paket	1 paket	59,04	1 paket	1.193,80	1 paket	1.313,18	1 paket	1.444,50	1 paket	1.588,95	5 paket	5.599,47	Bagian Pembangunan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	3 paket	4 paket	2.863,28	4 paket	7.360,89	4 paket	7.219,74	4 paket	7.783,25	4 paket	8.461,46	20 paket	33.688,62	Bagian Pembangunan
		39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	data tidak tersedia	1 dokumen	92,65	1 dokumen	550,54	1 dokumen	605,59	1 dokumen	666,15	1 dokumen	732,77	4 dokumen	2.647,70	Bagian Pembangunan
		89	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah	1 Paket	1 Paket	19,51	1 Paket	267,13	1 Paket	293,84	1 Paket	323,22	1 Paket	355,55	1 Paket	1.259,25	Bagian Pembangunan
			BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				4.267,13		4.428,14		4.483,13		4.857,58		5.293,89		23.329,88	
01			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu dan Tepat Guna	100%	100%	4.267,13	100%	4.428,14	100%	4.483,13	100%	4.857,58	100%	5.293,89	100%	23.329,88	Baqian Pengadaan
			i. BAGIAN ORGANISASI				2.544,14		4.293,74		3.982,87		4.314,24		4.703,39		19.838,38	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pembayaran iuran FORSESDASI	1 Orang	1 Orang	10,00	1 Orang	13,67	1 Orang	15,03	1 Orang	16,28	1 Orang	17,75	5 Orang	72,73	Bagian Organisasi
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah ASN yang memahami Budaya Kerja	248 Orang	125 Orang	229,49	125 Orang	699,45	125 Orang	358,55	125 Orang	388,38	125 Orang	423,41	620 Orang	2.099,28	Bagian Organisasi
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah PD yang diasistensi dan pelaporan LKjIP tepat waktu	53 SKPD	38 PD	1.060,04	38 PD	2.672,58	38 PD	2.177,10	38 PD	2.358,23	38 PD	2.570,95	38 PD	10.838,89	Bagian Organisasi
		28	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	38 PD	1.225,86	38 PD	875,64	38 PD	1.364,92	38 PD	1.478,48	38 PD	1.611,84	38 PD	6.556,75	Bagian Organisasi
		39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	Data tidak tersedia	100%	18,74	100%	32,41	100%	67,27	100%	72,87	100%	79,44	100%	270,73	
			i. BAGIAN UMUM				575,82		632,59		427,39		462,95		504,71		2.603,47	
		03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	100%	55,52	100%	110,32	100%	110,32	100%	119,49	100%	130,27	100%	525,92	Bagian Umum
		16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	36 kunjungan	36 kunjungan	500,00	36 kunjungan	500,00	36 kunjungan	300,00	36 kunjungan	324,96	36 kunjungan	354,27	180 kunjungan	1.979,23	Bagian Umum
		37	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terlaksananya Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	1890 buah	1890 buah	20,30	1890 buah	22,28	1890 buah	17,08	1890 buah	18,50	1890 buah	20,17	9450 buah	98,32	Bagian Umum
			k. BAGIAN KEUANGAN				2.416,85		2.626,27		2.526,27		2.736,46		2.983,29		13.289,16	
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Data tidak tersedia	12 bulan	995,37	12 bulan	794,69	12 bulan	794,69	12 bulan	894,69	12 bulan	994,69	12 bulan	4.474,12	Bag. Keuangan

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1		2	3	4	5	6	7	Rp. Juta	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Tri wulan dan Semesteran	Data tidak tersedia	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	1.209,30	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	1.306,93	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	1.306,93	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	1.317,12	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	1.317,12	2 Laporan Keuangan Triwulan dan 1 Laporan Semesteran	6.457,41	Baq. Keuangan
	17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	Data tidak tersedia	12 bulan	98,67	12 bulan	459,58	12 bulan	359,58	12 bulan	459,58	12 bulan	559,58	12 bulan	1.937,00	Baq. Keuangan
	18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	Terciptanya SPJ di masing-masing SKPD yang akuntabel	Data tidak tersedia	12 bulan	113,51	12 bulan	65,07	12 bulan	65,07	12 bulan	65,07	12 bulan	111,90	12 bulan	420,64	Bag. Keuangan
	I.	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN				59.732,32		68.770,54		51.277,82		55.544,13		60.554,22		295.879,03	
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	8Paket	8Paket	3.236,46	8Paket	23.796,36	8 Paket	4.178,92	8Paket	4.387,87	8Paket	4.607,26	40Paket	40.206,86	Perawatan Bagian Perlengkapan dan Perawatan
	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan dipelihara	8Paket	8Paket	56.472,04	11Paket	44.943,45	8Paket	47.066,64	8Paket	51.122,39	8Paket	55.911,39	43Paket	255.515,91	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
	33	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	13Dokumen	15 Dok.	23,82	15Dok.	30,73	15Dok.	32,27	15Dok.	33,88	15Dok.	35,57	75Dok.	156,27	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
		KECAMATAN KUTA				2.088,15		2.004,60		2.205,06		2.422,76		2.661,95		11.382,51	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	2 jenis	163,56	2 jenis	199,20	2 jenis	219,12	2 jenis	241,03	2 jenis	265,14	2 jenis	1.088,04	Kec. Kuta
	08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	12 jenis	635,68	12 jenis	567,43	12 jenis	624,17	12 jenis	686,58	12 jenis	755,24	60 jenis	3.269,10	Kec. Kuta
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 jenis	3 jenis	9,38	3 jenis	10,00	3 jenis	11,00	3 jenis	12,10	3 jenis	13,31	3 jenis	55,79	Kec. Kuta
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	145,20	1 dokumen	63,09	1 dokumen	69,40	1 dokumen	76,34	1 dokumen	83,97	1 dokumen	438,00	Kec. Kuta
	78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya	5 Lokasi	5 Lokasi	319,93	5 Lokasi	313,04	5 Lokasi	344,34	5 Lokasi	378,78	5 Lokasi	416,66	5 Lokasi	1.772,75	Kec. Kuta
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	3 jenis	1 jenis	369,16	2 jenis	477,58	2 jenis	525,33	2 jenis	575,07	2 jenis	629,49	9 jenis	2.576,63	Kec. Kuta
	85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	436,04	7 jenis	363,62	7 jenis	399,98	7 jenis	439,98	7 jenis	483,98	7 jenis	2.123,60	Kec. Kuta
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 Lokasi	5 Lokasi	9,21	5 Lokasi	10,65	5 Lokasi	11,71	5 Lokasi	12,88	5 Lokasi	14,17	5 Lokasi	58,62	Kec. Kuta	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
				Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1	2	3	4	5	6	7	Rp. Juta	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	KECAMATAN KUTA UTARA				3.220,88		2.860,27		3.304,04		3.629,74		3.992,71		17.007,64	
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah sumber daya aparatur desa yang mendapatkan pembinaan, monitoring, pengangkatan dan bimtek	data tidak tersedia	7 Kaling	3,30	6 Desa	22,96	6 Desa	18,01	6 Desa	15,09	6 Desa	16,60	6 Desa	75,96	Kecamatan Kuta Utara
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	252,42	4 dokumen	160,68	4 dokumen	176,75	4 dokumen	194,42	4 dokumen	213,86	4 dokumen	998,12	Kecamatan Kuta Utara
08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya	3 jenis	3 jenis	518,93	3 jenis	632,37	3 jenis	695,61	3 jenis	765,17	3 jenis	841,69	15 jenis	3.453,77	Kecamatan Kuta Utara
09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	3 jenis	3 Jenis	11,10	3 Jenis	10,00	2 Jenis	11,00	2 Jenis	12,10	2 Jenis	13,31	2 Jenis	57,51	Kecamatan Kuta Utara
29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 dokumen	102,59	1 dokumen	77,55	1 dokumen	85,31	1 dokumen	93,84	1 dokumen	103,22	5 dokumen	462,51	Kecamatan Kuta Utara
38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data	2 Jenis	2 Jenis	127,21	2 Jenis	29,67	2 Jenis	32,64	2 Jenis	35,90	2 Jenis	39,49	2 Jenis	264,92	Kecamatan Kuta Utara
78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Lokasi yang dipantau	6 desa/kel	6 Desa/Kel	328,86	6 Desa/Kel	101,00	6 Desa/Kel	111,10	6 Desa/Kel	122,21	6 Desa/Kel	134,43	6 Desa/Kel	797,61	Kecamatan Kuta Utara
79	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	6 desa/kel	6 desa/kel	473,64	6 desa/kel	274,82	6 desa/kel	302,31	6 Desa/Kel	332,54	6 Desa/Kel	365,79	6 Desa/Kel	1.749,09	Kecamatan Kuta Utara
82	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Pembinaan UKS	data tidak tersedia	-	35,58	3 kegiatan	12,34	3 kegiatan	13,57	3 kegiatan	14,93	3 kegiatan	16,43	3 kegiatan	92,86	Kecamatan Kuta Utara
82	PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jenis hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	143,40	7 hari besar	153,42	7 hari besar	168,77	7 hari besar	185,64	7 hari besar	204,21	7 hari besar	855,44	Kecamatan Kuta Utara
83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	1 Jenis	1 Jenis	391,15	1 Jenis	416,72	1 Jenis	458,39	1 Jenis	504,23	1 Jenis	554,65	1 Jenis	2.325,14	Kecamatan Kuta Utara
85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 Jenis	7 Jenis	302,56	7 Jenis	346,28	7 Jenis	380,91	7 Jenis	419,00	7 Jenis	460,90	7 Jenis	1.909,64	Kecamatan Kuta Utara
86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah karang Taruna dan PSM yang dibina	1 kegiatan	-	-	1 karang taruna dan 1 ora PSM	6,00	1 karang taruna dan 1 ora PSM	171,60	1 karang taruna dan 1 ora PSM	188,76	1 karang taruna dan 1 ora PSM	207,63	1 karang taruna dan 1 ora PSM	573,98	Kecamatan Kuta Utara
87	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kebersihan Lingkungan	3 kelurahan	3 kelurahan	495,56	3 kelurahan	558,41	3 kelurahan	614,25	3 kelurahan	675,68	3 kelurahan	743,25	3 kelurahan	3.087,16	Kecamatan Kuta Utara
92	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM yang Didata	462 RTM	400 RTM	4,95	370 RTM	5,46	340 RTM	6,00	310 RTM	6,60	280 RTM	7,26	280 RTM	30,28	Kecamatan Kuta Utara
93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/Kel	6 desa/kel	4,47	6 Desa/Kel	52,58	6 Desa/Kel	57,84	6 Desa/Kel	63,62	6 Desa/Kel	69,99	6 Desa/Kel	248,50	Kecamatan Kuta Utara
118	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA KECAMATAN	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	25,15	-	-	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	25,15	Kecamatan Kuta Utara

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17
			KECAMATAN KUTA SELATAN				2.617,98		2.400,54		2.640,44		2.904,48		3.194,93		13.758,38	
	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kepala Lingkungan yang dilantik	5 Kaling	4 Kaling	5,42	-	11,15	-	4,09	-	4,50	-	4,95	4 kaling	30,10	Kec. Kuta Selatan	
	09	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	11 jenis	11 jenis	441,30	11 jenis	639,49	11 jenis	703,44	11 jenis	773,79	11 jenis	851,17	11 jenis	3.409,19	Kec. Kuta Selatan	
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	99,28	1 dokumen	118,11	1 dokumen	129,93	1 dokumen	142,92	1 dokumen	157,21	1 dokumen	647,45	Kec. Kuta Selatan	
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Lokasi yang dipantau	3 desa dan 3 kelurahan	3 desa dan 3 kelurahan	231,24	3 desa dan 3 kelurahan	128,15	3 desa dan 3 kelurahan	140,96	3 desa dan 3 kelurahan	155,06	3 desa dan 3 kelurahan	170,56	3 desa dan 3 kelurahan	825,97	Kec. Kuta Selatan	
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	750,89	3 kegiatan	310,63	3 kegiatan	349,71	3 kegiatan	384,68	3 kegiatan	423,15	3 kegiatan	2.219,06	Kec. Kuta Selatan	
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kegiatan untuk memberdayakan masyarakat	data tidak tersedia	1 kegiatan	87,06	1 Kegiatan	10,69	1 Kegiatan	11,76	1 Kegiatan	12,93	1 Kegiatan	14,22	1 Kegiatan	136,66	Kec. Kuta Selatan	
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Peringatan Hari Besar	7 hari besar	7 hari besar	141,18	7 hari besar	180,27	7 hari besar	198,30	7 hari besar	218,13	7 hari besar	239,95	7 hari besar	977,83	Kec. Kuta Selatan	
	85	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan Keragaman Budaya	1 jenis	1 jenis	407,27	1 jenis	444,32	1 jenis	488,76	1 jenis	537,63	1 jenis	591,40	1 jenis	2.469,38	Kec. Kuta Selatan	
	87	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	7 jenis	448,17	7 jenis	536,00	7 jenis	589,60	7 jenis	648,56	7 jenis	713,42	7 jenis	2.935,76	Kec. Kuta Selatan	
	93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Desa/ Kelurahan yang dilaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	6 desa / kelurahan	6 desa / kelurahan	6,17	6 desa / kelurahan	14,03	6 desa / kelurahan	15,43	6 desa / kelurahan	16,98	6 desa / kelurahan	18,67	6 desa / kelurahan	71,28	Kec. Kuta Selatan	
	99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Karang Taruna/PSM yang dibina	1 karang taruna	1 karang taruna	-	1 karang taruna	7,69	1 karang taruna	8,46	1 karang taruna	9,31	1 karang taruna	10,24	1 karang taruna	35,70	Kec. Kuta Selatan	
			KECAMATAN MENGWI			4.262,91		5.434,80		5.086,69		5.594,36		6.152,80		26.531,57		
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Jenis	2 Kegiatan	308,46	2 Kegiatan	344,97	2 Kegiatan	379,47	2 Kegiatan	417,41	2 Kegiatan	459,15	2 Kegiatan	1.909,46	Kec.Mengwi	
	05	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	Data tidak tersedia	-	-	3 Kegiatan	211,58	3 Kegiatan	232,74	3 Kegiatan	256,01	3 Kegiatan	281,61	3 Kegiatan	981,93	Kec.Mengwi	
	08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	3 Kegiatan	4 Kegiatan	483,80	6 Kegiatan	1.090,79	6 Kegiatan	1.226,27	6 Kegiatan	1.348,89	6 Kegiatan	1.483,78	6 Kegiatan	5.633,53	Kec.Mengwi	
	09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran PD	3 Dokumen	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	50,00	Kec.Mengwi	
	29	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Kegiata Pembangunan Daerah	1 Dokumen	4 Kegiatan	161,59	2 Kegiatan	926,25	2 Kegiatan	101,89	2 Kegiatan	112,08	2 Kegiatan	123,28	2 Kegiatan	1.425,09	Kec.Mengwi	
	38	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Cakupan Data/Informasi Propil Desa/kelurahan	2 Dokumen	3 Kegiatan	135,41	1 Kegiatan	5,75	1 Kegiatan	6,33	1 Kegiatan	6,96	1 Kegiatan	7,65	1 Kegiatan	162,11	Kec.Mengwi	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah Kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	20 Desa/Kelurahan	3 Kegiatan	296,29	2 Kegiatan	108,82	2 Kegiatan	119,70	2 Kegiatan	131,67	2 Kegiatan	144,84	2 Kegiatan	801,31	Kec.Mengwi
	98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Jumlah Desa Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Data tidak tersedia	-	-	1 Kegiatan	21,27	1 Kegiatan	23,40	1 Kegiatan	25,74	1 Kegiatan	28,31	1 Kegiatan	98,73	Kec.Mengwi
	79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	13 Kegiatan	13 kegiatan	812,34	9 Kegiatan	468,95	9 Kegiatan	515,84	9 Kegiatan	567,43	9 Kegiatan	624,17	9 Kegiatan	2.988,72	Kec.Mengwi
	81	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	20 Desa/Kelurahan	1 Kegiatan	22,03		0,00		0,00		0,00		0,00		22,03	Kec.Mengwi
	82	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah Hari - Hari Besar Yang Diperingati	7 hari Besar	7 Kegiatan	154,17	7 Kegiatan	173,33	7 Kegiatan	190,66	7 Kegiatan	209,73	7 Kegiatan	230,70	7 Kegiatan	958,59	Kec.Mengwi
	83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	jumlah kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	393,90	2 Kegiatan	422,11	2 kegiatan	464,32	2 Kegiatan	510,75	2 Kegiatan	561,83	2 Kegiatan	2.352,90	Kec.Mengwi
	85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	jumlah pelayanan penataan administrasi kependudukan	7 Pelayanan	1 Kegiatan	237,85	2 Kegiatan	296,96	2 Kegiatan	326,65	2 Kegiatan	359,32	2 Kegiatan	395,25	2 Kegiatan	1.616,03	Kec.Mengwi
	87	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah Kegiatan Kebrsihan Lingkungan	20 Desa/Kelurahan	1 Kegiatan	804,24	2 Kegiatan	1.170,54	2 Kegiatan	1.287,60	2 Kegiatan	1.416,36	2 Kegiatan	1.557,99	2 Kegiatan	6.236,74	Kec.Mengwi
	90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM di Kecamtan Mengwi	3701 RTM	1 Kegiatan	11,28	1 Kegiatan	17,75	1 Kegiatan	19,52	1 Kegiatan	21,48	1 Kegiatan	23,62	1 Kegiatan	93,66	Kec.Mengwi
	95	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah Kegiatan Peningkatan jalan dan Jembatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	416,77		0,00		0,00		0,00		0,00		416,77	Kec.Mengwi
	99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Kegiatan peningkatan peran serta kepemudaan	Data tidak tersedia	-	-	1 Kegiatan	86,78	1 Kegiatan	95,46	1 Kegiatan	105,01	1 Kegiatan	115,51	1 Kegiatan	402,77	Kec.Mengwi
	99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	jumlah kegiatan pemberdayaan Aparatur Pemerintah	20 Desa/Kelurahan	1 kegiatan	14,78	1 Kegiatan	78,95	1 Kegiatan	86,85	1 Kegiatan	95,53	1 Kegiatan	105,09	1 Kegiatan	381,20	Kec.Mengwi
KECAMATAN ABIANSEMAL					1.221,93		1.865,83		2.217,86		2.439,65		2.814,85		10.560,11		
	08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	418,59	2 Kegiatan	650,17	2 Kegiatan	715,18	2 Kegiatan	786,70	2 Kegiatan	865,37	2 Kegiatan	3.436,01	Kec.Abiansemal
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	40,44	2 Kegiatan	52,54	2 Kegiatan	57,79	2 Kegiatan	63,57	2 Kegiatan	69,92	2 Kegiatan	284,26	Kec.Abiansemal
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Jumlah dokumen data	2 kegiatan	2 kegiatan	23,38	2 kegiatan	6,43	2 kegiatan	7,07	2 kegiatan	7,78	2 kegiatan	8,56	2 kegiatan	53,22	Kec.Abiansemal
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah lokasi yang	18 desa	18 desa	86,61	18 desa	160,67	18 desa	176,74	18 desa	194,41	18 desa	213,85	18 desa	832,28	Kec.Abiansemal
	79	PROGRAM PENINGKATANAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jenis partisipasi masyarakat	5 Kegiatan	5 Kegiatan	89,08	5 Kegiatan	233,85	5 Kegiatan	392,68	5 Kegiatan	431,94	5 Kegiatan	475,14	5 Kegiatan	1.622,68	Kec.Abiansemal
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah Pengelolaan Keragaman budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	362,13	1 kegiatan	424,53	1 kegiatan	466,98	1 kegiatan	513,68	1 kegiatan	565,05	1 kegiatan	2.332,37	Kec.Abiansemal
85	PROGRAM PENATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi	2 kegiatan	2 kegiatan	190,47	2 kegiatan	237,34	2 kegiatan	291,09	2 kegiatan	320,19	2 kegiatan	352,21	2 kegiatan	1.391,31	Kec.Abiansemal	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	79,72	1 Kegiatan	87,69	1 Kegiatan	96,46	1 Kegiatan	237,34	1 Kegiatan	501,22	Kec.Abiansemal
		90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Pengentasan kemiskinan	18 desa	18 desa	6,42	18 desa	7,46	18 desa	8,21	18 desa	9,03	18 desa	9,93	18 desa	41,05	Kec.Abiansemal
		99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Pembinaan penyelenggaraan	18 kali	18 kali	4,82	18 kali	13,12	18 kali	14,43	18 kali	15,88	18 kali	17,47	18 kali	65,72	Kec.Abiansemal
	KECAMATAN PETANG						1.360,35		1.958,03		2.100,72		2.309,79		2.539,77		10.268,65	
		08	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	12 jenis	4 Kegiatan	411,40	6 Kegiatan	446,02	6 Kegiatan	725,10	6 Kegiatan	797,61	6 Kegiatan	877,38	6 Kegiatan	3.257,52	kec.Petang
		09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Dokumen Perencanaan	3 Jenis	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	10,00	1 Kegiatan	40,00	kec.Petang
		29	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	4 Kegiatan	43,15	2 Kegiatan	32,38	2 Kegiatan	101,89	2 Kegiatan	112,08	2 Kegiatan	123,28	2 Kegiatan	412,78	kec.Petang
		38	PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Dokumen Data	2 Jenis	3 Kegiatan	23,97	1 Kegiatan	4,34	1 Kegiatan	6,33	1 Kegiatan	6,96	1 Kegiatan	7,65	1 Kegiatan	49,25	kec.Petang
		78	PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah desa yang dijaga ketertibannya	7 Desa	3 Kegiatan	91,08	2 Kegiatan	121,81	2 Kegiatan	119,70	2 Kegiatan	131,67	2 Kegiatan	144,84	2 Kegiatan	609,10	kec.Petang
		79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	2 kegiatan	13 kegiatan	64,44	9 Kegiatan	482,13	9 Kegiatan	85,95	9 Kegiatan	94,55	9 Kegiatan	104,00	9 Kegiatan	831,08	kec.Petang
		82	PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 Kegiatan	129,17	7 Kegiatan	150,10	7 Kegiatan	190,66	7 Kegiatan	209,73	7 Kegiatan	230,70	7 Kegiatan	910,36	kec.Petang
		83	PENGLOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya	3 Jenis	1 Kegiatan	355,35	2 Kegiatan	361,31	2 kegiatan	445,49	2 Kegiatan	490,04	2 Kegiatan	539,05	2 Kegiatan	2.191,25	kec.Petang
		85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan Administrasi kependudukan	7 jenis	1 Kegiatan	214,89	2 Kegiatan	287,37	2 Kegiatan	309,21	2 Kegiatan	340,14	2 Kegiatan	374,15	2 Kegiatan	1.525,76	kec.Petang
		90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	392 RTM	1 Kegiatan	6,70	1 Kegiatan	5,70	1 Kegiatan	19,52	1 Kegiatan	21,48	1 Kegiatan	23,62	1 Kegiatan	77,03	kec.Petang
		99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Karang Taruna/PSM yang dibina	1 Karang Taruna, 1 orang PSM	1 kegiatan	4,48	1 Kegiatan	54,27	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	58,75	kec.Petang
99		PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Desa yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7 desa	1 kegiatan	5,72	1 Kegiatan	12,59	1 Kegiatan	86,85	1 Kegiatan	95,53	1 Kegiatan	105,09	1 Kegiatan	305,78	kec.Petang	
02	FUNGSI PENGAWASAN					2.879,92		3.225,62		2.895,41		3.136,32		3.419,20		15.556,46		
	INSPEKTORAT					2.879,92		3.225,62		2.895,41		3.136,32		3.419,20		15.556,46		
		20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase Pelanggaran Kebiakan KDH	CC	B	1.742,25	BB	2.383,49	BB	2.159,98	A	2.339,69	A	2.550,73	A	11.176,13	Inspekorat
		21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	80%	100%	139,44	100%	223,49	100%	58,93	100%	63,83	100%	69,59	100%	555,28	Inspekorat
		22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase Penetapan Sistem Prosedur	100%	100%	998,22	100%	618,64	100%	676,50	100%	732,80	100%	798,89	100%	3.825,05	Inspekorat

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab																
					Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta																	
					Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta																			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
	03	FUNGSI PERENCANAAN																															
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																															
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Aparat yang mendapat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Data tidak tersedia	1 Paket	595,81	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	595,81	Bappeda															
		21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	100%	7.008,97	100%	7.758,69	100%	7.110,81	100%	7.702,43	100%	8.397,19	100%	37.978,10	Bappeda															
		27	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	14,55%	16,36%	491,44	20,00%	1.196,60	23,64%	983,47	27,27%	1.065,29	30,91%	1.161,38	30,91%	4.898,18	Bappeda															
		07	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	100%	183,13	100%	9,27	100%	466,14	100%	504,92	100%	550,47	100%	1.713,94	Bappeda															
		15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	tersedianya data dan informasi yang memadai	1 paket	1 paket	418,30	1 paket	127,37	1 paket	140,11	1 paket	151,76	1 paket	165,45	1 paket	1.002,99	Bappeda															
		22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam	6 Kecamatan	6 Kecamatan	247,04	6 Kecamatan	402,14	6 Kecamatan	442,35	6 Kecamatan	479,16	6 Kecamatan	522,38	6 Kecamatan	2.093,07	Bappeda															
		24	PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 paket	1 paket	303,64	4 paket	865,02	3 paket	375,55	3 paket	406,80	2 paket	443,49	15 paket	2.394,50	Bappeda															
	04	FUNGSI KEUANGAN					47.919,03		70.627,30		62.141,77		68.523,20		75.053,61		324.264,89																
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					20.612,21		24.667,07		22.592,98		24.624,07		26.989,66		119.486,00																
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur selama satu tahun	Data tidak tersedia	12 Bulan	1.127,76	12 Bulan	2.903,78	12 Bulan	2.600,65	12 Bulan	2.903,78	12 Bulan	3.203,78	60 Bulan	12.739,75	BPKAD															
		05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai di Masing-Masing PD yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / sejenisnya	Data tidak tersedia	53 PD dan 12 puskesmas	58,44	38 PD dan 13 puskesmas	50,70	38 PD dan 13 puskesmas	58,44	38 PD dan 13 puskesmas	50,70	38 PD dan 13 puskesmas	60,70	38 PD dan 13 puskesmas	278,98	BPKAD															
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel	Data tidak tersedia	100%	885,33	100%	762,37	100%	893,33	100%	762,37	100%	862,37	495 bk	4.165,77	BPKAD															
		07	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PD	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	Data tidak tersedia	100%	10,87	100%	6,00	100%	10,87	100%	6,00	100%	6,59	100%	40,34	BPKAD															
		09	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	Data tidak tersedia	100%	13.975,50	100%	13.428,16	100%	13.475,38	100%	13.428,16	100%	14.428,16	100%	68.735,37	BPKAD															
		10	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penvvusnan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh SKPD di Kab. Badung	Data tidak tersedia	100%	133,95	100%	107,98	100%	133,95	100%	107,98	100%	107,98	100%	591,84	BPKAD															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Target	Rp. Juta	
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			11 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	Data tidak tersedia	100%	2.419,68	100%	5.407,50	100%	3.419,68	100%	5.364,50	100%	6.319,50	100%	22.930,85	BPKAD
			12 PROGRAM ASURASNI BARANG MILIK DAERAH	Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover Asuransi selama satu tahun	Data tidak tersedia	2 jenis polis asuransi	2.000,68	2 jenis polis asuransi	2.000,58	2 jenis polis asuransi	2.000,68	2 jenis polis asuransi	2.000,58	2 jenis polis asuransi	2.000,58	2 jenis polis asuransi	10.003,11	BPKAD
			BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG					27.306,81		45.960,23		39.548,78		43.899,13		48.063,94		204.778,89
			08 PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.	Jumlah Lembaga Subak yang dilestarikan	214 Subak	214 Subak	13.537,14	214 Subak	17.600,87	214 Subak	16.616,40	214 Subak	16.645,47	214 Subak	16.733,40	214 Subak	81.133,28	Bapenda
			09 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah jenis pajak yang dikelola dalam rangka peningkatan PAD	10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	13.769,67	10 Jenis Pajak	28.359,35	10 Jenis Pajak	22.932,39	10 Jenis Pajak	27.253,65	10 Jenis Pajak	31.330,55	10 Jenis Pajak	123.645,61	Bapenda
		05	FUNGSI KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				7.454,98		28.607,90		25.541,82		27.666,89		30.162,45		119.434,04	
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				7.454,98		28.607,90		25.541,82		27.666,89		30.162,45		119.434,04	
			03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Kehadiran Pegawai Yang Mentaati Jam Kerja	80%	96%	36,41	97%	15.062,58	98%	8.495,60	99%	9.202,43	99%	10.032,49	99%	42.829,51	BKPSDM
			05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Pegawai Yang Mendapat Pendidikan, Pelatihan Dan BinteK/Sejenisnya Di Pemerintah Kabupaten Badung	12%	96%	5.841,86	97%	12.070,51	98%	14.579,36	99%	15.792,36	100%	17.216,83	100%	65.500,93	BKPSDM
			06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Akuntabilitas Kinerja	73	76,55	205,92	76,80	243,30	78,00	215,64	80,05	233,58	80,10	254,65	75	1.153,09	BKPSDM
			11 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Yang Terisi	100%	72,50%	1.186,39	74,00%	952,45	75,50%	1.047,70	76,00%	1.134,87	76,50%	1.237,23	76,50%	5.558,65	BKPSDM
			12 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Dapat Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	51,35	100%	178,99	100%	193,58	100%	209,69	100%	228,60	100%	862,21	BKPSDM
			13 PROGRAM PENINGKATAN SDM	Prosentase Akurasi Update Data Kepegawaian	Data tidak tersedia	96%	133,05	97%	57,59	99%	919,02	99%	995,48	100%	1.085,27	100%	3.190,40	BKPSDM
			14 PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase Sasaran Kinerja Asn Yang Berkinerja Baik	Data tidak tersedia	96%	0,00	97%	42,48	98%	90,92	99%	98,49	99%	107,37	99%	339,25	BKPSDM
			04 FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.382,47		8.248,64		8.127,18		8.486,32		9.597,92		37.842,53	
			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.382,47		8.248,64		8.127,18		8.486,32		9.597,92		37.842,53	
			15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya Data dan Informasi Yang Memadai	0%	100%	-	100%	75,35	100%	540,42	100%	308,50	100%	130,20	100%	1.054,46	Balitbanq
			26 PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan	0	12 Bulan.	3.210,85	12 Bulan.	6.871,57	12 Bulan.	6.242,47	12 Bulan.	6.699,11	12 Bulan.	7.841,13	12 Bulan.	30.865,13	Balitbanq
			28 PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Tercapainya pengembangan ilmu pengetahuan dan	12 Bulan.	12 Bulan.	171,62	12 Bulan.	1.301,72	12 Bulan.	1.344,29	12 Bulan.	1.478,72	12 Bulan.	1.626,59	12 Bulan.	5.922,93	Balitbanq

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja pemerintah daerah berkenaan.

Tabel 9.1 berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Daerah.

Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Badung

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1.	Pertumbuhan PDRB	7,07	7,64	6,82	6,97	6,24 - 6,58	7,2 - 7,6	7,75 - 8,18	7,91 - 8,35	8,2 - 8,65	8,5 - 8,97	8,5 - 8,97
1.2.	Laju inflasi provinsi	3,75	4,71	7,35	8,03	2,70	4,38 - 4,85	4,3 - 4,75	4,21 - 4,65	4,12 - 4,55	4,03 - 4,45	4,03 - 4,45
1.3.	PDRB per kapita	39,80	41,79	43,58	45,56	44,97 - 49,7	49,3 - 54,49	52,05 - 57,53	55,07 - 60,87	58,48 - 64,63	62,3 - 68,86	62,3 - 68,86
1.4.	Indeks Gini	0,3385	0,3258	0,3468	0,3404	0,3694 - 0,4082	0,3377 - 0,3732	0,31 - 0,3427	0,3251 - 0,3593	0,3319 - 0,3669	0,3379 - 0,3735	0,3379 - 0,3735
1.5.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	19,20	18,75	15,12	18,64	18,8 - 20,78	19,46 - 21,51	20,04 - 22,15	20,43 - 22,58	20,9 - 23,09	21,35 - 23,6	21,35 - 23,6
1.6.	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	2,62	2,16	2,46	2,54	2,39 - 2,64	2,34 - 2,59	2,31 - 2,56	2,29 - 2,53	2,27 - 2,51	2,24 - 2,48	2,24 - 2,48
1.7.	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,07	7,64	6,82	6,97	6,24 - 6,58	7,2 - 7,6	7,75 - 8,18	7,91 - 8,35	8,2 - 8,65	8,5 - 8,97	8,5 - 8,97
1.8.	Laju inflasi (%)	2,33	3,59	7,67	7,31	2,34 - 2,58	3,99 - 4,41	3,91 - 4,32	3,83 - 4,23	3,75 - 4,14	3,67 - 4,06	3,67 - 4,06
1.9.	PDRB Konstan Th. 2010 (Triliyun)	22,32	24,03	25,67	27,46	27,72 - 30,64	31,72 - 35,06	34,19 - 37,79	36,91 - 40,8	39,95 - 44,16	43,36 - 47,93	43,36 - 47,93
1.10.	PDRB berlaku (Triliyun)	23,51	27,20	31,79	37,06	39,22 - 43,35	50,99 - 56,35	58,44 - 64,59	67,01 - 74,06	76,94 - 85,04	88,48 - 97,79	88,48 - 97,79
1.11.	PDRB per kapita (ADHB)	41,91	47,31	53,97	61,49	66,64 - 67,31	82,99 - 83,82	93,18 - 94,12	104,72 - 105,77	117,95 - 119,14	133,15 - 134,49	133,15 - 134,49
	Fokus Kesejahteraan Sosial											
1.	IPM	76,66	77,26	77,63	77,98	78,14 - 82,08	78,76 - 82,74	79,06 - 83,06	79,38 - 83,39	79,71 - 83,73	80,05 - 84,1	80,05 - 84,1
2.	Angka usia harapan hidup	73,91	74,05	74,19	74,30	74,31 - 78,03	74,5 - 78,23	74,58 - 78,31	74,65 - 78,38	74,73 - 78,47	74,81 - 78,56	74,81 - 78,56
3.	Pengeluaran per Kapita (Rp. 000)	15.507,72	15.794,76	16.024,52	16.080,47	16326,87 - 17229,36	17024,24 - 17965,28	17612,16 - 18585,7	8007,89 - 19003,31	18512,87 - 19536,19	18935,29 - 19981,96	18935,29 - 19981,96
4.	IPG	93,25	93,89	94,68	94,88	95,09 - 95,61	95,9 - 96,43	96,23 - 96,76	96,62 - 97,15	97,02 - 97,56	97,45 - 97,98	97,45 - 97,98
5.	IDG				55,24	55,37 - 58,16	55,84 - 58,66	56,03 - 58,86	56,26 - 59,1	56,49 - 59,35	56,74 - 59,61	56,74 - 59,61
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat											
1.	Pendidikan											
1.1.	Angka melek huruf (BPS)	92,96	93,01	93,93	95,71							
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (BPS)	8,96	9,07	9,18	9,29							
1.3.	Angka partisipasi kasar	115,01	129,23	117,73	120,37	118,89	100	100	100	100	100	100
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	99,95	99,96	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.	Angka Partisipasi Murni											
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,87	103,67	98,62	99,12	99,98	100	100	100	100	100	100
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	91,28	101,62	91,59	92,1	109,95	100	100	100	100	100	100
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	78,04	91,09	83,69	83,72	104,44	100	100	100	100	100	100
1.6.	PAUD :											
1.6.1.	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	96,02	96,46	100,45	102,93	103,06	100	100	100	100	100	100
1.7.	Pendidikan Dasar 9 Tahun :											
1.7.1.	APK SD/MI (%)	110,04	117,84	112,31	113,16	113,57	100	100	100	100	100	100
1.7.2.	APM SD/MI (%)	96,87	103,67	98,62	99,12	99,98	100	100	100	100	100	100
1.7.3.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%)	100	94,6	97,91	96,99	99,37	100	100	100	100	100	100
1.7.5.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.7.6.	Setiap sekolah memiliki minimal 6 ruang kelas (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.7.7.	Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.7.8.	Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%)	55,72	60,15	64,57	69,00	73,43	82,43	86,86	91,28	95,71	100	
1.7.9.	Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%)	70	72	74	77	80	86	88	92	96	99	
1.7.10.	Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.7.11.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	36	37	38	39	80	85	87	90	95	100	
1.7.12.	Setiap Sekolah memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi (%)	42	43	44	45	46	70	80	90	95	100	
1.7.13	APK SMP/MTs (%)	122,57	137,63	125,12	128,14	123,16	100	100	100	100	100	
1.7.14.	APM SMP/MTs (%)	91,28	101,62	91,59	92,19	109,95	100	100	100	100	100	
1.7.15.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,01	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.16.	Angka Melanjutkan ke SMA/SMK/MA (%)	89,27	94,89	98,44	100	95,93	100	100	100	100	100	
1.7.17.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	99,97	99,99	99,99	100	100	100	100	100	100	
1.7.18.	Rasio Rombel / Kelas 1:1 (%)	1,4	1,38	1,36	1,33	1,3	1,15	1,1	1,05	1,05	1	
1.7.19.	Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.7.20.	Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%)	99,89	99,97	99,99	100	100	100	100	100	100	100	
1.7.21.	Setiap sekolah memiliki Lab ipa lengkap dengan prabotnya (%)	99,98	99,99	99,76	98,97	98,08	100	100	100	100	100	
1.7.22.	Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit)	99,79	99,88	99,99	100	100	100	100	100	100	100	
1.7.23.	Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%)	84	86	90	95	97	98	98,5	99	99,5	100	
1.7.24.	Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.7.25.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	48	49	50	55	80	85	87	90	95	100	
1.7.26.	Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%)	23	24	25	26	27	70	80	90	95	100	
1.8.	Pendidikan Menengah :											
1.8.1.	APK SMA/MA/SMK (%)	112,42	132,21	115,75	119,81	119,95	0	0	0	0	0	
1.8.2.	APM SMA/MA/SMK (%)	78,04	91,09	83,69	83,72	104,44	0	0	0	0	0	
1.8.3.	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%)	0	0,12	0,06	0,01	0	0	0	0	0	0	
1.8.4.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	100	100	99,98	100	100	0	0	0	0	0	
1.8.5.	Rasio Rombel / Kelas 1 : 1 (%)	1,35	1,29	1,28	1,26	1,3	0	0	0	0	0	
1.8.6.	Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%)	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	
1.8.7.	Setiap sekolah memiliki perpustakaan lengkap dengan prabotnya (%)	81	81,85	81,95	81,99	82,93	0	0	0	0	0	
1.8.8.	Setiap sekolah memiliki Lab IPA lengkap dengan prabotnya (%)	80,97	80,49	81,75	81,99	82,11	0	0	0	0	0	
1.8.9.	Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit)	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	
1.8.10.	Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%)	99,06	99,99	99,99	99,87	99,88	0	0	0	0	0	
1.8.11.	Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
1.8.12.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	45	46	47	48	49	0	0	0	0	0	
1.8.13.	Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%)	45	46	47	48	49	0	0	0	0	0	
1.9.	Pendidikan Non Formal :											
1.9.1	Angka Kelulusan Paket A (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.9.2.	Angka Kelulusan Paket B (%)	100	100	98	100	99	100	100	100	100	100	
1.9.3.	Angka Kelulusan Paket C (%)	100	100	93	100	100	100	100	100	100	100	
1.10.	Manajemen Pelayanan Pendidikan :											
1.10.1.	Persentase Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.10.2.	Persentase SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.10.3.	Persentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.10.4.	Persentase SMA/SMK/MA Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	
1.11.	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan :											

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.11.1.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	82,50	89,19	92,50	94,40	91,22	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00
1.11.2.	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	85,90	88,00	90,00	93,30	91,81	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	100,00
1.11.3.	Persentase Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	88,00	89,50	90,00	90,90	92,63	-	-	-	-	-	-
2.	Kesehatan :											
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	0,951/1000	0,997/ 1000	0,997/ 1000	0,995/ 1000							
2.2.	Angka usia harapan hidup	71,85	71,9	71,91	74,3	74,3	74,6	74,7	74,8	74,9	75	75
2.3.	Prevalensi balita gizi buruk	0,21	0,11	0,42	0,25	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
2.4.	Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya :											
2.4.1	Persentase Puskesmas kondisi baik (%)	90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4.2	Cakupan Puskesmas dan Pustu (per 1000 penduduk)	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
2.5.	Pengelolaan BLUD RSUD :											
2.5.1.	Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat	-	85%	87,50%	90%	90%	92%	93%	94%	95%	96%	96%
2.5.2.	Kinerja Pelayanan	-	61,75%	66,13%	61,63%	65%	76%	77%	78%	79%	80%	80%
2.5.3.	Kinerja Keuangan	-	83%	74,50%	79%	76,50%	80%	81%	82%	83%	85%	85%
2.6.	Pengawasan Obat dan Makanan :											
2.6.1.	Cakupan TTU yang memenuhi syarat (%)	90,50	91,75	92,15	92,50	93,75	94,75	95,20	96	96,50	96,75	96,75
2.7.	Pengembangan Tenaga Kesehatan :											
2.7.1.	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	36,5	26,2	55,3	110	110	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.7.2.	Rasio Tenaga Medis (per 1000 penduduk)	78,2	73,5	73,3	61,72	61,72	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.9.	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan											
2.9.1.	Persentase RS swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemda (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.2.	Persentase Faskes swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS	0	0	0	40%	45%	50%	55%	80%	90%	100%	100%
2.10.	Upaya Kesehatan Masyarakat :											
2.10.1.	Cakupan pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin (%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
2.11.	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	74,5	77,39	78	79	80,16	80,25	80,5	80,75	81	81	81
2.11.1	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)	0	0	0	2%	3%	20%	30%	40%	50%	53%	53%
2.11.2.	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	0	0	0	2%	3%	20%	30%	40%	50%	53%	53%
2.12.	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.1.	Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization) (%)	3	3	4	7	3	3	3	3	3	3	3
2.12.2.	AFP rate per 10.000 penduduk< 15 tahun	2,13	1,46	6,8	1,5	2,5						
2.12.3.	Penemuan penderita Pneumonia balita (%)	48,9	40,2	45,2	53,8	45,6	100	100	100	100	100	100
2.12.4.	Penemuan pasien baru TB BTA positif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.5.	Penderita DBD yang ditangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.6.	Penemuan penderita Diare (%)	<0.5	<0.5	<0.5	0,43	0,43	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
2.12.7.	Penemuan dan penanganan HIV AIDs (%)	<0.5	<0.5	<0.5	0,43	0,43	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.6
2.13.	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak											
2.13.1.	Angka usia harapan hidup (tahun)	106,7	132	98,91	43,7	99,89	93,83	90,83	87,83	85		
2.13.2.	Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH	4,27	2,83	2,54	4,09	2,99	3,74	3,37	2,99	2,99	2,99	2,99
2.13.3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH	5,1	5,2	3,1	2,8	4,7	3,62					
2.13.4.	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)	96,14	90,34	93,28	95,3	90,36	93	94	95	95	95	95
2.13.5.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) (%)	60,34	54,93	80,62	73,23	74,21	77	78	80	80	80	80
2.13.6.	Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani (%)	99,09	92,03	95,7	99,72	94,24	92	93	94	95	97	97
2.13.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang	97,77	90,44	99,97	95,66	93,76	98,3	98,4	98,5	98,6	98,6	98,6
2.13.8.	Cakupan pelayanan ibu nifas (%)	65,43	50,73	80,76	87,77	71,98	72,5	73	75	80	80	80
2.13.9.	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	105,87	96,42	96,77	97,88	96,57	96,62	96,64	96,65	96,67	96,97	96,97
2.13.10.	Cakupan kunjungan bayi (%)	105,87	96,42	96,77	97,88	96,57	96,62	96,64	96,65	96,67	96,97	96,97
2.14.	Perbaikan Gizi Masyarakat	3,79	3,27	3,85	3,01	2,97	12,3	12,1	11	10	10	10
2.14.1.	Persentase Balita gizi kurang (%)	13,1	9,96	8,69	8,39	10,53	20	20	20	20	20	20
2.14.2.	Prevalensi Balita Stunting (%)	76,29	78,06	80,77	84,44	86,02	84	85	85	85	85	85
2.14.3.	Cakupan Pelayanan Anak Balita (D/S) (%)	0,21	0,11	0,42	0,16	0,21	12,3	12,1	11	10		
2.14.4.	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.14.5.	Cakupan Balita Gzi Buruk mendapat perawatan (%)	61,34	64,54	66,69	68,2	70,29	44	47	50	50		
2.14.6.	Bayi Usia 0-6 Bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
2.14.7.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anakusia 6-24 bulan	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.8.	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan sederajat (%)	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14.9.	Rasio Posyandu per 1.000 balita	90,91	92,92	93,29	94,35	95,91	95,92	99,29	99,35	99,45	100	100
2.15.	Pengembangan Lingkungan Sehat	99,88	99,88	99,89	99,92	99,95	100	100	100	100	100	100
2.15.1.	Persentase Keluarga memiliki Jamban (%)	90,91	92,92	93,29	94,35	95,91	95,92	99,29	99,35	99,45	100	100
2.15.2.	Persentase Keluarga memiliki Sarana Air Bersih (%)	99,88	99,88	99,89	99,92	99,95	100	100	100	100	100	100
2.16	Persentase Sarana dan Prasarana sesuai standar kelas rumah sakit	-	-	-	-	80%	82%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Ketenagakerjaan											
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja	54,53	54,49	56,18	53,58	0	0	0	0	0	0	0
4.	Perumahan (Bidang Praswil)											
4.1.	pengembangan perumahan :											
4.1.1.	Rumah layak huni (%)	74,67%	75,36%	76,05%	76,74%	77,43%	79,50%	80,19%	80,88%	81,57%	82,26%	82,26%
4.3.	Lingkungan sehat perumahan						91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
4.3.1.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih (%)	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
4.3.2.	Persentase Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	88,00%	86,00%	86,96%	82,77%	75,62%	87,43%	90,43%	93,43%	96,43%	100%	100%
5.	Penataan Ruang (Bidang Praswil) :											
5.1.	Perencanaan Tata Ruang :											
5.1.1.	Jumlah rencana detail tata ruang kota yang telah disusun (buah)	-	-	-	-	6	1	2	2	2	2	2
5.1.2.	Terlaksananya perjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi public yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan pemanfaatan ruang.	-	-	-	-	-	2	4	4	4	4	4
5.2.	Pemanfaatan Ruang:											
5.2.2.	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rinciannya	-	-	3000	5000	4000	4000	3000	2000	2000	1500	1500
6.	Perencanaan :											
6.1.	Pengembangan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan :											
6.1.1.	Hasil Evaluasi RKPD (dokumen)	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.1.2.	Hasil Evaluasi RPJMD (dokumen)	-	-	Ada	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Perencanaan Pembangunan Daerah :											
6.2.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.4	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Perhubungan :											
7.1.	Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan :											
7.1.1.	Jumlah Terminal Bis	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
7.2.	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ :											
7.2.1.	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ berfungsi dengan baik (%)	87,0%	87,2%	87,4%	88,6%	89,9%	92,0%	93,8%	95,2%	96,8%	98,4%	98,4%
7.3.	Peningkatan Pelayanan Angkutan :											
7.3.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	372750	1552142	1307679	1279597	695433	920000	966000	1014300	1065015	1118265,75	1118265,75
7.3.2.	Rasio ijin trayek per jumlah penduduk	0,0000075	0,0000071	0,0000051	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050	0,0000050
7.3.3.	Persentase Angkutan darat terhadap penumpang (%)	44,5%	37,0%	59,0%	64,0%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%	37,0%
7.4.	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor :											
7.4.1.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	46 menit	46 menit	46 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit
7.4.2.	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	7138	10500	12285	13689	13655	15055	15808	16598	17428	18300	18300
8.	Lingkungan Hidup (Bidang Praswil) :											

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014		Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	
8.1.	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup :											
8.1.1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.1.2.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.1.3.	Pencemaran status mutu air (%)	73,33	92,86	79,22	76,25	75,00	77,00	78,00	79,00	79,00	79,00	79,00
8.1.4.	Penegakan hukum lingkungan (%)	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
8.2.	Peningkatan Pengendalian Polusi :											
8.2.1.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)	-	-	100%	100%	100	100	100	100	100	100	100
8.3.	Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam :											
8.3.2.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.3.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8.4.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) :											
8.4.1.	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha)	8,47 Ha	8,54 Ha	10,58 Ha	12,20 Ha	12,30 Ha	12,65 Ha	12,72 Ha	13,08 Ha	14,03Ha	14,50 Ha	14,50 Ha
8.5.	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup :											
8.5.1.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)	-	-	-	42.56%	100	100	100	100	100	100	100
8.6.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan :											
8.6.1.	Prosentase Cakupan pelayanan sampah	25,00%	25,00%	27,00%	26,00%	30,00%	37,00%	42,00%	47,00%	52,00%	57,00%	57,00%
8.6.2.	Prosentase Sampah yang Tertangani	72,9	89,3	97,3	97,9	78,5	89,8	91,1	92,1	93,3	94,4	94,4
9.	Pertanahan :											
9.1.	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah :											
9.1.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	422 bidang	474 bidang	839 bidang	888 bidang	1007 bidang	1156 bidang	0	0	0	0	1156 bidang
9.2.	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan :	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	100,00%
9.2.1.	Penyelesaian kasus tanah Negara	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	4 obyek	100,00%
10.	Kependudukan Dan Catatan Sipil											
10.1.	Penataan administrasi kependudukan :											
10.1.1.	Kepemilikan KTP (%)	99%	99%	98%	99%	90,02%	92%	94%	95%	97%	100%	100%
10.1.2.	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) (%)	-	97%	98%	99%	100%						
10.1.3.	Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	99,43%		98%	99%	100%						
10.1.4.	Rasio bayi berakte kelahiran	70%	86%	90%	92%	84,33%	85%	87%	89%	90%	92%	92%
10.1.5.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	74%	77%	60%	10%	80%	85%	90%	93%	89%	95%	95%
10.1.6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	99%	99%	98%	99%	90%	94%	95%	98%	99%	100%	100%
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Bidang Litbang)											
11.1.	Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan :											
11.1.1.	Jumlah organisasi perempuan aktif (%)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
11.2.	penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak :											
11.2.1.	Jumlah Focal Point SKPD yang aktif (unit)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
11.2.2.	Keterampilan perencana SKPD mengenai cara penyusunan PPRG (SKPD)	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
11.2.3.	Jumlah Forum Anak Kabupaten & Kecamatan (kelompok)	-	-	1	1	1	7	7	7	7	7	7
11.2.4.	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif (%)	-	1	1	1	63	63	63	63	63	63	63
11.3.	keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak :											
11.3.1.	Jumlah kebijakan yang mendukung pelaksanaan PUG dalam bentuk perda dan perbup (buah)	3	2	1	1	7	7	1	1	1	1	12
11.3.2.	Jumlah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak dalam bentuk perda dan Perbup (buah)	6	57	67	-	75	-	-	-	-	-	-
11.4.	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak :											
11.4.1.	Jumlah P2TP2A ditingkat kabupaten dan kecamatan (unit)	1	1	1	1	13	35	40	50	55	63	63

[illegible]

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
13.4.1.	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	75%	87,5%	87,5%	100%	100%	100%
13.5.	Pembinaan panti asuhan/ panti jompo :											
13.5.1.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
13.6.	Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) :	758	2082	1585	1899	2004	450	450	450	450	450	100%
13.6.1.	Jumlah Pengemis yang terbina (jiwa)	556	410	430	346	239	400	400	400	400	400	400
13.7.	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial :											
14.	Ketenagakerjaan (Bidang Kersos)											
14.1.	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja :											
14.1.1.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.1.2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.1.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.2.	Peningkatan Kesempatan Kerja :											
14.2.3.	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (orang)	1583	1223	451	653	401	600	650	675	700	725	#REF!
14.3.	Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan :											
14.3.1.	Jumlah tenaga kerja kepesertaan Jamsostek (orang)	-	-	-	19100	13102						
14.3.4.	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	17	13	17	15	19	16	18	18	19	19	19
14.3.5.	Persentase perusahaan menerapkan Keselamatan dan perlindungan (%)	100	100	92,57	89,22	65,45	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.3.6.	Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	100	100	86,11	76,47	83,24	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Koperasi Dan Usaha Kecil menengah :											
15.1.	Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah :											
15.1.1.	Jumlah orang yang dilatih pelatihan kewirausahaan	40 UKM	40 UKM	40 UKM	80 Orang	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	120 orang
15.1.2.	Jumlah koperasi dan UMKM bermitra (unit)	14	19	19	19	19	20	20	20	20	20	100
15.2.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah :											
15.2.1.	Jumlah UMKM yang telah memiliki ijin usaha (unit)	980	1.053	377	1.163	1.108	1.218	1.273	1.328	1.383	1.438	6.640
15.2.2.	Jumlah UMKM yang mampu mengakses permodalan usaha (unit)	61	92	236	225	230	240	242	246	248	250	1.226
15.3.	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif :											
15.3.1.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	14.754	15.862	17.162	18.366	19.173	21,327	22,404	23,481	24,558	25,635	25,635
15.3.2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap jumlah UMKM (%)	84,74	85,95	89,18	66,83	81,99	83,05	83,65	83,90	84,35	85,10	85,10
15.4.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi :											
15.4.1.	Persentase koperasi aktif (%)	88,87	90,00	78,00	78,92	81,51	47.56%	56.01%	65.51%	75.72%	86.99%	100%
15.4.2.	Persentase koperasi sehat (%)	14,81 (40)	14,81 (40)	18,51 (50)	14,81 (40)	67,73 (466)	32,85%	45,98%	59,12%	72,26%	85,39%	100%
15.4.3.	Jumlah koperasi yang telah dilatih prinsip-prinsip koperasi (koperasi)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
16.	Penanaman Modal (Bidang Ekonomi) :											
16.1.	Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi :											
16.1.1.	Jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali
16.1.2.	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	25 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	15 bidang usaha	75 bidang usaha
16.2.	Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi :											
16.2.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (investor)	689	777	785	1.459	5.739	2.231	2.357	2.496	2.649	2.817	12.550
16.2.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (rupiah)	3.173.814.437.239,00	7.180.810.126.088,00	6.147.499.450.989,00	2.618.136.988.815,00	6.329.353.227.774,00	2.419.842.370,05	2.871.927.176,75	3.359.197.642,05	3.899.203.310,35	4.493.089.023,15	17.043.259.522,35
16.2.3.	Jumlah tenaga kerja terserap	4.3	8.73	21.68	6.49	6.34	9.51	6,00	6,00	6,00	6,00	33.51
17.	Kebudayaan (Bidang Kersos) :											

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
17.1.	Pengembangan Nilai Budaya :											
17.1.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali
17.2.	Pengelolaan Kekayaan Budaya :											
17.2.1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	-	52 situs	52 situs	52 situs	52 situs	54 situs	54 situs	56 situs	58 situs	58 situs
17.3.	Pengelolaan Keragaman Budaya :											
17.3.1.	Jumlah Kelompok Seni	2334 sekaa/klp	2334 sekaa/klp	2334 sekaa/klp	2334 sekaa/klp	2334 sekaa/klp	2353 sekaa/klp	2359 sekaa/klp	2365 sekaa/klp	2371 sekaa/klp	2378 sekaa/klp	2378 sekaa/klp
17.3.3.	Cakupan Kajian Seni	46 sekaa	46 sekaa	58 sekaa	70 sekaa	86 sekaa	104 sekaa	110 sekaa	114 sekaa	118 sekaa	123 sekaa	123 sekaa
17.3.4.	Cakupan Fasilitas Seni	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat	700 tempat
17.3.5.	Cakupan Gelar Seni	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	25 Kegiatan
17.3.6.	Misi Kesenian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan
17.3.7.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	75 orang
17.3.8.	Cakupan Organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi	3 organisasi
18.	Pemuda Dan Olah Raga :											
19.1.	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda :											
18.1.1.	Jumlah organisasi pemuda	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
18.1.2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	11	13	15	11	11	11	11	11	11	11
18.4.	Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga :											
18.4.1.	Jumlah organisasi olahraga	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
18.4.2.	Jumlah kegiatan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
18.4.3.	Jumlah prestasi olahraga	11 Cabor	11 Cabor	11 Cabor	11 Cabor	11 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor	16 Cabor
18.5.	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga :											
18.5.1.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.5.2.	Jumlah Lapangan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
19.	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri (Bidang Stamonev):											
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Orang)	60	46	40	40	40	65	70	75	80	85	375
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah (orang)	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	5
19.4.	Tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilu (%)	92%	93%	94%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19.5.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	33,01	33,18	33,47	31,71	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	155,9
19.6.	Jumlah kasus Penegakan PERDA	1712 pelanggaran	1660 pelanggaran	1608 pelanggaran	1560 pelanggaran	1500 pelanggaran	1000 pelanggaran	900 pelanggaran	800 pelanggaran	700 pelanggaran	600 pelanggaran	600 pelanggaran
19.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,55	0,65	0,7	0,8	0,9	0,9
20.	Otonomi Daerah :											
20.1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	16,66%	16,66%	33,33%	67,00%	67,00%	67,00%	83,33%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%
20.2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manaiemen Kebakaran (WMK) (menit)	80,40%	88,14%	88,32%	96,33%	91,95%	92,05%	92,10%	92,15%	92,20%	92,25%	92,25%
20.3.	Unit pelayanan yang telah dilakukan survey Indeks Kepuasan Layanan	2	3	5	7	41	30	30	30	30	30	30
20.4.	Masyarakat (unit)	22 Desa	32 Desa	42 Desa	54 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa	62 Desa
20.7.	Persentase SKPD memiliki dan menerapkan SOP/SPP (%)				5,66%	37,74%	26,00%	50,00%	73,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.7.1	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	34,27	55,31	65,92	65,92	69,12	76,20	76,80	77,40	78,20	80,00	80,00
20.8.	Status audit Keuangan BPK	WTP	WTP	OTW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.9.	Persentase SKPD yang melakukan pengadaan barang/jasa dengan e-procurement melalui LPSE (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.10.	Tersusunnya LKJP Bupati	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.11.	Tersusunnya LPPD Bupati	70 buku	70 buku	70 buku	70 buku	70 buku	47 buku	47 buku	47 buku	47 buku	47 buku	47 buku
20.12.	Persentase Desa tertib administrasi ADD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.13.	Persentase desa/kelurahan yang tersalurkan Raskin (%)	100	98	97	95	92	92	92	92	92	92	92
20.14.	Inteprestasi evaluasi AKIP Kabupaten	C	CC	CC	B	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
20.16.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (trilyun rupiah)	1406	1868	2279	2720	2938	4.036	4.597	5.018	5.475	5.856	5.856

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
21.	Ketahanan Pangan :											
21.1.	Peningkatan Ketahanan Pangan :											
21.1.1.	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)	68,95	62,92	49,12	41,03	33,24	35	40	50	60	70	70
21.1.2.	Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	2246,00	2145,00	2058,00	2160,00	2093,00	210,00	2150,00	2200,00	2225,00	2250,00	2250,00
21.1.3.	Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	40,96	42,28	38,66	46,03	45,58	47	47	48	49	50	50
21.1.4.	Penguatan Cadangan Pangan (%)	68,45	62,96	49,12	41,03	33,24	35	40	45	50	55	55
21.1.5.	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%)	93,88	95,25	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21.1.6.	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	0	0	100	100	85	95	100	100	100	100	100
21.1.7.	Stor Pola Pangan Harapan (SPPH)	0	0	78,16	95,91	51	96,5	97	97,5	98	98,5	98,5
21.1.8.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	0	0	0	100	85	95	100	100	100	100	100
21.1.10.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
21.1.11.	Ketersediaan pangan utama (%)	68,95	62,92	49,12	41,03	33,24	35	40	50	60	70	70
21.1.12.	Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hr)	0	0	2115	2167	2067	2125	2150	2175	2200	2225	2225
21.1.13.	Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr)	0	0	65	76,1	66,88	70	72,5	75	77,5	80	80
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bidang Litbang):											
22.1.	Meningkatnya kapasitas lembaga desa tentang perencanaan partisipatif	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
22.2.	Tersusunnya RPJMDes	43 desa	43 desa	43 desa	43 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
22.3.	Meningkatya kemampuan dalam pengelolaan dan teknik pendataan profil desa	12 desa/kel.	24 desa/kel.	37 desa/kel.	47 desa/kel.	52 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.
22.4.	Tersusunnya Profil Desa/Kelurahan	12 desa/kel.	24 desa/kel.	37 desa/kel.	40 desa/kel.	42 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.
22.5.	Meningkatnya lembaga dalam penyusunan perencanaan yang resonsif gender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22.6.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa	46 Desa
22.7.	Meningkatnya LKM berprestasi	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel	4 Desa, 1 Kel
22.8.	Terbangunnya infrastruktur desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
22.9.	Terbangunnya kantor desa yang layak	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa
22.10.	Terbentuknya BUMDES	0	0	0	0	12 BUMDesa	13 BUMDesa	10 BUMDesa	8 BUMDesa	6 BUMDesa	9 BUMDesa	46 BUMDesa
23.	Statistik (Bidang Stamonev):											
23.1.	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.3.	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi	2,33	3,59	7,67	7,31	2,7						
23.4.	Sistem Informasi Profil Daerah											
23.5.	Buku "Kecamatan dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	Komunikasi Dan Informatika (Bidang Praswil):											
24.1.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :											
24.1.1.	Jumlah Kegiatan diseminasi Informasi Nasional melalui media massa seperti majalah, radio, dan televisi; (pertahun)	1196 adv	1646 adv	2064 adv	2472 adv	3036 adv	3600 adv	3650 adv	3700 adv	3750 adv	3800 adv	18500 adv
24.1.2.	Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi Nasional melalui media baru seperti website (media online) (setiap hari)	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari	rata-rata 2 kegiatan/hari
24.2.	Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi :											
24.3.	Kerjasama informsi dan media massa :											
24.3.1.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24.3.2.	Jumlah surat kabar nasional/lokal (media)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
24.3.3.	Jumlah Web site milik pemerintah daerah	43	43	62	62	62	62	62	62	62	62	62
25.	Perpustakaan (Bidang Litbang) :											
25.1.	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan:											
25.1.1.	Jumlah perpustakaan	336	336	428	440	438	439	439	439	439	439	439

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014		Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	
25.1.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	817	1024	4621	3507	1396	5100	5600	6200	6800	7500	31200
25.1.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	31118	34579	43684	50043	52633	65819	69969	74269	78769	83469	83469
26.	Pertanian :											
26.1.	Produktivitas Padi	42,78	49,66	56,49	57,27	36,19	47,4	47,41	47,42	47,43	47,44	47,44
26.2.	Produktivitas Jagung	12,93	12,53	13,65	14,48	15,12	15,10	15,15	15,18	15,20	15,20	15,2
26.3.	Produktivitas Kedelai	18,50	14,88	12,30	12,86	12,76	13,32	13,33	13,35	13,38	13,40	13,4
26.4.	Produktivitas K.Tanah	10,00	-	8,57	10,00	-	-	-	-	-	-	-
26.5.	Produktivitas K.Hijau	209,84	124,78	213,37	218,46	243,51	153,55	153,56	153,57	153,6	153,6	153,6
26.6.	Produktivitas Ubi Kayu	155,31	181,79	186,19	240,35	174,76	154,50	154,50	154,50	154,50	154,50	154,5
26.7.	Produktivitas Ubi jalar	235	228	227	226	362	398	414	430	447	465	2154
26.8.	Produksi Kakao	1954	2149	1977	1977	361,799	2388	2627	2685	2792	3071	13563
26.9.	Produksi kelapa	0	0	0	2057,609	0	0	0	0	0	0	
28.10.	Produksi tebu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.11.	Produksi kapas	0	0	0	149,945	0	0	0	0	0	0	
26.12.	Produksi kemiri	17	22	23	23	29	31,5	33	34,5	36	37,5	172,5
26.13.	Produksi cengkeh	30	32	61	77	93	58	58	58	58	58	58
26.14.	Cakupan bina kelompok petani (kelompok)	30 klp	33 klp	36 klp	39 klp	42 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	48 klp
26.15.	Jumlah komoditas unggulan yang dipasarkan keluar daerah (jenis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.16.	Kelompok tani yang memperoleh bantuan alat pertanian (kelompok)	-	1	4	17	-	6	11	10	10	10	10
26.17.	Persentase kepemilikan KIT penyuluhan (%)											
26.18.	Jumlah populasi sapi	48.049	49.051	38.128	37.862	30.771	31.079	31.235	31.391	31.548	31.706	31.706
26.19.	Jumlah populasi kambing	897	620	720	807	893	902	906	911	916	921	921
26.20.	Jumlah populasi itik	-	-	92.173	97.332	90.971	91.883	92.342	92.804	93.268	93.734	93.734
26.21.	Jumlah populasi ayam	1.361.246	1.092.246	1.102.948	1.197.465	1.208.581	1.220.697	1.226.801	1.232.935	1.239.099	1.245.294	1.245.294
26.25.	Angka Kesakitan Ternak	6.750	6.500	7.500	15.000	12.000	6.750	6.500	6.300	6.000	5.000	37.550
26.26.	Jumlah Ternak yang diberikan vaksin	21.000	21.000	22.000	24.000	30.000	38.000	42.000	45.000	47.000	50.000	258.000
26.27.	Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak	6.750	6.500	7.500	15.000	12.000	6.750	6.500	6.300	6.000	5.000	37.550
27.	Kehutanan :											
27.2.	Luas lahan kritis yang tertutupi di luar kawasan hutan (Ha)	1.683,66	642,68	1.500,50	599,53	33,15	100	100	100	100	100	500
27.3.	Luas lahan kritis yang tertutupi di luar kawasan hutan (Unit)	331.496,00	127.436,00	297.100,00	112.575,00	2.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000
27.6.	Tertanamnya bibit tanaman kehutanan dalam rangka penghijauan lingkungan	15044	23150	525	4000	1000	20000	22000	24000	26000	28000	120.000
27.9.	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan	8	8	8	8	40	0	0	0	0	0	-
27.10.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang dampak kebakaran	830 Orang	831 Orang	832 Orang	833 Orang	3.320 Orang	2.616 Orang	2.616 Orang	2.616 Orang	2.616 Orang	13.080 Orang	13.080 Orang
28.	Pariwisata :											
28.1.	Kunjungan wisata (orang)	2.756.579	2.892.019	3.148.443	3.681.342	3.934.384	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	5.105.126	5.105.126
28.2.	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW	30%	30%	42%	44%	55%	-	-	-	-	-	-
28.3.	Persentase kunjungan wisatawan ke wilayah Kab. Badung	9,6%	4,7%	8,1%	14,5%	6,4%	27%	28%	29%	30%	31%	31%
28.4.	Persentase desa wisata yang aktif	-	22%	44%	67%	100%	-	-	-	-	-	-
29.	Perikanan Kelautan:											
29.1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.551,40	4.632,40	4.765,10	6.112,50	6.173,90	6.423,33	6.551,79	6.682,83	6.816,48	6.952,81	33.427,24
29.2.	Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Terbedayakan (KUB)	41	43	46	49	49	50	50	51	52	53	54
29.3.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	33.834,90	43.931,60	44.334,20	507,10	586,80	598,59	604,58	610,63	616,73	622,90	3.053,43
29.4.	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapat sarana Produksi Budidaya (Pokdakan)	24	11	16	12	9	5	5	5	5		
29.5.	Jumlah Produksi Ikan Olahan (Ton)	3.420	3.780	4.140	4.500	4.860	5.056	5.157	5.260	5.365	5.472	26.310,00
29.6.	Jumlah Poklahsar yang berkembang (kelompok)	7	7	13	18	23	29	32	35	38	41	41

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014		Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	
29.7.	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas) aktif	6	5	5	5	5	7	8	9	10	11	11
29.8.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (Unit)	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47
30.	Perdagangan :											
30.3.	Data Pengawasan UTTP	-	-	-	-	3500	400	400	400	400	2400	2400
30.4.1.	Unit Usaha	732	766	284	877	871	871	910	949	988	1027	1027
30.4.2.	Tenaga Kerja	3660	3830	1420	3560	4355	4330	4500	4670	4840	5010	5010
30.4.3.	Modal	85.104.534.660	524.853.101.211	252.413.559.153	161.170.291.869	117.060.303.908	228.120.358.160	239.526.376.068	250.932.393.976	262.338.411.884	273.744.429.792	273.744.429.792
30.5.1.	Unit Usaha	141	141	39	209	197	215	233	251	259	287	287
30.5.2.	Tenaga Kerja	1410	2115	702	5635	3940	4085	4180	4267	4304	4592	4592
30.5.3.	Modal	666.416.944.408	222.955.729.211	216.400.000.000	239.892.005.840	294.911.615.703	344.521.021.984	360.926.784.936	377.332.547.888	393.738.310.840	410.144.073.792	410.144.073.792
30.6.1.	Unit Usaha	10	8	2	14	3	4	6	8	10	12	12
30.6.2.	Tenaga Kerja	200	160	50	37	150	221	265	309	353	397	397
30.6.3.	Modal	538.659.294.408	100.991.986.327	170.000.000.000	397.646.017.794	124.747.132.665	158.784.759.216	198.480.949.020	238.177.138.824	277.873.328.628	17.569.518.432	17569518432
30.7.	Kontribusi Perdagangan dalam PDRB (%)	7,39	7,28	7,42	7,56	7,60	7,63	7,65	7,67	7,69	7,71	7,71
30.8.	Perdagangan	883	915	325	1102	1071	1770	1864	1214	1244	1300	1300
30.9.	Dagang Besar	10	8	2	13	3	7	7	7	7	7	7
30.10.	Dagang Menengah	141	141	39	377	197	758	785	200	210	220	220
30.11.	Dagang Kecil	732	766	284	712	871	1005	1072	1139	1205	1073	1073
30.12.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
31.	Perindustrian :											
31.1.	Perkembangan IKM				74,9	79,43	79,45	79,75	80,2	80,5	80,9	81,26
31.1.1.	Unit pelayananan yang telah dilakukan survei ikm			5	7	41	38	38	38	38	38	38
31.2.	Jumlah Unit Usaha (unit)	1055	1111	1148	1176	1205	132753	133025	1313	1340	1367	1367
31.3.	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	11282	11690	12393	12665	12937	1154646110	1154646110	133297	133569	133841	133841
31.4.	Nilai Produksi (000)	959049793	1001948167	1072840966	1093292252	1113743538	1154646110	1154646116	11175097396	1195548682	1215999968	1215999968
31.5.	Nilai Investasi (000)	4699752	4890528	4959392	492409765	133511884	143321310	148226023	153130736	158035449	162940162	162940162
31.6.	Sentra IK	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31.7.	KUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.8.	Kontribusi Perindustrian dalam PDRB	4,59	4,47	4,53	4,67	4,72	4,81	4,84	4,87	4,91	4,95	4,95
31.9.	Industri	815	859	904	297	948	978	1065	1152	1239	1326	1326
31.10.	Industri Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.11.	Industri Menengah	13	15	18	18	19	17	17	17	17	17	17
31.12.	Industri Kecil	802	844	886	909	929	961	1048	1135	1222	1309	1309
	Fokus Seni Budaya											
1	Jumlah klub olahraga	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
2	Jumlah gedung olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	ASPEK PELAYANAN UMUM											
	Fokus Layanan Urusan Wajib											
1.	Pendidikan :											
1.1.	Angka partisipasi kasar	115,01	129,23	117,73	120,37	118,89	100	100	100	100	100	100
1.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan	99,95	99,96	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3.	Angka Partisipasi Murni											
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,87	103,67	98,62	99,12	99,98	100	100	100	100	100	100
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	91,28	101,62	91,59	92,1	109,95	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.4.	PAUD :											
1.4.1.	APK PAUD (laki-laki dan perempuan)	96,02	96,46	100,45	102,93	103,06	100	100	100	100	100	
1.5.	Pendidikan Dasar 9 Tahun :											
1.5.1.	APK SD/MI (%)	110,04	117,84	112,31	113,16	113,57	100	100	100	100	100	
1.5.2.	APM SD/MI (%)	96,87	103,67	98,62	99,12	99,98	100	100	100	100	100	
1.5.3.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.4.	Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs (%)	100	94,6	97,91	96,99	99,37	100	100	100	100	100	
1.5.5.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.5.6.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	36	37	38	39	80	85	87	90	95	100	
1.5.7.	APK SMP/MTs (%)	122,57	137,63	125,12	128,14	123,16	100	100	100	100	100	
1.5.8.	APM SMP/MTs (%)	91,28	101,62	91,59	92,19	109,95	100	100	100	100	100	
1.5.9.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,01	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.10.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	99,97	99,99	99,99	100	100	100	100	100	100	
1.5.11.	Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%)	48	49	50	55	80	85	87	90	95	100	
1.6.	Pendidikan Non Formal :											
1.6.1.	Angka Kelulusan Paket A (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.6.2.	Angka Kelulusan Paket B (%)	100	100	98	100	99	100	100	100	100	100	
1.6.3.	Angka Kelulusan Paket C (%)	100	100	93	100	100	100	100	100	100	100	
1.7.	Manajemen Pelayanan Pendidikan :											
1.7.1.	Persentase SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.7.2.	Persentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.8.	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan :											
1.8.1.	Persentase Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	82,50	89,19	92,50	94,40	91,22	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	
1.8.2.	Persentase Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV (%)	85,90	88,00	90,00	93,30	91,81	95,00	96,00	97,00	98,00	100,00	
1.1.	Pendidikan dasar:											
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	108,07	115,87	111,37	113,13	105,32	100	100	100	100	100	
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	49	52	50	51	51	52	52	52	52	52	
1.1.3.	Rasio guru/murid	58	57	57	59	60	40	40	40	40	40	
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	29	29	28	28	27	33	34	35	36	37	
1.2.	Pendidikan menengah:											
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	117,54	133,5	118,19	123,19	122,35	100	100	100	100	100	
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	23	27	23	23	22	23	23	23	23	23	
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	67	68	65	66	65	60	55	50	45	40	
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata	39	38	37	35	34	33	33	32	32	32	
1.3.	Fasilitas Pendidikan:											
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	269	271	272	274	275	278	278	278	278	278	
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	85	87	87	91	93	97	97	97	97	97	
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):											
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	320	320	320	320	338	350	365	370	380	390	
1.5.	Angka Putus Sekolah:											
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	0	0,01	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01	0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0	0,12	0,06	0,01	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Angka Kelulusan:											

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	99,99	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	99,97	99,99	99,99	100	100	100	100	100	100	100
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100	100	99,98	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	94,6	97,91	96,93	99,37	100	100	100	100	100	100
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,27	94,89	98,44	103,49	95,93	100	100	100	100	100	100
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	61,04	62,56	80,32	81,61	91,81	95	96	97	98	100	100
2.	Kesehatan :											
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	80,8	53,2	59	60	60	58	56	54	52	50	50
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	14,7	14,8	14,9	15,9	1,23	1,33	1,44	1,45	1,71	1,86	1,86
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07	0,069	0,1	0,116	0,01	0,01	0,01	0,01	0,016	0,016	0,016
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	36,5	26,2	55,3	110	0,70	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	78,2	73,5	73,3	61,72	0,70	0,84	0,93	1,02	1,13	1,24	1,24
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	60,3	54,9	80,6	72,99	74,41	75	77	78	80	80	80
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,09	92	95,7	99,72	98,68	92	93	94	95	96	96
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA positive	8,49	43	45,2	51,8	45,6	59	61,5	66	66,5	69	69
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.13.	Cakupan kunjungan bayi	105,87	104,3	96,77	93,86	100	100	100	100	100	100	100
2.14.	Jumlah puskesmas	12	12	13	13	13	14	15	16	17	17	17
2.15.	Jumlah pembantu puskesmas	53	54	54	54	54	54	57	60	60	60	60
3.	Pekerjaan Umum :											
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	62,79%	84,22%	89,07%	91,39%	91,39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	57	57,1	56,7	56,7	56,7	80	80	90	90	100	100
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk											
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	88,00%	86,00%	86,96%	82,77%	75,62%	87,43%	90,43%	93,43%	96,43%	100%	100%
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk											
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3.7.	Rasio rumah layak huni	81.136	81.886	82.636	83.386	84.136	86.386	87.136	87.886	88.636	89.386	89.386
3.8.	Rasio permukiman layak huni	58,83%	62,39%	65,06%	65,06%	65,06%	96,35%	97,08%	97,81%	98,54%	99,27%	99,27%
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	565.981	628.744	628.744	628.744							
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)											
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	355.353	529.517	560.018	574.626	625.274	96,75%	98,00%	99,25%	100,00%	100,00%	100,00%
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	-	-	259,7495	39,15%	44,07%	44,07%	44,07%	44,07%	44,07%
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	-	-	259,7495	45,12%	45,12%	45,12%	45,12%	45,12%	45,12%
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota											
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	10.272,39	10.345,77	10.685,17	10.829,64	10860,59	96,45%	97,50%	98,50%	100,00%	100,00%	100,00%
3.18.	Lingkungan Pemukiman											
4.	Perumahan :											
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	64.025,50	63.025,50	83.002,67	86.667,00	97.066,83	92.313.550	93.318.050	94.824.800	96.934.250	97.637.400	97.637.400
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	86.519	868.580	89.035	105.154	105.154	87.823.435	90.836.935	93.850.435	96.863.935	100.450.000	100.450.000
4.5.	Rumah layak huni	85.636	85.636	85.636	85.636	85.636	86.386	87.136	87.886	88.636	89.386	89.386

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
5.	Perencanaan Pembangunan :											
5.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
5.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
5.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
5.4.	Penjabaran RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Perhubungan :											
6.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	372.750	1.552.142	1.307.679	1.279.597	695433	920000	966000	1.014.300	1.065.015	1.118.266	1.118.266
6.2.	Rasio ijin trayek	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,376
6.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	7.138	10.500	12.285	13.689	13655	15055	15808	16.598	17.428	18.300	18.300
6.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
6.5.	Angkutan darat	319322	308939	232568	461359	484426,95	560.785	588.824	618265,1847	649178,4439	681637,3661	715719,2344
6.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	7.150	7.464	8.909	10.316	10145	11834	12781	13.803	14.907	16.100	16.100
6.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	46 menit	46 menit	46 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit	48 menit
6.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	37.500	37.500	37.500	37.500	37500	37500	37500	37.500	37.500	37.500	37.500
6.9.	Pemasangan Rambu-rambu	4861	4969	5088	5508	5553	6453	6753	7053	7353	7653	7953
7.	Lingkungan Hidup :											
7.1.	Persentase penanganan sampah	72,9	89,3	97,3	97,9							
7.2.	Persentase Penduduk berakses airminum	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
7.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	67,24%	71,32%	75,44%	80,29%	85,15%	89,03%	90,97%	92,91%	94,86%	96,80%	96,80%
7.4.	Pencemaran status mutu air	73,33	92,86	79,22	76,25	75,00	77	78	79	79	79	79
7.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air											
7.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
7.8.	Penegakan hukum lingkungan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pertahanan :											
8.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	-	67,6	73,75	80,16	-	-	-	-	-	-	-
8.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	18	22	24	28	-	-	-	-	-	-	-
8.3.	Penyelesaian izin lokasi	31,58%	45,83%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil :											
9.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	99%	99%	98%	99%	90,02%	92%	94%	95%	97%	100%	100%
9.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	70%	86%	90%	92%	84,33%	85%	87%	89%	90%	92%	92%
9.3.	Rasio pasangan berakte nikah	74%	77%	60%	10%	80%	85%	90%	93%	89%	95%	95%
9.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	700	800	900	920	-	-	-	-	-	-	-
9.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi											
9.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	99%	99%	98%	99%	90%	94%	95%	98%	99%	100%	100%
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :											
10.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	44,69%	45,12%	44,31%	46,56%	48,81%	51,06%	53,31%	55,56%	57,81%	60,06%	62,31%
10.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta											
10.3.	Rasio KDRT	0,5	0,071	0,044	0,048	0,044	0,048	0,044	0,048	0,044	0,048	0,044
10.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur											
10.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan											
10.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	6 Kasus	13 Kasus	12 Kasus	6 Kasus	6 Kasus	0	0	0	0	0	0
10.7.	Persentase Penanggankasus KDRT yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :											
11.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,14	2,10	2,11	2,12	2,1	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
11.2.	Rasio akseptor KB	85,26	85,31	85,32	84,31	78,64	78,76	78,82	78,86	78,90	78,94	78,94
11.3.	Cakupan peserta KB aktif	82,21% (65.885)	85,46% (67.070)	85,57% (67.145)	88,91% (70.384)	88,91% (70.384)	89,02 (73623)	89,13 (76862)	89,24 (80101)	89,35 (83340)	89,46 (86579)	89,57 (89818)
12.	Ketenagakerjaan :											
12.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	2,36	1,63	2,2	3,28	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	51	54	54	62	0	0	0	0	0	0	0
12.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	77,8	72,92	73,04	73,05	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	1.251	1.396	1.312	1.128	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Tingkat pengangguran terbuka	2,3	1,6	0,77	0,48	0	0	0	0	0	0	0
13.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah :											
13.1.	Persentase koperasi aktif	88,87	90,00	78,00	78,92	81,51	47.56%	56.01%	65.51%	75.72%	86.99%	100%
13.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	14.754	15.862	17.162	18.366	19.173	21,327	22,404	23,481	24,558	25,635	25,635
13.3.	Jumlah BPR/LKM	607	629	639	663	666	702	732	762	792	822	822
13.4.	Usaha Mikro dan Kecil	839	912	338	953	911	831	871	911	951	991	991
14.	Penanaman Modal :											
14.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	689	777	785	1.459	5.739	2.231	2.357	2.496	2.649	2.817	12.550
14.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	3.173.814.437.239,00	7.180.810.126.088,00	6.147.499.450.989,00	2.618.136.988.815,00	6.329.353.277.774,00	2.419.842.370,05	2.871.927.176,75	3.359.197.642,05	3.899.203.310,35	4.493.089.023,15	17.043.259.522,35
14.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	4.33	8.73	21.68	6.49	6.34	9.514	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
14.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1.740,50	1.355,46	27,46	-1.467,29	1308.02		322,20	376,05	424,59	487,23	
15.	Kebudayaan :											
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali
15.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	23 Situs	52 Situs	-	52 Situs	52 Situs	54 Situs	54 Situs	56 Situs	58 Situs	58 Situs
16.	Kepemudaan dan Olahraga :											
16.1.	Jumlah organisasi pemuda	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
16.2.	Jumlah organisasi olahraga	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
16.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	11	13	15	11	11	11	11	11	11	11
16.4.	Jumlah kegiatan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
16.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.6.	Lapangan olahraga	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
17.	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri :											
17.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	60	46	40	40	40	65	70	75	80	85	375
17.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	2	3	3	1	1	1	1	1	5
18.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :											
18.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,2	5,4	5,2	5,1							
18.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	33,01	33,18	33,47	31,71	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	31,18	155,9
18.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378	1890
18.4.	Pertumbuhan ekonomi	7,07	7,64	6,82	6,97	6,27						
18.7.	Penegakan PERDA	105,23	113,43	104,88	106,88	104,48	75	80	85	90	95	95
18.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari	2 kali patroli dalam sehari
18.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	60%	65%	70%	75%	80%	55%	65%	70%	80%	90%	90%
18.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922
18.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	84.20%	84.20%	295.4%	295.4%	295.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manaiemen Kebakaran (WMK)	84.20%	84.20%	295.4%	295.4%	295.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
18.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	80,40%	88,14%	88,32%	96,33%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	46 desa	46 desa	46 desa	46 desa	47 desa	48 desa	49 desa	50 desa	51 desa	52 desa	53 desa
18.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	79,9	80,9	81,9
19.	Ketahanan Pangan :											
19.1.	Regulasi ketahanan pangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19..2.	Ketersediaan pangan utama	68,95%	62,92%	49,12%	41,03%	33%	34%	40%	50%	60%	70%	70%
20.	Pemberdayaan Masyarakat Desa :											
20.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	8 kelompok
20.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok
20.3.	Jumlah LSM	7	7	7	5	5	2	2	2	2	2	10
20.4.	LPM Berprestasi	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok
20.5.	PKK aktif	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok	606 Kelompok
20.6.	Posyandu aktif	572 Kelompok	572 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok	573 Kelompok
20.7.	Swadaya Masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat	93,50%	79,40%	89,30%	93,90%	94,30%						
20.8.	Pemeliharaan Pasca pemberdayaan masyarakat	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	62 Kelompok	63 Kelompok	64 Kelompok	65 Kelompok	66 Kelompok	67 Kelompok	68 Kelompok	69 Kelompok
21.	Statistik :											
21.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
22.	Kearsipan :											
22.1.	Pengelolaan arsip secara baku	30 SKPD	30 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	180 SKPD
22.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	40 Orang	40 Orang	104 Orang	132 Orang	129 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	139 Orang	824 Orang
23.	Komunikasi dan Informatika :											
23.1.	Jumlah jaringan komunikasi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
23.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,000567697	0,00054038	0,000358234	0,000350091	0,000197037	0,000127551	0,0000995605	0,0000837943	0,0000680913	0,0000547912	0,0000547912
23.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23.5.	Web site milik pemerintah daerah	43	43	62	62	62	62	62	62	62	62	62
23.6.	Pameran/expo	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
24.	Perpustakaan :											
24.1.	Jumlah perpustakaan	336	336	428	440	438	439	439	439	439	439	439
24.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	817	1.024	4.621	3.507	2.336	5.100	5.600	6.200	6.800	7.500	31.200
24.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	31.118	34.579	43.684	50.043	52.633	65.819	69.969	74.269	78.769	83.469	83.469
	Fokus Layanan Urusan Pilihan											
1.	Pertanian :											
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62,88	63,2	64,61	62,91	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	12,91 M	13,43 M	14,21 M	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	666,32 M	693,76 M	744,55 M	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Cakupan bina kelompok petani	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp	9 klp
1.7.	Jumlah Populasi Ternak	1.661.692	1.357.001	1.366.005	1.476.035	1.486.869	1.501.775	1.509.284	1.516.831	1.524.414	1.532.036	1.532.036
1.8.	Kelautan dan Perikanan											
1.8.1	Produksi perikanan	38.386,30	48.563,50	49.099	6.619,60	6.724,65	5.335,96	5.389,32	5.443	5.497,62	5.552,60	27.219
1.8.2.	Konsumsi ikan	30,91	31,1	32,2	32,87	32,89	32,96	33,01	33,06	33,11	33,15	33,15
1.83.	Cakupan bina kelompok nelayan	150	169	167	167	149	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp
1.8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	4.467,9	4.570,30	4.748,40	6.094,70	6.137,81	4.737,32	4.784,69	4.832,54	4.880,86	4.929,66	24.165

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
2.	Kehutanan :											
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	331496	127436	297100	112575	2200	40000	40000	40000	40000	40000	240000
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral											
4.	Pariwisata											
4.1.	Kunjungan wisata	2.756.579	2.892.019	3.148.443	3.681.342	3934384	4.200.000,00	4.410.000,00	4.630.500	4.862.025	5105126	5105126
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	5.948.208,92	7.186.658,79	8.807.667,89	10.815.279,76							
4.3.	Persentase obyek wisata yang sesuai dengan standar DTW	30%	30%	42%	44%	55%	-	-	-	-	-	-
4.4.	Persentase DTW yang ditata	30%	30%	42%	44%	55%	64%	66%	69%	72%	72%	72%
4.5.	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	2.756.579	2.892.019	3.148.443	3.681.342	3.934.384	4.200.000	4.410.000	4.630.500	4.862.025	5.105.126	5.105.126
4.6.	Persentase kunjungan wisatawan ke wilayah Kab. Badung	9,6%	4,7%	8,1%	14,5%	6,4%	27%	28%	29%	30%	31%	31%
4.7.	Jumlah Desa wisata yang berbasis pertanian	-	2	2	2	3	1	1	1	1	1	6
4.8.	Persentase desa wisata yang aktif	-	22%	44%	67%	100%	-	-	-	-	-	-
5.	Kelautan dan Perikanan :											
5.1.	Produksi perikanan	38.386,30	48.563,50	49.099	6.619,60	6.724,65	5.335,96	5.389,32	5.443	5.497,62	5.552,60	27.219
5.2.	Konsumsi ikan	30,91	31,1	32,2	32,87	32,89	32,96	33,01	33,06	33,11	33,15	33,15
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	150	169	167	167	149	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp	14 klp
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	4.467,9	4.570,30	4.748,40	6.094,70	6.137,81	4.737,32	4.784,69	4.832,54	4.880,86	4.929,66	24.165
6.	Perdagangan :											
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,30%	10,30%	9,82%	8,68%	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0	0
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	128.296.174,45	64.119.363,27	57.770.469,90	63.675.447,62	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal											
7.	Perindustrian :											
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,58%	4,36%	4,21%	4,01%	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri											
7.3.	Pertumbuhan Industri.	54	41	50	22	-	-	-	-	-	-	-
	ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah											
1.	Pertanian :											
1.1.	Nilai tukar petani	1,103	1	0,98	1,265	-	-	-	-	-	-	-
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur											
1.	Perhubungan :											
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,77	2,04	2,7	1,36	1,292	1	1	0,999724971	0,949738723	0,902251787	0,857139197
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	372.750	1.552.142	1.307.679	1.279.597	695433	920000	966000	1.014.300	1.065.015	1.118.266	1.118.266
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	334677	1447702	1176531	1156821	561527	98155	100118,1	102120,462	104162,8712	106246,1287	108371,0512
2.	Lingkungan Hidup :											
2.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	75,80%	73,00%	76,80%	76,29%	76,29%	91,90%	92,90%	94,40%	96,50%	97,20%	97,20%
3.	Komunikasi dan Informatika :											
3.1.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	12,32%	12,06%	8,86%	0,0891	0,093555	0,108301607	0,113716687	0,119402522	0,125372648	0,13164128	0,138223344

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2011	2012	2013	2014	Tahun 2015	2017	2018	2019	2020	2021	
	Fokus Iklim Berinvestasi											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian :											
1.1.	Angka kriminalitas	0,11%	0,09%	0,13%	0,10%	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Jumlah demo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Lama proses perijinan											
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	9 Pajak dan 13 Retribusi	10 Pajak dan 14 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	10 Pajak dan 17 Retribusi	
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	3	20	4	5	5	5	5	5	25	

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Badung Tahun 2016 dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada Tahun 2015. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada Tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak untuk menyempurnakan RKPD dan RAPBD Kabupaten Badung Tahun 2017 yang telah disusun untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.

Sedangkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah setelah RPJMD ini berakhir, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 juga mengacu pada RKP Tahun 2022.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang tercantum dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Badung dengan dibantu oleh Perangkat Daerah terkait;
- 2) Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 3) Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung agar betul-betul melaksanakan program dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- 4) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
- 5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung;
- 6) Penyusunan RKPD Kabupaten Badung dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten;
- 7) RKPD Kabupaten Badung harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- 8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Badung merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD;
- 9) Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
- 10) Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
- 11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Badung menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan di masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;

- d. Kepala Bappeda Kabupaten Badung menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- 12) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Kabupaten Badung yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Badung, berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali. Hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Badung untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.
-

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA